



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2016





GUBERNUR SUMATERA BARAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 660/052/SP/DLH/2017

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN PRAYITNO**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Adapun isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat dimaksud adalah :

1. Pertambangan
2. Pencemaran Air
3. Kebencanaan
4. Pengelolaan Sampah

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 April 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR



Pertumbuhan penduduk secara langsung memberikan konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat, kebutuhan akan ketersediaan ruang dan infrastruktur. Pembangunan sektor ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan tersebut sesungguhnya merupakan salah satu sumber tekanan bagi kualitas lingkungan hidup. Perubahan kualitas lingkungan hidup yang terjadi dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengevaluasi dari ketepatan arah kebijakan, program-program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam program pembangunan serta upaya pemulihan kualitas lingkungan merupakan hal yang strategis dan penting dikelola.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 memuat data dan informasi tekanan, status dan upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan serta memuat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Disamping itu, DIKPLHD ini disusun telah mengacu kepada Pedoman Penyusunan DIKPLHD yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S. 156/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra.

Akhir kata, saya menghimbau agar Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ini dipedomani oleh organisasi perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan masing – masing dan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Padang, 2 Mei 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Profil Sumatera Barat	I-3
1.2.1. Kondisi Geografis	I-3
1.2.2. Kondisi Iklim	I-4
1.2.3. Potensi Sumber Daya Alam	I-5
1.3. Proses Perumusan Isu Prioritas dan Penyusunan Dokumen	I-8
1.3.1. Perumusan Isu Prioritas	I-8
1.3.2. Proses Penyusunan Dokumen	I-9
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Ruang Lingkup Penulisan	I-12
BAB II ISU PRIORITAS	
2.1 Mekanisme / Proses Penjaringan Isu Prioritas	II-1
2.2 Penetapan Isu Prioritas	II-7
BAB III ANALISIS TEKANAN, STATUS DAN UPAYA PENGELOLAAN (PSR) TERHADAP ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
3.1. Tata Guna Lahan	III-1
3.1.1. Isu Prioritas dan Tekanan Terhadap Lahan (<i>Pressure</i>)	III-2
3.1.2. Kondisi Lahan dan Statusnya (<i>State</i>)	III-3
3.1.2.1. Kawasan Lindung Menurut RTRW dan Tutupan Lahan	III-3
3.1.2.2. Penggunaan Lahan Utama	III-4
3.1.2.3. Kawasan Hutan, Fungsi dan Statusnya	III-6
3.1.2.4. Kerusakan Lahan Dalam dan Luar Kawasan Hutan	III-7
3.1.2.5. Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	III-10
3.1.2.6. Perubahan Penggunaan Lahan	III-14
3.1.2.7. Pemanfaatan Lahan	III-15
3.1.2.8. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Bahan Galian	III-15



3.1.3.	Upaya Pengelolaan Isu Lahan (<i>Response</i>)	III-16
3.1.3.1.	Penghijauan	III-16
3.1.3.2.	Reboisasi	III-17
3.1.3.3.	Penataan Perizin Pertambangan	III-17
3.1.3.4.	Penetapan Perda Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan	III-18
3.1.3.5.	Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)	III-20
3.1.3.6.	Konservasi Mangrove	III-25
3.1.3.7.	Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah	III-25
3.1.3.8.	Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati	III-26
3.2.	KUALITAS AIR	III-26
3.2.1.	Isu Prioritas dan Tekanan (<i>Pressure</i>)	III-26
3.2.2.	Kondisi Kualitas Air dan Statusnya (<i>State</i>)	III-28
3.2.2.1.	Kondisi Sungai	III-28
3.2.2.2.	Kondisi Air Danau/Situ/Embung	III-32
3.2.2.3.	Kondisi Air Sumur	III-39
3.2.2.4.	Kondisi Air Laut	III-39
3.2.2.5.	Curah Hujan Rata-rata Bulanan	III-40
3.2.3.	Upaya Pengelolaan Lingkungan terhadap Isu Kondisi Kualitas Air (<i>Response</i>)	III-41
3.2.3.1.	<i>Response</i> Kualitas Air Sungai	III-41
3.2.3.2.	<i>Response</i> Kualitas Air Danau	III-44
3.2.3.3.	<i>Response</i> Kualitas Air Sumur	III-49
3.2.3.4.	<i>Response</i> Kualitas Air Laut	III-49
3.3.	KUALITAS UDARA	III-50
3.3.1.	Isu dan Tekanan Terhadap Udara	III-51
3.3.2.	Kondisi Udara dan Statusnya	III-62
3.3.2.1.	Kualitas Udara Ambien	III-62
3.3.2.2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	III-65
3.3.2.3.	Kualitas Air Hujan	III-66
3.3.2.4.	Iklim	III-66
3.3.3.	Upaya Pengelolaan Kualitas Udara (<i>Response</i>)	III-67
3.4.	RESIKO BENCANA	III-71
3.4.1.	Isu Prioritas Kebencanaan dan Tekanan (<i>Pressure</i>)	III-72
3.4.2.	Kondisi Kebencanaan dan Statusnya (<i>State</i>)	III-74



3.4.2.1.	Bencana Banjir, Korban dan Kerugian	III-74
3.4.2.2.	Bencana Kekeringan, Korban dan Kerugian	III-78
3.4.2.3.	Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Korban serta Kerugian	III-78
3.4.2.4.	Bencana Gempa dan Tanah Longsor, Korban dan Kerugian	III-84
3.4.3.	Upaya Pengelolaan Kebencanaan (<i>Response</i>)	III-86
3.5	PERKOTAAN	III-88
3.5.1.	Isu Prioritas dan Tekanan terhadap Lingkungan Perkotaan (<i>Pressure</i>)	III-88
3.5.1.1.	Pengelolaan Sampah	III-88
3.5.2.	Kondisi Lingkungan Perkotaan dan Statusnya	III-89
3.5.2.1.	Luas Wilayah dan Kondisi Kependudukan	III-89
3.5.2.2.	Timbulan Sampah	III-92
3.5.3.	Upaya Pengelolaan terhadap Isu Perkotaan (<i>Response</i>)	III-96
3.5.3.1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	III-98
3.5.3.2.	Perlibatan LSM	III-98
3.5.3.3.	Pemberian Penghargaan Lingkungan	III-99
3.5.3.4.	Program Inisiasi Masyarakat	III-100
3.5.3.5.	Produk Hukum Lingkungan	III-102
3.6	RESPONSE YANG DILAKUKAN UNTUK MEMINIMALISASI ISU PRIORITAS LINGKUNGAN	III-103
3.6.1.	Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	III-103
3.6.2.	Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	III-105
BAB IV	INOVASI DAERAH	
4.1.	Gerakan Sumatera Barat Bersih	IV-2
4.2.	Pengelolaan Sungai Secara Terpadu	IV-7
4.3.	Program Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah (PROPERDA)	IV-10
4.4.	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)	IV-11
4.4.1.	Langkah-langkah Pelaksanaan PHBM	IV-14
4.4.2.	Perkembangan PHBM	IV-16
4.5.	Inovasi Daerah Kelembagaan, Penganggaran dan Peningkatan SDM	IV-21
BAB V	PENUTUP	



DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	
BAB II	ISU PRIORITAS	
Tabel 2.1.	Hasil Skoring Isu Prioritas Lingkungan	II-5
BAB III	ANALISIS TEKANAN, STATUS dan UPAYA PENGELOLAAN (PSR) terhadap ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
Tabel 3.1.	Peruntukan Lahan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RTRW	III-6
Tabel 3.2.	Kondisi BAU Emisi GRK Sektor Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2020	III-21
Tabel 3.3.	Penurunan Emisi GRK Berbasis Lahan	III-24
Tabel 3.4.	Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam	III-46
Tabel 3.5.	Perubahan Penambahan Ruas Jalan di Provinsi Sumatera Barat	III-53
Tabel 3.6.	Lokasi Titik Pengukuran Udara Ambien Sumatera Barat, 2016	III-62
Tabel 3.7.	Indeks Kualitas Udara Provinsi Sumatera Barat 2011-2014	III-65
Tabel 3.8.	Penghargaan Kecamatan dan Kelurahan Bersih Tahun 2016	III-100
Tabel 3.9.	Produk Hukum Lingkungan tentang Pengelolaan Sampah	III-103
Tabel 3.10	Dokumen Izin Lingkungan di Provinsi Sumatera Barat	III-104
BAB IV	INOVASI DAERAH	
Tabel 4.1.	Pemenang Lomba Kecamatan/Kelurahan Bersih dan Hijau GSB dalam Kurun Waktu Tahun 2014-2016	IV-4
Tabel 4.2.	Sebaran PHBM Provinsi Sumatera Barat	IV-18
BAB V	PENUTUP	



DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	
Gambar 1.1.	Peta Wilayah Administrasi Sumatera Barat	I-7
BAB II	ISU PRIORITAS	
Gambar 2.1.	Narasumber/Fasilitator Menyampaikan Materi saat <i>Brainstorming</i>	II-3
Gambar 2.2.	Direktur PSLH Universitas Bung Hatta dan PSLH UNP Memberikan Tanggapan saat <i>Brainstorming</i>	II-4
Gambar 2.3.	LSM WALHI dan Yayasan Citra Mandiri Mentawai Memberikan Tanggapan saat <i>Brainstorming</i>	II-4
Gambar 2.4.	Proses Metaplan pada saat Konsultasi Publik	II-4
Gambar 2.5.	Peserta sedang Mengisi Tabel Penilaian Isu Prioritas Lingkungan	II-6
Gambar 2.6.	Pakar/Pengamat Lingkungan OPD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Memberi Tanggap terhadap Penetapan Jumlah Isu Prioritas Lingkungan	II-7
BAB III	ANALISIS TEKANAN, STATUS dan UPAYA PENGELOLAAN (PSR) terhadap ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
Gambar 3.1.	Peta Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat	III-5
Gambar 3.2.	Distribusi dan Luas Lahan Kritis Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat	III-7
Gambar 3.3.	Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan	III-9
Gambar 3.4.	Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	III-12
Gambar 3.5.	Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Sumatera Barat	III-14
Gambar 3.6.	Target dan Realisasi Penghijauan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2016	III-16
Gambar 3.7.	Perbandingan Target dan Realisasi Kegiatan Reboisasi	III-17
Gambar 3.8.	Perbandingan Status Mutu Metode Indeks Pencemaran Sungai Lintas Provinsi Tahun 2013-2016	III-30
Gambar 3.9.	Perbandingan Status Mutu Metode Indeks Pencemaran Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016	III-31
Gambar 3.10.	Perbandingan Indeks Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2016	III-32
Gambar 3.11.	Kondisi Keramba Jaring Apung dan Kematian Ikan Secara Masal	III-35
Gambar 3.12.	Kadar BOD ₅ Danau Maninjau Tahun 2016 perbandingan dengan baku mutu	III-36
Gambar 3.13.	Perbandingan Kadar BOD ₅ Danau Maninjau Tahun 2014-2016	III-37
Gambar 3.14.	Kontur Danau Maninjau	III-37
Gambar 3.15.	Pemanfaatan Danau Maninjau dan Kondisi Alamiah	III-38



Gambar 3.16.	Curah Hujan Rata-rata Bulanan	III-41
Gambar 3.17.	Gotong Royong Bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota Bukittinggi dengan Dinas/Instansi Terkait dan Masyarakat di Batang Agam	III-43
Gambar 3.18.	Persentase Jenis Usaha yang Mengurus Izin Pengelolaan Limbah B3	III-45
Gambar 3.19.	Jumlah Kendaraan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar yang Digunakan	III-52
Gambar 3.20.	Penjualan Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat	III-52
Gambar 3.21.	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Barat Tahun 2015-2016	III-54
Gambar 3.22.	Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) per Provinsi di Sumatera Tahun 2011-2016	III-55
Gambar 3.23.	Perbandingan Total Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Pulau Sumatera Tahun 2011-2016	III-55
Gambar 3.24.	Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Sumatera Barat	III-56
Gambar 3.25.	Perbandingan Jumlah Timbulan Sampah yang Masuk pada TPA Regional Payakumbuh Tahun 2013-2015	III-57
Gambar 3.26.	Perbandingan Jumlah Timbulan Sampah yang Masuk TPA Regional Solok	III-57
Gambar 3.27.	Populasi Ternak menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Barat (ekor) Tahun 2015	III-58
Gambar 3.28.	Trend Populasi Ternak dan Unggas (ekor) di Sumatera Barat dari Tahun 2011-2015	III-59
Gambar 3.29.	Jumlah Kasus Ilegal Logging di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016	III-59
Gambar 3.30.	Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Sektor Industri Menurut Jenis Bahan Bakar	III-60
Gambar 3.31.	Jumlah Gas umah Kaca (Gg) Berdasarkan Jenis Bahan Bakar dari Sektor Industri	III-60
Gambar 3.32.	Beban Pencemaran Udara Perusahaan PROPER	III-61
Gambar 3.33.	Konsumsi Bahan Bakar untuk Keperluan Rumah Tangga (L)	III-61
Gambar 3.34.	Jumlah Gas Rumah Kaca Berdasarkan Jenis Bahan Bakar dari Sektor Rumah Tangga	III-62
Gambar 3.35.	Hasil Analisis Parameter SO ₂	III-63
Gambar 3.36.	Hasil Analisis Parameter NO ₂	III-63
Gambar 3.37.	Hasil Analisis Parameter O ₃	III-64
Gambar 3.38.	Hasil Analisis Parameter TSP	III-64
Gambar 3.39.	Hasil Analisis Parameter Timbal	III-64
Gambar 3.40.	Hasil Analisis Parameter CO	III-65
Gambar 3.41.	Kualitas Air Hujan Sumatera Barat Tahun 2016	III-66



Gambar 3.42.	Curah Hujan Rata-rata Bulanan di Sumatera Barat Tahun 2016	III-66
Gambar 3.43.	Suhu Rata-rata Bulanan di Sumatera Barat Tahun 2016	III-67
Gambar 3.44.	Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Danau Diatas dan Dibawah	III-68
Gambar 3.45.	Perbandingan Jumlah Kendaraan yang Diuji Tiga Tahun Terakhir	III-76
Gambar 3.46.	Peta Resiko Banjir Provinsi Sumatera Barat	III-77
Gambar 3.47.	Areal Terendam Akibat Banjir di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	III-78
Gambar 3.48.	Tren Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Barat 2016	III-80
Gambar 3.49.	Peta Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Barat lembar peta 0616	III-81
Gambar 3.50.	Peta Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Barat	III-82
Gambar 3.51.	Peta Resiko Gempa Provinsi Sumatera Barat	III-85
Gambar 3.52.	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Sumatera Barat	III-90
Gambar 3.53.	Perbandingan Jumlah Penduduk Versus Laju Pertumbuhan Penduduk	III-91
Gambar 3.54.	Kepadatan Penduduk di Sumatera Barat	III-91
Gambar 3.55.	Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Masing-masing Kabupaten/Kota	III-92
Gambar 3.56.	Timbulan Sampah Menurut Sumber	III-95
Gambar 3.57.	Kondisi dan Status TPA yang ada di Sumatera Barat	III-95
Gambar 3.58.	Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	III-96
Gambar 3.59.	Anggaran Pengelolaan Sampah Kota-kota di Sumatera Barat	III-97
Gambar 3.60.	Jumlah Sampah Terolah Harian	III-100
Gambar 3.61.	Persentase Jenis Usaha yang Mengurus Izin Pengelolaan Limbah B3	III-105
Gambar 3.62.	Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) di Provinsi Sumatera Barat	III-106

BAB IV INOVASI DAERAH

Gambar 4.1.	Sosialisasi Gerakan Sumatera Barat Bersih	IV-5
Gambar 4.2.	Workshop Pembentukan Bank Sampah	IV-5
Gambar 4.3.	Publikasi Gerakan Sumatera Barat Bersih	IV-6
Gambar 4.4.	Gerakan Sumatera Barat Bersih ke Masjid dan Mushalla	IV-6
Gambar 4.5.	Indeks Kualitas Air Sungai Batang Agam	IV-8
Gambar 4.6.	Launching Kegiatan Pengelolaan Sungai secara Terpadu (Sungai Batang Agam) oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat	IV-9
Gambar 4.7.	MoU Pengelolaan Sungai Secara Terpadu (Penurunan Beban Pencemaran Sungai Batang Agam)	IV-10
Gambar 4.8.	Perkembangan PHBM Provinsi Sumatera Barat dalam Kurun Waktu 2012-2016	IV-17



Gambar 4.9.	Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi	IV-19
Gambar 4.10.	Produk Kelompok PHBM	IV-20
Gambar 4.11.	Pengembangan PLTMH	IV-20
Gambar 4.12.	Pengembangan Ekowisata	IV-20

BAB V PENUTUP



LAMPIRAN

Lampiran I	Lampiran Tabel Data
Lampiran II	Kelengkapan Administrasi





BAB I. PENDAHULUAN

Besarnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki Sumatera Barat merupakan peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik potensi yang besar tersebut terdapat ancaman apabila sumberdaya alam yang ada tidak dikelola dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sehingga untuk itu pembangunan seringkali menjadi semacam paham atau *ideology of developmentalism*. Pembangunan berusaha menemukan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dan mencari perubahan - perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Akibatnya pembangunan menimbulkan banyak pengalaman bagi suatu negara baik pengalaman sukses maupun kegagalan.

Melalui proses pembangunan tersebut, menimbulkan pergeseran-pergeseran paradigma pembangunan. Awalnya pembangunan hanya dilihat

dari dinamika pertumbuhan ekonomi semata yang meningkatkan akumulasi kapital dan pendapatan per kapita negara terutama negara berkembang. Tetapi pembangunan tersebut menimbulkan banyak dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan, penyusutan sumberdaya alam dan timbulnya kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh sebab itu negara bersepakat bahwa pembangunan dilakukan dengan paradigma baru dimana pembangunan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, aman bagi lingkungan dan meningkatkan hubungan sosial antar masyarakat.

Permasalahan lingkungan sudah menjadi isu yang mengglobal pada era sekarang ini. Oleh karena itulah masyarakat bersama pemerintah gencar melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan - permasalahan lingkungan yang terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup dan diharapkan dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan prinsip

berkelanjutan, sehingga fungsi lingkungan hidup akan tetap dapat digunakan hingga generasi yang akan datang.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Upaya tersebut dapat dicapai melalui berbagai kegiatan perlindungan dan peningkatan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki secara berkesinambungan. Oleh sebab itu kebijakan pemanfaatan sumber daya alam menekankan pada tiga pilar pembangunan yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mewujudkan pemerintahan yang terbuka serta akuntabilitas publik maka pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan terkoordinasi serta harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

pasal 62. Disamping itu Undang - Undang tersebut juga mengamanatkan agar pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan terhadap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publik, Pemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, hal ini pun selaras dengan amanat yang tertuang dalam pasal 344 UU 32 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dimana salah satu azas pelayanan publik adalah keterbukaan, dalam hal ini salah satu bentuk keterbukaan adalah keterbukaan informasi.

Sistem informasi lingkungan paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup,

peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup antara lain keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini adalah merupakan pengejawantahan dari penyediaan kebutuhan pemerintah dan masyarakat terhadap informasi tentang gambaran, kondisi dan kinerja lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 yang pada gilirannya juga akan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan langkah kebijakan ke depan. Pada tahun-tahun sebelumnya penyediaan informasi lingkungan ini dikenal dengan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), namun berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.156/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, maka mulai untuk penyusunan tahun 2016 ini (yang dilaksanakan pada tahun 2017), Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan modifikasi penyempurnaan di dalam penyusunan buku SLHD menjadi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dengan mekanisme, proses dan teknis penyusunan yang banyak mengalami perubahan dari penyusunan Buku SLHD sebelumnya.

1.2. Profil Sumatera Barat

1.2.1. Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Barat berada di sebelah barat pulau Sumatera, terletak secara astronomis antara $0^{\circ} 54'$ Lintang Utara dan $3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan dan antara $98^{\circ} 36' - 101^{\circ} 53'$ Bujur Timur. Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas $42.297,30 \text{ km}^2$ dengan topografi yang datar dan bergelombang sampai bergunung yang merupakan bagian dan jajaran pegunungan Bukit Barisan dengan luas perairan laut diperkirakan $\pm 186.500 \text{ Km}^2$.

Berdasarkan geografisnya, Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi,



Provinsi Bengkulu dan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah administrasi 42.297,30 km² atau setara dengan 2,21% dari luas Republik Indonesia, dengan jumlah penduduk 5.259.528 jiwa, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota (12 Kabupaten, 7 Kota, 147 Kecamatan, 877 Kelurahan atau Desa). Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas yakni 6.100 km² atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil yakni 23,00 km² atau sekitar 0,05 % dari luas Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat mempunyai luas perairan (laut) teritorial dan ZEE 186.500 km² dengan panjang garis pantai 1.973,25 km dan memiliki 185 gugusan pulau dengan jumlah pulau terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) pulau, sedangkan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai pulau paling sedikit yakni hanya 1 (satu) pulau. Sedangkan 7 (tujuh) kabupaten/kota yang merupakan kabupaten/kota

pesisir mempunyai luas wilayah daratan 20.023,48 km² atau sekitar 47,34 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

Menurut kelas klasifikasi lereng, Provinsi Sumatera Barat hampir separuhnya atau sekitar 44% didominasi oleh lahan agak curam sampai dengan curam. Sementara itu luas daerah yang sangat curam sekitar 10%. Topografi daerah ini cukup bervariasi mulai dari dataran rendah berupa pantai sampai dataran tinggi, yang terdiri dari perbukitan sampai pegunungan, perairan darat yang terdiri dari sungai besar dan kecil serta kawasan laut mulai laut dangkal sampai laut dalam. Ketinggian permukaan daratan beberapa kabupaten/kota sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Painan, Simpang Ampek, Pariaman, Padang dan Tua Pejat.

1.2.2. Kondisi Iklim

Berdasarkan letak geografis, Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Karena itu, Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-



rata dengan suhu udara yang cukup tinggi yaitu antara 22,6°C sampai 31,5°C, rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu 85,53% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 995,41 mb.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Sumatera Barat kadang tidak menentu dimana pada bulan-bulan yang seharusnya musim kemarau terjadi hujan atau sebaliknya. Secara umum daerah Sumatera Barat tahun 2016 beriklim sedang dengan suhu udara berkisar dari 21⁰C sampai 27⁰C dan kelembaban relatif minimum 80 % serta kelembaban relatif maksimum 89 %.

1.2.3. Potensi Sumber Daya Alam

Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya air di daratan yang cukup besar, terdapat 606 sungai besar dan kecil, 27 diantaranya merupakan sungai lintas provinsi dan 84 sungai lintas kabupaten/kota.

Di provinsi ini berhulu sejumlah sungai besar yang bermuara ke pantai timur Sumatera yakni Batang Hari, Siak, Indragiri (disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya), dan Batang

Kampar. Sementara sungai-sungai yang bermuara ke pesisir barat adalah Batang Anai, Batang Arau dan Batang Tarusan.

Provinsi Sumatera Barat juga memiliki 25 danau/waduk/situ/embung. Beberapa danau yang besar dan terkenal diantaranya adalah Danau Maninjau di Kabupaten Agam dengan luas 99,5 km², Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dengan luas 130,11 km², Danau Diatas seluas 31,5 km² dan Danau Dibawah 14,0 km². Danau Singkarak merupakan danau terluas ke-dua di Sumatera dan ke-sebelas di Indonesia.

Disamping itu, di Sumatera Barat terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan Gunung Kerinci di Kabupaten Solok Selatan sebagai gunung tertinggi, yang mencapai ketinggian 3.085 m. Gunung aktif lainnya yakni Gunung Merapi, Gunung Tandikat dan Gunung Talang.

Selain ekosistem daratan, potensi ekosistem pesisir dan laut juga cukup besar dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi.

Pendahuluan

Walaupun Sumatera Barat merupakan provinsi yang penuh dengan alam dan panorama yang indah, namun provinsi ini termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan daerah rawan gempa. Hal

ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepatnya di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia, sehingga wilayah ini rawan mengalami gempa bumi.



1.3. Proses Perumusan Isu Prioritas dan Penyusunan Dokumen

1.3.1. Perumusan Isu Prioritas

Proses perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Sumatera Barat Tahun 2016 yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melalui beberapa rangkaian proses kegiatan, antara lain :

1. Pertemuan ditingkat internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjaring masukan terkait kondisi lingkungan yang didasari dari hasil pemantauan terhadap media lingkungan, pengawasan dan pembinaan ke sumber pencemar serta pembinaan ke instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang dilakukan pada tahun 2016.
2. Menyurati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait Provinsi Sumatera Barat antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral,

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam rangka menjaring isu lingkungan yang terkait dengan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berada dibawah lingkup tugas OPD yang bersangkutan.

3. Melakukan konsultasi publik dengan stakeholder seperti : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait Provinsi Sumatera Barat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota se

Sumatera Barat, pakar lingkungan, Lembaga Sosial Masyarakat dan beberapa asosiasi usaha seperti GAPKI, GAPKINDO dan PERHAPI.

4. Penetapan Isu Prioritas melalui Surat Pernyataan Gubernur.

Metoda atau pendekatan yang dilakukan dalam merumuskan isu lingkungan hidup Sumatera Barat tahun 2016 pada saat konsultasi publik adalah :

- a. *Brainstorming* untuk menjaring isu lingkungan hidup dari peserta konsultasi publik. Pada saat *brainstorming* ini juga dikemukakan isu yang tergambar dari pertemuan internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta beberapa masukan dari OPD Provinsi.
- b. Proses *metaplan* untuk mengerucutkan isu menjadi isu utama.
- c. Mekanisme skoring terhadap isu utama dari kriteria penetapan isu prioritas.
- d. Didapatkan urutan isu prioritas.
- e. Konsultasi publik ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan dipandu oleh seorang fasilitator yang didampingi oleh

seorang tenaga teknis yang akan menghitung skor isu prioritas.

1.3.2. Proses Penyusunan Dokumen

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dilakukan oleh internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang di *back up* sepenuhnya secara ketat oleh Tim Supervisi yang keanggotannya meliputi Sekretaris dan Kabid terkait di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ditambah dengan Ahli/Akademisi bidang lingkungan hidup yang sudah berpengalaman di dalam penulisan kajian lingkungan hidup dan LSM.

Keanggotaan tim penulisan terdiri dari para Kasi dan staf pilihan yang sudah mengikuti BinteK dan berpengalaman di dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup No. 094.4/68/SP/TL/DLH-2017 Tanggal 22 Februari 2017, sedangkan Tim Supervisi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat



No. 660 – 449 – 2017 tanggal 12 April 2017 Tentang Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Buku Data Dan Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta Tim Penilai Buku Data dan Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2017.

Khusus untuk data yang akan digunakan dalam analisa merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016. Data tersebut dihimpun dan ditabulasi oleh internal Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah/Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan di supervisi oleh OPD terkait tingkat Provinsi Sumatera Barat. Tim Supervisi yang melibatkan OPD terkait Tingkat Provinsi ini ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat yang keanggotaannya merupakan satu lampiran dari Keputusan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana tersebut di atas.

Tugas Tim Supervisi Buku Analisis adalah

1. Memberikan arahan dalam penulisan sesuai dengan petunjuk teknis/pedoman penyusunan dokumen Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).

2. Memberikan kiat-kiat dan teknis penulisan dalam tujuan mencapai kualitas tulisan/analisis yang lebih baik.
3. Melakukan fasilitasi konsultasi publik dalam rangka penjarangan isu prioritas.
4. Melakukan identifikasi awal isu lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat yang didasari atas hasil pemantauan, data series dan masukan OPD terkait.
5. Mengarahkan integrasi isu prioritas dalam analisis.
6. Mengawal secara ketat terhadap kelancaran dan kesempurnaan penyusunan dokumen IKPLHD.

Analisis dalam penyusunan dokumen IKPLHD dilakukan melalui pendekatan *Pressure* (Tekanan), *State* (Kondisi) dan *Response* (upaya penanggulangan/pengelolaan) yang dikenal dengan metoda P-S-R, dengan melakukan perbandingan antar lokasi, perbandingan antar waktu yang dilakukan dengan cara membandingkan kondisi pada saat ini dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, sedangkan antar lokasi

dilakukan dengan cara membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi suatu lokasi yang paling tinggi dengan yang paling rendah saja tingkatannya. Perbandingan antar lokasi juga dapat dilakukan dengan kondisi tingkat nasional.

Keterkaitan isu prioritas kedalam analisis dilakukan dengan cara mengintegrasikan masing-masing isu prioritas kedalam analisis masing-masing Sub Bab (Tata Guna Lahan, Kualitas Air, Kualitas Udara, Resiko Kebencanaan dan Perkotaan) yang bersentuhan dengan isu prioritas. Bisa saja 1 (satu) isu prioritas akan bersentuhan dengan 1 (satu) atau 2 (dua) sub bab isu lingkungan.

Isu prioritas yang bersentuhan dengan sub bab isu lingkungan akan dianalisis lebih dalam dan komprehensif begitu juga bila 1 (satu) isu prioritas hanya menyentuh 1 (satu) sub bab isu lingkungan.

Integrasi isu prioritas kedalam analisis P-S-R sub bab lingkungan akan dijelaskan pada Bab III.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah

untuk memberikan gambaran status lingkungan hidup suatu daerah, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menyusun laporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah sebagai upaya pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam daerah.
2. Mendorong upaya pengelolaan lingkungan hidup oleh berbagai stakeholder melalui program dan kegiatan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mendorong partisipasi aktif stakeholder dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup
4. Mendorong pengembangan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Penyebar luasan informasi terkait kebijakan dan respon pemerintah



dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.5. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat terdiri atas beberapa bagian yaitu :

1. Pengumpulan data dan informasi dari stakeholder terkait baik instansi vertikal di daerah, OPD provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta, serta data dari pihak lain yang dibutuhkan.
3. Melakukan kompilasi data sesuai dengan petunjuk penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
4. Merumuskan isu lingkungan hidup prioritas Provinsi Sumatera Barat.
5. Melakukan analisis data sesuai dengan metode P-S-R sehingga dengan metode tersebut ada hubungan antara faktor penyebab dengan upaya yang dilakukan.

6. Melakukan penyusunan laporan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat yang memuat isu-isu prioritas daerah.





BAB II



ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH



Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan melalui konsultasi publik dengan melibatkan pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat (OPD terkait Provinsi, Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Pakar/Pemerhati Lingkungan, Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH), LSM, Asosiasi Industri dan Pemerhati Pertambangan yang ditetapkan melalui Surat Pernyataan Gubernur Sumatera Barat sebanyak 4 (empat) Isu Prioritas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yaitu (1) Pertambangan, (2) Pencemaran Air, (3) Kebencanaan dan (4) Pengelolaan Sampah.

Pada bab ini akan dibahas semua proses terkait penetapan isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, meliputi :

2.1. Mekanisme/Proses

Penjaringan Isu Prioritas

Penetapan isu prioritas di Provinsi Sumatera Barat yang akan diintegrasikan dalam penulisan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui :

- (1) Penjaringan isu lingkungan hidup yang dibahas secara internal pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat,
- (2) Menyurati OPD terkait tingkat provinsi dalam rangka penjaringan isu,
- (3) Konsultasi publik yang melibatkan pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat OPD terkait Provinsi, Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Pakar/Pemerhati Lingkungan, Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH), LSM, Asosiasi Industri dan Pemerhati Pertambangan, dan
- (4) Penetapan isu prioritas melalui Surat Pernyataan Gubernur.

Metoda yang digunakan dalam penetapan isu prioritas dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan

analisis dengan metoda *Presurre*, *State* dan *Response* yang didasari atas ketersediaan data-data yang dimiliki.

Proses dan mekanisme penetapan isu prioritas yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Awal

Tahap awal ini dilakukan dalam rangka menjaring masukan dari internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang didasari dari hasil pemantauan, pengawasan yang dilakukan, baik yang dilakukan terhadap sumber pencemaran maupun media lingkungan serta pembinaan yang dilakukan ke instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dan sumber pencemaran.

Disamping menjaring isu di tingkat internal, pada tahap ini juga dilakukan penjaringan isu lingkungan hidup yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi di OPD terkait tingkat Provinsi Sumatera Barat melalui surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor 660/431/TL/DLH-2017 tanggal 3 April 2017 tentang



Penjaringan Isu dan Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun OPD terkait meliputi Bappeda, BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas PSDA, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

2. Tahap Penjaringan dan Penetapan Isu Prioritas Melalui Konsultasi Publik.

Pada tahap ini dilakukan kegiatan konsultasi publik dalam rangka penjaringan dan penetapan isu prioritas lingkungan hidup dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di Wilayah Sumatera Barat. Adapun peserta pertemuan berasal dari OPD terkait Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Bappeda, BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas PSDA, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan dan

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota se Barat, pakar/ pengamat lingkungan, Pusat Studi Lingkungan Hidup (UNAND, UNP, Univ. Bung Hatta dan Univ. Muhammadiyah), Lembaga Sosial Masyarakat (WALHI, QBAR, Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Andalas Bumi Lestari dan WARSI) dan Asosiasi Industri (Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/GAPKI, Gabungan Asosiasi Pengusaha Karet Indonesia/ GAPKINDO dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia/PERHAPI). Dari Kabupaten/Kota dihadiri oleh instansi lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota.

Pelaksanaan konsultasi publik ini dipandu oleh seorang fasilitator yang didampingi oleh seorang tenaga teknis yang membantu kelancaran kegiatan selama pertemuan berlangsung. Fasilitator yang ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk memandu pertemuan tersebut adalah Dr. Ardinis Arba'in yang merupakan

pakar/ahli lingkungan yang berasal dari Universitas Andalas. Sedangkan tenaga teknis yang mendampingi adalah Veronika Sriwulantari, ST, M.Si (PSLH UNAND).

Adapun tahapan proses penjaringan isu prioritas yang dilaksanakan selama konsultasi publik berlangsung adalah

- a. *Brainstorming* untuk menjaring isu lingkungan hidup dari peserta konsultasi publik.

Proses *brainstorming* dilaksanakan selama lebih kurang 30 menit. Pada tahapan ini peserta diminta untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas mengenai isu lingkungan yang ada di Sumatera Barat. Pada tahapan ini juga dikemukakan isu yang tergambar dari pertemuan internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta beberapa masukan dari OPD Provinsi.

Gambar 2.1. Narasumber/Fasilitator Menyampaikan Materi Saat *Brainstorming*



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017

Gambar 2.2. Direktur PSLH Universitas Bung Hatta dan PSLH UNP Memberikan Tanggapan Saat *Brainstorming*



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017

Gambar 2.3. LSM WALHI dan Yayasan Citra Mandiri Mentawai Memberikan Tanggapan Saat *Brainstroming*



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017

b. *Proses Metaplan*

Tujuan dari proses *metaplan* ini adalah untuk mengerucutkan isu menjadi isu utama. Pada proses ini peserta diminta untuk menuliskan 1 (satu) isu lingkungan hidup di kartu berwarna warni (kartu *metaplan*). Kartu tersebut lalu dikumpulkan dan ditempelkan di *white board*. Setelah itu, isu lingkungan dikelompokkan sesuai dengan

kriterianya. Berdasarkan hasil pengelompokan tersebut, diperoleh 9 (sembilan) isu utama, yaitu : pertambangan, pencemaran air, kebencanaan, pengelolaan sampah, tata kelola SDA, perubahan tata guna lahan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA, kerusakan wilayah pesisir dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Gambar 2.4. Proses *Metaplan* Pada Saat Konsultasi Publik



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017

c. Mekanisme skoring

Mekanisme skoring merupakan proses analisis secara kuantitatif untuk mendapatkan isu prioritas. Skoring dilakukan terhadap 9 (sembilan) isu utama hasil dari proses metaplan. Tujuan dari proses skoring ini adalah untuk memperoleh urutan isu prioritas. Terdapat 3 (tiga) kriteria yang digunakan dalam penetapan urutan isu prioritas, yaitu :

- 1) kerusakan sumber daya alam dan kerusakan keanekaragaman hayati.
- 2) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup.
- 3) mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen).

Tabel 2.1. Hasil Skoring Isu Prioritas Lingkungan

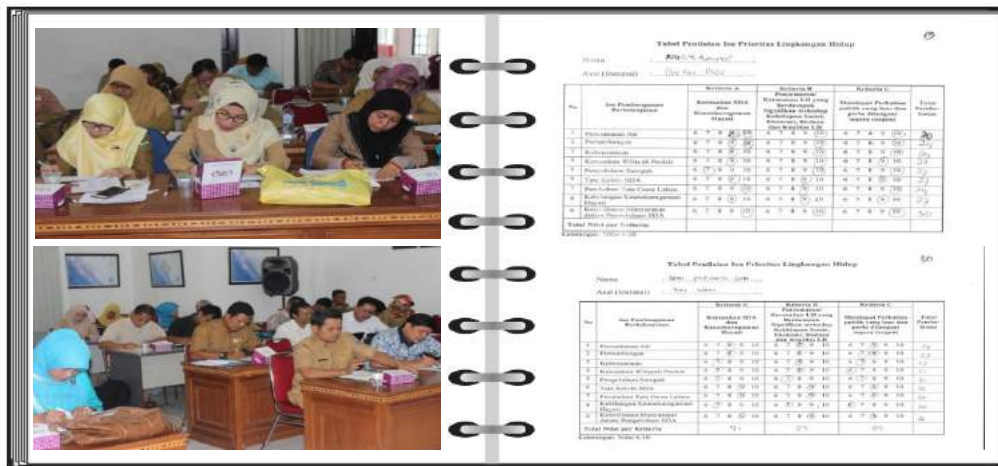
Peringkat	Isu Prioritas	Total Skoring
1	Pertambangan	1.074
2	Pencemaran Air	1.038
3	Kebencanaan	1.026
4	Pengelolaan Sampah	977
5	Tata Kelola SDA	972
6	Perubahan Tata Guna Lahan	967
7	Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA	939
8	Kerusakan Wilayah Pesisir	920
9	Kehilangan Keanekaragaman Hayati	916

Sumber : Hasil proses konsultasi publik dalam penjaringan isu prioritas yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 18 April 2017

Berdasarkan hasil skoring tersebut, dapat disimpulkan bahwa posisi tertinggi dari urutan isu prioritas lingkungan hidup di Sumatera Barat adalah isu pertambangan, pencemaran air,

kebencanaan, pengelolaan sampah, tata kelola SDA, perubahan tata guna lahan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA, kerusakan wilayah pesisir dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Gambar 2.5. Peserta Sedang Mengisi Tabel Penilaian Isu Prioritas Lingkungan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017

d. *Penetapan jumlah isu prioritas.*

Jumlah isu prioritas ditentukan melalui pelaksanaan diskusi dengan fasilitator dan internal Dinas Lingkungan Hidup. Dari diskusi disepakati bahwa jumlah

isu prioritas lingkungan hidup di Sumatera Barat adalah 4 (empat) isu, yaitu **pertambangan, pencemaran air, kebencanaan dan pengelolaan sampah.**

Gambar 2.6. Pakar/Pengamat Lingkungan, OPD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Memberi Tanggapan Terhadap Penetapan Jumlah Isu Prioritas Lingkungan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017

3. Tahapan Akhir

Tahap akhir dari penetapan isu lingkungan hidup adalah :

- a. Penandatanganan Surat Pernyataan oleh Gubernur Sumatera Barat yang memuat 4 (empat) Isu Prioritas Lingkungan Hidup Sumatera Barat dan dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat, melalui pendekatan partisipatif
- b. Pemberkasan administrasi terkait dengan konsultasi publik seperti undangan, absensi, dll sebagaimana termuat dalam lampiran.

2.2. Penetapan Isu Prioritas

Dari hasil mekanisme/proses penjaringan isu diatas maka untuk Tahun 2016, ditetapkan 4 (empat) isu lingkungan hidup Sumatera Barat, yaitu :

1. Pertambangan
2. Pencemaran Air
3. Kebencanaan
4. Pengelolaan Sampah

Keempat isu prioritas dinyatakan melalui Surat Pernyataan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/052/SP/DLH/2017 tanggal 20 April 2017.





BAB III ANALISIS *PRESSURE STATE RESPONSE* ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Analisis isu lingkungan hidup daerah dilakukan dengan metoda P-S-R (*Pressure, State, Response*) guna menggambarkan isu lingkungan yang terjadi dikorelasikan dengan sumber tekanan penyebab isu, kondisi lingkungan dan statusnya yang diakibatkan serta upaya yang telah dilakukan dalam mengelola isu dan pencapaian target.

Seluruh isu akan dibahas sesuai dengan tabel yang disajikan pada lampiran, karena informasi tersebut memang dibutuhkan, namun penekanan pembahasan akan difokuskan kepada 4 (empat) isu prioritas yang terangkat dalam konsultasi publik yaitu :

- a. Pertambangan
- b. Pencemaran air
- c. Kebencanaan
- d. Pengelolaan sampah

Dalam pembahasan suatu isu, satu isu dapat saja memberi tekanan pada lebih dari satu komponen lingkungan. Misalnya permasalahan pertambangan akan berdampak pada tata guna lahan, pencemaran air dan kebencanaan. Oleh karena itu pembahasan secara proporsional akan dilakukan pada pada masing-masing komponen lingkungan.

Pembahasan terkait kondisi lingkungan dan statusnya (*state*) akan dilakukan dengan membandingkan antara baku mutu ataupun indeks kualitas lingkungan, baik Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) maupun Indeks Tutupan Hutan. Juga akan dioptimalkan dalam setiap komponen lingkungan dianalisis dengan

perbandingan antara waktu, lokasi serta data statistika secara umum untuk menggambarkan kondisi umum (rata-rata) dan kondisi ekstrim baik yang terbaik ataupun terburuk.

Pembahasan upaya pengelolaan dilakukan terutama untuk mengelola isu, pengurangan sumber tekanan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Satu upaya pengelolaan dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai isu dan tekanan, seperti penerapan dokumen lingkungan guna mengurangi tekanan terhadap tata guna lahan dan pencemaran air. Selanjutnya pembahasan lebih detail akan dilakukan pada isu-isu yang merupakan isu prioritas.

3.1. Tata Guna Lahan

Tata guna lahan yang merupakan upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu. Pengaturan terkait tata guna lahan di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penetapan zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penetapan status dan fungsi kawasan hutan. Pembahasan pada sub bab tata



guna lahan difokuskan isu prioritas dan tekanan terhadap tata guna lahan (*pressure*), kondisi dan statusnya (*state*) dan upaya yang telah dilakukan (*response*) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Tabel 1 s/d Tabel 14 dan Tabel Tambahannya.

3.1.1. Isu Prioritas dan Tekanan Terhadap Lahan (*Pressure*)

Isu prioritas terkait tata guna lahan di Provinsi Sumatera Barat adalah terkait “kegiatan pertambangan“, disamping isu-isu terkait tata guna lahan lainnya berupa perubahan tata guna lahan seperti kawasan hutan dan lahan pertanian menjadi peruntukan lainnya, kerusakan wilayah pesisir, dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Isu pertambangan ini mencuat dalam konsultasi publik sebagai isu prioritas pertama (skoring 1.074) karena sebagian peserta berpendapat bahwa bencana yang terjadi berupa banjir dan longsor serta pencemaran air serta kehilangan keanekaragaman hayati disebabkan aktifitas pertambangan terutama tanpa izin pada DAS dan *cathment*

area serta pada lokasi-lokasi yang rawan longsor. Dapat diketahui bahwa 39,08% (1.650.918 Ha) berada pada kemiringan > 40%. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun 2016 terdapat IUP eksplorasi untuk batubara sebanyak 13 perusahaan dan mineral 70 perusahaan. Sementara IUP operasi produksi terdapat 54 perusahaan untuk batubara dan 141 untuk mineral. Sebanyak 97.014,06 hektar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di Provinsi Sumatera Barat terbebani izin pertambangan. Hal tersebut merujuk pada surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan No. S.704/ VII-WKH/2014, dimana terdapat 78 IUP di Provinsi Sumatera Barat yang arealnya terindikasi berada di kawasan hutan, terdiri atas 11 IUP di Kawasan Konservasi (190,16 hektar), dan 67 IUP di kawasan lindung yang tersebar di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Dharmasraya. Disamping itu, yang dampaknya



tidak dapat terprediksi dan direncanakan adalah pertambangan ilegal. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, pada lahan akses terbuka yaitu lahan masyarakat di luar kawasan hutan dan di luar lahan yang memiliki izin pertambangan, terdapat 217 titik areal bekas tambang yang ditinggalkan tanpa pengelolaan.

Selain isu pertambangan, isu terkait tata guna lahan lainnya di Provinsi Sumatera Barat adalah perubahan tata guna lahan untuk perkebunan. Pada daerah perkotaan perubahan tataguna lahan terjadi akibat dari tekanan penduduk yang merobah lahan produktif, daerah rawa menjadi perumahan sehingga berdampak pada kemampuan lahan menyerap air.

3.1.2. Kondisi Lahan dan Statusnya (State)

3.1.2.1. Kawasan Lindung Menurut RTRW dan Tutupan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat secara umum meliputi kawasan lindung dan

kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, sedang kawasan budidaya diantaranya berupa kawasan permukiman, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan perikanan dan kelautan, dan kawasan hutan.

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029, luas Provinsi Sumatera Barat adalah 4.229.730,00 Ha dengan peruntukan berupa kawasan lindung seluas 1.516.593,00 Ha (35,86%) dan kawasan budidaya 2.713.137,00 Ha (64,14%).

Kondisi lahan di Provinsi Sumatera Barat dengan berbagai tekanan yang dihadapi menyebabkan tutupan lahannya cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, indeks tutupan lahan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 berada pada angka 64,23. Kondisi ini terus mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya

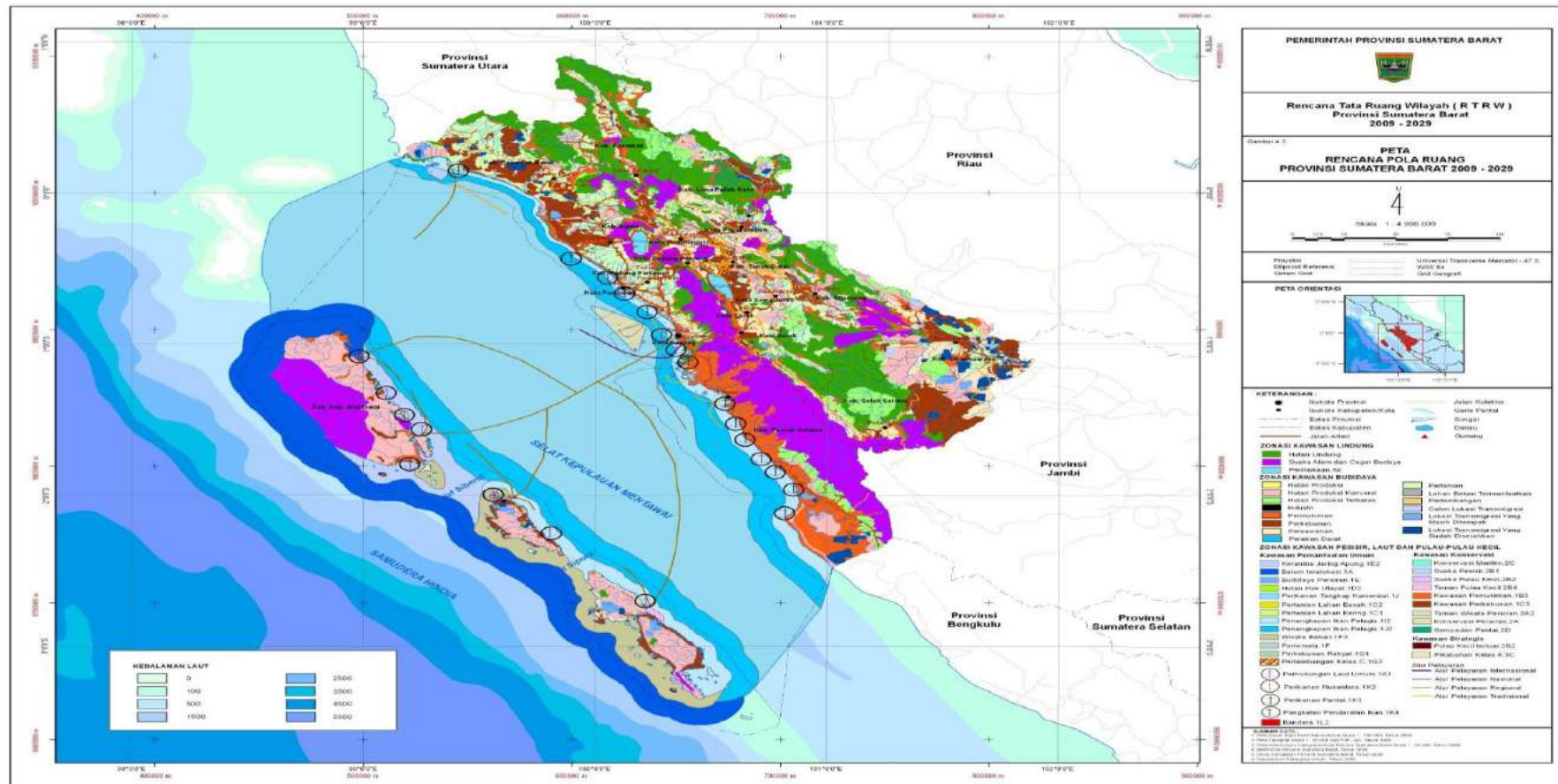


yaitu 64,78 pada Tahun 2015, dan 65,13 pada Tahun 2014.

3.1.2.2. Penggunaan Lahan Utama

Berdasarkan data olahan Tabel 1.3, penggunaan lahan terluas di Sumatera Barat adalah hutan seluas 1.860.002, 46 Ha, hutan terluas berada di kepulauan Mentawai yaitu 456.301,00 Ha. Penggunaan lahan terluas kedua adalah perkebunan yaitu 881.274,7 Ha. Kabupaten yang memiliki lahan perkebunan terluas adalah Kabupaten Dharmasraya seluas 218.007,40 Ha. Penggunaan lahan selanjutnya adalah lahan kering seluas 627.896,26 Ha, terluas di Kabupaten Solok, lahan non pertanian seluas 493.250,91 Ha terluas di Kabupaten Pasaman, lahan sawah seluas 242.605,47 Ha terluas berada di Kabupaten Pesisir Selatan dan sisanya adalah badan air seluas 74.230,30 Ha.

Gambar 3.1. Peta Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Dokumen RZWP3K Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2016.



3.1.2.3. Kawasan Hutan, Fungsi dan Statusnya

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok Hutan Konversi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 35/Kpts-II/2013, luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat adalah 2.342.893,24 Ha.

Berdasarkan klasifikasi peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat, peruntukan lahan yang paling luas adalah untuk kawasan hutan yaitu 53,61 % yang terdiri dari hutan lindung 17,02 %, Suaka Alam dan Cagar Budaya 18,83%, Hutan Produksi 6,8%, Hutan Produksi konversi 5,65 %, Hutan Produksi Terbatas 5,31%. Peruntukan kedua yang terluas adalah pertanian yaitu 30,22% disusul perkebunan 13,62% (576.012,00 (13,62%)), secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1. Peruntukan Lahan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RTRW

No.	Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	719.989	17,02
2	Suaka Alam & Cagar Budaya	796.604	18,83
3	Hutan Produksi	287.563	6,8
4	Hutan Produksi Konversi	239.123	5,65
5	Hutan Produksi Terbatas	224.726	5,31
6	Industri	432	0,01
7	Danau / Perairan darat	36.499	0,86
8	Permukiman	70.327	1,66
9	Perkebunan	576.012	13,62
10	Pertanian	1.278.088	30,22
11	Pertambangan	367	0,01
	Total	4.229.730	100

Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029

3.1.2.4. Kerusakan Lahan Dalam dan Luar Kawasan Hutan

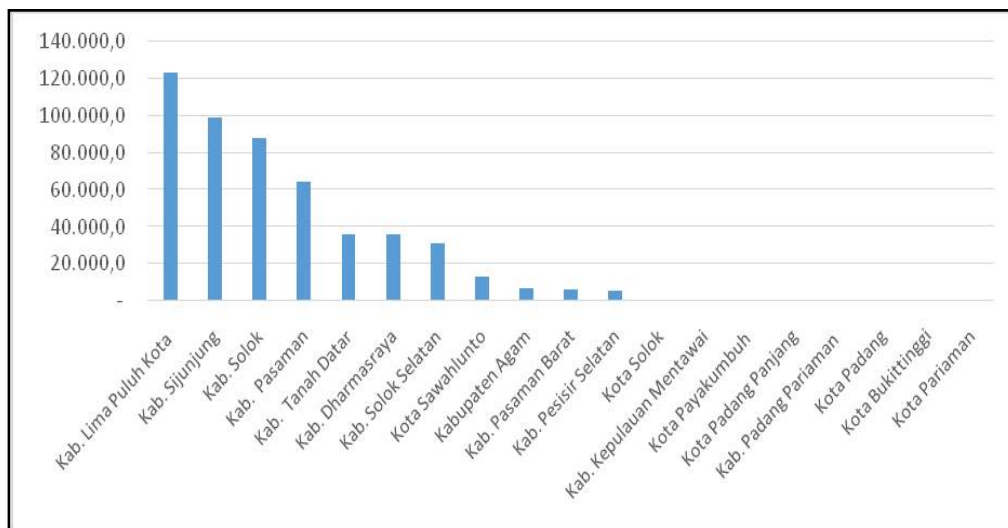
1. Lahan Kritis

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 (Tabel 4) Lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat adalah seluas 512.840,33 Ha, dimana distribusinya berada pada kawasan hutan seluas 208.054,48 Ha dan di luar kawasan hutan seluas 304.785,85 Ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa 12,12 % lahan di Provinsi Sumatera Barat sudah berada pada kondisi kritis, dan 8,9%

dari total kawasan hutan juga sudah dalam kondisi kritis.

Adapun sebaran lokasi lahan kritis tersebut sebagian besar terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebesar 24%, Kabupaten Sijunjung 19%, Kabupaten Solok 17%, Kabupaten Pasaman 12%, Kabupaten Tanah Datar 7%, dan Kabupaten Dharmasraya 7%, serta Kabupaten Solok Selatan 6%. Untuk lebih jelasnya distribusi lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini.

Gambar. 3.2. Distribusi dan Luas Lahan Kritis Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Tabel 4 Data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016

Sebaran lokasi lahan kritis ini juga sangat erat kaitannya dengan keberadaan aktivitas-aktivitas dari antropogenik seperti kegiatan

pertambangan. Hal ini terlihat dari kondisi daerah yang memiliki banyak aktivitas pertambangan cenderung untuk juga memiliki lahan

kritis yang cukup luas seperti Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, serta Kabupaten Dharmasraya. Sebagai contoh di Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki lahan kritis paling luas sebesar 123.454,77 Ha, sebanyak 57.100,48 Ha diantaranya berada dalam kawasan hutan. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan lokasi tambang tersebut berada pada kawasan hutan dengan status hutan lindung, sedangkan pola penambangan masih menerapkan sistem tambang terbuka sehingga potensi untuk meningkatnya luas lahan kritis dan resiko bencana yang ditimbulkan akan semakin meningkat.

2. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air

Berdasarkan data Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota Tahun 2016, lahan kering di Provinsi Sumatera Barat sebagian besar masih dalam kondisi baik dan masih memenuhi baku mutu ambang kritis erosi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000. Hal ini ditunjukkan dari hasil

pengamatan yang dilakukan oleh beberapa kabupaten/kota yaitu: Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Namun yang patut menjadi perhatian khusus adalah terkait kondisi lahan kering di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Agam, dimana untuk ketebalan tanah <20cm, dan 20cm<50 cm masing-masing sudah melebihi baku mutu, hal ini ditengarai sebagai akibat kondisi jenis tanah, pola tanam, dan pola penggunaan lahan seperti perkebunan kelapa sawit. Bentuk penutupan lahan seperti kelapa sawit tersebut berpotensi menyebabkan adanya peningkatan erosi.

3. Kerusakan Tanah di Lahan Kering

Data pengamatan lapangan yang dilakukan oleh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa pada umumnya kondisi lahan kering sudah dalam kondisi kritis. Seperti hasil pengamatan di Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang menunjukkan derajat pelulusan air yang hanya 0,37 cm/jam dan 2,97 cm/jam (ambang kritis adalah < 0,7 cm/jam; > 8,0), hal ini akan meningkatkan potensi terjadinya

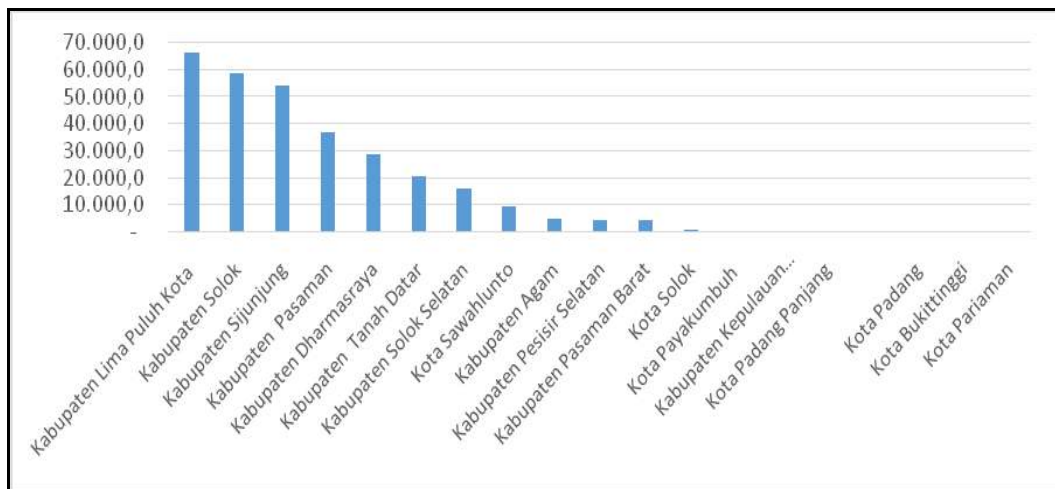


banjir karena infiltrasi air yang kecil dan *run off* akan semakin besar. Pengamatan untuk redoks di dua kota ini juga menunjukkan nilai yang kritis dengan nilai sudah < 200mV, hal ini mengindikasikan bahwa tanah sudah dalam kondisi tereduksi atau terendam air dalam jangka waktu lama (jenuh air dalam waktu lama).

Untuk wilayah kabupaten seperti Dharmasraya, Agam, dan Solok menunjukkan kondisi lahan kering yang juga sudah kritis dengan indikator daya hantar listrik yang

sangat besar. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi lahan sudah jenuh dengan kation terlarut. Di Kabupaten Pesisir Selatan juga sudah menunjukkan kondisi yang sudah kritis, terbukti dengan angka ketebalan solum yang sedikit di bawah ambang batas yaitu 19 cm. Kondisi ini menyebabkan luas lahan kritis di luar kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat menjadi cukup besar yaitu seluas 304.785,85 Ha.

Gambar 3.3. Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (Ha)



Sumber : Tabel 4 Data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016

4. Kerusakan Lahan di Lahan Basah

Wilayah yang termasuk lahan basah (kawasan bergambut) di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter menyebar di Kabupaten Pasaman

Barat, Kabupaten Agam bagian barat di daerah Tiku dan Masang, serta di Kabupaten Pesisir Selatan di daerah Lunang dan Silaut. Hampir semua kawasan bergambut ini sudah menjadi kebun kelapa sawit, hal ini



dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap keberadaan gambut.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kondisi lahan basah yang bervariasi. Untuk lahan gambut di Kabupaten Agam terlihat masih memiliki kualitas yang cukup baik dimana ketinggian muka air tanahnya tetap terjaga dengan angka 12 cm, dan besaran subsidensi gambut di atas pasir kuarsa juga masih relatif kecil dengan nilai 1,8 cm/Tahun. Sedangkan untuk lahan gambut di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kondisi gambut yang sudah terekspose ke permukaan dengan subsidensi gambut di atas pasir kuarsa yang sangat besar dengan nilai 38 cm/Tahun, dan kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah juga sudah melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000. Hal ini ditengarai sebagai akibat perubahan tata air di kawasan gambut tersebut, terlihat dari hasil pengukuran ketinggian muka air yang hampir melewati ambang nilai kritis, yaitu sebesar 23 cm.

3.1.2.5. Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sumatera Barat mempunyai luas wilayah daratan $\pm 42.297,30$ km² dan luas perairan (laut) teritorial dan ZEE 186.500 km² dengan panjang garis pantai 1.973,25 km. Sedangkan 7 (tujuh) kabupaten/kota yang merupakan kabupaten/kota pesisir mempunyai luas wilayah daratan 20.023,48 km² atau sekitar 47,34 % dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga terdapat sebanyak 185 unit pulau-pulau kecil yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota tersebut.

Luas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Barat adalah 13.750,43 km² atau sekitar 32,51 % dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten/kota yang mempunyai wilayah pesisir terluas adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 6.011,35 km², kemudian Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 4.860,22 km², Kabupaten Pasaman Barat yaitu 1.807,77 km², Kabupaten Padang Pariaman yaitu 420,46 km², Kota Padang 389,05 km², dan Kabupaten Agam 205,73 km².



Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah pesisir terkecil adalah Kota Pariaman yaitu 55,85 km².

Perairan laut Provinsi Sumatera Barat pada umumnya dimanfaatkan sebagai daerah penangkapan ikan (perikanan tangkap) dan jalur pelayaran transportasi laut. Sedangkan yang dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya laut, kawasan konservasi dan kawasan wisata bahari hanya sebahagian kecil saja. Untuk kawasan konservasi perairan laut, Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah seluas 381.090,95 ha, dan sudah memiliki SK Pencadangan dari Bupati/Walikota. Kawasan konservasi Perairan Nasional yang berupa Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan sekitarnya dengan luasan 39.900,00 Ha juga telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Barat khususnya untuk luas dan kerapatan mangrove, luas dan kerusakan padang lamun, dan luas tutupan dan kondisi terumbu karang adalah sebagai berikut:

1. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, luas kawasan mangrove di Provinsi Sumatera Barat adalah 33.824,09 Ha yang tersebar di 7 kabupaten/kota yaitu: Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kawasan mangrove yang terluas berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 24.619,43 Ha, dan yang terkecil berada di Kota Pariaman yaitu 18,4 Ha.

Secara umum kondisi tutupan mangrove berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, karena rata-rata tutupannya dibawah 50% dan juga kerapatan pohon yang minim seperti di Kota Padang yang hanya 25 batang/Ha dan bahkan Kota Pariaman sudah tidak lagi memiliki tegakan mangrove. Sedangkan untuk Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan kerapatan pohon mangrovenya masih cukup baik yaitu masing-masing sebesar 600 pohon/hektar dan 1.110 pohon/hektar,



namun persentase tutupan mangrove untuk 2 kabupaten ini hanya sekitar 30%.

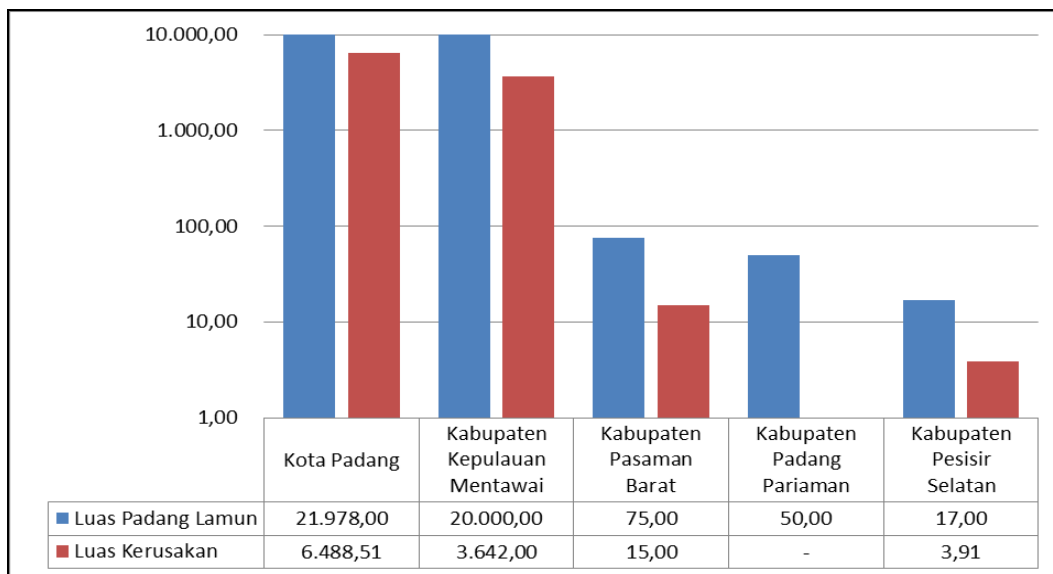
Kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh karena tekanan kepentingan sosial ekonomi yang cukup besar seperti untuk pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan, pengembangan tambak-tambak, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, diperkirakan lebih kurang 60 – 70 % hutan mangrove di Sumatera Barat sudah dalam keadaan yang kurang baik.

2. Luas dan Kerusakan Padang Lamun

Luas padang lamun pada 5 (lima) kabupaten/kota di Sumatera Barat

yaitu Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 42.120 Ha. Padang Lamun yang terluas terdapat di Kota Padang yaitu 21.978 Ha, dan kondisinya mengalami kerusakan seluas 8.483,51 Ha (38,6%). Selanjutnya Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 20.000 Ha yang juga mengalami kerusakan seluas 3.642 Ha (18,21%). Untuk lebih jelasnya kondisi padang di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.4. di bawah ini.

Gambar 3.4. Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Tabel 9 Data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016



Analisa perbandingan antar waktu kerusakan padang lamun Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 diwakili dengan kondisi padang lamun di Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa terjadi peningkatan kerusakan padang lamun di Kota Padang yaitu dari 19 % pada Tahun 2014 menjadi 22,67 % di Tahun 2015, dan 38,6% pada Tahun 2016. Kerusakan yang terjadi pada padang lamun dapat disebabkan oleh perubahan fungsi pantai untuk pelabuhan atau dermaga, pencemaran air (oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian), penangkapan ikan yang merusak serta pengerukan lumpur, lalu lintas perahu yang padat, dan lain-lain.

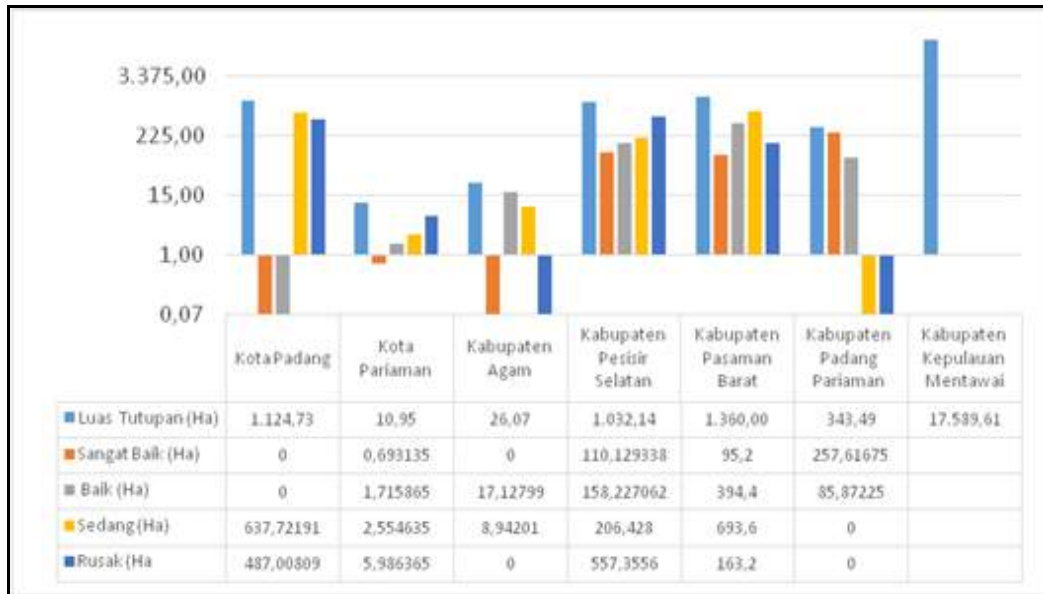
3. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang

Untuk analisa perbandingan antar waktu, perbandingan kerusakan terumbu karang Tahun 2014 – 2016 diwakili dengan kondisi terumbu karang di Kota Padang karena memiliki data yang cukup lengkap dibandingkan 6 (enam) kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan hasil olah data Tabel 10, dapat dilihat bahwa kerusakan terumbu karang di

Kota Padang Tahun 2016 mencapai 43,3 %. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi data Tahun 2015 sebesar 15,05% dan data Tahun 2014 sebesar 18,9%.

Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan terumbu karang seluas 21.486,99 Ha, dimana 82% nya berada di Kepulauan Mentawai. Khusus untuk tutupan terumbu karang di Kepulauan Mentawai belum tersedia data terkait kondisinya. Kondisi terumbu karang untuk Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kondisi terumbu karang yang sudah cukup mengkhawatirkan karena sebagian besar dalam kondisi sedang sampai dengan rusak. Secara umum kondisi terumbu karang di Sumatera Barat di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai 31 % sudah mengalami kerusakan, dan 40 % dalam kondisi sedang, artinya hanya $\pm 30\%$ saja terumbu karang yang berada dalam kondisi baik. Luas tutupan terumbu karang pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 3.5. di bawah ini.

Gambar 3.5. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Sumatera Barat



Sumber: Olahan Tabel 10 Data Dokumen IKPLHD Sumatera Barat, 2016

3.1.2.6. Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, karena pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan menjadi faktor pendorong dalam terjadinya alih fungsi lahan. Selain itu juga terdapat faktor eksternal berupa kebutuhan industri dan ekspor beberapa komoditas perkebunan seperti minyak kelapa sawit ikut mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Disamping itu juga ada tuntutan pembangunan infrastruktur juga berperan dalam mendorong

munculnya kegiatan-kegiatan pertambangan batuan seperti andesit yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pembangunan infrastruktur dalam jumlah yang besar.

Berdasarkan data pada Tabel 12 diperoleh informasi bahwa alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan merupakan bentuk alih fungsi lahan terbesar di Provinsi Sumatera Barat dengan luas penambahan sebesar 149.076,07 Ha, kondisi ini naik 35% dari sebelumnya hanya seluas 426.935,93 Ha. Penggunaan lahan lainnya yang ikut meningkat adalah untuk pertanian lahan kering dengan penambahan 96.054,74 Ha atau naik



sebesar 23,4% dari kondisi sebelumnya seluas 410.514,20 Ha. Penggunaan lahan lainnya yang juga mengalami penambahan adalah lahan pertambangan dengan total penambahan seluas 68,11 Ha atau meningkat 23% dari kondisi sebelumnya seluas 298,89 Ha. Sedangkan sektor yang terdampak dari alih fungsi lahan tersebut adalah lahan sawah yang berkurang sangat signifikan seluas 183.185,29 Ha yang mana jumlah ini merupakan 43% dari total lahan sawah. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena akan berimplikasi terhadap produksi beras yang merupakan komoditas utama dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat.

3.1.2.7. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan di Provinsi Sumatera Barat terdiri atas beberapa peruntukan utama antara lain pertambangan, perkebunan, pertanian, dan pemanfaatan hutan. Pemanfaatan lahan untuk pertambangan di Provinsi Sumatera Barat adalah seluas 46.539,17 Ha dengan pembagian 41.428,550 Ha (89%) merupakan tambang besar, 4.756,200 Ha (10,22%) merupakan tambang menengah, dan sebagian

kecil merupakan tambang skala kecil dan tambang rakyat seluas masing-masing 305,63 Ha (0,66%) dan 48,79 Ha (0,1%). Sedangkan untuk lahan perkebunan seluas 1.032.352 Ha sebagian besar (76,6%) merupakan perkebunan rakyat dengan luas 790.307 Ha, selanjutnya perkebunan besar seluas 222.988 Ha dengan persentase 21,6%. Perkebunan menengah dan perkebunan kecil dalam jumlah yang relatif kecil dengan luas masing-masing 9.142 Ha (0,9%), dan 9.915 Ha (1%). Terkait pemanfaatan lahan pertanian, sebagian besar merupakan lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat berupa tanah ulayat.

3.1.2.8. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Bahan Galian

Berdasarkan hasil olah data Tabel 13 diperoleh kondisi luas areal lahan pertambangan menurut bahan galian di Provinsi Sumatera Barat, dimana jenis bahan galian yang memiliki luas izin usaha pertambangan yang paling luas adalah logam dasar seluas 27.815,3 Ha disusul timah hitam seluas 8.932,1 Ha, emas 6.624,3 Ha, biji besi 2.876,4 Ha, batubara 1.783,00 Ha.



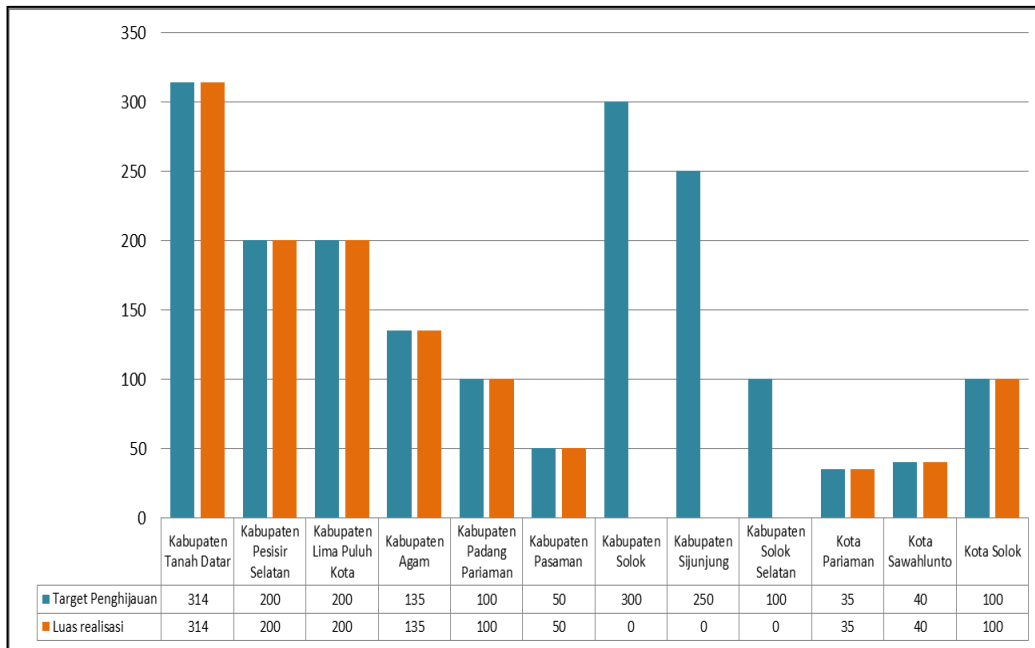
Sedangkan luas izin usaha pertambangan mineral dan batuan lainnya seperti batu kapur, batu silika, batu *clay*, batu gamping, dan lain-lain memiliki total luasan yang tidak terlalu luas. Dari aspek produksi bahan tambang mineral dan batuan pada Tahun 2016 terdapat 8.383.625,42 ton bahan galian yang diproduksi, dimana sebagian besarnya merupakan batu kapur sebanyak 5.677.003 ton (67,7%) yang akan digunakan sebagai bahan baku dalam industri semen, selanjutnya sirtukil 894.872,98 ton (10,7%) disusul batu silika 760.000 Ha (9,1%).

3.1.3. Upaya Pengelolaan Isu Lahan (*Response*)

3.1.3.1. Penghijauan

Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam merespon isu tata guna lahan salah satunya adalah berupa kegiatan penghijauan. Beberapa kabupaten/kota sudah melaksanakan kegiatan penghijauan dengan realisasi jumlah pohon yang ditanam sejumlah 397.600 batang. Adapun target dan realisasi penghijauan di kabupaten/kota Tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 3.6. sebagai berikut:

Gambar 3.6. Target dan Realisasi Penghijauan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2016



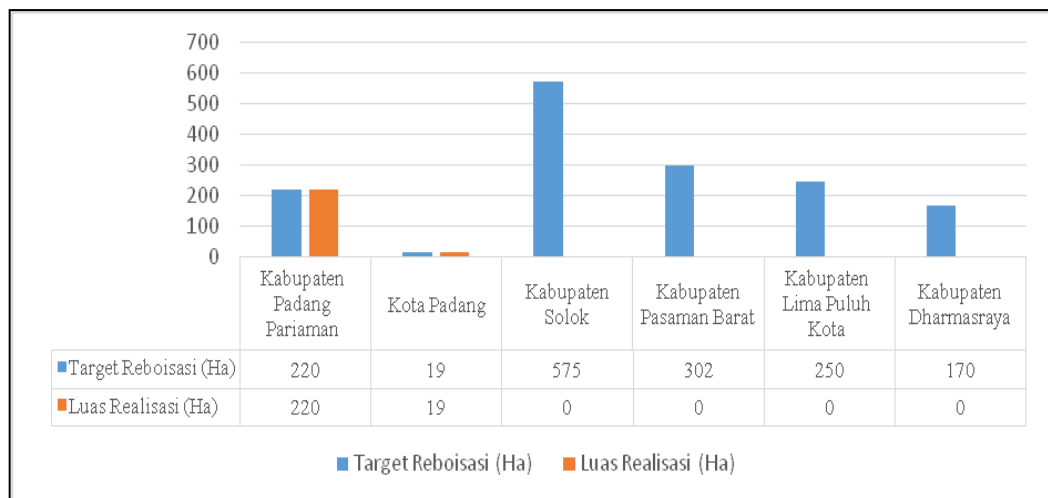
Sumber: Olahan Tabel 14 Data Dokumen IKPLHD Sumatera Barat, 2016

Sebanyak 9 (Sembilan) kabupaten/kota sudah melaksanakan penghijauan dengan luas total area yang berhasil ditanam seluas 1.174 Ha. Penanaman pohon tersebut diharapkan mampu menurunkan luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat sekaligus juga berperan dalam memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat dengan pemilihan tanaman berupa tanaman MPTS (*Multy Purpose Tree Species*) sekaligus juga berperan dalam menyerap karbon dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

3.1.3.2. Reboisasi

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penyelamatan kawasan hutan sekaligus dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sumatera Barat, beberapa kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan reboisasi dengan jumlah pohon yang berhasil ditanam sebanyak 149.375 batang, dan dengan luasan masing-masing kabupaten/kota sebagai mana Gambar 3.7. di bawah ini.

Gambar 3.7. Perbandingan target dan realisasi kegiatan reboisasi



Sumber: Olahan Tabel 14 Data Dokumen IKPLHD Sumatera Barat, 2016

3.1.3.3. Penataan Perizinan

Pertambangan

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait isu pertambangan adalah dengan melakukan penataan terhadap izin tambang

melalui evaluasi dan verifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada Tahun 2016, dari 278 IUP yang ada di Sumatera Barat, 153 tidak atau belum dinyatakan *Clean and Clear* (CnC). *Clean and Clear* maksudnya



adalah bahwa IUP harus memenuhi persyaratan administratif, kewilayah-an, teknis lingkungan dan keuangan. Penerapan CnC mulai diberlakukan pemerintah sejak Mei 2012. Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral menyatakan rekomendasi dan sertifikat CnC baru bisa didapat jika perusahaan memenuhi persyaratan tertentu.

Disamping itu pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Pemberitahuan Ka. BKPM dan PPT No. 540/861-Periz/BKPM&PPT/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 menghentikan sementara kegiatan izin usaha penambangan bahan batuan sampai dengan terpenuhinya kewajiban yang termuat pada masing-masing pemegang IUP Operasi Produksi sesuai peraturan perundang-undangan terhadap 6 (enam) perusahaan tambang di Kabupaten Solok.

3.1.3.4. Penetapan Perda Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan

Dalam rangka mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan, Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya perlindungan yang salah satunya diwujudkan melalui penetapan regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor Perda 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan. Peraturan daerah tersebut diperlukan dengan pertimbangan untuk mewujudkan kelestarian hutan dan mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam memelihara hutan dengan mengutamakan kearifan lokal dan hukum adat, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan. Sedangkan pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan mempunyai tujuan untuk:

1. Mewujudkan hutan negara, hutan adat dan hutan hak yang lestari, sehingga mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;



2. Memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan hutan berdasarkan kearifan lokal dan/atau hukum adat setempat; dan
3. Memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan.

Dengan adanya dukungan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan tersebut Pemerintah Sumatera Barat juga sudah memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis nagari (PHBN), yang mana sampai dengan Tahun 2016 sudah terdapat 38.733 Ha kawasan hutan yang sudah diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat berupa HPHN (Hak Pengelolaan Hutan Nagari)/IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan). Saat ini juga sudah diproses seluas 129.081 Ha usulan kawasan hutan untuk diberikan HPHN/IUPHKm kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Usulan ini tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan.

Bagi masyarakat, sumber daya hutan merupakan salah satu faktor terpenting hutan bukan hanya sebagai tegakan kayu yang bernilai ekonomis. Lebih dari itu hutan memiliki makna sosial, politik dan religius. Keterkaitan masyarakat dengan kawasan hutan membuat munculnya praktek pengelolaan hutan berbasis nagari. Praktek ini sudah banyak diatur dalam bentuk Peraturan Nagari dan adat. Beberapa praktek pengelolaan sumber daya alam berbasis nagari adalah :

1. Parak

Parak merupakan bentuk pengelolaan lahan yang mampu memadukan kebutuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Pengelolaannya dilakukan secara komunal dan lahannya tidak diperjual belikan. Salah satu ciri parak adalah keanekaragaman spesies dengan keanekaragaman pohon yang tinggi serta struktur vertikal yang kompleks dan bertingkat – tingkat.

Bagi masyarakat di Sumatera Barat, parak mempunyai fungsi yang kompleks. Baik itu fungsi ekologi, sosial, pengetahuan, ekonomi maupun religi yang



dikelola dengan suatu aturan pengelolaan yang telah diuji dan teruji dari refleksi pengalaman mereka berupa norma tidak tertulis yang senantiasa menjadi bagian dari tradisi dan kebudayaan yang selalu dipatuhi. Parak merupakan salah satu bentuk kemampuan masyarakat Sumatera Barat (sejarahanya Suku Minangkabau) berinteraksi dengan alam sebagaimana tertuang dalam salah satu pepatah, “*Nan lereng buek kaparak, nan gurun ka ditanam tabu, nan bancah jadikan sawah, nan munggu ka pandam pakuburan, nan randah ka tabek ikan, nan lambah kubangan kabau, dan nan padek ka parumahan*” yang artinya setiap lahan yang tersedia bisa dimanfaatkan secara lestari sesuai dengan potensinya.

2. Rimbo Larangan

Rimbo larangan merupakan hutan yang secara adat dilindungi karena memiliki fungsi vital terutama untuk ketersediaan air dan benteng untuk melindungi masyarakat dari bencana tanah longsor, dapat dimanfaatkan tetapi dalam skala tertentu yang tidak

berakibat pada pengrusakan hutan. Salah satu konsep rimbo larangan yang berjalan baik ada di Nagari Paru Kabupaten Sijunjung.

3. Lubuk Larangan

Upaya menjaga sungai agar tidak tercemar dari bahan atau benda yang dapat merusak binatang dan biota lainnya agar tidak punah, upaya menjaga ketersediaan sumber – sumber makanan yang bergizi tinggi.

4. Tradisi Lelong

Sistem gotong royong untuk mengerjakan sawah, lelong berfungsi mengurangi biaya produksi dan mempererat hubungan kekerabatan.

3.1.3.5. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)

Provinsi Sumatera Barat juga sudah memiliki rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2012, yang sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dimana sektor lahan dan gambut merupakan penyumbang emisi GRK



terbesar dengan kontribusi sebesar 86,06%. Nilai emisi GRK pada sektor lahan dan gambut merupakan kontribusi dari sub sektor kehutanan dan alih fungsi lahan dengan sub sektor pertanian (sawah, pupuk dan peternakan). Nilai masing-masing sektor berdasarkan hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

1. Sub sektor kehutanan dan alih guna lahan serta gambut diperoleh emisi sebesar 4,25 ton CO₂-eq/Hektar Tahun atau
- sebesar 18.019.442,96 ton CO₂-eq/ Tahun;
2. Sub sektor pertanian diperoleh emisi sebesar 11.948.160,72 ton CO₂-eq dengan rincian:
 - a. Sawah dengan emisi sebesar 1.927.632,34 ton CO₂-eq
 - b. Pupuk dengan emisi sebesar 214.126,94 ton CO₂-eq
 - c. Perternakan dengan emisi sebesar 9.806.401,44 ton CO₂-eq

Tabel 3.2. Kondisi BAU Emisi GRK Sektor Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2011-2020

No	Zona	2011	2015	2020
1	Hutan Lindung	15.587.650,49	14.082.079,06	13.031.308,82
2	Hutan Penggunaan Lain	22.053.822,74	16.834.171,80	13.103.369,75
3	Hutan Produksi	11.894.166,60	10.736.143,12	9.787.607,53
4	Hutan Produksi Konversi	3.926.657,19	3.556.813,17	3.223.538,99
5	Hutan Produksi Terbatas	10.820.949,05	8.639.508,42	7.330.351,74
6	Hutan Suaka dan Wisata	5.390.099,26	5.320.607,08	5.252.060,92
7	Gambut Non Hutan	16.196.378,43	9.847.517,69	10.409.130,84
8	Gambut Hutan	4.227.491,08	4.125.459,93	4.049.062,24
	Total	90.097.214,85	73.142.300,27	6.186.430,84

Sumber: RAD GRK Provinsi Sumatera Barat 2011-2020

Dalam rangka penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan sudah ditargetkan angka penurunan emisi sebesar 24,78% dari BAU pada Tahun 2020 melalui aksi mitigasi berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang tercantum dalam RAD-GRK yaitu :
 - a. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
 - b. Perencanaan dan pemanfaatan usaha kawasan hutan.
 - c. Pengukuhan kawasan hutan.
 - d. Peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan gambut)



- e. Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan
 - f. Pengelolaan lahan pertanian di lahan gambut terlantar dan terdegradasi untuk mendukung sub sektor perkebunan, peternakan dan hortikultur.
 - g. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dan reklamasi di DAS prioritas.
 - h. Pengembangan perhutanan sosial.
 - i. Pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung,
 - j. Peningkatan usaha hutan tanaman
2. Kegiatan yang sudah ada dalam Renstra
- a. Pembuatan Hutan Rakyat
 - b. Penyelenggaraan KMDN dan Gerakan Menanam Indonesia.
 - c. Pengamanan dan perlindungan hutan.
 - d. Pengendalian kebakaran hutan dan pengembangan sarana penyuluhan.
 - e. Peningkatan Luasan HKM dan HD s/d Tahun 2020 seluas 500.000 Ha.
 - f. Pembangunan KPH.
 - g. Penataan Batas Kawasan Hutan.
3. Usulan kegiatan baru
- a. Perluasan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Nagari (PELANA) :
 - Pembentukan dan Penguatan Lembaga Layanan Satu Atap untuk PELANA.
 - Memfasilitasi adanya Kebijakan di Provinsi dan Kabupaten untuk mendukung Implementasi PELANA.
 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola PELANA di berbagai Level.
 - Memfasilitasi tercapai rekognisi Kawasan Kelola Rakyat seluas 250.000 ha selama 5 Tahun.
 - b. Pengembangan Ekonomi Hijau (BANGAU)
 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Rendah Karbon di Sumatera Barat.

- Pembentukan Lembaga Daerah untuk Penyiapan Implementasi REDD+ dan Skema-Skema Lain terkait Isu Pembangunan Rendah Karbon.
 - Pembentukan Lembaga Daerah untuk Penyiapan Implementasi REDD+ dan Skema-Skema Lain terkait Isu Pembangunan Rendah Karbon.
 - Pembentukan Lembaga Daerah untuk Penyiapan Implementasi REDD+ dan Skema-Skema Lain terkait Isu Pembangunan Rendah Karbon.
 - Pengembangan dan Implementasi Jasa Lingkungan.
 - Mendukung Implementasi Gerakan Pensejahteraan Petani melalui Pertanian Organik dan Agroforest.
- c. Re-Desain Tata Guna Lahan Dan Resolusi Konflik (TAHAN)
- Memfasilitasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota berbasis KLHS.
 - Mediasi Konflik Pemanfaatan Lahan.
- Fasilitasi Pembentukan Layanan Satu Atap Penyelesaian Konflik Lahan.
- d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dalam Mitigasi Bencana (RELAMINA)
- Reforestasi berbasis Nagari.
 - Pengembangan Bank Bibit Tanaman Asli berbasis Nagari
 - Restorasi Hutan melalui Pengembangan dan Pengayaan Parak
 - Penyelamatan Lahan Gambut dan Mangrove Tersisa dari Konversi
- Realisasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan pada Tahun 2016 adalah sebesar 231.452,43 tonCO₂eq yang berasal dari kegiatan penanaman pohon di berbagai kawasan seperti kawasan hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi serta areal penggunaan lain. Untuk lebih jelasnya terkait hasil penurunan emisi gas rumah sektor berbasis lahan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.3. sebagaimana berikut.

Tabel 3.3. Penurunan Emisi GRK Berbasis Lahan

No	Kegiatan	Lokasi	Penurunan Emisi GRK (ton CO ₂ e)	Keterangan
1	Fasilitasi Hutan Rakyat	areal penggunaan lain (APL)	62.799,00	Mahoni, ketapang, surian, MPTS (petai, jengkol, manggis dan durian)
2	Rehabilitasi dalam PHBM	hutan lindung	755,04	Mahoni, ketapang, surian, MPTS (petai, jengkol, manggis dan durian)
3	Pengembangan Kelompok Usaha Produktif (KUP)	areal penggunaan lain (APL)	242	Mahoni, ketapang, surian, MPTS (petai, jengkol, manggis dan durian)
4	Pengembangan Aneka Guna Hutan (Gaharu dan Rotan)	areal penggunaan lain (APL)	1.452,00	Gaharu, rotan
5	Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM)	areal penggunaan lain (APL)	121	Mahoni, ketapang, surian, MPTS (petai, jengkol, manggis dan durian)
6	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI)	areal penggunaan lain (APL)	47,19	Mahoni, ketapang, surian
7	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	areal penggunaan lain (APL)	15.125,00	Mahoni, ketapang, surian, MPTS (petai, jengkol, manggis dan durian)
8	Agroekowisata	areal penggunaan lain (APL)	24,2	Mahoni, ketapang, surian, MPTS (petai, jengkol, manggis dan durian)
9	Reboisasi oleh KPHL Bukit Barisan (170 ha X 600 batang)	hutan lindung	4.114,00	Mahoni, ketapang, surian, MPTS (petai, jengkol, manggis dan durian)
10	Aksi Menanam oleh para pihak Swasta	APL, Tahura	65.485,20	Mahoni, ketapang, surian, MPTS (petai, jengkol, manggis dan durian)
11	Aksi Menanam oleh berbagai instansi Pemerintah Tk Provinsi	Taman Nasional, DAS, HL,HP dan APL	68.849,00	Akasia, albazia, mahoni, MPTS, Jabon, mahoni dan surian
12	Penanaman oleh instansi kehutanan Kab/Kota	APL, Tahura, HL dan HP	12.438,80	Mahoni, ketapang, surian, MPTS (petai, jengkol, manggis dan durian)
Total penurunan emisi sektor lahan			231.452,43	

Sumber : Laporan PEP-RAD GRK Provinsi Sumatera Barat, 2016

3.1.3.6. Konservasi Mangrove

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir dalam melestarikan ekosistem mangrove adalah dengan menetapkan kawasan mangrove sebagai kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang berlokasi di Batang Tomak, Air Bangis, dan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat; Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan; sebagian besar kawasan pantai Kepulauan Mentawai; Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Bungus Teluk Kabung di Kota Padang.

3.1.3.7. Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah

Secara keruangan melalui penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan kawasan konservasi laut daerah terhadap beberapa kawasan padang lamun, antara lain kawasan konservasi laut daerah Pulau Pasumpahan dan Pulau Pisang, kawasan pengawasan keanekaragaman hayati biota laut di Pulau

Sikuai, kawasan konservasi laut daerah Pulau Ujung Agam, daerah perlindungan laut Tiku Agam, kawasan perlindungan laut daerah berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara (Pulau Batu Bakudung), dan perbatasan dengan Provinsi Bengkulu (Pulau Baringin) dengan total luas 71.296,5 Ha.

Kawasan konservasi perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah tersebut secara berkelanjutan. Tujuan pengelolannya melindungi sejauh mungkin flora dan fauna laut (marin) endemik dan mengeluarkan atau mencegah masuknya spesies-spesies asing (exotic). Bila memungkinkan, sebagian dari zona konservasi digunakan untuk menimba ilmu pengetahuan. Disamping itu ditetapkan juga wilayah konservasi dengan situs budaya atau tempat kapal tenggelam.

3.1.3.8. Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati

Sampai dengan Tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki 8 unit taman kehati dengan total luas 68 hektar yang terdiri atas Taman Kehati Universitas Andalas seluas 15 Ha di Kota Padang, Taman Kehati Solok seluas 3 Ha di Kota Solok, Taman Kehati Sikapak seluas 5 Ha di Kota Pariaman, Taman Kehati Kandih seluas 5 Ha di Kota Sawahlunto, Taman Kehati Koto Malintang seluas 10 Ha di Kabupaten Agam, Taman Kehati seluas 10 Ha di Kabupaten Padang Pariaman, Taman Kehati Lubuk Sikaping seluas 10 Ha di Kabupaten Pasaman, dan Taman Kehati Padang Mangateh seluas 10 Ha di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.2. Kualitas Air

Pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan di satu pihak terus meningkat dari Tahun ke Tahun, sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan pengembangan aktifitasnya. Di lain pihak, ketersediaan sumber daya air semakin terbatas, bahkan cenderung semakin langka karena penurunan

kualitas lingkungan (termasuk kualitas air) akibat pencemaran. Diperlukan upaya yang proporsional dan seimbang antara pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya air baik dilihat dari aspek teknis maupun aspek legal.

Hampir seluruh sumber daya air ada di Sumatera Barat yaitu Sungai, Danau/Situ, Embung, Sumur (Air Tanah) dan Laut (Tabel 15 s/d 20). Berbagai faktor akan mempengaruhi kualitas air baik faktor alami seperti curah hujan (Tabel 21) maupun faktor non alami seperti kepadudukan dan kompleksitas permasalahan yang ditimbulkannya seperti permasalahan sampah dan limbah cair (Tabel 22 s/d Tabel 27). Pembahasan akan dilakukan pada seluruh tabel namun akan dilakukan penekanan pada sumberdaya air terkait dengan isu prioritas.

3.2.1. Isu Prioritas dan Tekanan (Pressure)

Secara umum, penyebab/ sumber pencemar air dapat di inventarisasi sebagai berikut:

- *Non point Source* (Pertanian, lahan terbangun, hutan)



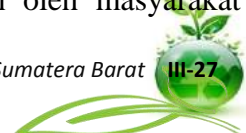
- Air Limbah domestik
- *Land Erosion*/Erosi lahan
- Peternakan
- Air Limbah Industri (tambang, manufaktur, prasarana& jasa, industri skala kecil)
- *Solid Waste Leachate* (sampah)
- *Atmospheric deposition*/Diposisi atmosfer.

Pencemaran air merupakan isu prioritas kedua (skoring 1.038) berdasarkan konsultasi publik yang telah dilakukan. Sebagaimana umumnya di kabupaten/kota di Sumatera Barat, permasalahan sungai terutama pada segmen perkotaan berupa penurunan kualitas air akibat tekanan yang berasal dari masalah kependudukan meliputi limbah domestik (sampah dan limbah cair), aktifitas peternakan, pemanfaatan sempadan sungai. Di beberapa daerah perkotaan, sempadan dipergunakan untuk kawasan pemukiman dimana masyarakat masih membuang sampah dan limbah cairnya ke sungai secara langsung. Di Pedesaan, sering kali sempadan sungai dibuka (*land clearing*) untuk perladangan (tanaman sawit, atau karet) akibatnya meningkatkan laju erosi sebagai

akibat dari tergerusnya *top soil* oleh air hujan. Pada daerah tertentu seperti yang terjadi di Kabupaten Sijunjung (sempadan Sungai Batang Ombilin) serta Kabupaten Dharmasraya (sempadan Sungai Batanghari pada kawasan seluas ± 300 Ha) dan Kabupaten Solok Selatan, sempadan sungai maupun sungai itu sendiri marak kegiatan penambangan tanpa izin, sehingga menyebabkan kekeruhan/tingginya kandungan TSS di kedua sungai tersebut.

Walau secara data masalah kualitas air sungai segmen perkotaan menunjukkan penurunan kualitas secara terus menerus, isu kualitas air di Sumatera Barat yang mencuat dalam konsultasi publik bukan masalah pencemaran kualitas air sungai tetapi terkait **“Pencemaran Danau Maninjau Akibat Tekanan dari Aktifitas Perikanan Keramba”**

Danau Maninjau yang berada di Kabupaten agam ini mempunyai fungsi ekonomi sebagai pusat perikanan budidaya keramba jaring apung. Danau Maninjau pada saat ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat



untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik seperti sumber air baku air minum, mandi, dan mencuci (MCK). Kegiatan perikanan seperti pembudidayaan ikan dengan teknik Keramba Jaring Apung (KJA) juga merupakan sumber limbah yang potensial mencemari danau. Pada Tahun 2012 jumlah Keramba Jaring Apung mengalami perkembangan yang pesat dengan jumlah sebanyak 15.680 petak (Syandri et al, 2014). Saat ini jumlah kerambah kurang lebih 17.226 petak. Jumlah ini melebihi daya dukung danau yang berdasarkan kajian hanya bisa menampung 6.000 petak.

Pemanfaatan lainnya yang juga sangat penting adalah fungsi ekonomi sebagai pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan energi rata-rata Tahunan sebesar 205 GWH dengan nilai Rp 71,8 milyar per Tahun. Konstruksi *weir* PLTA Maninjau yang dibangun pada Tahun 1980 dalam tingkatan tertentu menghambat pengaliran alami air dari Danau Maninjau ke Sungai Batang Antokan.

Setiap Tahun terjadi *up welling* air danau. *Up welling*

tersebut menyebabkan pertukaran arus bawah ke atas sekaligus mengangkat akumulasi limbah didasar danau yang utamanya berasal pakan ikan (pada lokasi dangkal) yang menyebabkan kualitas air menurun hingga parameter DO air bisa mencapai 1 – 2 mg/l. Akibatnya ikan danau mati secara massal. Terdapat ikan bada (*Rasbora argyrotaenia*) dan rinuk (*Psylopsin sp*) yang bersifat endemik dan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Keberadaan ikan tersebut sudah terancam punah akibat semakin meningkatnya beban pencemaran yang masuk ke badan air danau dan kematian secara massal. Pada Tahun 2016, sekitar 500 ton ikan mati di Danau Maninjau pada bulan Februari dan Desember 2016.

3.2.2. Kondisi Kualitas Air dan Statusnya (State)

3.2.2.1. Kondisi Sungai

Provinsi Sumatera Barat memiliki 606 buah sungai, baik skala besar maupun kecil, dengan rincian: sungai lintas provinsi sebanyak 27 sungai, sungai lintas kabupaten/kota sebanyak 81 sungai dan sungai

parsial kabupaten/kota sebanyak 498 sungai besar dan kecil.

Sungai-sungai di Sumatera Barat memiliki panjang, lebar (permukaan dan dasar) serta kedalaman yang bervariasi. Sungai Batang Hari merupakan sungai yang terpanjang dan terlebar, dengan panjang 144,4 km dan lebar permukaan 150 m. Bagian rentang dan hilir sungai pada umumnya melebar seiring bersatunya beberapa anak sungai ke sungai utama. Kedalaman sungai juga bervariasi, yaitu pada kisaran 0,5 m s/d 10 m. Perbedaan kedalaman sungai sangat dipengaruhi oleh intensitas curah hujan. Sungai Batang Hari mempunyai kedalaman mencapai 10 m. Untuk nilai debit sungai, debit minimum bervariasi antara 0,12 m³/detik (Sungai Batang Kuranji, Kota Padang) s/d 34,02 m³/detik (Sungai Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan), sedangkan debit maksimum berkisar 6,13 m³/detik (Sungai Batang Ulakan) sampai dengan 280,3 m³/detik (Sungai Batang Pariaman). (*sumber: Olahan Tabel-15 Buku Data IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016*).

Pada Tahun 2016, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan terhadap 6 (enam) sungai lintas kabupaten/kota (pembiayaan dana APBD), yakni Sungai Batang Agam, Batang Anai, Batang Pangian, Batang Ombilin, Batang Lembang, serta Batang Lampasi dan 3 (tiga) sungai lintas provinsi (dana dekonsentrasi Tahun 2016), yakni Sungai Batang Hari, Batang Kuantan serta Batang Kampar.

Berdasarkan hasil analisis laboratorium, ditemukan beberapa parameter diatas ambang baku mutu kualitas air sungai, seperti parameter Fecal Coli dan Total Coliform. Hal ini disebabkan oleh pengaruh alami maupun kontribusi dari berbagai sumber pencemar seperti aktifitas manusia.

Pembahasan kualitas air baik sungai lintas kabupaten/kota maupun lintas provinsi, difokuskan pada hasil perhitungan status mutu Metode Indeks Pencemaran, tidak membahas per parameter uji.

Hasil Perhitungan Status Mutu Air untuk sungai lintas Provinsi dan sungai lintas Kabupaten/Kota berdasarkan per-

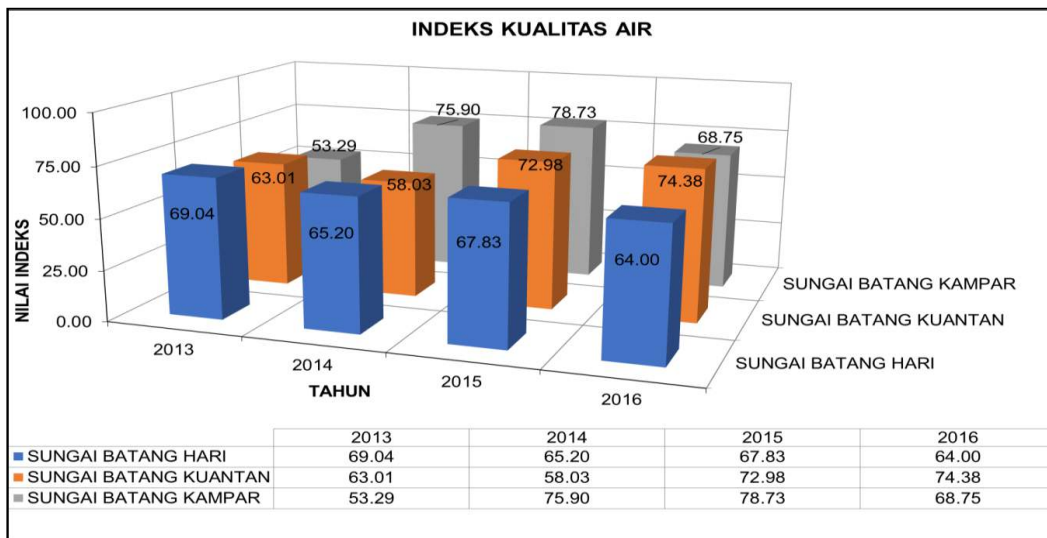


bandingan antar waktu : Perhitungan menggunakan metode Indeks Pencemaran yang mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air (dengan tujuh parameter kunci yaitu **TSS, BOD₅, COD, DO, Total Phosphat, Fecal Coli dan Total Coliform**).

1. Sungai Lintas Provinsi

Indikator pencemaran sungai lintas provinsi diwakili oleh kualitas Sungai Batang Hari, Batang Kuantan, Batang Kampar. Dari hasil perhitungan, diperoleh data dan perbandingan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) untuk ketiga Sungai Lintas Provinsi dari Tahun 2013 s/d 2016, sebagaimana Gambar 3.8. di bawah ini:

Gambar 3.8. Perbandingan Status Mutu Metode Indeks Pencemaran Sungai Lintas Provinsi Tahun 2013-2016



Sumber: olahan Tabel-17 Buku Data IKPLHDProvinsi Sumatera Barat, 2016

Dari gambar di atas, terlihat bahwa sungai lintas provinsi di Sumatera Barat secara umum berada pada kategori “cukup” (berdasar juknis IKLH) dengan range 64 s/d 74.38 pada Tahun 2016. Kualitas air sungai terbaik adalah Sungai Batang

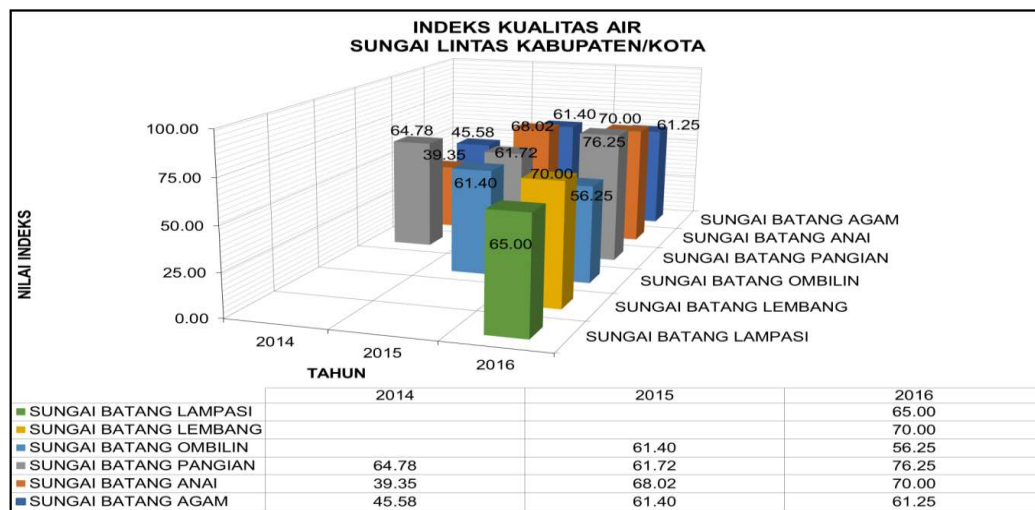
Kuantan dibandingkan kedua sungai lainnya. Terjadi peningkatan kualitas air sungai Batang Kuantan pada periode 2013 – 2016, sedangkan untuk Batang Hari maupun Batang Kampar terjadi penurunan kualitas airnya.

Untuk Sungai Batang Hari, dari hasil analisis laboratorium selama pemantauan Tahun 2016, kadar parameter TSS yang melebihi baku mutu. Indikasi penyebab tingginya kadar TSS Sungai Batang Hari yaitu telah terjadi penggerusan (pada kawasan seluas ±300 Ha) karena kegiatan penambangan batuan maupun emas pada sempadan dan badan sungai di Sungai Batang Hari, sehingga menyebabkan keruhnya air sungai Batang Hari. Sedangkan untuk parameter Hg (Mercury), walaupun di beberapa titik terdeteksi namun kadarnya masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

2. Sungai Lintas Kabupaten/Kota

Sungai lintas Kabupaten/Kota diwakili oleh Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Lampasi. Diperoleh perhitungan dan perbandingan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) untuk keenam sungai lintas kabupaten/kota sampai dengan Tahun 2016, sebagaimana Gambar 3.9. di bawah ini :

Gambar 3.9. Perbandingan Status Mutu Metode Indeks Pencemaran Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016



Sumber: olahan Tabel-17 Buku Data Dokumen IKPLHDPProvinsi Sumatera Barat, 2016

Kualitas air sungai lintas kabupaten/kota umumnya berada pada kategori “sangat kurang” sampai “baik” dengan range



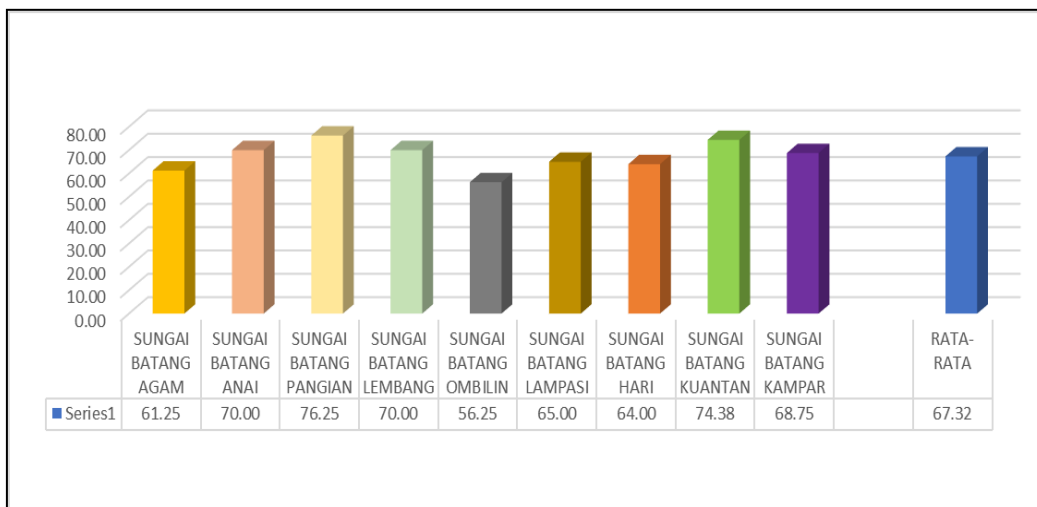
s/d 76.25. Kondisi sungai terburuk pada Tahun 2016 adalah sungai Batang Ombilin (IKA = 56.25). Kualitas air sungai dalam kondisi baik adalah sungai Batang Pangian (76.25).

Secara umum, kualitas sungai di Sumatera Barat baik lintas provinsi maupun lintas Kab/kota didapat bahwa IKA rata-rata untuk 9 (sembilan) sungai tersebut adalah 67,32 dengan kategori “cukup” berdasarkan Juknis IKLH sebagaimana Gambar 3.10 di bawah, terdapat 2 (dua) sungai dengan nilai IKA terendah, yakni Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Agam. Untuk Sungai Batang Ombilin, beberapa parameter penyebab

rendahnya nilai IKA adalah TSS (akibat penambangan illegal : galian C dan PETI), COD, Total Phosphat, Fecal Coli dan Total Coliform.

Di Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan Sungai Batang Agam sebagai *baseline* dan dasar perhitungan pencapaian target indikator IPA. Pemilihan Sungai Batang Agam sebagai *baseline* dan untuk mewakili kondisi sungai secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat dalam perhitungan Indeks Pencemaran Air didasarkan atas pertimbangan bahwa; melintasi areal kabupaten/kota yang padat aktifitas, kondisinya cenderung menurun, dilakukan pemantauan berkala setiap Tahunnya.

Gambar 3.10. Perbandingan Indeks Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2016



Sumber: Olahan Tabel-17 Buku Data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Parameter yang sangat mempengaruhi kondisi/kualitas sungai Batang Agam adalah parameter Fecal Coliform dan Total Coliform dengan kategori cemar berat terutama yang berada pada segmen Kota Bukittinggi dan beberapa titik di Kabupaten Agam, merupakan gabungan dari limbah rumah tangga, limbah perhotelan, rumah sakit dan Rumah Potong Hewan (RPH). Total Coliform dan Fecal Coliform yang sangat tinggi terutama terdapat pada titik pengambilan sampel pada badan sungai yang menerima limbah RPH secara langsung. Semakin menurunnya kualitas air Sungai Batang Agam disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kelestarian Sungai Batang Agam.

3.2.2.2. Kondisi Air Danau/Situ/ Embung

Provinsi Sumatera Barat memiliki 25 (dua puluh lima) danau/waduk/situ/embung yang tersebar di 9 (Sembilan) kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat,

Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Ke-25 danau/waduk/situ/embung tersebut terdiri atas 5 (lima) buah danau, 4 (empat) buah situ danau, 6 (enam) buah waduk, dan (10) sepuluh buah embung.

Ukuran danau di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, dengan kategori luas yang berbeda. Danau Singkarak merupakan danau yang paling luas di Provinsi Sumatera Barat dengan luas 107.8 Km², Danau Maninjau dengan luas 97.9 Km², Danau Diatas dengan luas 12.3 Km² dan Danau Dibawah dengan luas 11.2 Km².

Kualitas air danau di Sumatera Barat yang dibahas diwakili oleh Danau Maninjau dan Danau Singkarak mengingat kedua danau ini merupakan danau prioritas nasional dan tekanannya cukup besar. Dari hasil pengujian kualitas air danau secara umum masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

Danau Maninjau

Danau Maninjau merupakan salah satu danau vulkanik prioritas untuk diselamatkan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011), terletak di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dengan luas 9.997 Ha, kedalaman maksimum 176.65 meter (rata-rata 105 meter) dengan volume air 10,33 milyar m³. Jumlah penduduk yang bermukim di daerah sekitar danau sebanyak 33.000 jiwa. Kawasan danau ditinjau dari topografi wilayahnya merupakan kawasan dengan elevasi ketinggian wilayah yang bervariasi dengan ketinggian maksimal mencapai 500 meter (461,50 m) di atas permukaan laut.

Danau Maninjau berada pada bagian Hulu DAS Antokan dengan total luas *catchment* meliputi 13.260 Ha (25% dari total luas 50.704 Ha DAS Antokan). Laju erosi aktual di DAS Antokan ini relatif sangat tinggi yaitu 195,26 ton/ha/Tahun = 9,92 mm/Tahun (Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, 2011). Sedimentasi di wilayah DAS Antokan ini tergolong relatif sedang, Nisbah Pelepasan Sedimen (SDR) = 0,085 (8,5%). Jadi, semua

tanah yang tererosi yaitu 195,26 ton/ha/Tahun hanya 16,60 ton/ha/Tahun yang tersedimentasi = 9.25 mm/th.

Permasalahan pada Danau Maninjau:

1. Penggunaan air, ruang untuk KJA semakin meningkat, sering terjadi ikan mati secara massal, sehingga beban pencemaran air semakin bertambah (pencemaran air dan *blooming* algae).
2. Daerah tangkapan air semakin kritis, belum ada zonasi kawasan.
3. Pemanfaatan daerah sempadan danau untuk pemukiman semakin bertambah.
4. Hilangnya ekosistem endemis
Perkembangan keramba ikan di Danau Maninjau yang mempengaruhi kualitas airnya pada Tahun 2016 dapat diulas sebagai berikut :

- a. Di Danau Maninjau perkembangan budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA) semakin meningkat, dimana di Tahun 2016 ini jumlah KJA telah mencapai ±17.226 petak. Sedangkan menurut Perda Kabupaten Agam No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau, bahwa jumlah KJA yang sesuai dengan



daya tampung dan daya dukung Danau Maninjau adalah sebanyak 1.500 unit dan/atau 6.000 petak dengan ukuran 5 x 5 meter persegi per petak keramba. Untuk mencapai angka batasan jumlah KJA sebanyak 1.500 unit dan/atau 6000 petak akan dilakukan pengurangan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 10 Tahun, 5 (lima) Tahun pertama mencapai angka 11.760 petak dan 5 (lima) Tahun kedua 6.000 petak.

- b. Pada bulan Februari Tahun 2016 ini telah terjadi kematian ikan secara massal. Menurut Prof. Hafrizal Syandri dan petugas stasiun Limnologi - LIPI

di Danau Maninjau, kematian ikan secara massal ini disebabkan oleh faktor terjadinya angin kencang dengan kecepatan ± 62 km/jam sehingga terjadinya pembalikan massa air. Kejadian kematian ikan banyak terjadi pada lokasi Timur Danau Maninjau (Gasang-Maninjau-Kubu Baru, Sungai Rangeh, Bayur dan Pasar Akad) dimana danau pada wilayah timur secara kontur memiliki kedalaman lebih dangkal dibandingkan wilayah lainnya. Menurut petugas stasiun Limnologi - LIPI di Danau Maninjau, dengan kecepatan angin ± 28 km/jam saja dari arah Timur dan Utara sudah dapat mengangkat senyawa toksik di kedalaman 18,5 m.

Gambar 3.11. Kondisi Keramba Jaring Apung dan Kematian Ikan Secara Masal

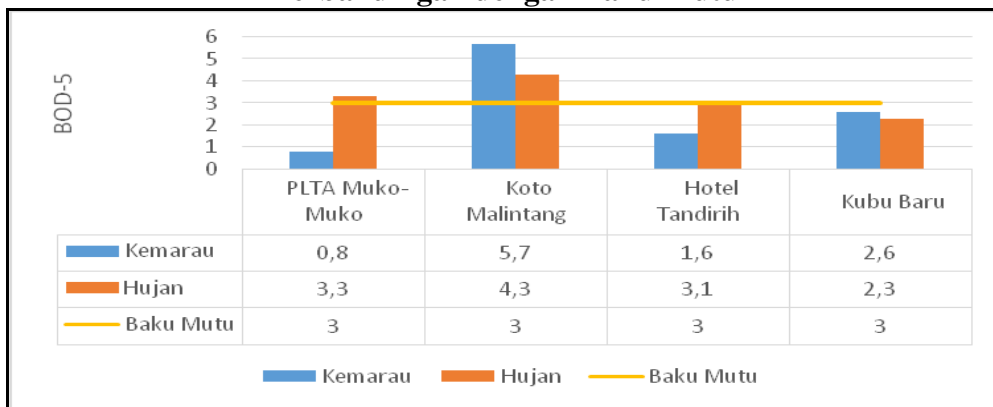


Sumber : Hasil Pemantauan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Pembahasan tentang analisis perbandingan parameter dengan baku mutu dan antar waktu hanya pada parameter yang melebihi baku mutu, yakni parameter BOD₅ (*Biochemical Oxygen Demand*). Sedangkan parameter lainnya seperti suhu, pH, COD masih memenuhi baku mutu. Dari Gambar 3.12. di bawah, dapat

dilihat bahwa pada musim kemarau nilai BOD₅ tertinggi terdapat di Koto Malintang (5,7 mg/L) dan nilai BOD₅ terendah terdapat di Muko-Muko (0,8 mg/L) sedangkan pada musim hujan nilai BOD₅ tertinggi terdapat di Hotel Tandirih (6,6 mg/L) dan terendah di Muko-Muko (0,8 mg/L).

Gambar 3.12. Kadar BOD₅ Danau Maninjau Tahun 2016 Perbandingan dengan Baku Mutu



Sumber : olahan Tabel-17 Buku Data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Pada musim kemarau BOD₅ di Muko-Muko (3,3 mg/L), Koto Malintang (4.3mg/L) dan Hotel Tandirih (3.1) diatas baku mutu yang dipersyaratkan (3 mg/L). Di Kubu Baru nilai BOD₅ tidak jauh berbeda pada kedua musim yaitu pada musim kemarau (2,65 mg/L) dan pada musim hujan (2,49 mg/L) namun nilai BOD₅ pada kedua musim masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan (3 mg/L).

Pemeriksaan BOD₅ diperlu-

kan untuk menentukan beban pencemaran akibat air buangan, penduduk atau industri dan lainnya. Apabila suatu badan air dicemari oleh zat organis, bakteri dapat menghabiskan oksigen terlarut dalam air selama proses oksidasi yang bisa mengakibatkan kematian ikan.

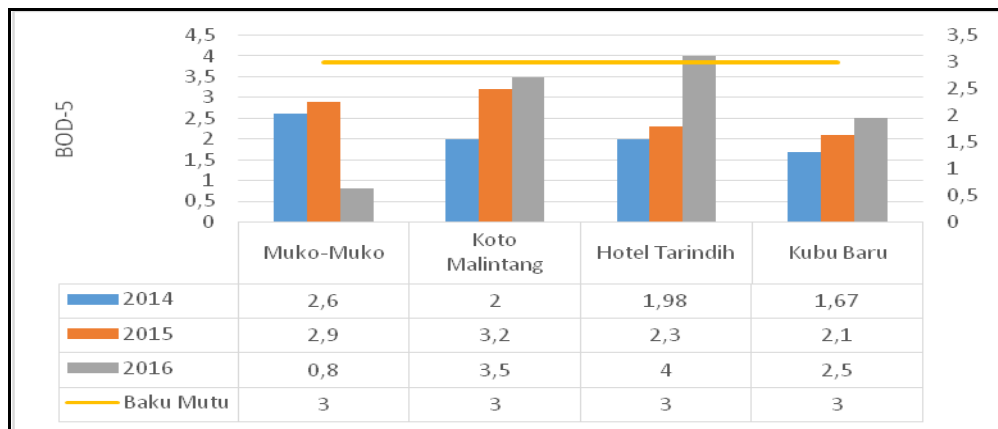
Menurut Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Danau dan Telaga di Provinsi Sumatera Barat, nilai ambang batas BOD₅ adalah 3 mg/L.



Kondisi perairan Danau Maninjau secara umum kurang mendukung untuk perikanan karena kadar BOD₅ telah melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Berdasarkan perbandingan 3 (tiga) Tahun yaitu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, parameter BOD₅ di seluruh lokasi titik sampel sebagaimana

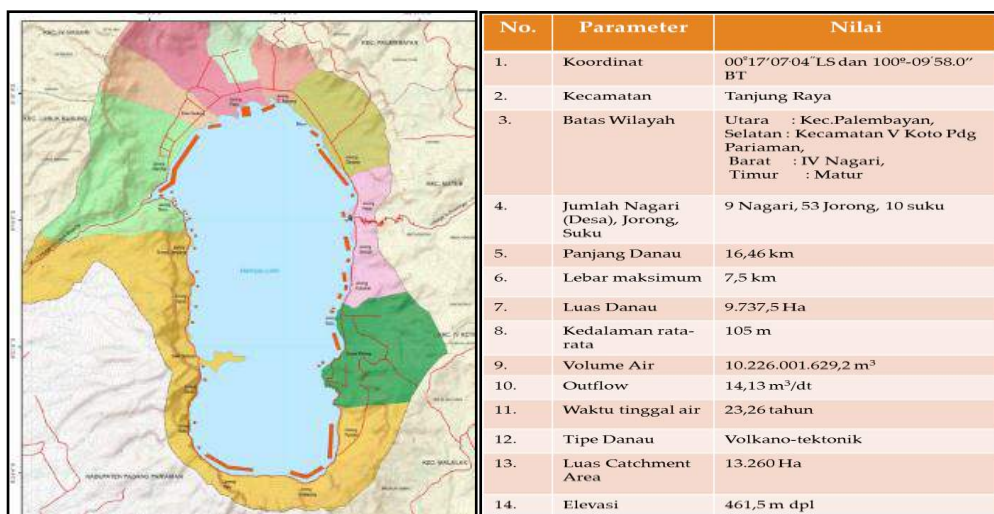
Gambar 3.13 kecuali Muko-Muko mengalami penurunan. Di Muko-Muko parameter BOD₅ cukup baik karena kualitas airnya juga tergantung kepada pembersihan eceng gondok dan sampah-sampah yang biasa terhambat pada pintu air PLTA Maninjau.

Gambar 3.13. Perbandingan Kadar BOD Danau Maninjau Tahun 2014-2016



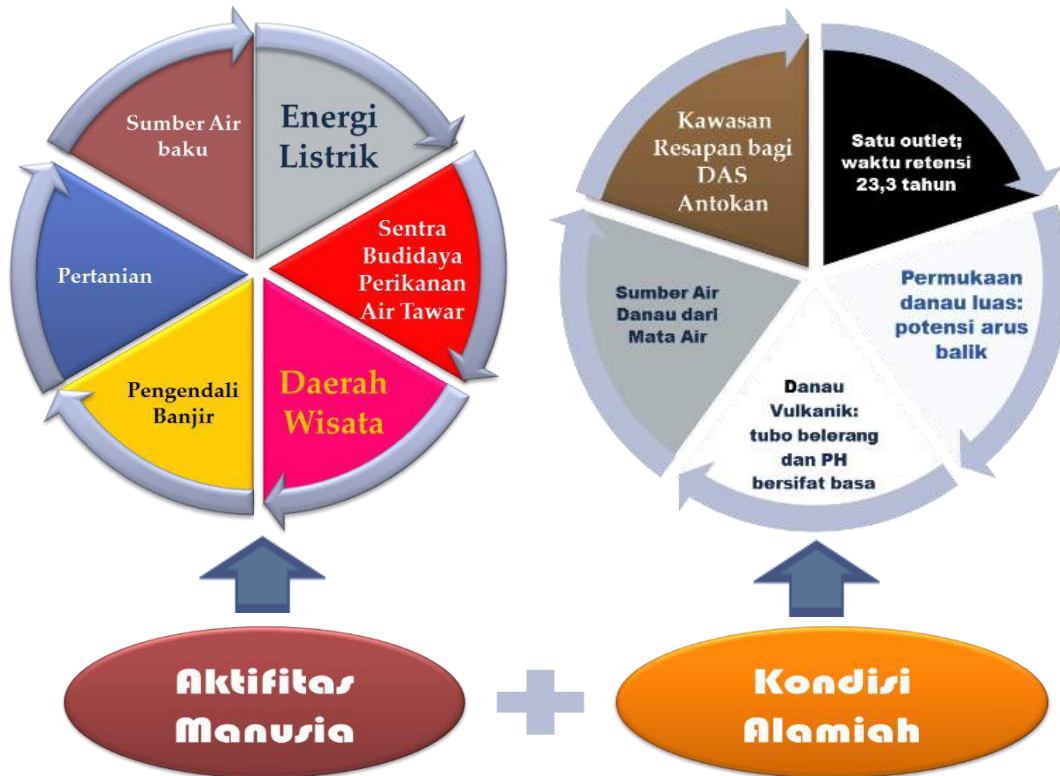
Sumber: olahan Tabel-17 Buku Data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Gambar 3.14. Kontur Danau Maninjau



Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Gambar 3.15. Pemanfaatan Danau Maninjau dan Kondisi Alamiah



Dampak Aktifitas

Positif:

PLN

- Kawasan Strategis Prop
- Pengembangan Sumber Energi terbarukan (PLTMH)

Kawasan Wisata

- 5 Danau terindah didunia;
- Obyek Wisata
- Sektor ekonomi (perhotelan)

Perikanan Keramba

- Peningkatan Kesejahteraan
- Target Minapolitan

Negatif:

PLN

- Mengubah sistem hidrologi : dari aliran di atas permukaan menjadi 6-10 m di bawah permukaan

Kawasan Wisata

- Limbah cair hotel
- Sampah padat

Perikanan Keramba

- Pencemaran Air;
- Penurunan Nilai Estetika;
- Punahnya ekosistem endemis;
- Air bersifat korosif
- Blooming Algae;
- Sedimentasi;
- Sampah : Bangkai Ikan, Limbah Pelet, Sisa Jaring Apung, Sisa Drum,dll



3.2.2.3 Kondisi Air Sumur

Kualitas air sumur dalam hal ini sumur gali sangat dipengaruhi aktifitas domestik. Di samping itu, aktifitas manusia lainnya seperti pertanian/perkebunan, peternakan, industri dan pertambangan, juga dapat mempengaruhi kualitas air sumur. Kondisi alami seperti kandungan mineral bebatuan dan tanah, juga turut andil mempengaruhi kualitas air sumur.

Dari hasil pemantauan terhadap kualitas air sumur yang dilakukan oleh perusahaan antara lain PT. AMP *Plantation* Kabupaten Agam, PT. Binapratama Sakatojaya Kabupaten Dharmasraya, PT. Bintara Tani Nusantara, Kabupaten Pasaman Barat, PT. Kencana Sawit Indonesia, Kabupaten Solok Selatan, PT. Perkebunan Nusantara VI Kabupaten Solok Selatan, PT. Tindar Kerinci Agung Kabupaten Dharmasraya, PT. Sumatera Andalas Kencana Sawit Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan bahwa hasil analisis laboratorium untuk semua parameter yang diuji kadarnya masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan (berdasarkan Baku Mutu PP No.82 Tahun 2001,

Kualitas Air, Kelas II), *sumber : olahan data Tabel 19 Buku Data DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016*. Semua perusahaan tersebut adalah objek PROPER yang terus didorong untuk melakukan pengelolaan limbah cairnya sehingga tidak mencemari lingkungan.

3.2.2.4. Kondisi Air Laut

Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuh kabupaten/kota yang mempunyai wilayah pesisir pantai dengan panjang garis pantai 2.420 km, yang memanjang dari Kabupaten Pesisir Selatan hingga Kabupaten Pasaman Barat serta Kabupaten Kepulauan Mentawai. Garis pantai yang cukup panjang selain dari Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan diikuti oleh Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan yang terpendek adalah garis pantai Kota Pariaman.

Pembangunan wilayah pesisir dan laut Provinsi Sumatera Barat pada hakekatnya adalah memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki taraf



hidup masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan memenuhi kesempatan kerja.

Berbagai permasalahan telah dan akan terjadi pada kawasan pesisir dan lautnya. Secara umum ekosistem tersebut telah mengalami degradasi akibat eksploitasi yang berlebihan dan destruktif yang tidak mengindahkan aspek - aspek konservasi. Sejalan dengan keadaan tersebut, adanya pemukiman nelayan dan pemukiman penduduk lainnya didaerah pantai berkontribusi secara langsung terhadap pencemaran pantai yang lebih lanjut akan mempengaruhi kawasan pesisir dan laut. Limbah domestik yang dihasilkan dari permukiman mengakibatkan degradasi lingkungan pantai.

Bukan hanya limbah domestik dari pemukiman masyarakat, limbah yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata di daerah

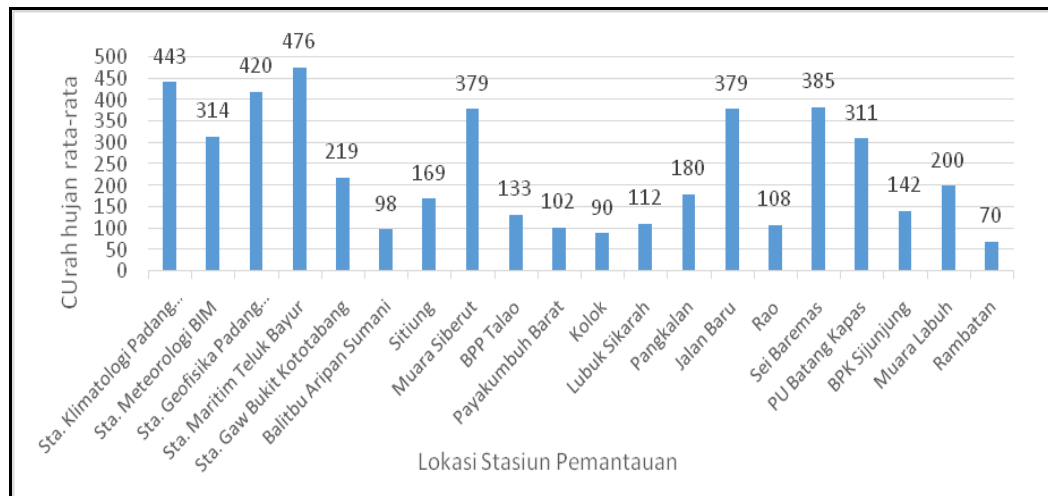
pesisir laut juga turut berkontribusi mencemari wilayah pantai, sementara itu limbah cair maupun padat yang berasal dari aktivitas kapal turut memperparah kondisi perairan laut, terutama di daerah pelabuhan.

3.2.2.5. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan

Selama Tahun 2016 curah hujan rata-rata bulanan (dalam seTahun) tertinggi terdapat di Kota Padang (Sta. Maritim Teluk Bayur), sebesar 472 mm. Sedangkan curah hujan rata-rata bulanan terendah berada di Kabupaten Pasaman (Sta. Rao), sebesar 124 mm, sebagaimana Gambar 3.16. di bawah:



Gambar 3.16. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan



Sumber: olahan tabel 17 Dokuemn IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

3.2.3. Upaya Pengelolaan Lingkungan terhadap Isu Kondisi Kualitas Air (Response)

3.2.3.1. Response Kualitas Air Sungai

Pembahasan sungai sebagai salah satu komponen lingkungan memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia, termasuk menunjang pembangunan ekonomi, seperti perikanan, energi, pariwisata, transportasi, pertambangan, pertanian, dan tempat pembuangan limbah. Akibat laju pertumbuhan penduduk dan kemajuan dibidang industri dan transportasi, sungai menanggung beban pencemaran yang semakin berat.

Dengan ditetapkan Sungai Batang Agam sebagai *baseline* dan dasar perhitungan pencapaian target indikator IPA, mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilintasi Sungai Batang Agam, untuk melakukan upaya pengelolaan /pengendalian kualitas air sungai Batang Agam sehingga kualitasnya tidak terus menurun.

Untuk mengatasi agar kualitas air Sungai Batang Agam tidak terus menurun, maka diperlukan program terpadu yang dapat dijadikan model untuk mengendalikan sekaligus memulihkan kualitas air sungai yaitu dengan menetapkan Sungai Batang Agam sebagai sungai target program terpadu/model pemulihan



pengendalian pencemaran sungai perkotaan dengan orientasi target pencapaian penurunan beban pencemaran, melalui upaya penyadaran terhadap masyarakat dan inventarisasi sumber pencemar.

Pada Tahun 2016, Bapedalda Sumatera Barat telah melakukan beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi, dalam rangka program terpadu/model pemulihan dan pengendalian pencemaran sungai perkotaan dengan orientasi target pencapaian penurunan beban pencemaran, antara lain:

1. Membentuk klaster pengelolaan sampah disempadan Sungai Batang Agam.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi pemulihan Sungai Batang Agam.
3. Penyerahan peralatan pemulihan Sungai Batang Agam, seperti Alat Pengolah Sampah Dapur (*Solar Biodigester*).
4. Gotong royong di lokasi klaster.
5. Pendampingan yang dilakukan oleh LSM dalam hal pengelolaan bank sampah.
6. Penandatanganan Kesepakatan /MoU Bersama antara Pemerintah Provinsi (Gubernur)

dengan Pemerintah 4 (empat) Kabupaten/Kota pada DAS Batang Agam (Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh). Adapun tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Menurunkan beban pencemaran sungai Batang Agam dari sampah domestik, limbah industri, perhotelan, pasar dan rumah makan.
- b. Menjadi contoh atau model dalam pengelolaan sungai-sungai di Provinsi Sumatera Barat.
- c. Meningkatkan kinerja para pihak/*stakeholder* terkait dalam rangka pengendalian pencemaran air untuk mendukung program pembangunan di Sumatera Barat.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, diharapkan kepada pemerintah kabupaten/kota agar memiliki program-program terkait, diantaranya:

1. Pembuatan IPAL komunal
2. Pengadaan Bank Sampah



3. Penyediaan peralatan pengolah limbah domestik, misalnya komposter dan *biodigester*.

Kepada Instansi Pengelola Lingkungan Hidup (kab/kota terkait), diharapkan untuk melakukan

bimbingan dan sosialisasi lebih intensif dalam hal pengelolaan lingkungan kepada pemilik kegiatan/usaha khususnya yang limbah pembuangannya ke media sungai.

Gambar 3.17. Gotong Royong Bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota Bukittinggi dengan Dinas Instansi/Terkait dan Masyarakat di Batang Agam



Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Pencemaran air sungai, di samping disebabkan oleh limbah domestik, industri/pabrik juga turut berkontribusi mencemari sungai melalui limbah yang dibuang ke media lingkungan, baik industri yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) maupun yang tidak memiliki IPAL. Di Sumatera Barat, melalui Program PROPER (Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan) dan PROPER Daerah, industri didorong dan diwajibkan untuk melakukan pengelolaan air

limbahnya melalui IPAL sebelum dibuang ke media lingkungan. Bagi perusahaan yang terbukti melakukan buangan langsung limbahnya, akan dikenai sanksi berupa sanksi administrasi maupun biaya pemulihan, seperti yang terjadi pada 2 (dua) perusahaan di Sumatera Barat yang membayar denda akibat limbah industri. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan penegakan hukum bagi industri tetap berjalan sebagaimana mestinya.

3.2.3.2. Response Kualitas Air Danau

Terkait upaya pengelolaan terhadap isu pencemaran khususnya air danau, diperlukan tindakan konservasi sumber daya air danau untuk menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas air danau untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup (manusia, flora dan fauna) secara berkesinambungan, serta upaya pengendalian bencana alam yang terjadi atau diakibatkan oleh sumber daya air danau tersebut.

Upaya konservasi terhadap sumber daya air danau dilakukan untuk menjaga kelangsungan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air danau, antara lain dengan cara pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemarannya.

Tindakan konservasi sumber daya air danau dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dalam kerangka Peningkatan Konservasi Kualitas Air Danau di Provinsi Sumatera Barat,

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat

antara lain telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan kualitas air Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas dan Danau Dibawah.
2. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam rangka kegiatan Gerakan Penyelamatan Ekosistem Danau (GERMADAN) kerjasama antara Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK).
3. Menghadiri undangan KLHK dan SKPD – SKPD Provinsi dan Kabupaten dalam kegiatan pengelolaan danau di Sumatera Barat.
4. Mengikuti koordinasi pelaksanaan kegiatan SKPD Provinsi yang ada di kawasan danau di Sumatera Barat.
5. Mengikuti kegiatan/seminar/ sosialisasi penyelamatan ekosistem danau yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ditingkat nasional maupun di tingkat daerah.



6. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosial kerjasama LSM, Tim Pengelola Kawasan Danau Singkarak Berbasis Nagari, dan Badan Pengelola Danau Maninjau.
7. Tahun 2016, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat mengikuti Acara Konferensi Danau Sedunia yang ke 16 di Bali yang menghasilkan rekomendasi hal-hal strategis yang harus dilakukan dalam menjaga kelestarian ekosistem danau.

Gambar 3.18. Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Danau Diatas dan Dibawah



Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Khusus terhadap Danau Maninjau, upaya penanganannya, antara lain:

1. Perbaikan *Catchment Area*

Melalui program Agam Menyemai (2010 s/dsekarang):

- a. bukit: tanaman hutan yang memiliki nilai ekonomis dan dipelihara masyarakat, seperti jengkol, petai, damar, dan lain-lain
- b. lereng: cengkeh, pala, durian,

dan lain-lain

- c. areal perkampungan : buah-buahan seperti manggis, pokat dan lain-lain

Rencana/Agenda ke depan :

- ✓ Normalisasi Sungai
- ✓ Terasering
- ✓ Rehabilitasi hutan

Tabel 3.4. Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam

No.	Kegiatan	Tahun	Luas/unit
1.	Pembuatan Hutan Rakyat	2012	100 ha
2.	Kebun Bibit Rakyat	2012	3 unit
3.	Pembuatan Hutan Rakyat	2013	50 ha
4.	Pembuatan Hutan Rakyat	2014	40 ha
5.	Reboisasi	2014	200
6.	Kebun Bibit Rakyat	2014	2 unit
7.	Pembuatan Hutan Rakyat	2016	50 ha
8.	Penanaman Daerah Tangkapan air Danau Maninjau	2016	55 ha

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten Agam, 2016

2. Pengaturan Pintu Air PLTA

Dalam rangka menjaga aliran alami dari Danau Maninjau ke sungai Batang Agam, telah dilakukan :

- a. Koordinasi dengan pihak PLTA Maninjau
- b. Pembukaan pintu air

Agenda ke depan:

- a. Evaluasi elevasi air pada pintu air PLTA
- b. Kesepakatan tentang pengaturan pembukaan pintu air secara berkala antara Pemda dan PLTA
- c. Kajian kelaikan pemanfaatan air.

3. STOP KJA Baru ;

- a. Surat Edaran Bupati Agam No. 533.2/611/DKP-AG/IV/2016 Tanggal 11 April 2016 Tentang Penambahan KJA
- b. Surat Edaran Bupati Agam

No. 523.2/1229/DKP-AG/IX/2016 Tanggal 5 September 2016 Tentang Penambahan KJA

4. Pengurangan KJA:

- a. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.34/MenLHK/PPKL/PKL.2/1/2017 Perihal Penanganan Lingkungan Danau Maninjau (Penghentian Sementara aktivitas KJA)
- b. Surat Wakil Bupati Agam No. 660.1/113/DLH-PKSDA/2017 Tanggal 7 Februari 2017 kepada 8 Wali Nagari Perihal Pemulihan Danau Maninjau
- c. Inisiatif Pengurangan Keramba oleh Petani KJA
- d. Pendekatan secara persuasif terhadap Pengusaha Pakan dan Investor KJA

- e. Moratorium KJA
- f. Sosialisasi dan Edukasi dengan Petani KJA, Pengusaha Pakan, MUI
- g. Pertemuan dengan Wali Nagari Salingka Danau

Diharapkan dari 17.226 petak KJA berkurang menjadi 6.000 petak (Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014)

5. Pembersihan Permukaan Danau

Yang telah dilakukan:

- a. Gotong royong 1 x 1,5 bulan yang telah dilaksanakan 4 kali
- b. Pembentukan Satgas Danau Maninjau (10 Orang)
- c. Hasil Evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pembersihan manual belum efektif, sehingga diperlukan penambahan sarana dan prasarana pendukung karena laju pencemaran lebih besar dari laju pengendalian

Agenda ke depan:

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional (butuh dukungan anggaran)
- b. Integrasi Muatan Lokal

tentang *Save Maninjau* dan 3R (*reduce, reuse, recycle*) di Sekolah

- c. Pengembangan Pengelolaan Sampah berbasis 3R dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media *audio visual* (film, video, dll) berbasis kearifan lokal
- d. Pengembangan Program Sanitasi Masyarakat/Sanimas (IPAL Komunal dan Program 1000 jamban)

6. Pengerukan dan/penyedotan dan/bioremediasi ;

Yang telah dilakukan:

- a. Sebanyak 50.846.902 m³/Tahun (BWSS V)
- b. Penyedotan menggunakan pompa hisap banjir, air yang tersedot > viskositas sedimen
- c. Pengerukan
- d. Penyedotan
- e. Bioremediasi

7. Transformasi Ekonomi

Yang telah dilakukan:

- a. Program Inovatif : Agam Menyemai
- b. Budidaya udang galah
- c. Pengembangan perikanan keramba air deras
- d. Pengembangan kawasan



- jagung dan bawang merah
- e. Pengembangan Tanaman Hutan dan Perkebunan (*Multi Purpose Tree Species*)
- f. Peningkatan ketahanan UMKM
- g. Pengembangan Ekonomi Kreatif : pengolahan eceng gondok menjadi tikar

8. Penyelamatan Biota Endemis Danau Maninjau

Yang telah dilakukan:

- a. Konservasi DAS Antokan
- b. Pemijahan dan *Restocking* ikan-ikan yang langka dan hampir punah
- c. Memelihara keseimbangan ekosistem
- d. Memperbaiki jalur migrasi ikan dari sungai ke danau
- e. Mewujudkan Kawasan Konservasi Perairan
- f. Pemanfaatan danau sesuai dengan daya dukung dan daya tampung

9. Penguatan Regulasi

Yang telah dilakukan:

- a. Peraturan Bupati Agam No. 620 Tahun 2009 tentang Badan Pengelola Kawasan Danau Maninjau
- b. Peraturan Bupati Agam No.

22 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Danau Maninjau

- c. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau

Agenda ke depan:

- a. Penyusunan Peraturan Bupati Agam tentang KJA Ramah Lingkungan (terkendala zonasi)
- b. Penyusunan Peraturan Bupati Agam tentang Tata Cara Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengelolaan Danau Maninjau
- c. Penyusunan Peraturan Bupati Agam tentang Lembaga Pengelola Kelestarian Danau Maninjau
- d. Penyusunan Dokumen AMDAL Kawasan Danau Maninjau

10. Penguatan Kelembagaan

Yang telah dilakukan:

- a. Pembentukan Satgas Kebersihan Danau Maninjau (sudah terbentuk)
- b. Pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Pencemaran
- c. Pembentukan UPT Pengelolaan Danau Maninjau



3.2.3.3. Response Kualitas Air Sumur

Kualitas air sumur dapat diketahui dari hasil pemantauan (pengambilan sampel air sumur). Pemantauan air sumur dilakukan oleh perusahaan-perusahaan peserta objek PROPER. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat melalui program PROPER, terus mendorong perusahaan yang menjadi objek PROPER untuk terus dan tetap melakukan pengelolaan limbah cairnya sehingga tidak mencemari lingkungan, termasuk melakukan pemantauan terhadap kualitas air sumur pada 3 (tiga) lokasi sampling.

Dari hasil analisis laboratorium untuk semua parameter yang diuji, kadarnya masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan (berdasarkan Baku Mutu PP No.82 Tahun 2001 Kualitas Air, Kelas II), *sumber: olahan data Tabel 19 Buku Data DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016.*

3.2.3.4. Response Kualitas Air Laut

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi pada kawasan pesisir dan laut di Provinsi Sumatera

Barat, seperti yang telah disebutkan pada bagian tekanan /kondisi air laut, maka Bapedalda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemantauan kualitas air laut setiap Tahunnya yang dapat digunakan untuk menyusun ke-bijakan terkait pelestarian wilayah pesisir laut serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan laut.

Secara umum dari hasil pemantauan kualitas air laut dan muara sungai pada setiap lokasi pemantauan memiliki kandungan amoniak, nitrat, posfat dan total coliform yang telah melewati batas baku mutu yang telah ditetapkan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut dan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat. Dibandingkan dengan data Tahun 2015 dan Tahun 2016, untuk air laut terjadi peningkatan nilai pada parameter TSS, COD dan Posfat. Dan untuk air muara sungai, terjadi peningkatan kadar parameter TSS, Amoniak, Nitrat dan Posfat. Sumber pencemar



dominan pada objek pemantauan antara lain limbah domestik dari pemukiman penduduk, aktivitas wisata dan kapal nelayan.

Disamping pemantauan kualitas air laut yang telah dilakukan, upaya lainnya yang telah dilakukan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dalam kaitannya dengan kualitas air laut antara lain:

1. Membuat arahan tindak lanjut kepada Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir laut untuk melakukan pemantauan sesuai dengan Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut dimana Gubernur, Bupati/Walikota wajib melaksanakan kegiatan pemantauan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memperoleh data potensi dan kerusakan kawasan pesisir laut di Sumatera Barat serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka konservasi wilayah pesisir laut.

3.3. Kualitas Udara

Pada sub bab kualitas udara akan dibahas kualitas udara sesuai dengan PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan parameter pendukung seperti suhu, kualitas air hujan serta tekanannya sebagaimana Tabel 28 s/d 33 serta kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi kualitas udara di Sumatera Barat seperti peristiwa kebakaran hutan, timbulan sampah, pertanian, *illegal logging*, industri dan aktifitas rumah tangga.

Kualitas udara merupakan salah satu komponen penting dalam penentuan kualitas lingkungan hidup. Saat ini di Indonesia metode yang digunakan untuk menjelaskan dan menginformasikan kondisi dan perubahan kualitas udara suatu daerah adalah dengan perhitungan indeks kualitas udara. Indeks kualitas Udara (IKU) di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 adalah 82,9. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat baik ($82 < x \leq 90$). Namun meskipun demikian, seiring dengan pesatnya pembangunan serta aktifitas perekonomian, maka ancaman penurunan kualitas udara juga semakin meningkat jika tidak diantisipasi



dengan berbagai kebijakan dari sektor-sektor terkait. Penyebab dari menurunnya kualitas udara adalah terjadinya pencemaran udara.

3.3.1 Isu dan Tekanan Terhadap Udara

Berdasarkan hasil penjarangan, kualitas udara bukan merupakan isu prioritas di Sumatera Barat. Namun dengan penambahan jumlah penduduk dan kebutuhan akan kendaraan serta timbulan sampah akan memberikan tekanan terhadap kualitas udara yang kalau tidak dicermati akan menurunkan kualitas udara di Sumatera Barat. Adapun sumber tekanan yang menghasilkan polutan pencemar udara adalah

1. Aktifitas lalu lintas

Pada era modern saat ini kendaraan sudah menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan aktifitas dan kegiatan sehari-hari. Disamping penggunaan transportasi umum, masyarakat juga memilih untuk memiliki kendaraan sendiri seperti mobil dan motor. Jumlah pemakaian kendaraan bermotor dari Tahun ke Tahun semakin meningkat. Hal ini tidak saja meningkatkan kemacetan lalu lintas, namun juga berdampak pada peningkatan polusi udara.

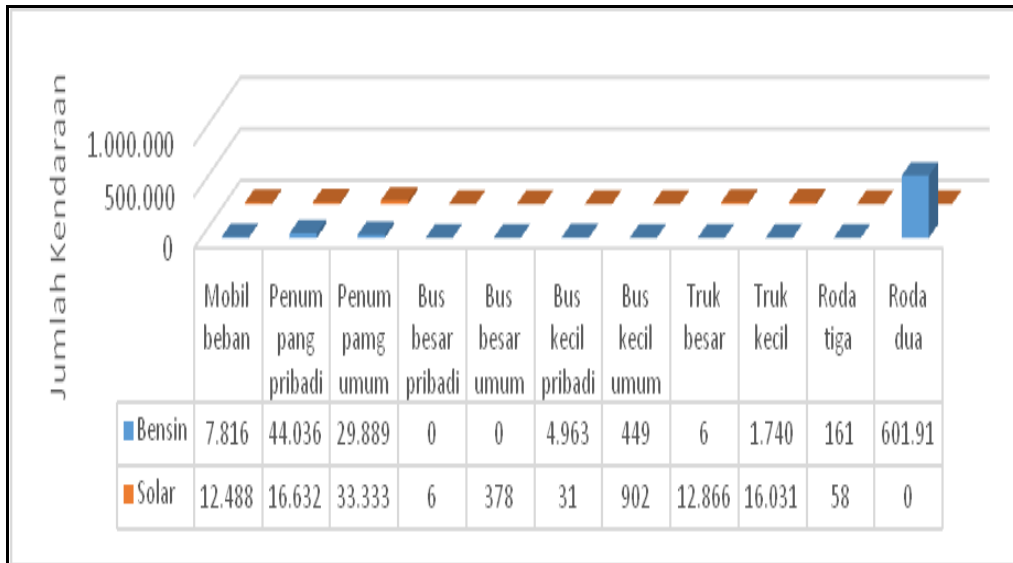
Berdasarkan hasil penelitian, alat transportasi memberikan sumbangan polusi udara hampir mencapai 70% sedangkan 20% bersumber dari proses industri dan sisanya dari sampah domestik dan rumah tangga (JICA 1996).

Aktivitas kendaraan bermotor dewasa ini merupakan sumber utama penyebab pencemaran udara, terutama di daerah perkotaan. Aktifitas transportasi memberikan sumbangan terbesar untuk partikulat, timbal, CO, HC dan NO_x dengan konsentrasi tertinggi terdapat di daerah yang padat lalu lintas (macet).

Penjualan kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat setiap Tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Hal yang menarik adalah adanya kenaikan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi, terutama kendaraan roda dua. Dengan beralihnya masyarakat dari kendaraan umum ke kendaraan pribadi (mobil dan motor), maka lalu lintas menjadi semakin padat dan hal ini tentu saja menambah emisi polutan ke udara. Tahun 2016 jumlah kendaraan terbesar ini adalah kendaraan roda dua, yaitu sebesar 601.917 unit.

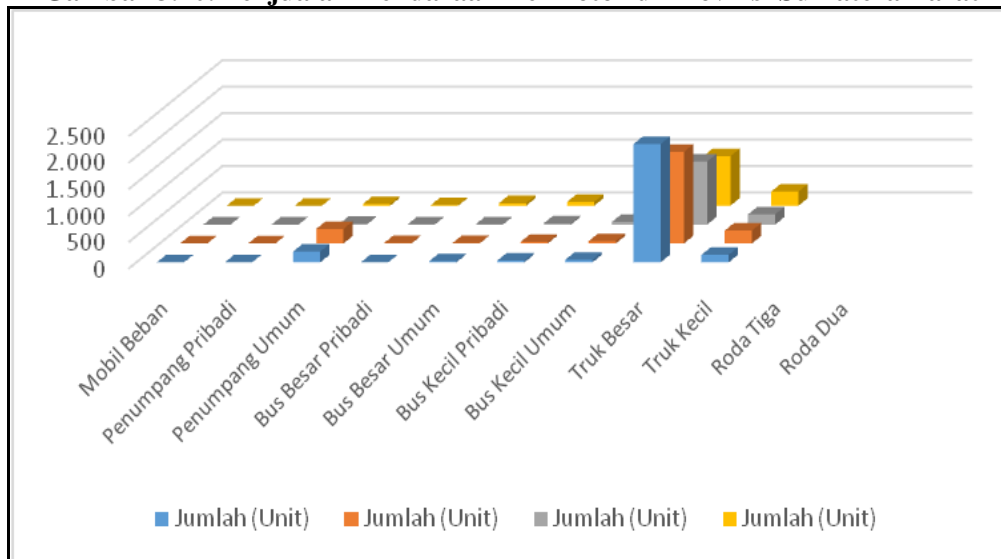


Gambar 3.19. Jumlah Kendaraan Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar Yang Digunakan



Sumber : Olahan Tabel 31 Data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Gambar 3.20. Penjualan Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Olahan Tabel 32 Data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Apabila dilihat dari penambahan ruas jalan, pada Tahun 2013-2015 tidak terdapat penambahan ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat terlihat

pada Tabel 3.5 berikut. Tabel tersebut menampilkan bahwa jenis jalan di Sumatera Barat adalah jalan kelas III B dengan panjang 1.230,53 km.

Tabel 3.5. Perubahan Penambahan Ruas Jalan di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Jalan	Panjang Jalan (km)		
		2013	2014	2015
1.	Jalan Tol	-	-	-
2.	Jalan Kelas I	-	-	-
3.	Jalan Kelas II	-	-	-
4.	Jalan Kelas IIIA	-	-	-
5.	Jalan Kelas IIIB	1.230,53	1.230,53	1.230,53
6.	Jalan Kelas IIIC	-	-	-

Sumber : Olahan Tabel 33 Data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

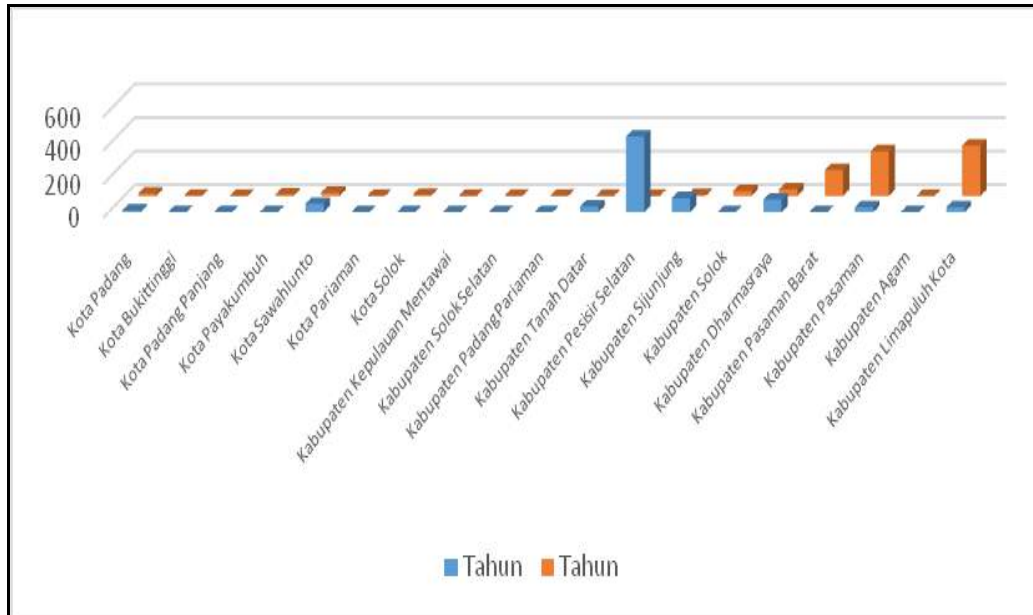
2. Kebakaran lahan dan hutan

Kebakaran lahan dan hutan dapat disebabkan oleh proses alami akibat kekeringan pada musim kemarau serta juga akibat pembukaan lahan yang dilakukan oleh peladang berpindah dan perusahaan agro-industri. Polusi udara yang diakibatkan oleh terjadinya kebakaran hutan memiliki dampak yang sangat besar, karena bisa menyebar ke berbagai daerah dan bahkan hingga ke negara tetangga.

Berdasarkan data dari Gambar 3.21 dapat diketahui bahwa luas

kebakaran lahan dan hutan di Sumatera Barat pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 tidak terlalu signifikan. Jumlah total area yang mengalami kebakaran pada Tahun 2015 dan 2016 adalah 764 Ha dan 845,18 Ha. Kebakaran lahan dan hutan terbesar pada Tahun 2015 adalah di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu seluas 450 Ha dan pada Tahun 2016 di Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 300 Ha.

Gambar 3.21. Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan di Sumatera Barat Pada Tahun 2015-2016

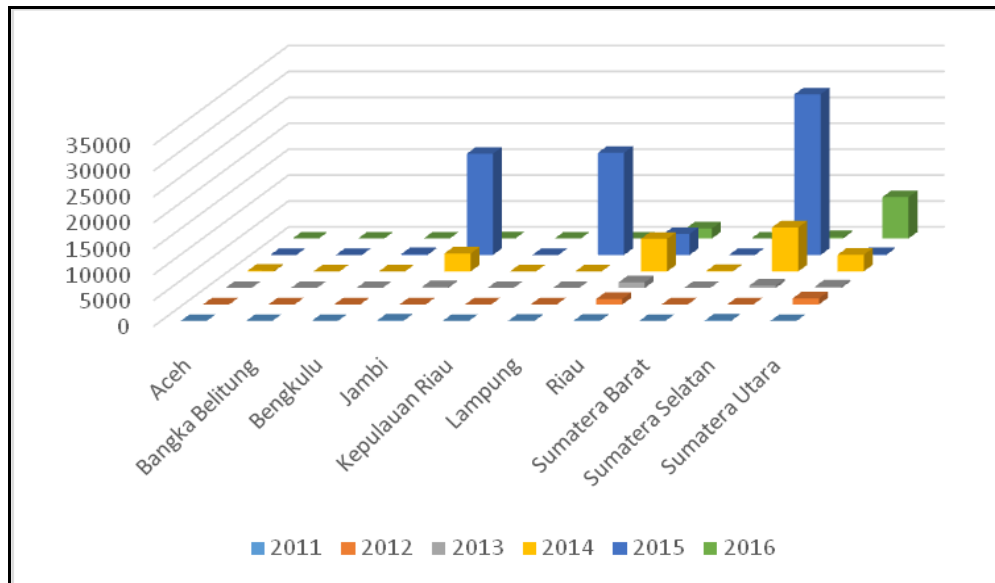


Sumber : Olahan Tabel 39 Data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Namun hal yang patut diwaspadai adalah kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga. Gambar 3.22 mengilustrasikan bahwa kebakaran hutan terparah terjadi pada Tahun 2015 dengan provinsi yang mengalami kebakaran lahan terluas terdapat di Provinsi Sumatera Selatan (30.984,98 Ha), diikuti oleh Lampung (19.695,86 Ha), Jambi (19.528 Ha) dan Riau (4.040,5 Ha). Pada Tahun 2016, kebakaran hutan tetap terjadi, namun

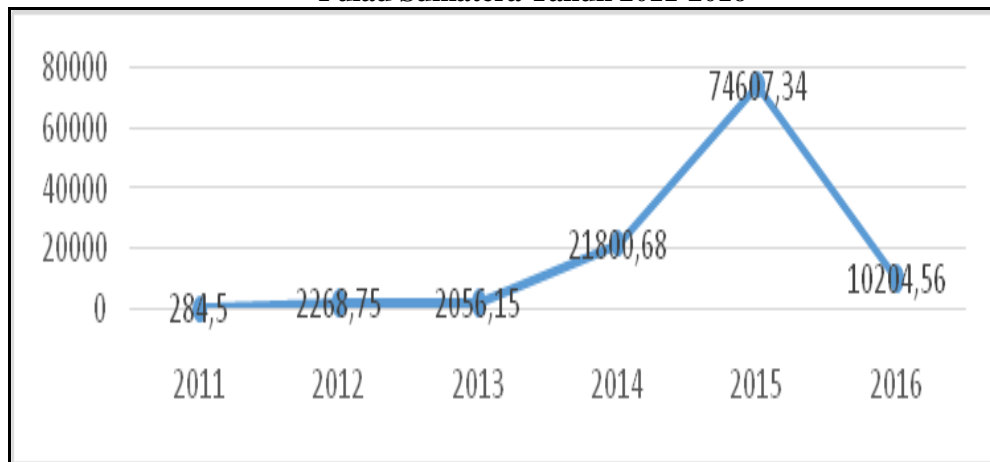
tidak separah kejadian pada Tahun 2015. Kebakaran hutan paling luas terdapat di Provinsi Sumatera Utara (7.973,01 Ha). Kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi tetangga cukup memberikan dampak polusi udara yang luar biasa di Sumatera Barat, terutama pada Tahun 2015. Asap pekat menyelimuti hampir seluruh wilayah Sumatera Barat yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Gambar 3.22. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Sumatera Tahun 2011-2016



Sumber : Olahan Tabel SiPongi MenLHK, 2016

Gambar 3.23. Perbandingan Total Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Pulau Sumatera Tahun 2011-2016



Sumber : Olahan Tabel SiPongi MenLHK, 2016

Dari Gambar 3.23 dapat dilihat bahwa dari Tahun 2011 sampai 2015 jumlah kebakaran hutan dan lahan cenderung meningkat, namun pada Tahun 2016 jumlahnya mengalami penurunan. Kebakaran hutan dan lahan bersifat situasional,

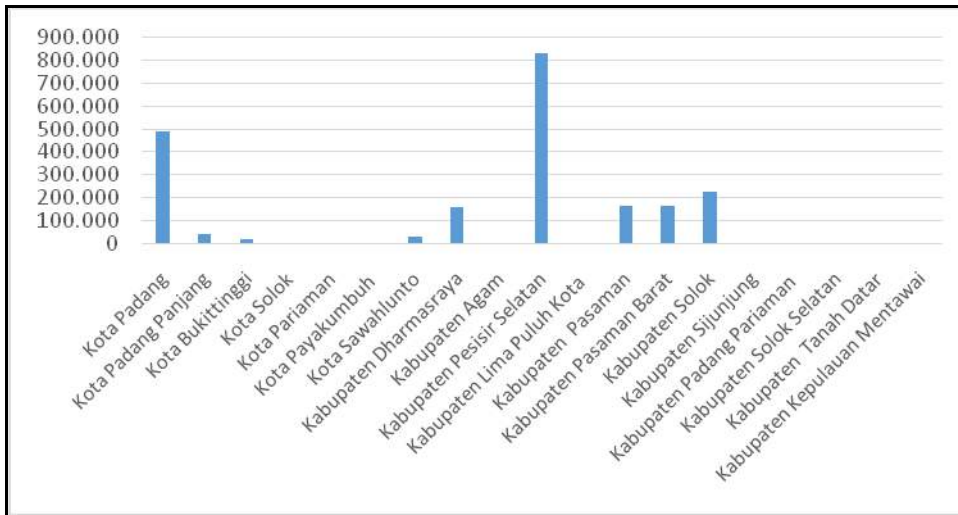
sehingga walaupun pada Tahun 2016 luas area hutan dan lahan yang terbakar mengalami penurunan, namun upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan tetap harus menjadi prioritas pemerintah.

3. Timbulan sampah

Perkiraan timbulan sampah per hari di Sumatera Barat disajikan pada

Gambar 3.24 Timbulan sampah terbesar terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang.

Gambar 3.24. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Sumatera Barat

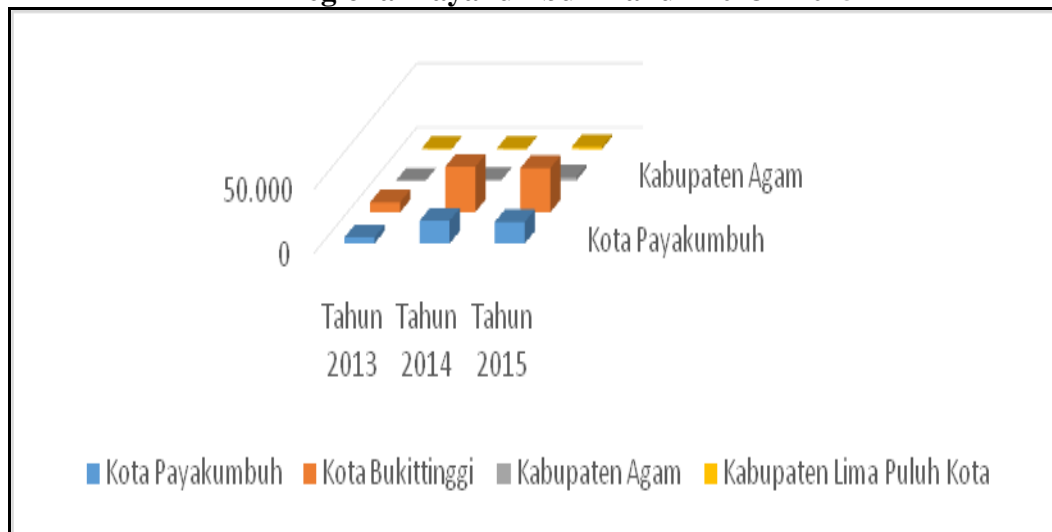


Sumber : Olahan Tabel 42 Data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Emisi sampah merupakan sumber pencemaran udara ke atmosfer. Sistem pengelolaan sampah di Sumatera Barat sebagian besar masih bersifat *open dumping* dengan membuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Menurut IPCC 2006 *Guidelines*, kontribusi gas rumah kaca (GRK) dari sistem *open dumping* adalah 3-4% dari emisi GRK global. Senyawa utama yang dihasilkan dari TPA adalah gas metana (CH₄), CO₂, CO, NO_x dan N₂O (sumber buku RAD-GRK Sumatera Barat 2012-2020).

Sumatera Barat memiliki dua TPA Regional, yaitu TPA Regional Payakumbuh dan TPA Regional Solok. Perbandingan jumlah timbulan sampah yang masuk pada TPA Regional Payakumbuh Tahun 2013 – 2015 dan TPA Regional Solok pada Tahun 2015 disajikan pada Gambar 3.25 dan Gambar 3.26 berikut.

Gambar 3.25. Perbandingan Jumlah Timbulan Sampah Yang Masuk Pada TPA Regional Payakumbuh Tahun 2013 - 2015



Sumber : UPTD TPA Sampah Regional Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat, 2016

Gambar 3.26. Perbandingan Jumlah Timbulan Sampah Yang Masuk Pada TPA Regional Solok



Sumber : UPTD TPA Sampah Regional Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat, 2016

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa TPA Regional Kota Payakumbuh menampung sampah dari beberapa Kabupaten/Kota di sekitarnya, antara lain Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh

Kota dan Kabupaten Agam. Sedangkan TPA Regional Solok menampung sampah dari Kabupaten Solok dan Kota Solok. Volume sampah yang cukup besar memasuki kedua TPA tersebut tentu saja dapat menimbulkan emisi gas polutan



pencemar udara yang besar ke lingkungan.

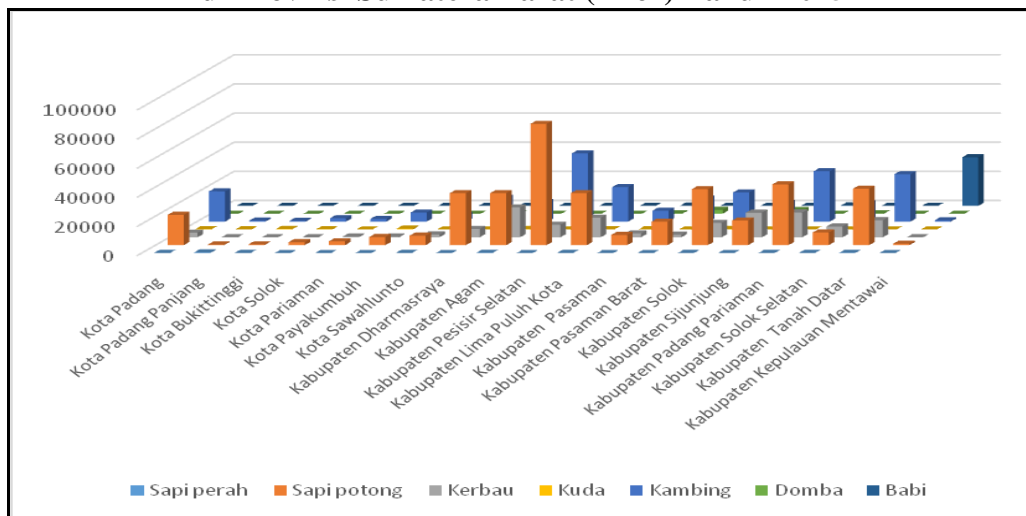
4. Pertanian

Sumber emisi dari aktifitas pertanian terdiri dari tiga kategori, yaitu dari peternakan, penggunaan pupuk dan sawah. Berdasarkan hasil proyeksi dan analisis yang terdapat dalam buku Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca Sumatera Barat Tahun 2012, sektor peternakan memberikan kontribusi terbesar ($\pm 80\%$) untuk emisi gas rumah kaca ke udara, lalu diikuti

oleh sawah ($\pm 16\%$) dan sisanya dari penggunaan pupuk.

Dari data jumlah populasi ternak pada Tahun 2015, jumlah hewan ternak terbesar adalah ayam ras pedaging dan ayam ras petelur di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah mencapai 5.714.129 dan 5.007.561 ekor serta ternak sapi potong dan kambing dengan jumlah terbesar terdapat pada Kabupaten Pesisir Selatan (83.277 dan 46.828 ekor).

Gambar 3.27. Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Barat (Ekor) Tahun 2015

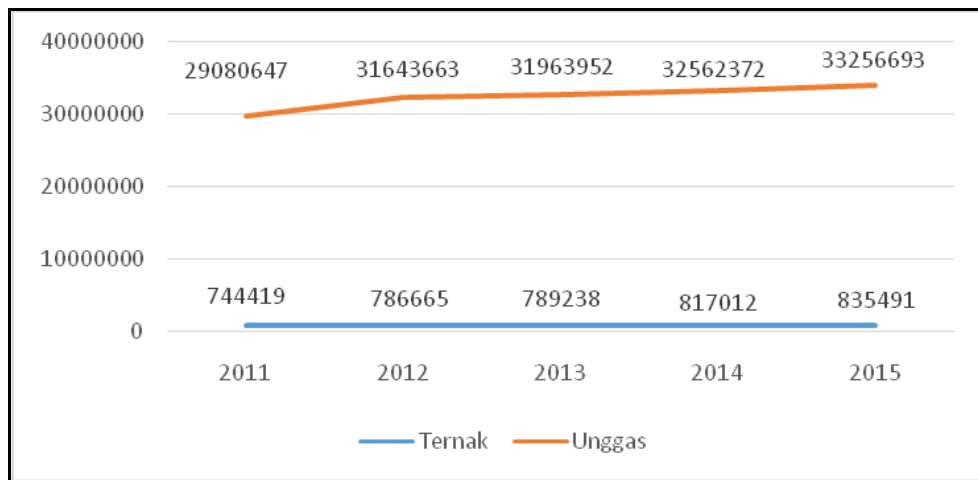


Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, 2016

Apabila dilihat trend data dari Tahun ke Tahun, populasi hewan ternak di Sumatera Barat cenderung naik, namun kenaikannya tidak signifikan. Hal tersebut bisa dilihat pada Gambar 3.28 berikut ini.

Berdasarkan Gambar 3.28 dapat disimpulkan bahwa laju kenaikan emisi dari sektor peternakan cukup rendah, namun meskipun demikian trendnya naik dari Tahun ke Tahun.

Gambar 3.28. Trend Populasi Ternak dan Unggas (ekor) di Sumatera Barat dari Tahun 2011-2015



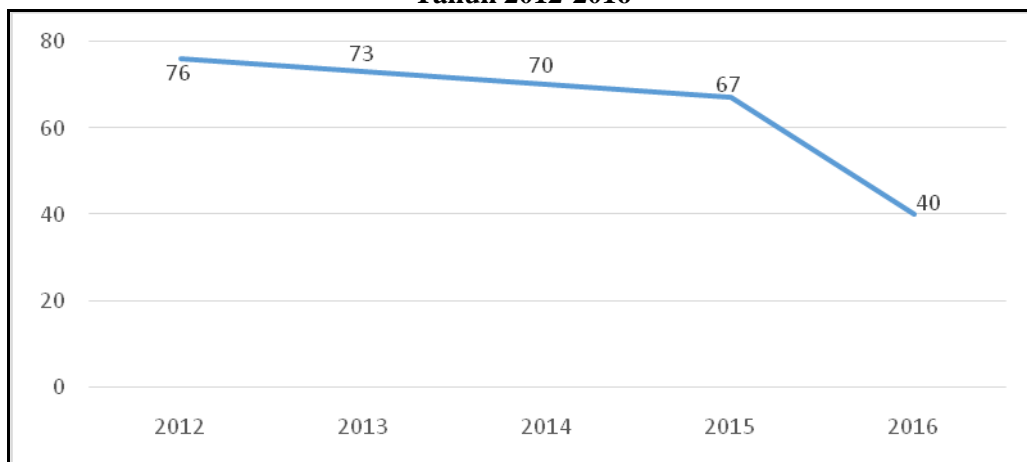
Sumber : Sumatera Barat dalam Angka, 2016

5. Kasus illegal logging atau penebangan liar

Kegiatan penebangan liar merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu dari hutan. Berdasarkan data dari hasil operasi intelijen, operasi represif, monev kasus dan tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan pada kegiatan

Pengamanan dan Perlindungan Hutan, data *illegal logging* di Provinsi Sumatera Barat disajikan pada gambar berikut. Dari gambar dapat disimpulkan bahwa trend kasus penebangan liar di Sumatera Barat cenderung turun dalam lima Tahun terakhir dan pada Tahun 2016 hanya terdapat 40 kasus.

Gambar 3.29. Jumlah Kasus Illegal Logging Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2016

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat

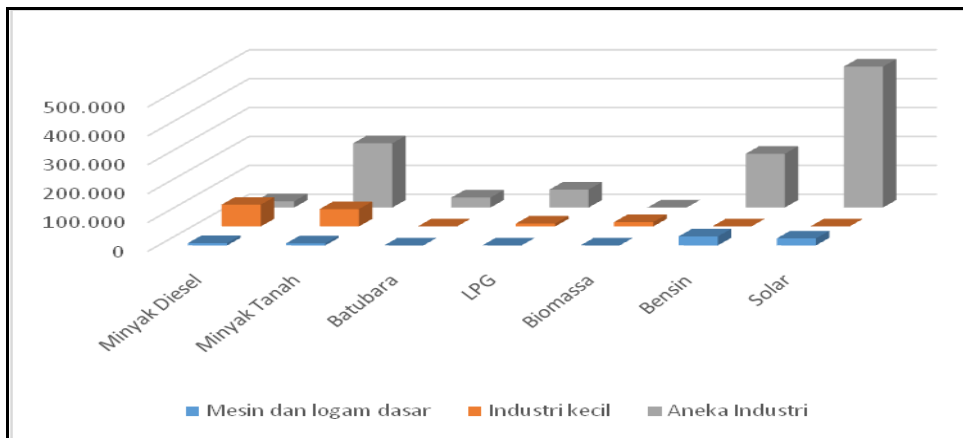


6. Industri

Pada umumnya sumber pencemaran udara akibat aktifitas industri adalah berasal dari penggunaan bahan bakar untuk sumber energi serta dari limbah yang

dihasilkan. Berdasarkan Gambar 3.30. di bawah, dapat diketahui bahwa sumber energi utama dari industri yang ada di Sumatera Barat adalah solar dengan konsumsi terbesar adalah oleh aneka industri.

Gambar 3.30. Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Sektor Industri Menurut Jenis Bahan Bakar

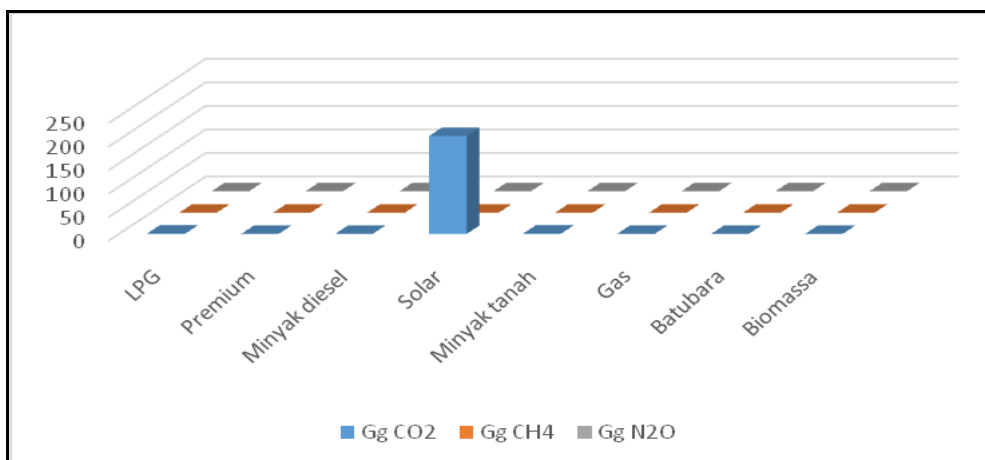


Sumber : Olahan Tabel 42 Data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Apabila dianalisis dari jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan, maka solar adalah penyumbang gas

karbon dioksida terbesar dari sektor industri. Pada Tahun 2015 jumlahnya mencapai 208,052 Gigagram CO₂.

Gambar 3.31. Jumlah Gas Rumah Kaca (Gg) Berdasarkan Jenis Bahan Bakar dari Sektor Industri

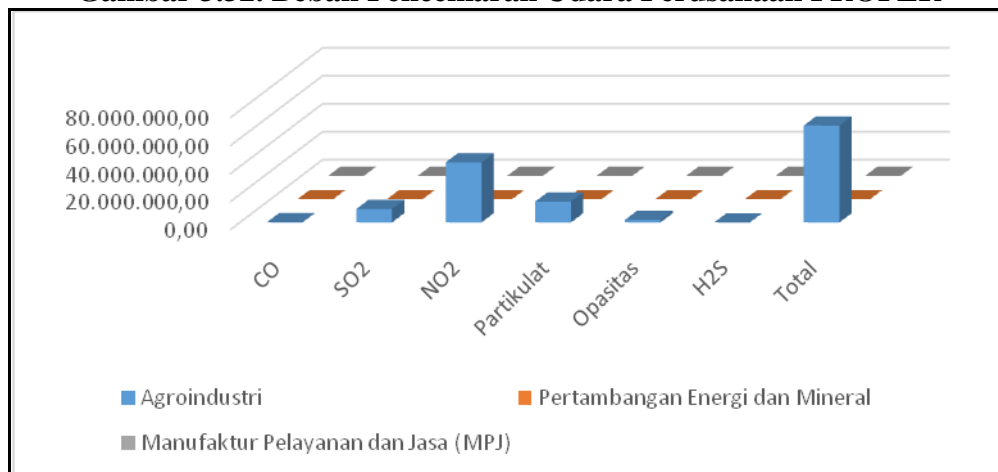


Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2015

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis industri yang memiliki beban pencemaran udara terbesar, digunakan data hasil penilaian PROPER di Sumatera Barat Tahun

2015. Berdasarkan data tersebut, beban pencemaran terbesar berasal dari sektor agroindustri dengan sumber pencemar terbesar adalah NO₂ dan partikulat.

Gambar 3.32. Beban Pencemaran Udara Perusahaan PROPER



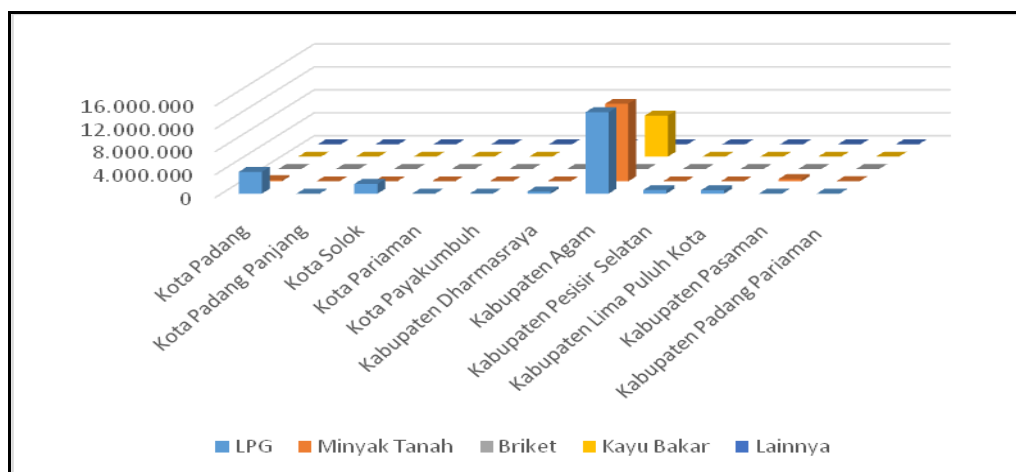
Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2015

7. Aktifitas Rumah Tangga

Konsumsi bahan bakar tertinggi terdapat di Kabupaten Agam dengan jumlah pemakaian terbesar adalah

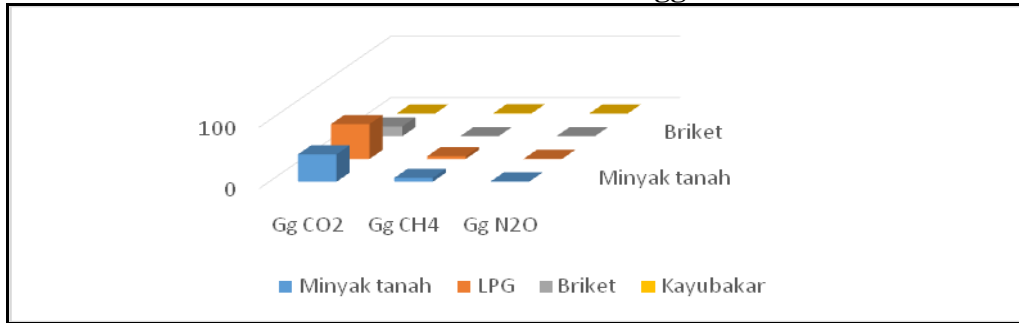
LPG, minyak tanah dan kayu bakar dengan emisi gas rumah kaca terbesar yang dihasilkan adalah gas CO₂.

Gambar 3.33. Konsumsi Bahan Bakar untuk Keperluan Rumah Tangga (L)



Sumber : SLHD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, 2015

Gambar 3.34. Jumlah Gas Rumah Kaca Berdasarkan Jenis Bahan Bakar dari Sektor RumahTangga



Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2015

3.3.2 Kondisi Udara dan Statusnya

3.3.2.1 Kualitas udara ambien

Pada Tahun 2016 telah dilakukan pemantauan kualitas udara ambien pada 21 (dua puluh satu) titik

di wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang lokasinya mewakili kawasan padat lalu lintas, kawasan permukiman dan kawasan industri sebagai Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Lokasi Titik Pengukuran Udara Ambien Sumatera Barat, 2016

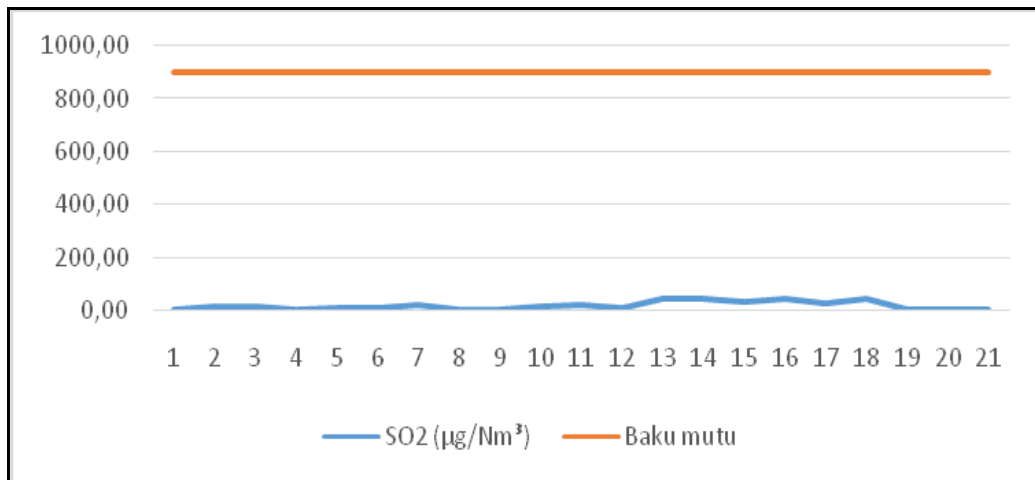
No.	Lokasi
1	Depan Pasar Sumani Kabupaten Solok
2	Depan Pelabuhan Tuapejat
3	Depan Kantor Lingkungan Hidup Pasaman
4	Bundaran Simpang Tiga Lubuk Basung
5	Depan Kantor Bupati Lima Puluh Kota
6	Depan RSUD Kabupaten Sijunjung
7	Tugu Monumen Polisi Polwan Bukittinggi
8	Lapangan Cindua Mato Batusangkar
9	Depan Kantor PSDA PU Kabupaten Pesisir Selatan
10	Depan Kantor Wali Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat
11	Halaman Masjid Al-Akhwan Sei. Rumbai Kabupaten Dharmasraya
12	Depan Masjid Nurul Iman Kota Padang Panjang
13	Depan UKM Kota Payakumbuh
14	Simpang Segitiga Depan Kantor Bukit Asam Kota Sawahlunto
15	Pasar Lubuk Alung
16	Lampu Merah Simpang Rumbio Kota Solok
17	Depan RPH Pasar Muaro Labuh Kabupaten Solok Selatan
18	Lampu Merah Simpang Lapai Kota Pariaman
19	Perumnas Siteba
20	Depan Kantor KAN Ulu Gadut
21	Simpang Lubuk Begalung ex Kantor Lurah Pitameh Tj. Saba

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Adapun hasil pengukuran kualitas udara ambien berdasarkan parameter, dapat dilihat dibawah ini yang menunjukkan seluruh parameter masih berada di bawah ambang batas, kecuali untuk parameter TSP pada dua titik melebihi baku mutu.

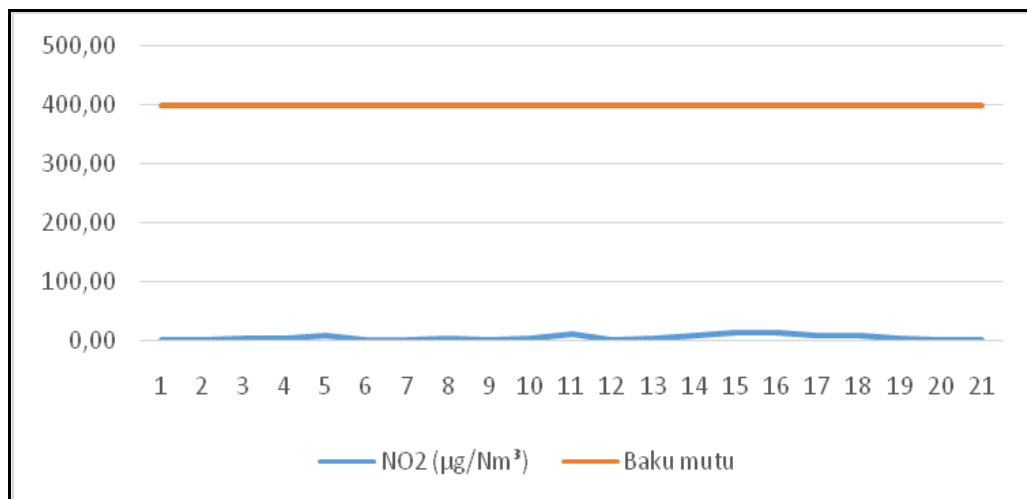
Adapun hasil pemantauan parameter SO₂, parameter NO₂, parameter O₃, parameter TSP, parameter Timbal dan parameter CO disajikan sebagaimana Gambar 3.35. sampai dengan Gambar 3.40. berikut :

Gambar 3.35. Hasil Analisis Parameter SO₂



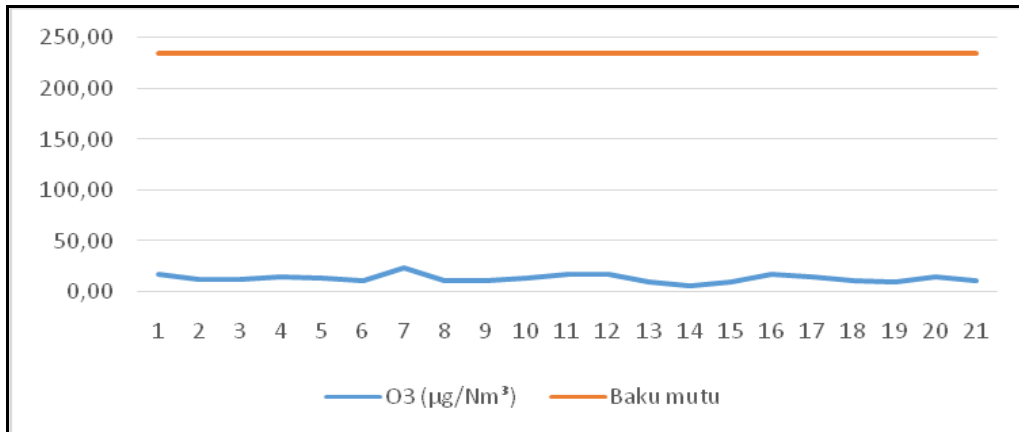
Sumber : Olahan Tabel 30 Buku Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Gambar 3.36. Hasil Analisis Parameter NO₂



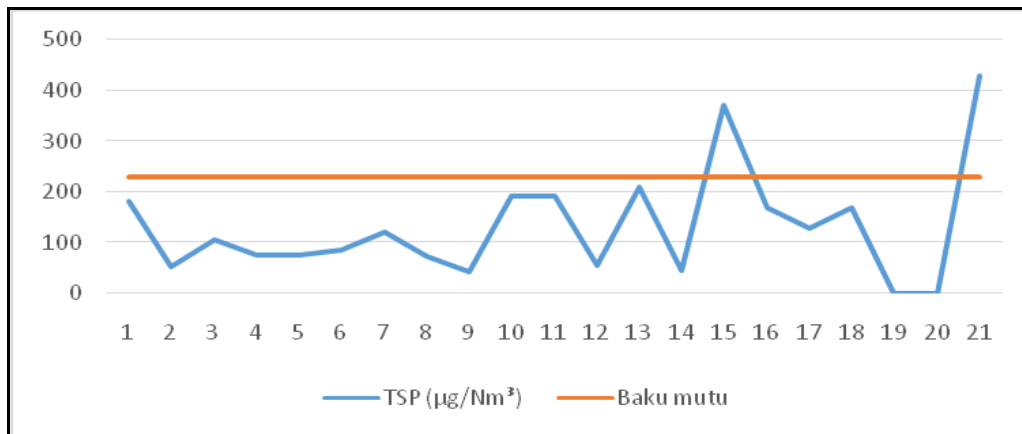
Sumber : Olahan Tabel 30 Buku Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Gambar 3.37. Hasil Analisis Parameter O₃



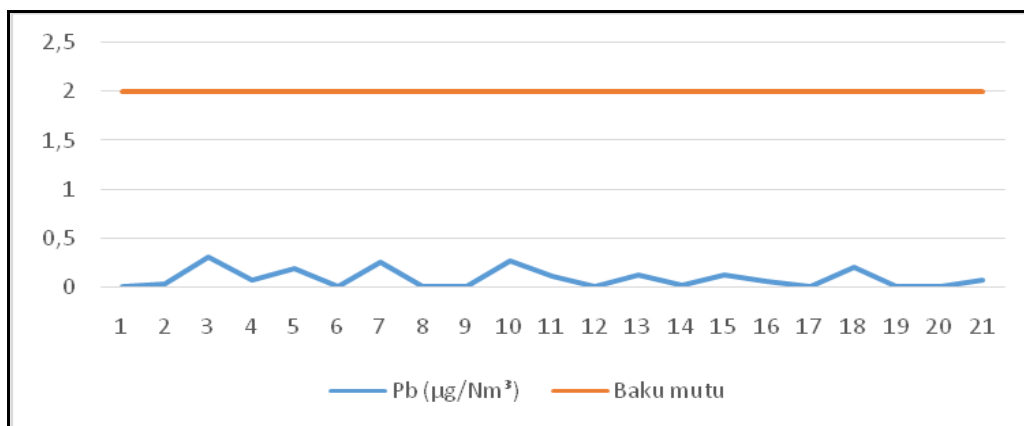
Sumber : Olahan Tabel 30 Buku Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Gambar 3.38. Hasil Analisis Parameter TSP



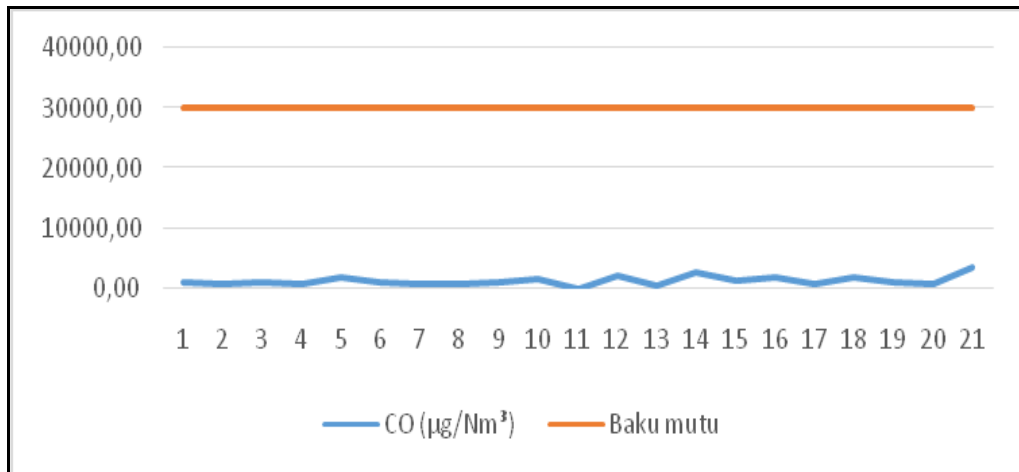
Sumber : Olahan Tabel 30 Buku Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Gambar 3.39. Hasil Analisis Parameter Timbal



Sumber : Olahan Tabel 30 Buku Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Gambar 3.40. Hasil Analisis Parameter CO



Sumber : Olahan Tabel 30 Buku Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

3.3.2.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Berdasarkan hasil analisis laboratorium untuk parameter SO₂ dan NO₂, nilai IKU rata-rata Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 adalah 82,9 (baik). Hasil pemantauan yang digunakan untuk perhitungan IKU berasal dari pengukuran dengan menggunakan metode Passive sampling selama 14 (empat belas) hari berturut-turut dalam 2

(dua) semester. Dibandingkan dengan Tahun 2011 s/d 2014, maka IKU Provinsi Sumatera Barat pada masa-masa tertentu turun dan kembali naik. Kualitas udara Provinsi Sumatera Barat selain dipengaruhi tekanan yang disebutkan di atas, juga dipengaruhi asap “kiriman” dari Provinsi tetangga pada saat kebakaran hutan yang melanda secara luas.

Tabel 3.7. Indeks Kualitas Udara Provinsi Sumatera Barat 2011-2014

No	Tahun	IKU
1	2014	89.16
2	2013	86.41
3	2012	86.02
4	2011	91.05

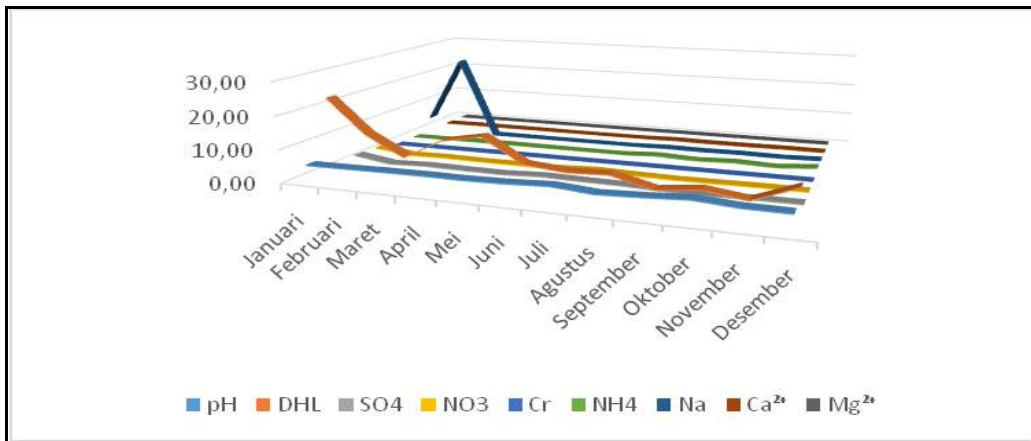
Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, KLH-2014

3.3.2.3 Kualitas Air Hujan

Kualitas air hujan paling utama ditentukan oleh tingkat keasaman (parameter pH). Hujan asam akan berpengaruh pada vegetasi dan ketahanan bangunan.

Dari Gambar 3.41 maka pH air hujan di Sumatera Barat yang di stasiun kilimatologi GAW Koto Tabang, Kabupaten Agam berkisar 5,07 s/d 6,22 dan masih dalam kategori netral

Gambar 3.41. Kualitas Air Hujan Sumatera Barat Tahun 2016



Sumber : Olahan Tabel 29 Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

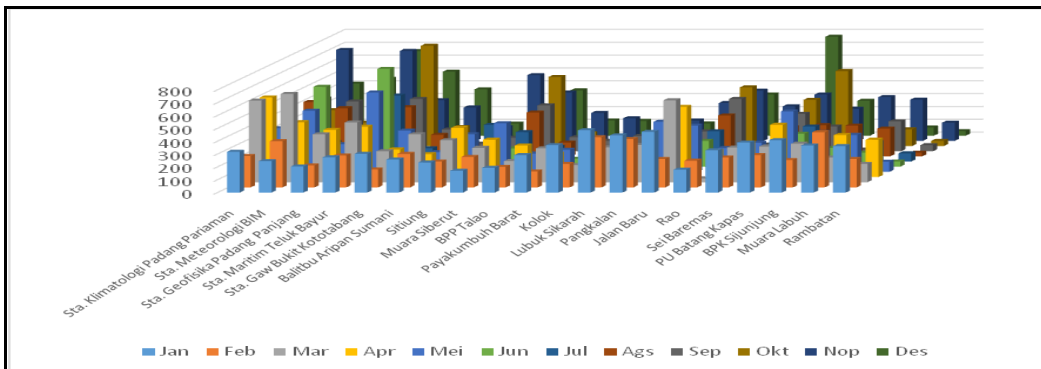
3.3.2.4 Iklim

1. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan

Provinsi Sumatera Barat mempunyai curah hujan yang cukup tinggi dengan kisaran 29 s/d 771 mm Hampir setiap bulan selalu ada

hujan. Curah hujan tertinggi pada Kabupaten Pasaman Barat pengukuran di stasiun Sungai Baremas dan terendah pada Kabupaten Tanah Datar pengukuran di Stasiun Rambatan.

Gambar 3.42. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan di Sumatera Barat Tahun 2016



Sumber : Olahan Tabel 21 Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat

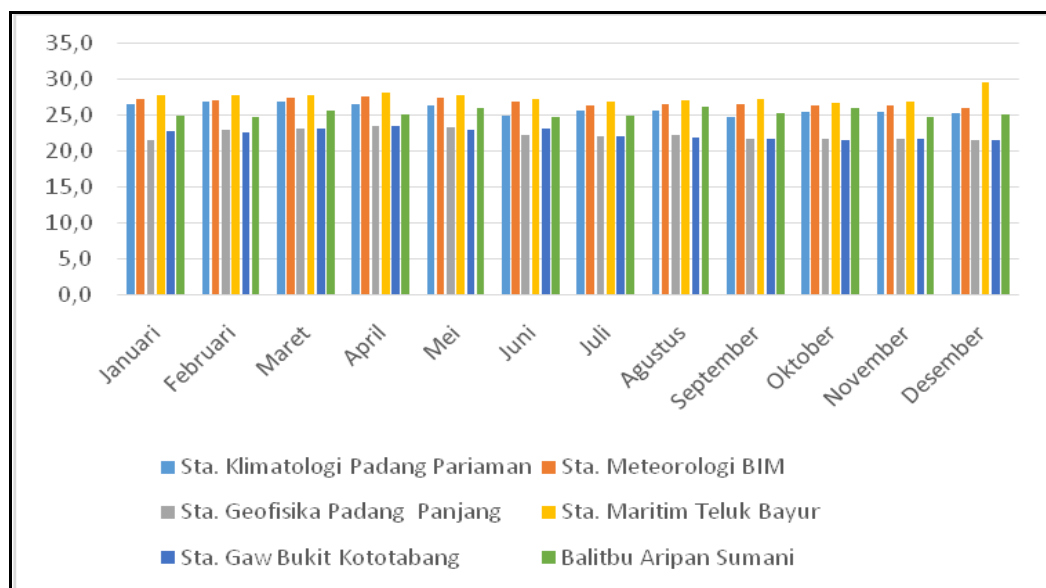


2. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan

Suhu udara di Provinsi Sumatera Barat berkisar 21,5 s/d 29,7 °C. Hasil pengukuran suhu terendah terjadi pada bulan Desember 2016 yang diukur pada stasiun Geofisika

Padang Panjang dan stasiun GAW Koto Tabang Kabupaten Agam, sedangkan suhu tertinggi diukur pada stasiun Maritim Teluk Bayur, Kota Padang dimana suhu ini masih dalam ukuran kenyamanan iklim tropis.

Gambar 3.43. Suhu Rata-Rata Bulanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016



Sumber : Olahan Tabel 28 Buku Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

3.3.3 Upaya Pengelolaan Kualitas Udara (Response)

Beberapa kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola kualitas udara, diantaranya juga mendukung program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

1. Sektor Transportasi

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) sebagai pelaksanaan dari Program Langit Biru dan Transportasi Berkelanjutan. Kegiatan EKUP Tahun 2016 di Kota Padang meliputi uji emisi kendaraan bermotor, pemantauan kinerja lalu lintas dan

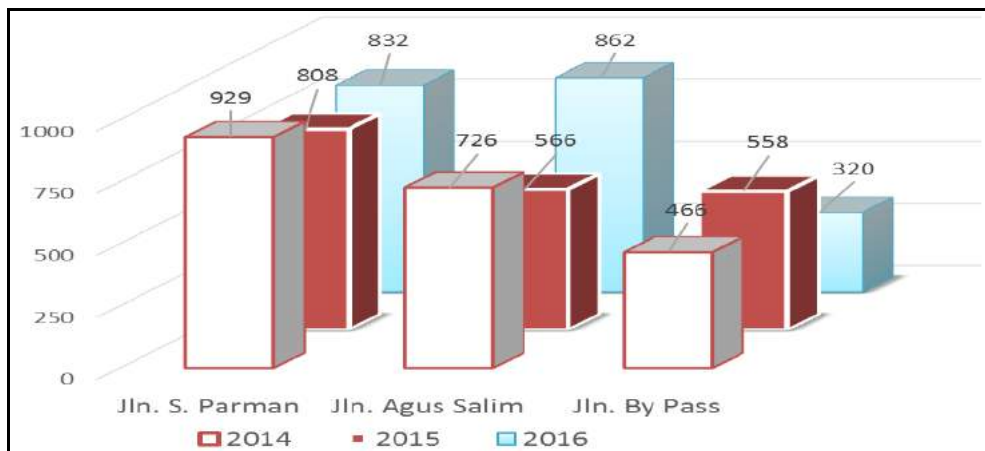


roadside monitoring. Tujuan dari EKUP adalah untuk memberikan kontribusi bagi terciptanya udara yang bersih dan sehat serta memenuhi baku mutu kualitas udara ambient di kota-kota di Indonesia.

Uji emisi kendaraan dilakukan dengan alat uji emisi yang terdiri dari 2 unit alat uji bensin dan 1 unit alat uji solar. Selama 3 (tiga) hari tersebut masing-masing alat melakukan uji emisi terhadap sejumlah kendaraan dimana pada hari ke-I

sejumlah 832 unit, hari ke-II sejumlah 862 unit dan hari ke-III sebanyak 320 unit. Jika dibandingkan dengan Tahun 2015, jumlah kendaraan yang diuji pada Tahun 2016 ini mengalami peningkatan, dari 1.932 unit kendaraan pada Tahun 2015 menjadi 2.014 unit kendaraan pada Tahun 2016. Perbandingan jumlah kendaraan yang diuji emisi dari Tahun 2014 sampai Tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 3.44. berikut:

Gambar 3.44. Perbandingan Jumlah Kendaraan Yang Diuji Tiga Tahun Terakhir



Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Disisi lain dalam pelaksanaan kegiatan EKUP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah membuat kebijakan untuk sektor transportasi yang dituangkan dalam RPJMD 2015-2020. Beberapa kebijakan yang

pro lingkungan terkait kualitas udara antara lain:

a. *Membangun sistem angkutan massal*

Mengingat pesatnya laju pertumbuhan kendaraan pribadi

setiap Tahunnya, terutama untuk kendaraan roda dua mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan meningkatnya polusi udara. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal yang aman dan nyaman dan *non profit oriented*. Contoh angkutan umum massal di wilayah perkotaan/metropolitan yang dikembangkan adalah *Bus Rapid Transit* (BRT) seperti Bus Trans Padang. Di dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 pemerintah telah menetapkan 5 (lima) kawasan metropolitan di Sumatera Barat yakni : Padang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kota Solok. Disamping di wilayah perkotaan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga bermaksud untuk membuat layanan BRT pada kawasan aglomerasi perkotaan seperti Payakumbuh-Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bukittinggi-Agam. Kedua kawasan tersebut memiliki potensi untuk diintegrasikan karena memiliki keterkaitan ekonomi dan sosial.

b. Pengembangan dan Peningkatan Transportasi Massal Berbasis Rel

Pembangunan rel kereta api dilakukan untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas. Sarana kereta api perlu untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan dalam hal ketepatan waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaku perjalanan dalam mempertimbangkan moda yang diinginkan adalah ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan peningkatan frekuensi layanan Kereta Api Padang – Pariaman. Untuk kedepannya Sumatera Barat bermaksud akan melaksanakan pembangunan rel kereta api kereta api Duku – Bandar BIM, reaktivasi kereta api Padang – Bukittinggi, reaktivasi rel kereta Muara Kalaban – Pekanbaru, peningkatan daya dukung lokomotif angkutan barang Indarung - Teluk Bayur dan pengembangan jalur kereta api *shortcut* Padang – Solok.



c. Penguatan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan

Peran pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan antara lain dengan menetapkan standar pelayanan angkutan umum untuk menjamin kualitas pelayanan, perbaikan mekanisme perijinan dan penyusunan regulasi angkutan umum, pengawasan terhadap pelanggaran perizinan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, peremajaan angkutan umum yang melewati batas umur laik jalan pembangunan gedung parkir pada pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah pengendalian dan pengawasan terhadap emisi gas buang, mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andallalin)

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

2. Sektor Kehutanan

Upaya mitigasi yang telah dilakukan dari sektor kehutanan antara lain pembuatan hutan rakyat, penyelenggaraan gerakan menanam

Indonesia, pengamanan dan perlindungan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan pengembangan sarana penyuluhan, pembangunan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), penataan kawasan hutan, pemberantasan penebangan liar, fasilitasi penyusunan RTRW kabupaten/kota berbasis KLHS, mediasi konflik pemafaatan lahan, pengembangan hutan nagari dan penyelamatan lahan gambut dan mangrove. Bahasan lebih detail sudah disampaikan pada subbab Tataguna Lahan

3. Limbah Padat

Tindakan yang diambil Pemerintah Daerah antara lain penyusunan master plan persampahan, program pengelolaan sampah, pendirian bank sampah, komposting sampah organik, penambahan sarana dan prasarana persampahan, pengelolaan TPA Regional, program pembangunan IPAL Komunal, pengembangan sanitary landfill, sosialisasi pembentukan kelurahan sadar sanitasi dan pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Bahasan lebih detail di subbab perkotaan.



4. Pertanian

Upaya yang telah dilakukan di bidang pertanian antara lain peningkatan teknologi pertanian, penggunaan pupuk organik, penyuluhan kepada petani, perbaikan sistem irigasi, pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik dan biogas.

3.4. Resiko Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu musim panas dan musim hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimia,

menghasilkan tanah yang subur. Sebaliknya dengan kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan.

Kondisi geologis dan geografis di atas menyebabkan Sumatera Barat menjadi daerah yang memiliki potensi bencana seperti letusan gunung api, gempa, banjir, longsor (galodo), angin ribut, gelombang pasang dan tsunami. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Sumatera Barat di dominasi oleh relief perbukitan dan pegunungan dan 39,08% (1.650.918 Ha) dan berada pada kemiringan lebih dari 40%.

Pembahasan pada sub bab kebencanaan hanya difokuskan pada jenis bencana yang frekwensi dan luasannya cukup dominan terjadi di Sumatera Barat Tahun 2016 yaitu Banjir dan longsor (Tabel 37, 39 dan 40). Sedangkan untuk kekeringan (Tabel 38) tidak dominan di Sumatera Barat, namun tetap akan dibahas secara umum.

3.4.1. Isu Prioritas Kebencanaan dan Tekanan (*Pressure*)

Berdasarkan hasil dari pen- jaringan Isu prioritas yang dilaksanakan dalam konsultasi publik maka kebencanaan merupakan isu ke-3, dengan skor 1.026 setelah per- tambangan dan air. Adapun isu dan tekanan yang terkait dengan ke- bencanaan:

1. Banjir

Provinsi Sumatera Barat me- rupakan salah satu Provinsi yang rawan dengan bencana hidro- meteorologi, kondisi ini diperparah dengan adanya campur tangan ke- rusakan lingkungan yang di- akibatkan oleh tangan manusia. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya alam terhadap aktivitas manusia. Beberapa kota mengalami banjir pada Tahun 2016 yang cukup luas dan frekwensi yang cukup sering, tekanan terbesar banjir berasal dari pembukaan lahan akibat pertambangan. Untuk wilayah perkotaan tekanan penyebab banjir berasal dari alih fungsi lahan menjadi perumahan.

2. Gempa Bumi dan Longsor

Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktifitas gunung api dan atau runtuh batuan. Sumatera Barat diapit oleh dua pusat gempa utama yaitu patahan semangka yang berada di sepanjang Bukit Barisan dan zona subduksi yaitu pertemuan Lempeng Indo- Australia dengan Lempeng Eurasia ± 250 km dari garis pantai ke arah barat. Disamping itu juga memiliki 4 buah gunung berapi aktif. Hal ini mengakibatkan frekwensi gempa yang cukup tinggi di Sumatera Barat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia memberikan kekhawatiran yang cukup tinggi terutama penduduk yang sebagian besar berada pada zona rawan tsunami.

Longsor (*landslide*) merupakan peristiwa pergerakan batuan, tanah serta bahan lainnya yang menjadi penyusun struktur tanah yang bergerak ke bawah karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Secara umum faktor penyebab longsor terbagi dua yaitu faktor pendorong dan faktor penahan. Faktor



pendorong adalah faktor di dalam material itu sendiri sedangkan faktor penahan adalah faktor yang memicu Bergeraknya material sehingga menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor ini akan sangat mudah terjadi apabila faktor pendorong di lereng tanah lebih besar dibandingkan dengan faktor penahan yang ada.

Untuk faktor penahan sendiri seringkali adalah kekuatan tanah dan struktur batuan yang ada di dalamnya. Jika kondisi tanah, air tanah serta struktur batuan baik dan stabil maka tanah tidak akan mudah mengalami longsor dan sebaliknya tanah yang memiliki kondisi tanah dan air serta batuan yang tidak baik dan tidak stabil maka akan sangat berpotensi terjadinya tanah longsor. Hal ini disebabkan oleh maraknya pertambangan ilegal di beberapa daerah seperti di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.4.2. Kondisi Kebencanaan dan Statusnya (State)

3.4.2.1 Bencana Banjir, Korban dan Kerugian

Banjir merupakan salah satu bencana yang sangat sering terjadi di Indonesia, bencana yang disebabkan

oleh faktor hidrometeorologi ini selalu meningkat tiap Tahunnya, bencana ini dapat merenggut korban jiwa dan merusak infrastruktur dan mengganggu stabilitas perekonomian masyarakat secara signifikan. Banjir dapat disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan daya serap tanah.

Secara umum banjir disebabkan oleh beberapa tekanan terhadap lingkungan yang menyebabkan menurunnya kemampuan tanah menyerap air permukaan yang mengakibatkan terjadinya aliran permukaan dan bila hal ini terjadi dalam intensitas yang besar dan dalam waktu yang lama maka akan mengakibatkan banjir dan genangan bahkan banjir bandang, tekanan tersebut dapat berupa:

1. Alih fungsi lahan, baik untuk kebutuhan lahan pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, maupun untuk wilayah perumahan/pemukiman.

Pada Tahun 2016 terdapat penambahan total bukaan lahan seluas 16.406,11 Ha yaitu perubahan pada sektor industri dari 492,50 Ha menjadi 15.174,50 Ha dan areal pertambangan dari 298,89 Ha



menjadi 2.023 Ha. Untuk wilayah lahan produktif berupa sawah mengalami penurunan sebesar 183.184,86 Ha dari 423.035,86 Ha menjadi 239.851 Ha karena perubahan fungsi menjadi pemukiman (sumber: Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2016). Alih fungsi lahan ini dibahas secara lebih jelas pada pokok bahasan Tata Guna Lahan.

2. Curah hujan yang tinggi

Pada Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Barat tercatat 144 lokasi yang terkena banjir, frekwensi banjir mulai dari yang terbanyak sampai paling sedikit yaitu Kota Padang sebanyak 15 kali dengan korban sebanyak 2 orang dengan kerugian Rp 45.820.449.680,- Kabupaten Agam 14 kali jumlah penduduk mengungsi 4 orang dengan jumlah kerugian sebesar Rp 180.000.000,- Kabupaten Kepulauan Mentawai 12 kali, Kabupaten Sijunjung 11 kali dengan jumlah penduduk yang mengungsi 129 orang dan kerugian Rp 901.000.000,- Kabupaten Pesisir Selatan 10 kali dengan jumlah penduduk mengungsi 200 orang dan kerugian sebesar Rp 646.500.000,-

sedangkan Kota Pariaman mengalami banjir sebanyak 9 kali tidak tercatat penduduk mengungsi maupun korban jiwa namun terdapat kerugian sebesar Rp 10.000.000,- Kota Sawahlunto mengalami banjir sebanyak 9 kali namun tidak tercatat data mengenai korban dan kerugian, Kabupaten Tanah Datar mengalami banjir sebanyak 9 kali, Kabupaten Solok 7 kali dengan kerugian Rp 3.885.650,- Kota Bukittinggi sebanyak 7 kali dengan kerugian sebesar Rp 21.000.000,- Kabupaten Dharmasraya sebanyak 6 kali dengan jumlah kerugian Rp 1.400.000.000,-, Kabupaten Solok Selatan banjir sebanyak 6 kali dengan jumlah korban meninggal sebanyak 7 orang dan kerugian Rp 103.000.000.000,- dan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 6 kali dengan korban meninggal sebanyak 1 kali dengan kerugian sebesar Rp 30.000.000,-, Kabupaten Lima Puluh Kota 5 Kali dengan korban meninggal 1 orang dan kerugian Rp 79.645.000.000,-, Kabupaten Pasaman mengalami banjir sebanyak 3 (tiga) kali dengan kerugian Rp 32.351.234.000,-.

Bencana banjir pada Tahun 2016 mengalami kenaikan 100 % di-

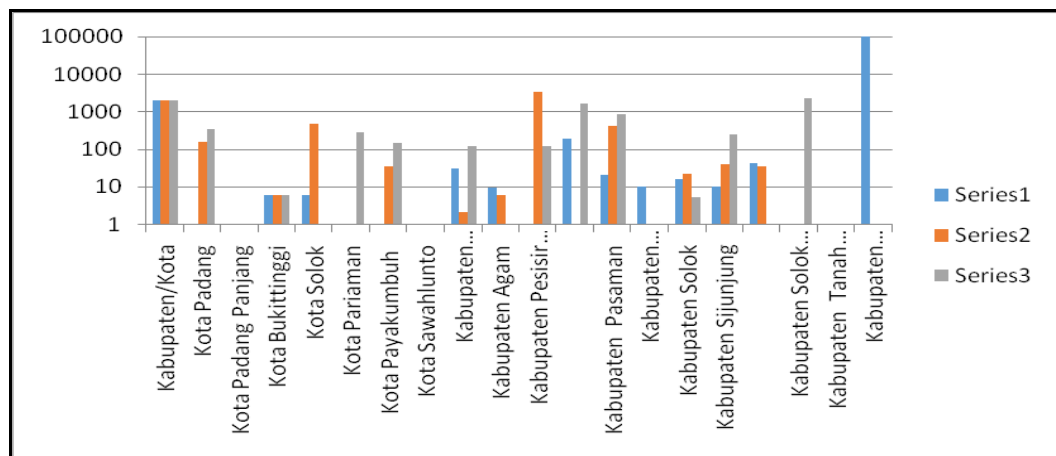


bandingkan dengan pada Tahun 2015, dari segi frekwensi banjir dari data yang didapat dari Badan Pengendalian Bencana Daerah pada Tahun 2015 terjadi 68 kali bencana banjir dengan intensitas terbesar di Kota Bukittinggi sebanyak 20 kali. Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 13 kali, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 6 kali, Kota Padang dan Kota Solok sebanyak 5 kali, Kabupaten Agam sebanyak 4 kali, Kabupaten Pesisir Selatan

sebanyak 3 (tiga) kali, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Dharmasraya masing - masingnya sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Tanah Datar masing-masingnya sebanyak 1 kali.

Untuk data area terendam yang terluas terdapat di Kota Padang, tren data banjir dari Tahun 2015-2016 dilihat dari luas area terendam dapat dilihat pada Gambar 3.45 berikut:

Gambar 3.45. Gambar Luas Area Terendam Tahun 2014-2016



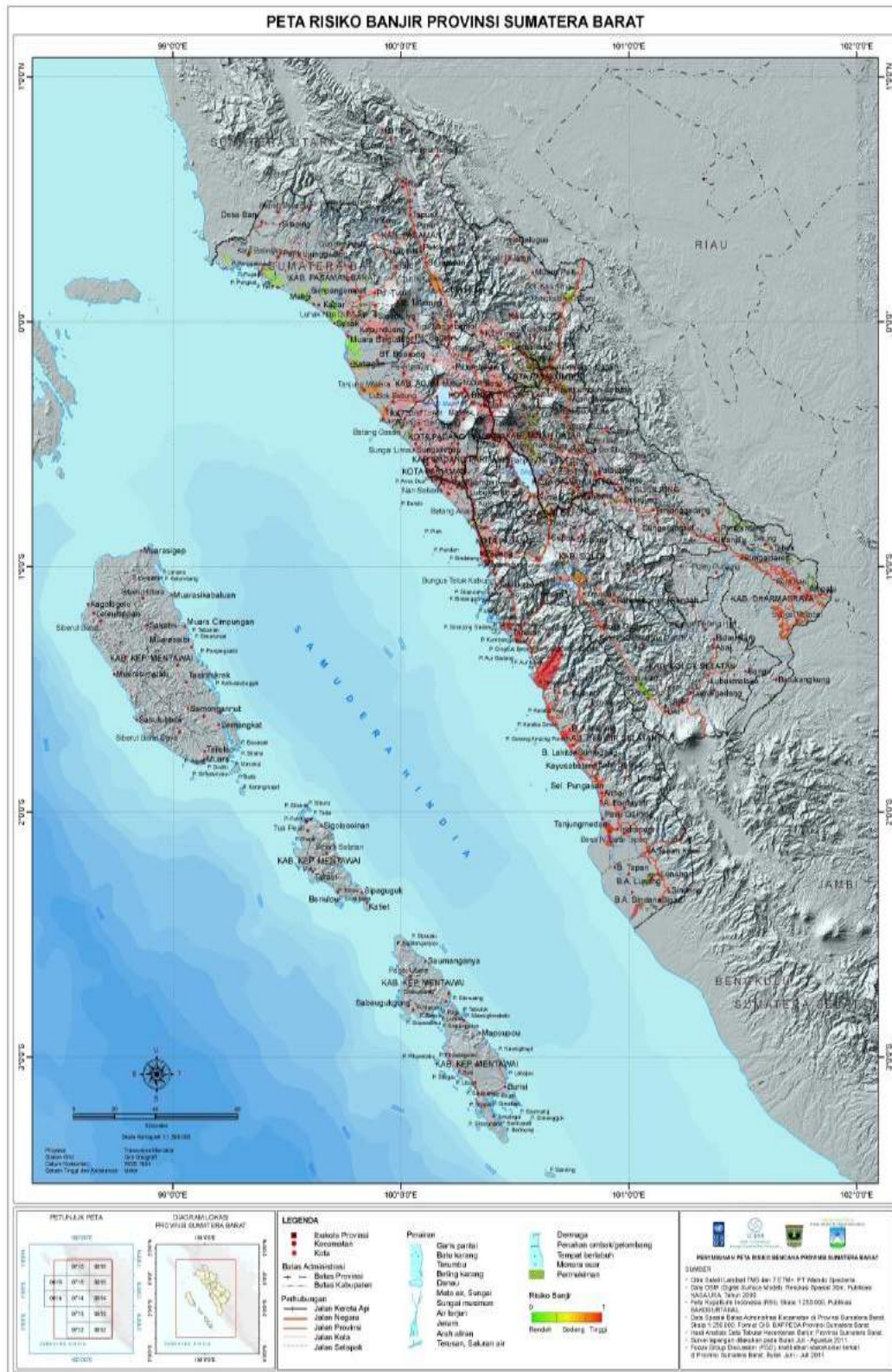
Sumber : Buku data SLHD Tahun 2015 dan Dokumen IPKLHD Tahun 2016

Dari data diatas terlihat bahwa Kota sebagian besar daerah di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan kejadian banjir, bahkan Kota Padang meningkat sampai 300%. Hal ini diasumsikan bahwa selain berkurangnya serapan air juga disebabkan oleh curah hujan yang

tinggi, curah hujan tertinggi pada bulan Maret dengan rata-rata 317,45 mm dan terendah pada bulan 173,95 mm (Badan Meteorologi dan Geofisika Sicincin, 2016).

Peta resiko banjir di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.46 dibawah ini.

Gambar 3.46. Peta Resiko Banjir Provinsi Sumatera Barat



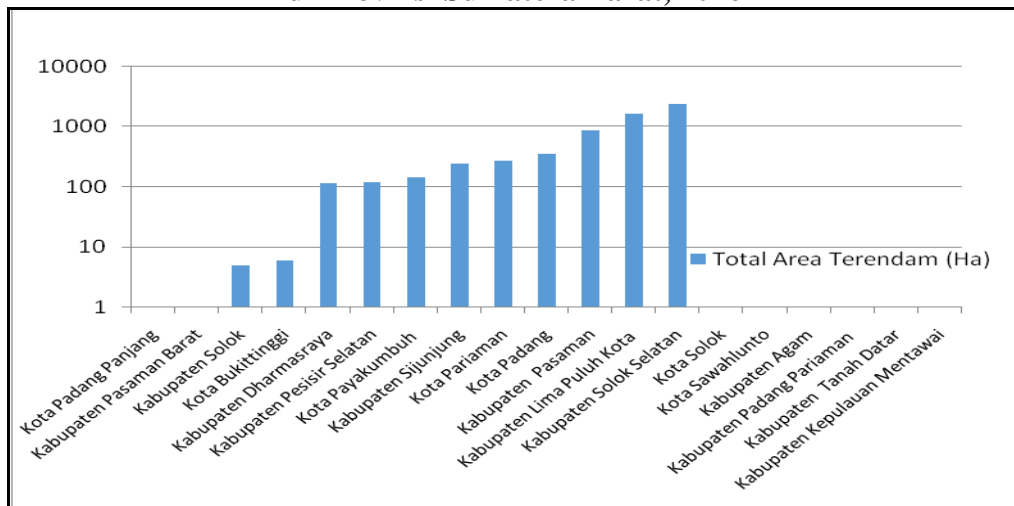
Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2016



Dari peta resiko banjir diatas terlihat bahwa hampir sebagian besar wilayah Sumatera Barat mempunyai resiko yang tinggi terhadap bencana

banjir. Untuk melihat total area terendam masing-masing Kabupaten /Kota dapat dilihat pada Gambar 3.47 berikut:

Gambar 3.47. Areal Terendam Akibat Banjir di Provinsi Sumatera Barat, 2016



Sumber: olahan tabel 37 Dokumen IKPLHD Sumatera Barat Tahun 2016

3.4.2.2 Bencana Kekeringan, Korban dan Kerugian

Kekeringan merupakan suatu kondisi dimana ketersediaan air berada dibawah kebutuhan air untuk kehidupan, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan hidup. Dari data yang diperoleh, pada Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Barat tidak terjadi bencana kekeringan (BPBD, 2016). Hal ini disebabkan karena intensitas hujan yang merata sepanjang Tahun. Begitu juga dengan Tahun 2015 yang lalu tidak terjadi bencana kekeringan di Provinsi Sumatera Barat.

3.4.2.3 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Korban serta Kerugian

Kebakaran hutan mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian ekonomis dan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan ini tidak jarang juga mengakibatkan bencana kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.

Pada Tahun 2016 terdapat 11 daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan dengan total lahan yang terbakar seluas 845,18 Ha dan

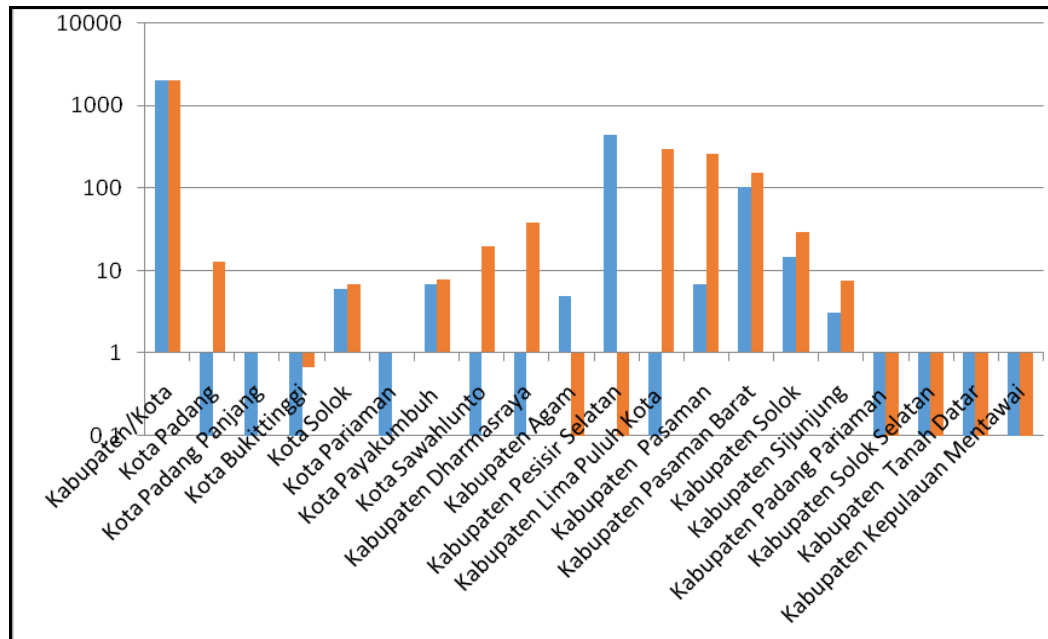


perkiraan total kerugian sebesar Rp. 3.236.200.000,-. Luas hutan dan lahan yang terbakar paling luas terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 300 Ha, Kabupaten Pasaman seluas 266 Ha dengan perkiraan kerugian sebesar Rp.1.400.000.000, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Pasaman Barat diperkirakan mencapai 154 Ha, Kabupaten Dharmasraya seluas 39 Ha dengan total kerugian sebesar Rp. 1.680.000.000,-, Kabupaten Solok seluas 30 Ha, Kota Sawahlunto seluas 20 Ha, Kota Padang seluas 13 Ha dengan 1 (satu) titik hotspot dan total kerugian mencapai Rp.81.200.000.000,-, Kota Payakumbuh seluas 8 Ha dengan total kerugian Rp.4.000.000, Kabupaten Sijunjung seluas 7,5 Ha, Kota Solok seluas 7 Ha dan Kota Bukittinggi seluas 0,68 Ha.

Sedangkan pada Tahun 2015 yang lalu Kebakaran lahan terluas

terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan seluas 450 Ha dan pada Tahun 2016 tidak terdapat kebakaran lahan di Kabupaten Pesisir Selatan (BPBD, 2016). Daerah yang mengalami perluasan kebakaran lahan adalah Kabupaten Pasaman dari 7 Ha yang terbakar pada Tahun 2015 meluas menjadi 266 Ha, Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2015 tidak terjadi kebakaran lahan namun pada Tahun 2016 meluas menjadi 39 Ha, Kabupaten Solok dari 15 Ha menjadi 39 Ha, Kota Payakumbuh dari 7 Ha menjadi 8 Ha dan Kabupaten Sijunjung dari 74,5 menjadi 75 Ha. Tren kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada Gambar 3.48 menunjukkan bawah data Tahun 2016 terlihat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang paling rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.49 dan Gambar 3.50 berikut ini :

**Gambar 3.48. Trend Kebakaran Hutan Dan Lahan
Provinsi Sumatera Barat, 2016**

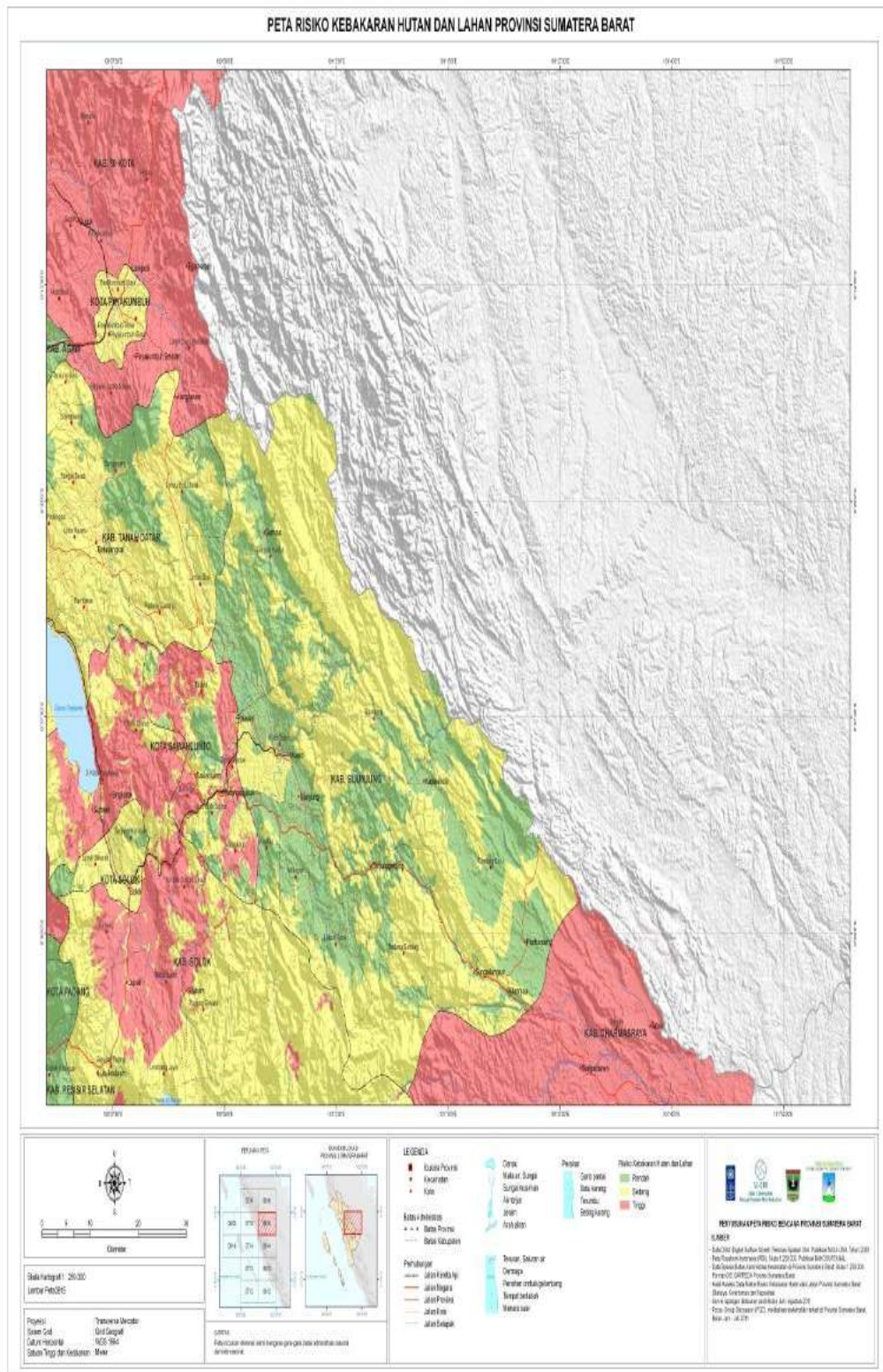


Sumber : Buku Data Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Peta resiko kebakaran hutan dan lahan yang tinggi menunjukkan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto. Pada peta tersebut terlihat bahwa untuk Kabupaten Sijunjung resiko kebakaran hutan dan lahan tergolong rendah, namun

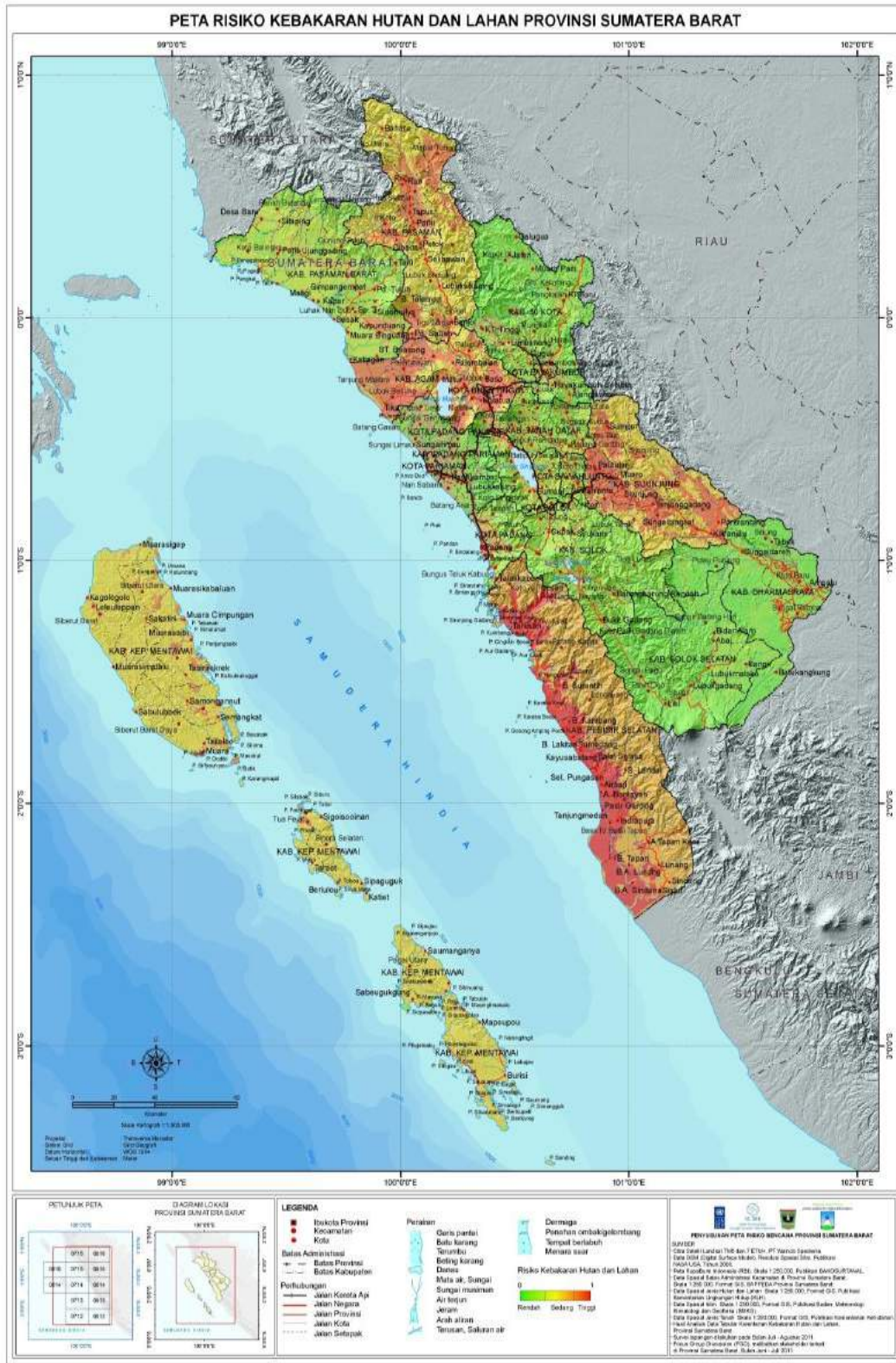
untuk Tahun 2017 terdapat 7,5 Ha lahan yang terbakar di Kabupaten Sijunjung. Pada kasus ini berkemungkinan kebakaran dan hutan dan lahan diakibatkan dari perilaku peladang yang berpindah sehingga menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 3.49. Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Barat Lembar Peta 0616



Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2016

Gambar 3.50. Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Barat



Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2016



3.4.2.4 Bencana Gempa dan Tanah Longsor, Korban dan Kerugian

Sumatera Barat juga rawan terhadap gempa bumi, salah satu daerah yang memiliki potensi gempa bumi berada di kawasan Mentawai Megathrust. Namun ancaman gempa ini bukan hanya terdapat di Megathrust namun masih ada 2 (dua) sumber lainnya yaitu gempa yang terjadi di daerah subduksi pertemuan antara Lempeng Tektonik India - Australia dengan Lempeng Euroasia (lokasi Megathrust Mentawai) dan yang kedua yaitu Mentawai *Fault System* (SFS) atau yang biasa dikenal dengan Sesar Sumatera. Sumber gempa dari Sesar Sumatera ini berada di darat yang memanjang dari Provinsi Lampung hingga Banda Aceh sepanjang ± 1900 Km dan melewati beberapa Kabupaten di Sumatera Barat antara lain Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Pasaman.

Pada Tahun 2016 tercatat 73 kali terjadi gempa tektonik di Provinsi Sumatera Barat namun tidak terdapat korban jiwa. Kabupaten

Kepulauan Mentawai merupakan daerah dengan intensitas gempa tertinggi, tercatat selama Tahun 2016 terjadi 31 kali gempa, diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 25 kali, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam mengalami gempa sebanyak 5 kali, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 4 kali, Kota Padang dan Kota Pariaman masing-masing sebanyak 1 kali. Dibandingkan Tahun 2015 intensitas gempa sebanyak 5 kali, hal ini berarti pada Tahun 2016 intensitas gempa mengalami peningkatan yang sangat tinggi.

Pada Tahun 2016 terjadi 108 kali longsor di Sumatera Barat dengan jumlah korban sebanyak 12 orang dengan rincian Kabupaten Agam terjadi 13 kali longsor dengan korban jiwa sebanyak 4 orang, kabupaten Dharmasraya 3 (tiga) kali longsor namun tidak menimbulkan korban jiwa, Kabupaten Kepulauan Mentawai 2 (dua) kali longsor juga tidak menimbulkan korban jiwa, Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami 14 kali longsor juga tidak menimbulkan korban jiwa, Kabupaten Padang Pariaman mengalami 1 (satu) kali longsor tidak menimbulkan



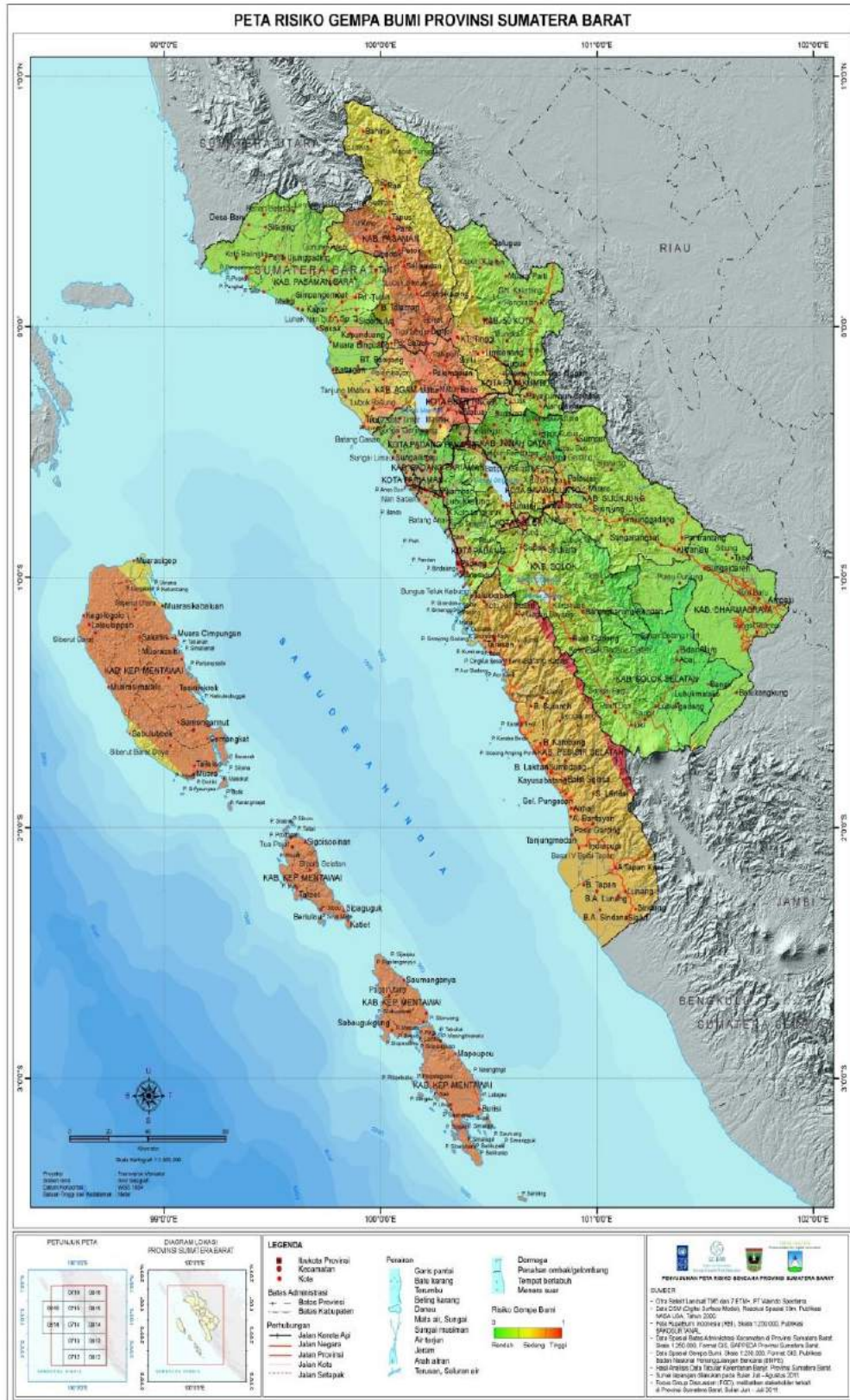
korban jiwa, Kabupaten Pasaman Barat 5 kali tidak ada korban jiwa, Kabupaten Pesisir Selatan 9 kali tidak menimbulkan korban jiwa, Kabupaten Sijunjung 2 kali, Kabupaten Solok 8 kali tidak menimbulkan korban jiwa, Kabupaten Solok Selatan 7 kali menimbulkan korban jiwa sebanyak 8 orang, Kabupaten Tanah Datar 4 kali tidak menimbulkan korban jiwa, Kota Padang 13 Kali longsor tidak menimbulkan korban jiwa, Kota Padang Panjang 2 kali longsor tidak menimbulkan korban jiwa, Kota Sawah lunto 20 kali longsor tidak menimbulkan korban jiwa dan Kota Solok 8 kali longsor tidak menimbulkan korban jiwa.

Dibandingkan dengan Tahun 2015 bencana longsor di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 longsor terjadi sebanyak 68 kali dengan korban jiwa sebanyak 6 orang dan sedangkan yang luka/sakit sebanyak 6 orang.

Total kerugian akibat bencana longsor, gempa bumi dan kebakaran selama Tahun 2016 adalah sejumlah Rp 57.758.079.000,- (Lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di 683 lokasi di Sumatera Barat.

Peta resiko gempa di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.51. berikut :

Gambar 3.51. Peta Risiko Gempa Provinsi Sumatera Barat



Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2016



Selain ancaman gempa bumi, Sumatera Barat juga rawan terhadap bencana longsor. Pada Tahun 2016 tercatat 108 kejadian tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat dengan intensitas terbesar terjadi di Kota Sawahlunto sebanyak 30 kali, Kabupaten Lima Puluh Kota 14 kali, Kabupaten Agam 13 kali dan menimbulkan korban sebanyak 4 orang, Kota Padang 13 kali, Kabupaten Pesisir Selatan 9 kali, Kabupaten Solok 8 kali, Kabupaten Solok Selatan 7 kali dan menimbulkan korban sebanyak 8 orang, Kabupaten Solok 8 kali, Kabupaten Solok Selatan 7 kali, Kabupaten Tanah Datar 4 kali, Kabupaten Dharmasraya 3 kali, Kabupaten Mentawai 2 kali dan Kabupaten Padang Pariaman 1 kali.

3.4.3. Upaya Pengelolaan

Kebencanaan (*Response*)

Dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat untuk mengantisipasi berbagai tingkat risiko bencana di Sumatera Barat yang saat telah menunjukkan frekuensi meningkat terutama bencana gempabumi, kabut asap, banjir dan bencana lainnya, maka perlu dilakukan upaya-upaya

untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) baik ditingkat aparat maupun masyarakat melalui pembentukan sistem penanggulangan bencana di tingkat masyarakat, serta melakukan upaya pembangunan fasilitas-fasilitas yang tahan terhadap bencana yang sesuai dengan kearifan lokal setempat, guna menurunkan tingkat risiko pada saat terjadinya bencana, melindungi masyarakat dari kerugian yang besar.

Untuk mencegah atau meminimalisir bencana yang terjadi di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya mitigasi baik secara struktural maupun non struktural. Mitigasi bencana secara struktural dapat dilakukan dengan membangun tanggul atau bronjong di sepanjang aliran sungai yang memang rawan dengan banjir dan dekat dengan pemukiman penduduk.

Mitigasi bencana non struktural dapat berupa perencanaan wilayah, dalam mitigasi non struktural dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, dengan kemajuan teknologi diharapkan dapat memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi resiko bencana.



Beberapa mitigasi non struktural diantaranya adalah :

1. Membentuk LSM peduli bencana seperti Kogami, Jemari Sakato dan organisasi - organisasi Perguruan Tinggi peduli bencana.
2. Pelatihan dan penyuluhan.
3. Membentuk POKJA yang beranggotakan Instansi terkait dimana ditetapkan pembagian peran dan kerja dalam penanggulangan banjir.
4. Mapping daerah rawan banjir disertai dengan petunjuk evakuasi, lokasi posko dan lokasi pos pengamat banjir.
5. Membuat SOP bencana banjir.
6. Mengadakan simulasi bencana banjir.
7. Membentuk SATGAS seperti PUSDALOPS dan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Program Pemerintah dalam pengurangan resiko bencana dan pemulihan pasca bencana tertuang dalam bentuk kegiatan Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dengan total dana Rp. 1. 650.000.000,00 dan Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana dengan total dana sebesar

Rp 260.000.000,-. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, meliputi kegiatan :
 - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan dana sebesar Rp. 500.000.000,-
 - b. Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanggulangan Bencana dengan alokasi dana sebesar Rp 550.000.000,-
 - c. Peningkatan Simulasi Pelatihan Kebencanaan dengan dana Rp. 200.000.000,-
 - d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana dengan alokasi dana Rp.100.000,000-
 - e. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana dengan alokasi dana sebesar Rp 150.000.000,-
 - f. Peningkatan Kapasitas Relawan Kesiapsiagaan Bencana dengan alokasi dana sebesar Rp 100.000.000,-



- g. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah dengan alokasi dana Rp 50.000,000-
- 2. Meningkatkan pemulihan daerah Pasca bencana
 - a. Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah pasca bencana dengan dana sebesar Rp 80.000.000,-
 - b. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Pasca bencana dengan dana sebesar Rp 80.000.000,-
 - h. Pengkajian dengan dana sebesar Rp 100.000.000,-

Sejak dini perlu disadari bahwa Provinsi Sumatera Barat berada di daerah yang rawan bencana sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mempersiapkan diri, keluarga dan komunitas di daerah sekitar. Kesiapsiagaan diri diharapkan mampu mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka maupun kerusakan infrastruktur. Mulai dari dalam diri sendiri, dan membantu keluarga dan komunitas untuk membangun kesiapsiagaan, maupun

pada saat menghadapi bencana dan pulih kembali pasca bencana.

3.5. Perkotaan

Pada subbab ini akan dibahas mengenai isu prioritas dan tekanan terhadap lingkungan perkotaan, kondisi lingkungan perkotaan dan statusnya serta upaya pengelolaan terhadap isu perkotaan.

3.5.1. Isu Prioritas dan Tekanan Terhadap Lingkungan Perkotaan (*Pressure*)

3.5.1.1. Pengelolaan Sampah

Penanganan sampah khususnya di perkotaan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini merupakan tantangan dalam pengelolaan kota. Pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas yang pesat di perkotaan telah mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah disertai permasalahannya. Institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas permasalahan sampah dan kebersihan masih belum mampu memberikan pelayanan pengangkutan seluruh sampah dari sumber ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kemampuan dalam menangani persoalan sampah belum



didukung oleh sumber daya manusia serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. Sampah yang dihasilkan dari daerah urban sebagian dibawa ke TPA. Sisanya ditangani oleh penghasil sampah dengan berbagai cara, seperti dibakar, ditimbun dalam tanah, dikomposkan dan beragam upaya termasuk daur ulang atau dibuang dimana saja seperti tanah kosong, drainase atau badan air lainnya.

Paradigma umum yang dijumpai sampai saat ini dalam pengelolaan sampah kota masih berupa *kumpul – angkut – buang*. Seiring dengan penambahan penduduk, tambah lama akan semakin banyak sampah yang harus ditangani. Permasalahan anggaran dalam pengelolaan sampah perkotaan merupakan hal yang lumrah terdengar, sehingga agak sulit bagi institusi pengelola sampah untuk berpikir ke depan dalam upaya pengembangan. Prasarana yang tersedia semakin lama akan bertambah tua dan kemampuan juga akan semakin terbatas. Disamping itu, sebagian besar Pemerintah Daerah sampai saat ini masih belum menganggap penanganan sampah

menjadi prioritas yang penting, apalagi dalam situasi anggaran pemerintah yang terbatas. Dengan demikian beban pengelolaan sampah menjadi tambah berat. Untuk itu, diperlukan terobosan dalam mengubah cara pandang terhadap permasalahan sampah yang terjadi. Perbaikan ini tidak dapat dilakukan dalam waktu sekejap karena menyangkut pula cara pandang masyarakat penghasil sampah dan juga yang cara pandang pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif.

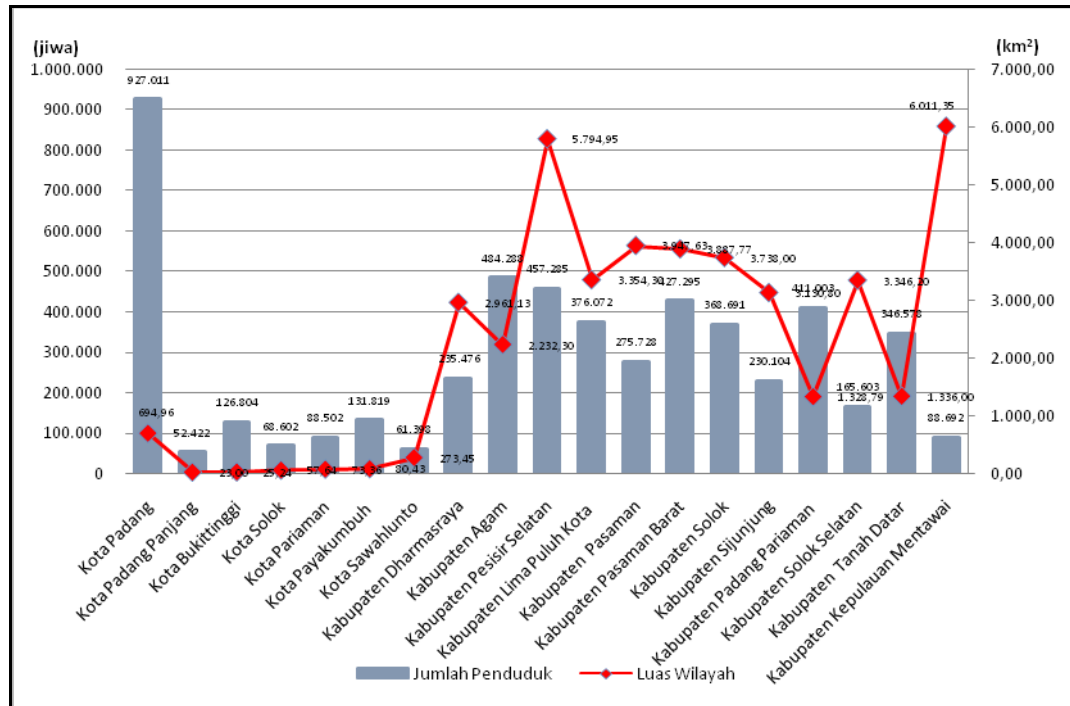
3.5.2. Kondisi Lingkungan Perkotaan dan Statusnya

3.5.2.1. Luas Wilayah dan Kondisi Kependudukan

Luas wilayah Kabupaten/Kota yang terbesar di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan masing-masing sebesar 6.011,35 km² dan 5.794,95 km². Sedangkan kabupaten/kota dengan luas terkecil adalah Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi masing-masing dengan luas 23 km² dan 25,24 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.52 di bawah ini.



Gambar 3.52. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Sumatera Barat

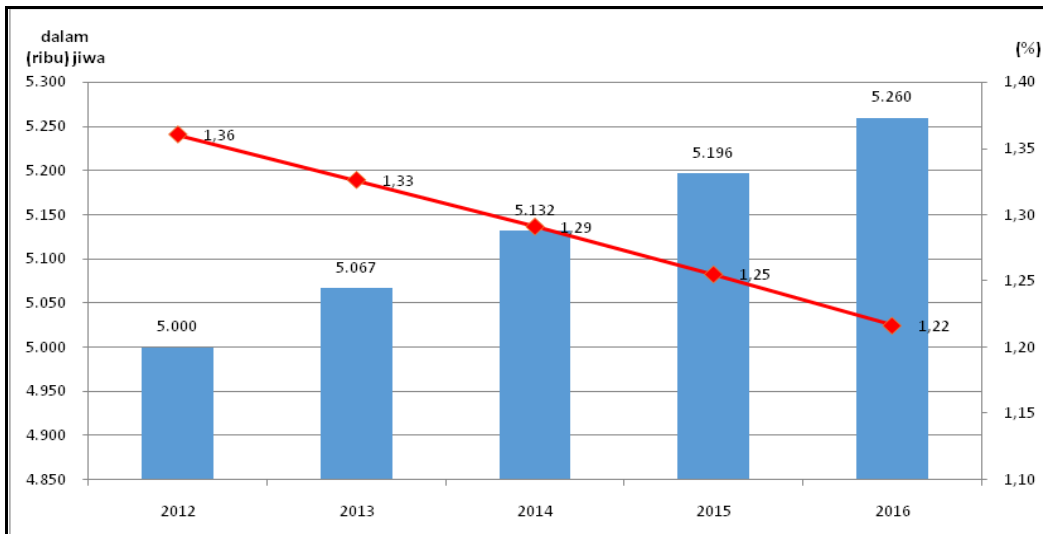


Sumber: Olahan data Tabel 41 Dokumen IKPLHD Sumatera Barat Tahun 2016

Berdasarkan data jumlah penduduk Sumatera Barat pada Tahun 2016 diperkirakan mencapai 5.259.258 jiwa (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2016). Gambar 3.53 menunjukkan bahwa Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah 927.011 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kota Padang Panjang dengan jumlah 52.422 jiwa.

Trend jumlah penduduk Sumatera Barat terus mengalami kenaikan setiap Tahun, dari Gambar 3.53. terlihat peningkatan jumlah penduduk Sumatera Barat, sedangkan laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami penurunan seperti yang terlihat pada Gambar 3.54. dimana laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2016 berada pada angka 1,22 persen.

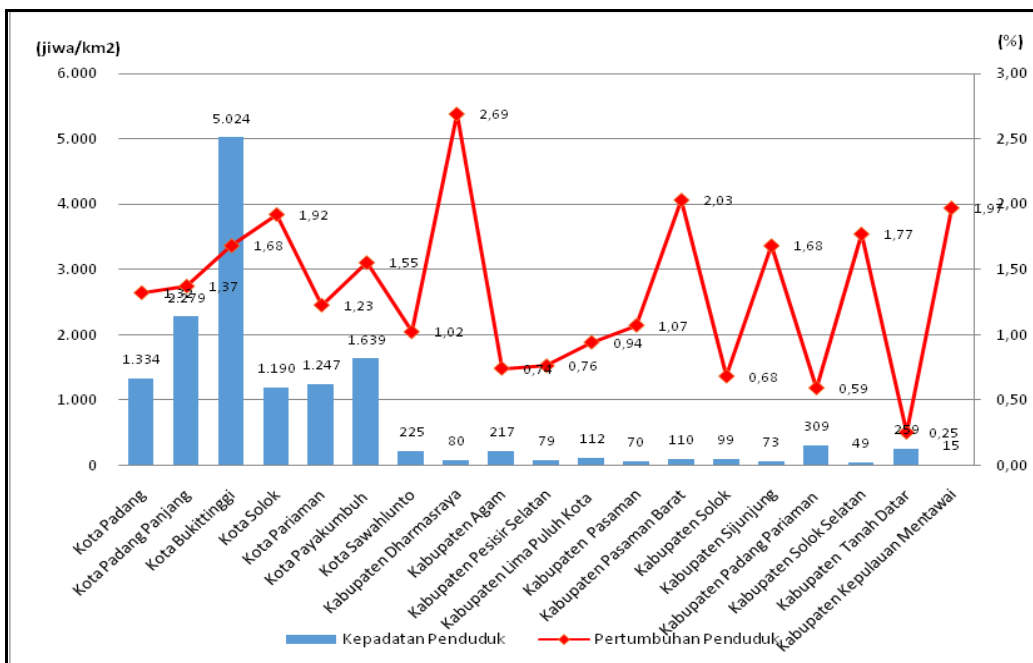
Gambar 3.53. Perbandingan Jumlah Penduduk Versus Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber: Olahan data Tabel 41 Dokumen IKPLHD Sumatera Barat Tahun 2016

Jumlah penduduk yang besar ini bukan hanya satu-satunya faktor penentu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, namun juga distribusi serta kepadatan penduduk yang menempati suatu wilayah. Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung berada di wilayah perkotaan.

Gambar 3.54. Kepadatan Penduduk di Sumatera Barat



Sumber: Olahan data Tabel 41 Dokumen IKPLHD Sumatera Barat Tahun 2016

Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, maka daerah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang masing-masing sebesar 5.024 jiwa/km² dan 2.279 jiwa/km². Jumlah ini jauh lebih tinggi dari kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 126 jiwa/km². Hal tersebut mengindikasikan bahwa tekanan terhadap lingkungan di daerah perkotaan akibat aktifitas penduduk akan semakin besar. Sedangkan wilayah dengan kepadatan terkecil terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan masing-masing 15 jiwa/km² dan 49 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya data tentang luas wilayah, jumlah penduduk serta kepadatan penduduk disajikan pada Tabel 41.

3.5.2.2. Timbulan Sampah

Isu persampahan selalu dilatarbelakangi oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap Tahun. Peningkatan jumlah timbulan sampah bergantung pula pada tingkat ekonomi suatu wilayah. Wilayah yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi akan memiliki

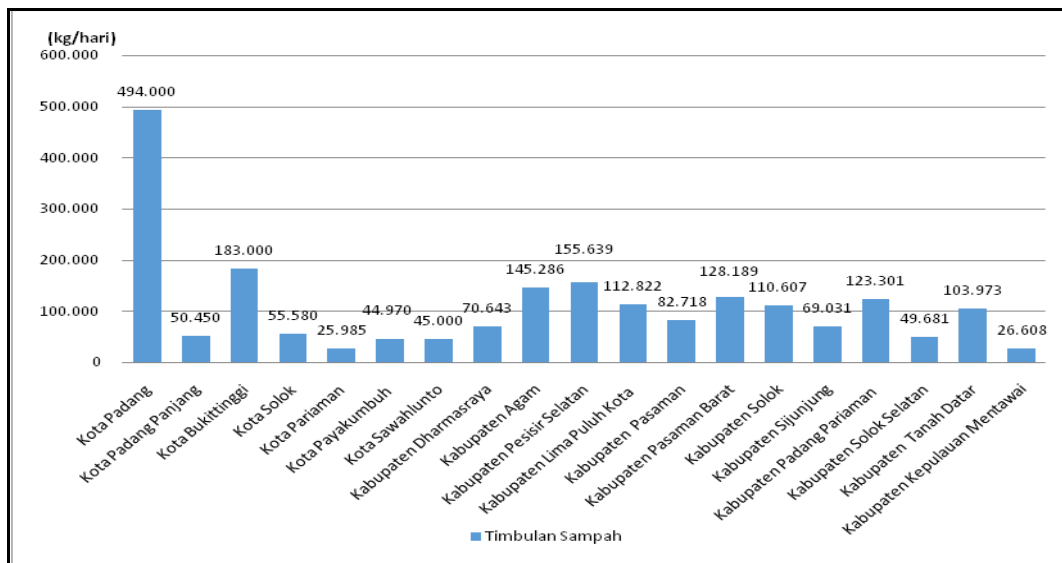
kebutuhan terhadap barang dan jasa yang tinggi pula sehingga akan berdampak terhadap besarnya jumlah timbulan sampah. Setiap Tahun jumlah timbulan sampah selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa yang berarti meningkatkan jumlah timbulan sampah dan akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan karena sampah terkait dengan hubungan nilai dan perilaku masyarakat terhadap perwujudan sampah, organisasi pengelola sampah, serta sistem pengelolaan yang dilakukan.

Timbulan sampah Sumatera Barat pada Tahun 2016 adalah sebesar 2.077.483 kg/hari dan berasal dari berbagai macam sumber serta memiliki komposisi yang bermacam-macam. Sebagian besar timbulan sampah yang berasal dari permukiman adalah sampah rumah tangga yaitu sampah organik. Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di masing-masing kabupaten/kota disajikan pada Gambar 3.55 berikut ini.



Gambar 3.55. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Per Hari Di Masing-Masing Kabupaten/Kota



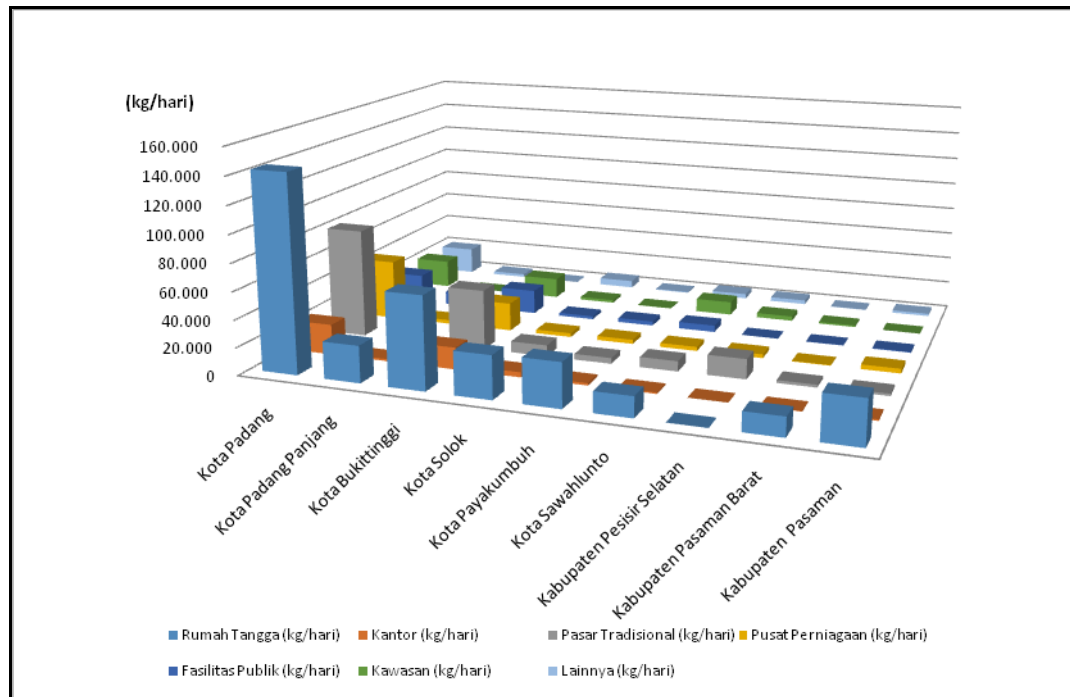
Sumber: Olahan data Tabel 42 Dokumen IKPLHD Sumatera Barat Tahun 2016

Dari Gambar 3.56 dapat dilihat bahwa Kota Padang dan Kota Bukittinggi memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi yakni masing-masing sebesar 494.000 kg/hari dan 183.000 kg/hari. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan kota lainnya. Khusus untuk Kota Bukittinggi yang merupakan kota wisata, jumlah sampah yang datang tidak hanya dari penduduk domestik Kota Bukittinggi saja, melainkan juga merupakan wisatawan yang datang dari daerah lain di luar Kota Bukittinggi, biasanya jumlah

timbulan sampah akan meningkat dari biasanya di hari-hari libur.

Produksi sampah berhubungan linier dengan produktivitas dan aktivitas manusia. Dengan demikian, peningkatan jumlah sampah berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Penanganan yang dilakukan terhadap sampah yang ada, lazimnya adalah dengan penumpukan, pengumpulan, dan pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Permasalahan yang sering timbul antara lain adalah semakin terbatasnya lokasi tempat pemrosesan akhir sampah tersebut.

Gambar 3.56. Timbulan Sampah Menurut Sumber



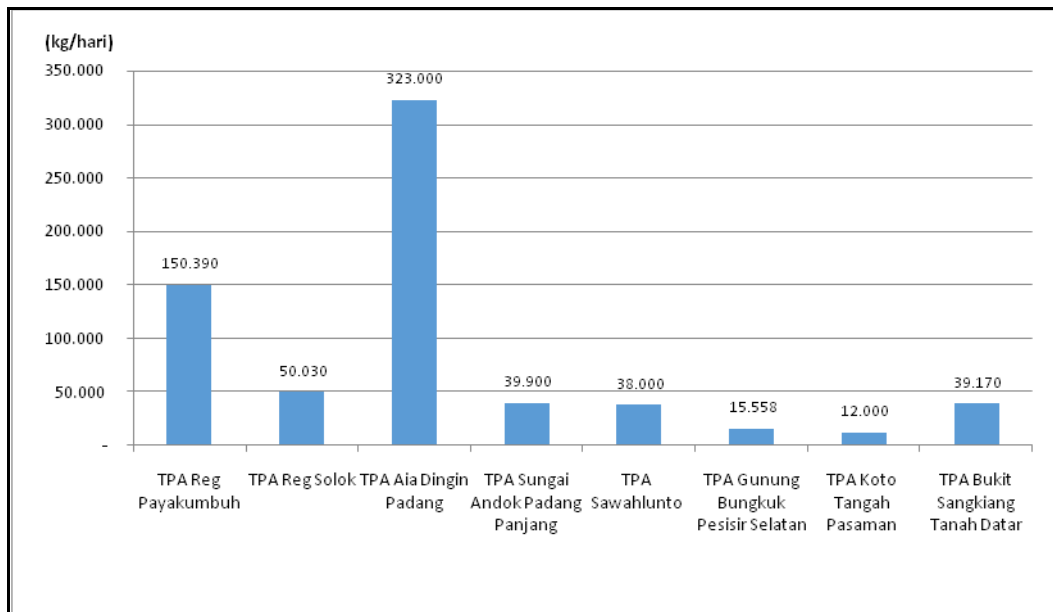
Sumber: Olahan data Tabel 42.2 Dokumen IKPLHD Sumatera Barat Tahun 2016

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencoba untuk memfasilitasi permasalahan lahan TPA yang banyak menjadi kendala pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pemrosesan akhir yakni dengan membuat kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk menyediakan lahan yang dapat digunakan menjadi TPA. Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah menetapkan lahan seluas 12 Ha yang dapat dijadikan lahan TPA. Rencana

pembangunan TPA diperuntukkan 8 Ha untuk pengelolaan sampah domestik, 2 Ha untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, dan 2 Ha sisanya representatif untuk dikembangkan sebagai pusat pengelolaan LB3 Provinsi Sumatera Barat.

Untuk melihat kondisi dan status TPA yang ada di Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.57. di bawah ini.

Gambar 3.57. Kondisi dan Status TPA yang ada di Sumatera Barat



Sumber: Olahan data Tabel 42.1 Dokumen IKPLHD Sumatera Barat Tahun 2016

Berdasarkan Gambar 3.57 dapat dilihat bahwa timbulan sampah yang masuk ke TPA Aia Dingin Padang adalah yang tertinggi dibandingkan dengan TPA lainnya di Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 323 ton/hari, selanjutnya adalah TPA Regional Payakumbuh (melayani sampah dari Payakumbuh, Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam) dengan jumlah sampah yang masuk sebesar 150 ton/hari. Hal ini disebabkan juga karena tingginya beban timbulan sampah di masing-masing daerah tersebut.

Volume sampah yang besar dan beranekaragam jenisnya jika

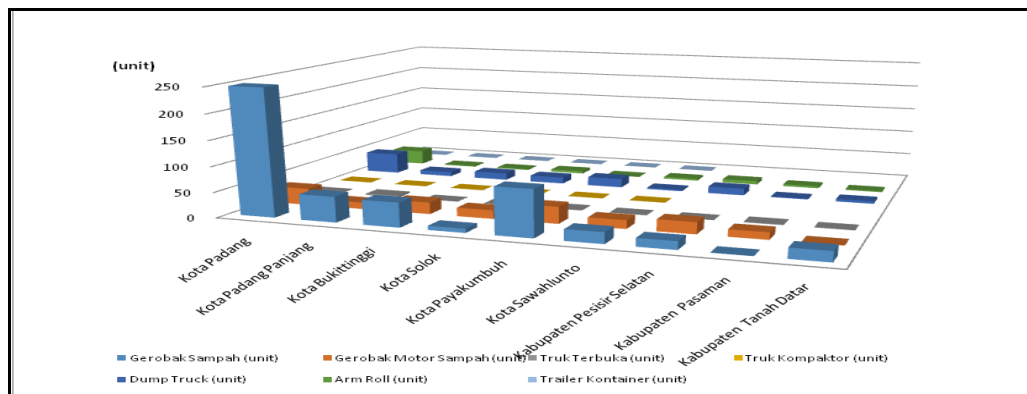
tidak dikelola dengan baik dan benar sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang kompleks dan serius, antara lain: 1) pencemaran air oleh “lindi” (*leachate*) yang keluar dari tumpukan sampah dan mengalir menuju badan perairan ataupun meresap ke dalam tanah; 2) pencemaran udara karena adanya gas metana (CH_4), salah satu jenis gas rumah kaca, yang keluar dari tempat penimbunan akhir sampah akibat proses penguraian bahan organik secara anaerobik; 3) sampah merupakan habitat bagi berkembangnya bakteri patogen tertentu yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia;

4) menurunkan nilai estetika lingkungan; dan 5) mengurangi kenyamanan lingkungan.

Dalam hal sarana yang digunakan untuk pengangkutan sampah secara umum yang banyak digunakan untuk mengangkut

sampah dari TPS ke TPA adalah *Dump Truck* dan *Arm Roll Truck*. Sedangkan untuk melakukan pengangkutan dari rumah-rumah menuju TPS pengangkutan menggunakan gerobak sampah dan gerobak motor sampah.

Gambar 3.58. Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Sampah



Sumber: Olahan data Tabel 42.5 Dokumen IKPLHD Sumatera Barat Tahun 2016

Berdasarkan Gambar 3.58, jumlah prasarana yang dominan digunakan untuk pengangkutan sampah adalah gerobak sampah, gerobak motor sampah, dan *dump truck*. Untuk lebih jelasnya jumlah sarana pengangkutan yang digunakan Tabel 42.5.

3.5.3. Upaya Pengelolaan Terhadap Isu Perkotaan (*Response*)

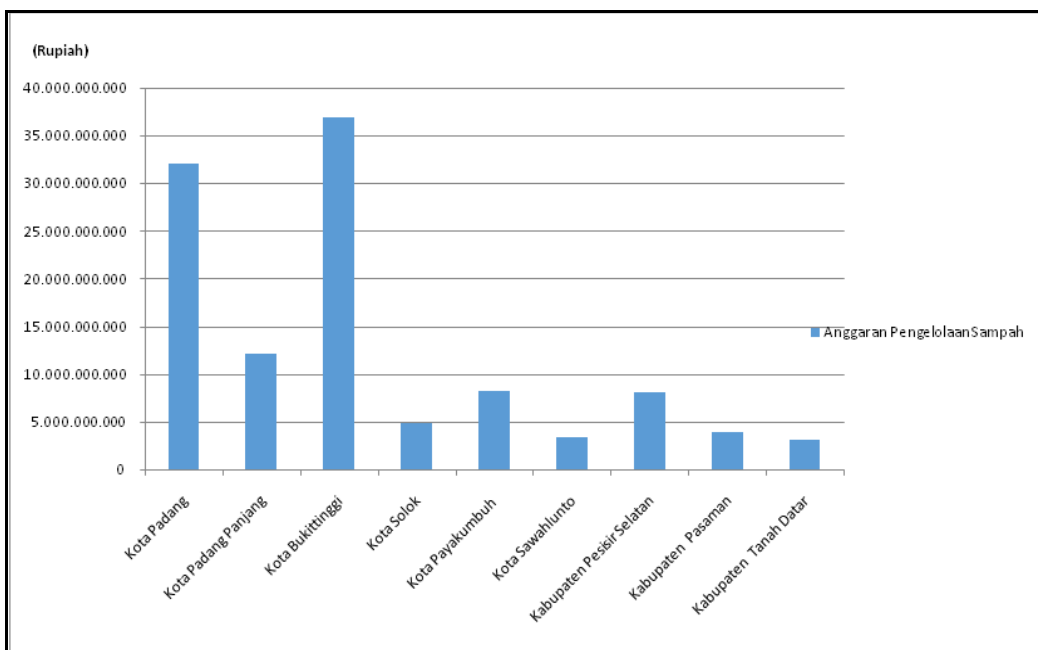
Masalah pelayanan sampah di perkotaan tersebut akhir-akhir ini menjadi masalah yang cukup serius dirasakan mengingat volumenya yang kian hari kian membengkak

atau bertambah sementara kemampuan aparat pemerintah dalam melayani sangat terbatas. Hal ini berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu beserta aktivitasnya menyebabkan meningkatnya sampah bukan hanya dalam jumlah sampah tetapi juga dari variasi komposisi sampah. Disamping itu, diperkuat juga dengan kecenderungan masyarakat modern untuk menghasilkan berbagai macam sampah khususnya perilaku hidup masyarakat kota-kota besar.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah di daerah masuk dalam urusan lingkungan hidup, maka pengelolaan sampah di tingkat daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Urusan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kebersihan kota, pasar,

jalan, dan lingkungan. Namun terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya dana, SDM, serta sarana dan prasarana yang dipunyai oleh pemerintah daerah sehingga beberapa wilayah yang masih belum mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dari pemerintah, sehingga apabila dibiarkan akan menimbulkan berbagai dampak negatif baik dari segi ekologi, estetika, dan pada akhirnya berpengaruh pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Gambar 3.59. Anggaran Pengelolaan Sampah Kota-Kota di Sumatera Barat



Sumber: Olahan data Tabel 42.4 Dokumen IKPLHD Sumatera Barat Tahun 2016

Jika dilihat dari aspek anggaran, pada Tahun 2016 yang dikeluarkan untuk pengelolaan kebersihan yang terbesar adalah Kota Bukittinggi dan Kota

Padang yakni masing-masing sebesar Rp 36.949.923.919,- dan sebesar Rp 32.048.460.667,-, kemudian diikuti oleh Kota Padang



Panjang dan Kota Payakumbuh yakni masing - masing sebesar Rp 12.240.633.700,- dan sebesar Rp 8.259.992.130,-. Untuk lebih jelasnya data anggaran pengelolaan sampah disajikan pada Tabel 42.4.

Salah satu bentuk lain dari upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di perkotaan di Tahun 2016 yang lalu adalah mengurangi beban sampah yang terjadi di Sungai Batang Agam. Sungai Batang Agam sebagai salah satu sungai yang mengalir di Provinsi Sumatera Barat merupakan sungai yang melintasi areal kabupaten/kota yang padat aktivitas. Dari data-data yang didapatkan beberapa Tahun terakhir terlihat bahwa kondisi kualitas Sungai Batang Agam semakin menurun. Salah satu penyebab dari menurunnya kualitas sungai ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan, sehingga sampah yang dihasilkan masih banyak yang dibuang ke sungai.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka Pemerintah Provinsi telah menetapkan Sungai

Batang Agam sebagai sungai target program terpadu/model pemulihan dan pengendalian pencemaran sungai perkotaan dengan orientasi target pencapaian penurunan beban pencemaran. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Membentuk klaster pengelolaan sampah di sempadan Sungai Batang Agam;
2. Melakukan kegiatan sosialisasi pada masyarakat di sempadan sungai;
3. Penyerahan peralatan solar biodigester;
4. Gotong royong di lokasi klaster;
5. Pendampingan yang dilakukan oleh LSM.

3.5.3.1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Dinas Provinsi Sumatera Barat memiliki pos pengaduan yang menangani permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke pos pengaduan provinsi terkait dengan isu sampah.

3.5.3.2. Perlibatan LSM

Pengelolaan sampah organik merupakan jenis sampah yang terbanyak yang dihasilkan dari pe-



mukiman. Untuk memaksimalkan potensi sampah organik dilakukan pendamping oleh LSM Andalas Bumi Lestari juga memberikan sosialisasi pengelolaan sampah organik yang diarahkan kepada pengelolaan sampah sisa makanan dan sampah organik. Pengelolaan dilakukan dengan penyediaan alat pengelolaan berupa solar biodigester. Alat ini memanfaatkan sinar matahari dalam proses penguraian sampah sisa makanan dan sampah organik lainnya untuk terurai di dalam peralatan tersebut dan peralatan ini berfungsi untuk menyuburkan tanaman di sekitar lokasi solar biodigester. Solar biodigester juga diarahkan untuk mengurangi beban pencemaran Batang Agam yang bersumber dari sampah rumah tangga

3.5.3.3. Pemberian Penghargaan Lingkungan

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penilaian terhadap kebersihan lingkungan di kecamatan untuk kabupaten dan kelurahan untuk kota. Penilaian kecamatan dan kelurahan bersih ini dilakukan setiap Tahun dan setiap kecamatan maupun kelurahan yang dinilai bersih akan diberikan penghargaan oleh Gubernur Sumatera Barat pada Peringatan Hari Kemerdekaan RI di halaman Kantor Gubernur pada tanggal 17 Agustus. Tahun 2016 yang lalu, ada 3 kecamatan dan 3 kelurahan yang mendapatkan penghargaan tersebut. Kecamatan dan kelurahan peraih penghargaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8. Penghargaan Kecamatan dan Kelurahan Bersih Tahun 2016

No	Kecamatan/Kelurahan	Penghargaan	Penghargaan
1.	Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat
2.	Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota	Kecamatan Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat
3.	Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman	Kecamatan Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat
4.	Kelurahan Pakan Sinayan, Kota Payakumbuh	Kelurahan Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat
5.	Kelurahan Pasar Usang, Kota Padang Panjang	Kelurahan Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat
6.	Kelurahan Tanah Lapang, Kota Sawahlunto	Kelurahan Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat

Sumber: Tabel 46 Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

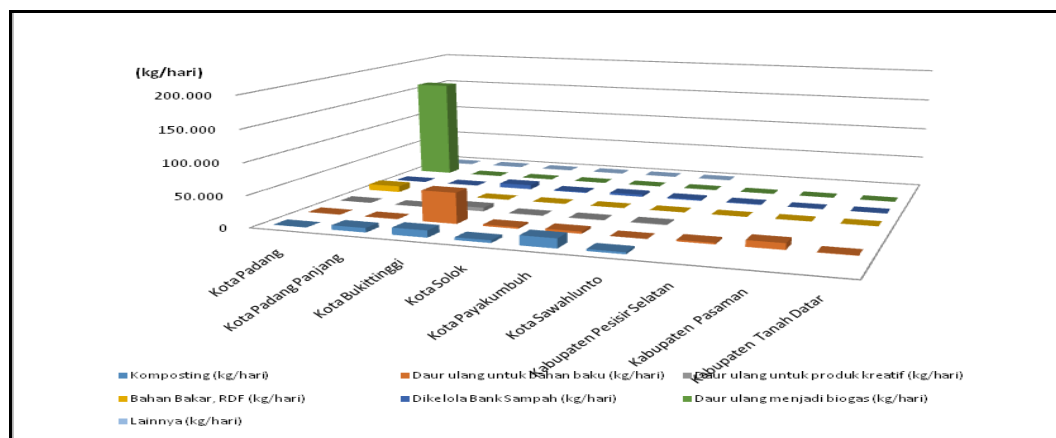
3.5.3.4. Program Inisiasi

Masyarakat

Untuk meminimasi jumlah sampah yang ditimbun ke TPA, maka peran serta masyarakat sangat diperlukan agar dapat mereduksi sampah mulai dari sumbernya. Semakin banyak sampah yang berhasil direduksi di sumber akan semakin sedikit jumlah sampah yang

akan dibawa dan ditimbun ke TPA. Selain memberikan manfaat bagi penghasil sampah juga dapat memperpanjang umur TPA yang ada. Perkiraan timbulan sampah yang terolah per hari paling tinggi terdapat di Kota Padang dengan jumlah sebesar 171.130 kg/hari dan Kota Bukittinggi sebesar 73.000 kg/hari.

Gambar 3.60. Jumlah Sampah Terolah Harian



Sumber: Olahan data Tabel 42.3 Dokumen IKPLHD Sumatera Barat Tahun 2016

Sampah yang ada diolah menjadi berbagai bentuk produk diantaranya kompos, daur ulang untuk bahan baku, daur ulang untuk produk, bahan bakar, daur ulang menjadi biogas, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya data pengolahan sampah disajikan pada lampiran Tabel Data 42.3.

Upaya pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas; melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Meskipun demikian, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.

Salah satu solusi/upaya untuk mengatasi masalah yang sedang giat dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni dengan pengembangan Bank Sampah. Kegiatan ini bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah,

sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak. Harapannya akan dapat mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Pembangunan bank sampah ini merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru Indonesia.

Salah satu fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk menyalurkan keinginan warga dalam melakukan pengelolaan sampah dimulai dari sumber antara lain melakukan sosialisasi terhadap peserta yang merupakan anggota bank sampah di Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah (ATTS) dan Kelurahan Puhun Tembok. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah.



Hasil sosialisasi tersebut maka dapat dibentuk bank sampah di masing-masing kelurahan tersebut, yakni bank sampah “Mutiarra Indah” dan bank sampah “Seayun Selangkah”. Selanjutnya dilakukan praktek pengelolaan Bank sampah dengan didampingi Tenaga Ahli Pendamping dan diberikan alat solar biodegester yang nantinya akan menghasilkan tanah pupuk untuk menyuburkan tanaman.

3.5.3.5. Produk Hukum Lingkungan

Dengan adanya berbagai tekanan yang timbul akibat berbagai permasalahan yang muncul akibat sampah, maka beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah yang khusus mengatur pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Sebagai contoh Kota Padang yang termasuk dalam kategori kota besar di Sumatera Barat telah menyusun Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Perda yang dikeluarkan ini telah memuat target pengurangan sampah yang akan dicapai dengan melibatkan kelompok maupun individual masyarakat. Pemko juga membentuk Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di setiap kelurahan yang memiliki peran memberikan pelayanan pengangkutan sampah mulai dari sumber ke TPS dan lembaga ini dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Selain itu, terdapat juga pengaturan jadwal bagi masyarakat dalam membuang sampahnya ke TPS-TPS yang telah disediakan yakni antara pukul 17.00-05.00 WIB.

Selain Kota Padang, daerah lain yang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah antara lain Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Sawahlunto dan Kabupaten Pasaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini.



Tabel 3.9. Produk Hukum Tentang Pengelolaan Sampah

No	Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
1.	Peraturan Daerah Kota Padang	No. 21 Tahun 2012	Pengelolaan Sampah
2.	Peraturan Daerah Kota Bukittinggi	No. 05 Tahun 2014	Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
3.	Peraturan Daerah Kota Payakumbuh	No. 04 Tahun 2014	Pengelolaan Persampahan
4.	Peraturan Daerah Kota Sawahlunto	No. 12 Tahun 2009	Pengelolaan Sampah dan Taman
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman	No. 9 Tahun 2011	Pengelolaan Sampah dan Taman

Sumber: Tabel 48 Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

3.6. Response yang dilakukan untuk meminimalisasi Isu Prioritas Lingkungan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi isu prioritas lingkungan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimulai dari perencanaan kegiatan dalam bentuk penerbitan izin lingkungan yang dilakukan melalui kajian dokumen lingkungan hidup dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang telah mendapatkan izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

3.6.1. Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada Tahun 2016, dokumen lingkungan yang diterbitkan di Provinsi Sumatera Barat adalah 5 (lima) dokumen yang terdiri dari 4 (empat) dokumen UKL-UPL dan 1 (satu) dokumen AMDAL. Apabila dilihat dari lokasi kegiatan, 3 (tiga) kegiatan terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, 1 (satu) kegiatan di lintas Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dan sisanya di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung.

Tabel 3.10. Dokumen Izin Lingkungan di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
1.	UKL-UPL	Rencana Penambangan Mineral Non Logam/Clay di Nagari Teluk Kabung Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	CV. Putra Idola
2.	UKL-UPL	Rencana Pembangunan Pengamanan Muara dan Pantai Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
3.	UKL-UPL	Rencana Kegiatan Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal Mandeh di Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
4.	UKL-UPL	Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Naras – Sungai Limau Kota Pariaman – Kabupaten Padang Pariaman	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat
5.	AMDAL	Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Muara Kalaban – Muaro Sijunjung di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat

Sumber : Olahan Tabel 34 Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2016

Disamping pemberian izin lingkungan, pada Tahun 2016 sebanyak 129 perusahaan mengurus izin pengelolaan limbah B3 untuk jenis izin penyimpanan seperti yang disampaikan pada tabel berikut. Hanya 1 (satu) perusahaan yang mengurus izin pemanfaatan limbah B3, yaitu PT. Semen Padang.

Terdapat 4 jenis usaha/kegiatan yang mengurus izin pengelolaan limbah B3, yang terbanyak adalah sektor industri (60%), kemudian diikuti oleh kesehatan (25%), ESDM 8% dan Penginapan 7% seperti yang ditampilkan dalam Gambar 3.61 di bawah ini.

Gambar 3.61. Persentase Jenis Usaha yang mengurus Izin Pengelolaan Limbah B3



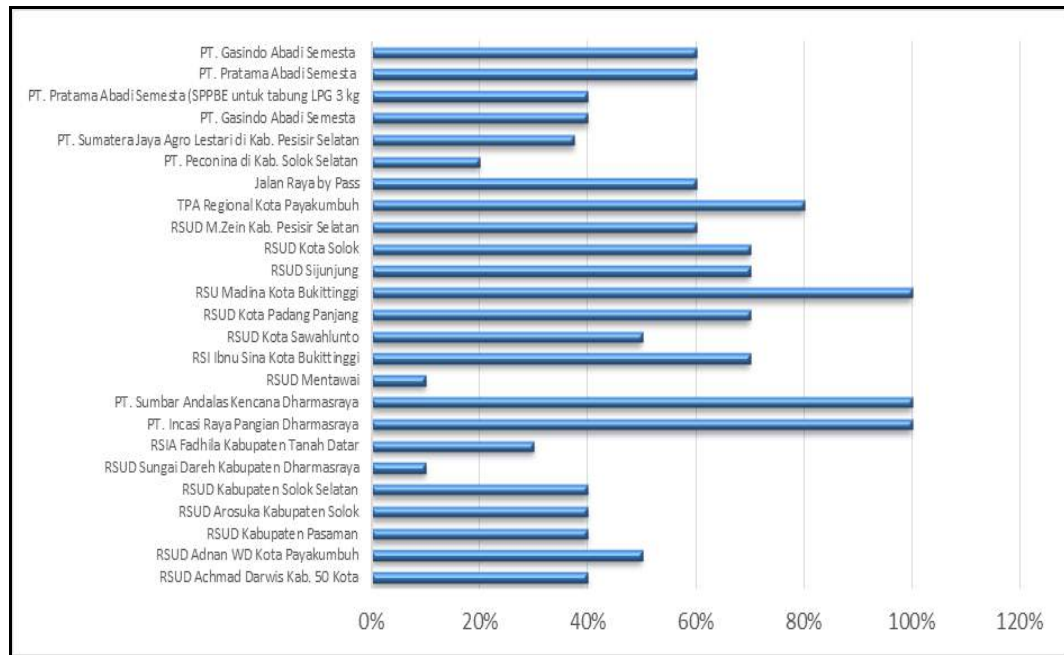
Sumber: olahan data Tabel 35 Buku Data DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat, 2016.

3.6.2. Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan pengawasan selama Tahun 2016 terhadap 25 usaha dan/kegiatan. Pengawasan dilakukan terhadap 4 (empat) komponen, yaitu ketaatan terhadap izin, ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu kualitas air, udara dan LB3. Hasil dari pengawasan disajikan pada gambar di bawah.

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendapat hasil 100% yang artinya usaha tersebut benar-benar komit dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yaitu RSUD Madina Kota Bukittinggi, PT. Sumbar Andalas Kencana dan PT. Incasi Raya Pangian Dharmasraya. Sedang yang memiliki persentase nilai terendah adalah RSUD Mentawai dan RSUD Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya yang masing-masing memperoleh nilai 10%.

Gambar 3.62. Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)) di Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Olahan Tabel 36 Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2016



BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk mengatasi isu lingkungan melalui pendekatan berbagai program pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada masyarakat dengan harapan agar masyarakat dapat terlibat langsung dan aktif hingga secara bertahap dapat mandiri dalam mengelola lingkungannya. Pengembangan program-program inovatif dalam pengelolaan lingkungan berbasis partisipatif dilakukan secara sinergis (terpadu) melibatkan berbagai elemen (Pemerintah, Masyarakat, LSM, Pengusaha/Swasta, Sekolah, dan komponen lain yang terkait).

Inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk mengatasi isu lingkungan melalui pendekatan berbagai program pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada masyarakat dengan harapan agar masyarakat dapat terlibat langsung dan aktif hingga secara bertahap dapat mandiri dalam mengelola lingkungannya. Pengembangan program - program inovatif dalam pengelolaan lingkungan berbasis partisipatif dilakukan secara sinergis (terpadu) melibatkan berbagai elemen (Pemerintah, Masyarakat, LSM, Pengusaha/Swasta, Sekolah, dan komponen lain yang terkait).

Diharapkan dengan menjadikan masyarakat serta komunitas lokal sebagai objek dan subjek pembangunan lingkungan maka akan tercipta suatu sistem masyarakat yang secara mandiri mampu mewujudkan sebuah pola interaksi antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya secara simbiosis mutualistik dalam jangka yang panjang.

Pengembangan program-program inovasi di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Kebijakan langsung Gubernur Sumatera Barat terkait dengan Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) yang sudah dicanangkan sejak tahun 2014 dengan salah satu tujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.
2. Program yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang diukur melalui Indeks Kinerja Lingkungan Hidup (Indeks Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara) adapun program kegiatan ini adalah Pengelolaan Sungai Secara Terpadu (sungai Batang Agam)
3. Program perluasan jangkauan pengawasan yang komprehensif terhadap usaha dan/atau kegiatan melalui pelaksanaan Program Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha

dan/atau Kegiatan di Daerah (PROPERDA).

4. Program yang dikembangkan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya, melalui penerapan sistem teknis kehutanan dengan mendayagunakan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat yang mendukung upaya pelestarian sumberdaya hutan beserta fungsi lain yang dimilikinya.

Inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat diuraikan secara rinci dibawah ini :

4.1. Gerakan Sumatera Barat Bersih

Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) merupakan salah satu kegiatan unggulan dan komitmen Pemerintah Sumatera Barat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau dimulai dari tingkat kecamatan dan kelurahan yang sudah dicanangkan sejak Tahun 2014. GSB juga merupakan gerakan

berskala lokal di Sumatera Barat untuk mendukung pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peningkatan pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau serta aspek peran serta masyarakat, sehingga diharapkan dari kegiatan GSB ini dapat memberikan dampak terhadap masyarakat yang mampu mengembangkan strategi dan membangun kepedulian sesamanya agar dapat 'berkawan' dengan sampah bukan 'berlawan' yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya

Visi

Terciptanya Kebersihan Lingkungan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Misi

- Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dan sanitasi melalui penerapan sistem secara konsisten dan konsekuensi, holistik dan terpadu termasuk pengurangan dan penanganan sampah



- Meningkatkan pengetahuan seluruh lapisan masyarakat tentang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau
- Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.
- Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau

Tujuan

- Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau dari tingkat kecamatan sampai kelurahan di Provinsi Sumatera Barat.
- Memberikan pembinaan dan arah yang jelas kepada kabupaten/kota dalam menangani persoalan lingkungan hidup dari tingkat kecamatan/kelurahan.
- Meningkatkan kinerja unit kerja OPD terkait kabupaten/kota, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam memulihkan lingkungan

Implementasi kegiatan GSB dilakukan dalam beberapa kegiatan, antara lain :

1. *Lomba Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan Hijau*
Lomba Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan hijau bertujuan

untuk mendorong masyarakat di kecamatan dan kelurahan untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan pengelolaan sampah dan tata ruang hijau untuk kehidupan yang berkualitas

Peserta lomba merupakan kecamatan dan kelurahan melalui usulan dari Bupati/Walikota dan setiap kabupaten diwakili oleh 1 (satu) Kecamatan dan Kota akan diwakili oleh 2 (dua) Kelurahan. Pemenang Lomba akan diumumkan pada perayaan Kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus 2017 dan kepada pemenang diberikan piagam, insentif uang dan bantuan becak motor dari CSR perusahaan.

Penilaiannya dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Kecamatan/ Kelurahan Bersih dan Hijau yang terdiri dari unsur Kesehatan, Bidang Ke PU an, Tata Kota, Pemukiman dan Perumahan, Perguruan Tinggi, LSM dan Lingkungan Hidup yang anggotanya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat. Tata Cara dan Kriteria Penilaian Lomba mengacu kepada kriteria penilaian Program Nasional ADIPURA dengan memasukkan

unsur lokal dan pedomannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Berikut dapat dilihat pemenang

lomba kecamatan /kecamatan bersih dan hijau antar tahun 2014 s/d 2016 sebagaimana Tabel 4.1. berikut.

Tabel. 4.1. Pemenang Lomba Kecamatan/Kelurahan Bersih dan Hijau GSB Dalam Kurun Waktu Tahun 2014-2016

Tahun	Pemenang Lomba 2014-2016		
	No.	Kecamatan	Kelurahan
2014	1	Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman	Parak Gadang Kota PADang
	2	Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	Silaing Bawah Kota Padang Panjang
	3	IV Nagari Kabupaten Sijunjung	Manggis Ganting Kota Bukittinggi
2015	1	Sitiung Kabupaten Dharmasraya	Guguk Malintang Kota Padang Panjang
	2	Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar	Desa Bungo Tanjung Kota Pariaman
	3	Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Tanjung Paku Kota Solok
2016	1	Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Pakan Sinayan Kota Payakumbuh
	2	Guguak kabupaten Lima Puluh Kota	Pasar Usang Kota Padang Panjang
	3	Bonjol Kabupaten Pasaman	Tanah Lapang Kota Sawahlunto

Sumber : Bapedalda Prov. Sumbar Tahun 2016

2. Sosialisasi Gerakan Sumatera Barat Bersih

Sosialisasi GSB diberikan kepada unsur lingkungan hidup, camat, dan lurah/wali nagari kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan dalam pengelolaan sampah

yang berbasis masyarakat yang dapat diaplikasikan di daerah masing-masing. Sosialisasi dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat sebagai Key Note Speaker, pakar dan praktisi pengelolaan sampah serta Ulama .

Gambar 4.1. Sosialisasi Gerakan Sumatera Barat Bersih



Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2015

3. Workshop Bank Sampah

Tujuan dari workshop bank sampah ini adalah untuk memperkenalkan pengelolaan sampah melalui kegiatan bank sampah kepada masyarakat dan pelaku bank sampah itu sendiri. Diharapkan setiap kecamatan/kelurahan minimal

mempunyai Bank Sampah sehingga persentase reduksi bank sampah tahun ke tahun dapat ditingkatkan dan ada akhirnya target Nasional Indonesia Bebas Sampah Tahun 2020 dapat dicapai di Provinsi Sumatera Barat

Gambar 4.2. Workshop Pembentukan Bank Sampah



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017

4. Publikasi Gerakan Sumbar Bersih

Cara lain untuk mensosialisasi GSB ini adalah dengan mempublikasikan memperkenalkan GSB ke seluruh masyarakat melalui

pembuatan iklan, film dan berita tentang GSB dan ajakan pengelolaan sampah melalui media cetak dan elektronik yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 4.3. Publikasi Gerakan Sumatera Barat Bersih



Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016

5. Safari Gerakan Sumatera Barat Bersih

Gerakan Safari Sumatera Barat Bersih dicanangkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat yang terinspirasi dari kegiatan Safari Ramadhan yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Barat. Setiap bulan Ramadhan di mesjid-mesjid. Namun Safari GSB langsung dilakukan di lapangan dengan mengajak dan mendorong masyarakat bersama – sama untuk melakukan upaya peningkatan

kebersihan lingkungan dan gerakan bersih-bersih ini dipusatkan pada wilayah umum, seperti pasar, tempat wisata dan sempadan sungai/pantai. Safari GSB diikuti oleh OPD Provinsi Sumatera Barat, Bupati/Walikota dan unsur Muspida di masing-masing Kabupaten/Kota. Safari GSB ini telah dilakukan di 5 (lima) Kabupaten/kota, yaitu Kota Padang, Payakumbuh, Solok, Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 4.4. Gerakan Sumatera Barat Bersih Ke Mesjid dan Mushalla



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017

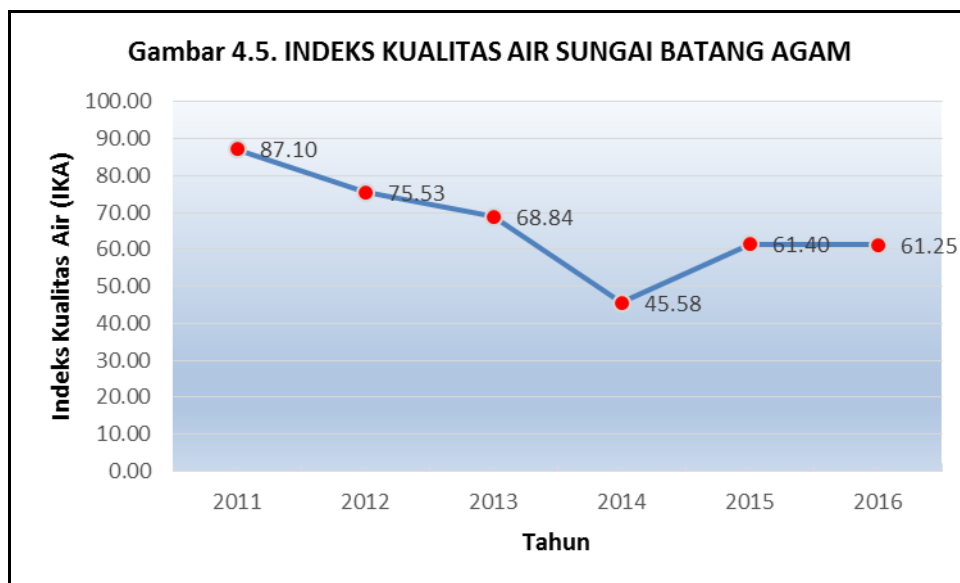
4.2. Pengelolaan Sungai Secara Terpadu

Sungai sebagai salah satu komponen lingkungan memiliki peran dan fungsi penting dan strategis bagi kehidupan manusia (*common property resources*). Sungai merupakan bagian penting dalam dalam berbagai sektor seperti bidang hidrologi, pertanian, peternakan, perikanan dan kepariwisataan. Peran dan fungsi sungai adalah sebagai suplai air, menanggulangi bencana banjir, menanggulangi kekeringan, sarana transportasi dan masih banyak lagi termasuk untuk menunjang kegiatan perekonomian. Banyaknya manfaat yang diperoleh dari sungai ternyata tidak diimbangi dengan upaya menjaga kelestarian fungsi sungai. Sungai dimanfaatkan sebagai media pembuangan limbah baik limbah cair maupun limbah padat, baik limbah domestik maupun non-domestik, baik limbah organik maupun anorganik.

Besarnya beban pencemar yang diterima sungai akibat pembuangan limbah pada akhirnya

dapat melewati daya *self purification* yang dimiliki sungai sehingga mengakibatkan pencemaran sungai. Agar kualitas air sungai tersebut dapat menjamin kelangsungan kehidupan manusia, maka perlu dilakukan pengelolaan dan pengendalian kualitas air sungai secara tepat, intensif dan berkesinambungan.

Salah satu sungai lintas Kabupaten/Kota di Sumatera Barat adalah Sungai Batang Agam. Sungai ini melintas 4 wilayah administrasi yaitu Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. Aktifitas domestik pada 4 (empat) Kabupaten/Kota mendominasi perubahan kualitas air Sungai Batang Agam. Kualitas air sungai ini cenderung mengalami degradasi dari tahun ke tahun. Rata-rata tingkat penurunan kualitas air Sungai Batang Agam adalah 21,47 %/tahun (periode 2011-2016). Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Batang Agam dapat dilihat pada Gambar 4.5. berikut:



Sumber: Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016.

Salah satu aspek penting dalam menjaga dan memelihara kelestarian fungsi sungai adalah pengintegrasian kepentingan lingkungan hidup pada kebijakan dan perencanaan pembangunan. Untuk mengatasi penurunan kualitas air Sungai Batang Agam diperlukan program terpadu yang dapat dijadikan model untuk mengendalikan sekaligus memulihkan kualitas air sungai yaitu dengan menetapkan Sungai Batang Agam sebagai sungai target program terpadu/model pemulihan dan pengendalian pencemaran sungai perkotaan dengan orientasi target pencapaian penurunan beban pencemaran.

Penurunan beban pencemaran Sungai Batang Agam merupakan program strategis Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, dibuatlah nota kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding-MoU*) antara Pemerintah Provinsi dengan 4 (empat) Kabupaten/Kota lintas Sungai Batang Agam. Pada tahun 2016, MoU telah ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Walikota lintas Sungai Batang Agam (Bupati Agam, Bupati Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh) melalui Nomor 120-16.1/GSB-2016, Nomor 22 Tahun 2016, Nomor 130/12/ BLK/2016, Nomor 180/23/Huk-D/2016 dan Nomor 120/MoU/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Penurunan Beban Pencemaran Sungai Batang Agam. Sejalan dengan hal tersebut,

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan program dan kegiatan dalam rangka penurunan beban pencemaran Sungai Batang Agam di Kota Bukittinggi yaitu pembangunan IPAL Komunal, stimulan pengelolaan sampah yaitu pemberian digester kompos kepada masyarakat dan rak *vertical garden*. Selanjutnya pada Tahun 2017 ini dilakukan kegiatan pada lokasi yang sama yaitu pemberian stimulan *biogas digester*, jaring sampah dan pembangunan rumah bank sampah.

Kesepakatan bersama akan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara pihak Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perjanjian kerjasama ini akan memuat hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Penjaringan program dan kegiatan masing-masing sektor antara

Kabupaten/Kota dilakukan dalam penyusunan Rencana Teknis penurunan beban pencemaran Sungai Batang Agam. Target penurunan beban pencemaran sungai adalah sebesar 15%. Program dan kegiatan pemerintah dalam penurunan beban pencemaran sungai ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh masyarakat dan pihak swasta. Untuk itu dilakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat dan swasta didalam menjaga dan memelihara fungsi Sungai Batang Agam.

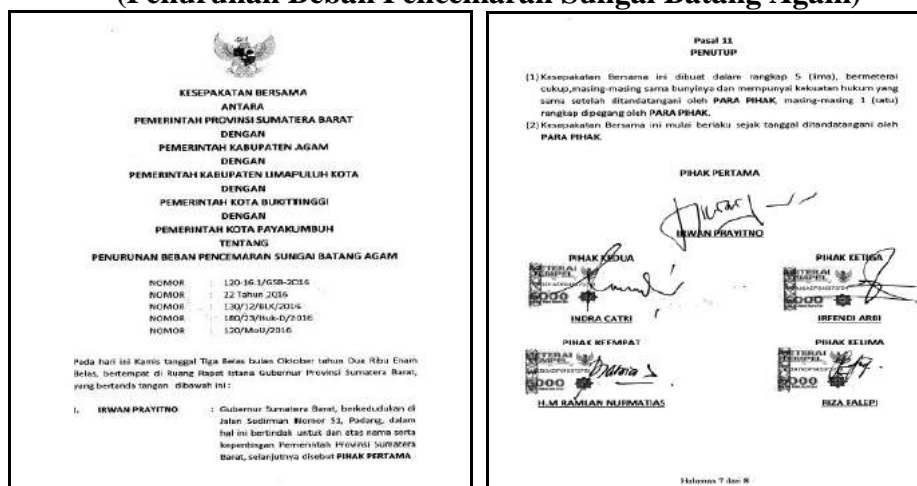
Penganggaran kegiatan ini pada Tahun 2016 sebesar Rp 200.000.000,- sedangkan untuk Tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 240.000.000,- (peningkatan anggaran sebesar 20%).

Gambar 4.6.
**Launching Kegiatan Pengelolaan Sungai Secara Terpadu
(Sungai Batang Agam) Oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat**



Sumber: Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016

Gambar 4.7.
MoU Pengelolaan Sungai Secara Terpadu
(Penurunan Beban Pencemaran Sungai Batang Agam)



Sumber: Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016

4.3. Program Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah (PROPERDA).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi pengelola lingkungan hidup berkomitmen dalam mewujudkan ketaatan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup oleh pelaku usaha/kegiatan guna menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari operasional usaha/kegiatan di Sumatera Barat.

Salah satu bentuk kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong peningkatan ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Daerah (PROPERDA). Kegiatan ini merupakan aplikasi dari mekanisme pengawasan secara terpadu dan komprehensif yang melibatkan instansi teknis tingkat Provinsi Sumatera Barat dan LSM serta Laboratorium. Melalui kegiatan PROPERDA akan dapat memperluas jangkauan objek pengawasan secara komprehensif karena objek PROPER Nasional terbatas jumlahnya. Mekanisme dan kriteria penilaian PROPERDA mengacu kepada



PROPER Nasional, namun objek PROPERDA tidak *overlapping* dengan objek PROPER Nasional.

Kegiatan PROPERDA merupakan salah satu program unggulan daerah yang mampu menekan kejadian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup oleh pelaku usaha/kegiatan, dampak negatif dari operasional usaha/ kegiatan dapat terkontrol, terawasi dan terminimalisasi dengan baik.

Hingga saat ini, kegiatan ini telah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun. Dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, tingkat ketaatan dan kepatuhan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan terjadinya peningkatan peringkat kinerja usaha/kegiatan dari tahun ketahun dengan rata-rata peningkatan 15%. Sedangkan peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup sekitar 75%.

Ketaatan peraturan perundangan-undangan berbanding lurus dengan

penurunan beban pencemaran media lingkungan (air dan udara). Diasumsikan terwujudnya penurunan beban pencemaran dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan PROPERDA ini adalah sekitar 45%. Indikasi lainnya atas keberhasilan kegiatan ini adalah berkurangnya pengaduan masyarakat dari adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan ketaatan tersebut juga buah hasil dari kegiatan pembinaan dan pengawasan secara terpadu antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkesinambungan, serta kepedulian kepala daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

4.4. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)

Salah satu implementasi paradigma baru pengelolaan hutan adalah *Social forestry* (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) yaitu sistem pengelolaan hutan yang mensinergikan tiga sumberdaya (lahan hutan, teknologi pengelolaan dan masyarakat setempat) dalam rangka pemberdayaan masyarakat



dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya, melalui penerapan sistem teknis kehutanan dengan mendayagunakan kearifan local dan nilai-nilai budaya masyarakat yang mendukung upaya pelestarian sumberdaya hutan beserta fungsi lain yang dimilikinya (Sudarna, 2003).

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (*social forestry*) dapat dipandang sebagai paradigma baru, jiwa, spirit atau pendekatan dalam implementasi pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan secara komprehensif, oleh karena itu PHBM tidak hanya membicarakan perlakuan dalam pengelolaan hutan secara parsial, seperti pemanfaatan hasil hutan atau rehabilitasi hutan saja, tetapi mencakup seluruh sektor atau aspek pengelolaan hutan secara menyeluruh yang meliputi: penataan dan penyusunan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan (kayu, non kayu dan jasa lingkungan), penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan konservasi alam.

Berbeda dengan pengelolaan hutan secara konvensional dari prepektif bisnis (ekonomi) seluruh

rangkaian kegiatan pengelolaan hutan dalam PHBM akan melibatkan masyarakat atau melibatkan partisipasi langsung pihak penerima manfaat (masyarakat). Perbedaan yang lain terletak pada pola pendekatan dimana aparat kehutanan tidak bertugas lagi melindungi hutan terhadap perambahan, penebangan dan lainnya tetapi bertindak sebagai fasilitator dan bekerjasama dengan rakyat dalam budidaya pohon dan agroforestri sehingga tumbuh kesadaran dan aksi kolektif dalam perlindungan dan pengamanan hutan.

Agar pengelolaan hutan secara PHBM bersifat fleksibel dan sesuai dengan perkembangan yang ada maka diperlukan strategi pengembangan, berupa:

1. Pengelolaan Kawasan dan Sumberdaya

Pengelolaan Kawasan dan Sumberdaya hutan dilakukan melalui penetapan unit pengelolaan, penataan hutan secara partisipatif, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, reklamasi lahan, penumbuhan dan perlindungan hutan, penguatan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan pada areal pengelolaan hutan kemasyarakatan

yang diharapkan nantinya bertindak sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan.

2. Pengembangan Institusi

Pengembangan institusi dilakukan dalam rangka mendorong dan memfasilitasi terbentuknya jaringan kerjasama yang dapat menciptakan akses terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar. Bentuk kerjasamanya dapat berupa;

- a. Kerjasama antara institusi bisnis (BUMN/BUMD/BUMS) dengan kelompok masyarakat, yang dilakukan dalam bentuk mengusahakan setiap segmen pengelolaan kehutanan seperti: Pembenihan, pembibitan, rehabilitasi, pemeliharaan, perlindungan hutan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
- b. Pembedaan Industri hulu dengan industri hilir dalam siklus agribisnis kehutanan yakni industri hulu memiliki cakupan usaha yang dilakukan pada kawasan sumberdaya hutan atau terkait dengan peningkatan produktivitas sumberdaya, sementara industri hilir meliputi kegiatan pemanenan, pengolahan

serta pemasaran produk olahannya.

- c. Penyertaan saham, yakni penyertaan saham masyarakat sebagai peserta PHBM yang diperoleh dari konversi kawasan hutan atau lahan yang dijadikan areal PHBM, tenaga kerja yang digunakan dalam pembinaan dan pemeliharaan hutan, perlindungan dan pengamanan kawasan serta sumberdaya hutan.

3. Pengembangan Sistem Usaha

Pengembangan system usaha yang berbentuk kemitraan antara masyarakat dengan pengusaha harus didasari atas kejelasan tanggung jawab, peran dan proporsi biaya-manfaat dari masing-masing pihak yang bermitra.

4.4.1. Langkah-langkah

Pelaksanaan PHBM

Pelaksanaan PHBM meliputi tahapan-tahapan berikut:

1. Fasilitasi Usulan PHBM

Fasilitasi Usulan PHBM terkait dalam hal perijinan atau penetapan Areal Kerja skema PHBM oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimulai dari proses sosialisasi, penyepakatan skema, pembentukan kelompok/lembaga,

penyiapan administrasi dan kelengkapan dokumen usulan penetapan Areal Kerja.

2. Perencanaan Partisipatif

Rencana pengelolaan hutan meliputi kegiatan pembagian kawasan dalam blok-blok ekosistem, tipe dan rencana pemanfaatan hutan, yang selanjutnya dibagi dalam petak-petak berdasarkan intensitas efisiensi pengelolaan. Sebagian besar tempat kegiatan ini belum dilakukan secara optimal baik karena institusi yang ada belum mampu melakukan maupun karena kurang melibatkan peran serta masyarakat sekitar.

Rencana pengelolaan diatas di susun dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) termasuk masyarakat sekitar dengan memperhatikan andil tugas dan tanggungjawab, serta hak kewajiban secara berkeadilan.

Dalam hal pemilihan (komposisi) jenis tumbuhan yang diusahakan dalam kegiatan pembudidayaanya akan ikut menentukan keberhasilan pola pengelolaan, sehingga rancangan teknik social forestry akan bersifat spesifik (khusus) untuk masing-masing daerah, karena

adanya keragaman kondisi biofisik sumberdaya hutan dan karakteristik sosial ekonomi masyarakatnya.

3. Pemberdayaan masyarakat

Teknologi pemanfaatan sumber daya hutan yang ramah lingkungan sebenarnya telah tersedia, namun teknologi semacam ini tidak selalu digunakan karena pengguna teknologi memiliki aksesibilitas terhadap teknologi ramah lingkungan yang kurang, yang biasanya karena kendala pembiayaan, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Untuk itu upaya peningkatan keberdayaan pengguna teknologi ramah lingkungan tersebut merupakan langkah yang harus ditempuh dengan jalan: (1) memberikan akses kepada masyarakat setempat terhadap sumberdaya hutan, (2) peningkatan kapasitas masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan pendidikan untuk penguasaan teknologi seperti diklat, studi banding dll, (3) pemberian akses terhadap sumber pembiayaan seperti kredit dan lain lain dan (4) pendampingan dan penyuluhan.

4. Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan pengelolaan hutan kemasyarakatan dilaksanakan dengan :

- a. Penumbuhan dan penguatan institusi masyarakat yang berupa kelompok usaha bersama, kelompok usaha tani hutan, koperasi dan lain-lainnya.
- b. Penataan peraturan dilakukan untuk mengoptimalkan peran-serta masyarakat dalam pengelolaan hutan yang mencakup pengaturan dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, hak dan kewajiban, serta peraturan internal kelompok sesuai tujuan dalam pengelolaan hutan.
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan sifat dan karakteristik daerah dengan memperhatikan batas-batas geografi, pemerintahan dan adat istiadat.

5. Rehabilitasi hutan

Rehabilitasi hutan dilakukan dengan penanaman hutan kembali oleh masyarakat sekitar hutan yang dikoordinir dalam kelompok-kelompok dalam kegiatan membuat

persemaian, mempersiapkan lokasi yang akan di rehabilitasi dan menanam tanaman secara tupangsari untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemeliharaan hutan hasil penanaman kembali (reboisasi) dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan mendapat hak untuk memetik hasil dari pohon-pohon yang ditanam dan dipeliharanya.

6. Perlindungan hutan dan Konservasi lahan

Serangkaian kegiatan pengelolaan hutan akan berhasil apabila perlindungan dan pengamanan hutan dari segala ancaman dan gangguan hutan dapat dilakukan dengan baik. Gangguan dan ancaman terhadap hutan bermacam-macam antara lain:

- a. Penebangan liar (Illegal logging)

Penebangan liar merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang utama, pencegahan dan penindakan bagi pelaku kegiatan ini mutlak diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan, dalam hal ini penegakkan hukum menjadi kunci sukses bagi usaha pengendalian penebangan liar ini, lemahnya penegakkan hukum baik dari segi aparat pelaksana maupun perangkat hukum yang ada merupakan masalah klasik yang

selalu dihadapi.

b. Perambahan Hutan

Perambahan hutan terjadi pada umumnya karena masalah kependudukan yang mengalami pertumbuhan secara terus menerus dan memerlukan lahan untuk tempat tinggal maupun untuk usaha lain seperti ladang berpindah, masalah ini diharapkan dapat di atasi dengan partisipasi masyarakat untuk melakukan usaha tani menetap dengan pola agroforestri.

c. Pengendalian kebakaran hutan dan Lahan

Sudah menjadi pengetahuan yang umum bila kebakaran hutan menjadi salah satu gangguan hutan yang dapat menimbulkan efek yang sangat besar baik dari segi ekonomi maupun ekologi.

Ribuan hektar bahkan jutaan hektar hutan dapat musnah dalam waktu yang relatif singkat oleh kebakaran hutan, di samping memerlukan biaya yang sangat mahal kebakaran hutan dalam skala besar juga sangat sulit dipadamkan sehingga filosofi mencegah akan lebih baik dari memadamkan sangatlah tepat jika diterapkan pola partisipatif masyarakat dalam

penanggulangan kebakaran hutan.

4.4.2. Perkembangan PHBM

Perkembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2016 yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kerjasama Berbagai Pihak Dalam Pengembangan Perhutanan Sosial (PS)/PHBM

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah melibatkan SKPD/OPD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dunia usaha, LSM serta perguruan tinggi. Berikut ini adalah MoU yang telah disepakati :

- a. MoU Pemerintah Provinsi dengan 13 Kabupaten/Kota Se Sumbar Implementasi REDD dengan Pengembangan PS
- b. MoU Pemerintah Provinsi dengan Dunia Usaha dalam Pengembangan Model Nagari PS (PT Semen Padang)
- c. MoU Dinas Kehutanan dengan LSM dalam pendampingan dan Pengembangan PS (UNDP, KKI Warsi, Kemitraan, Q Bar, Kehati, Pundi Sumatera, CO2BV , WWF dll)

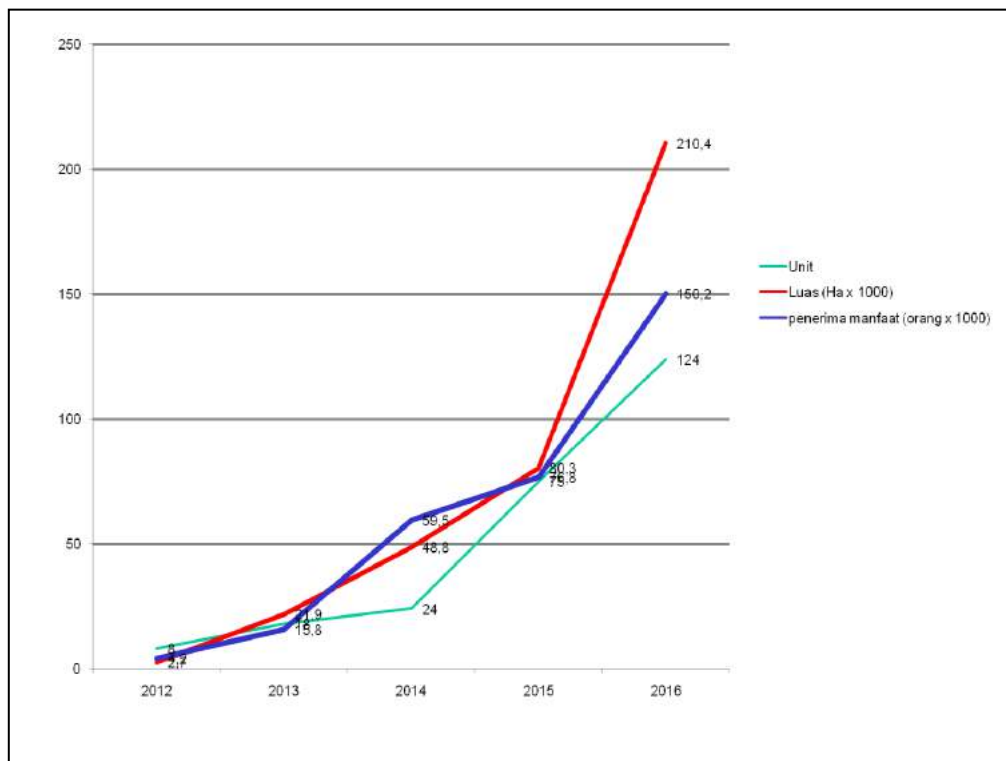


- d. MoU Dinas Kehutanan dengan Perguruan Tinggi untuk KKN Tematik Pengembangan PS (UNAND, UMSB)
- e. MoU Dinas Kehutanan dengan SKPD Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan/Perikanan, Bakorluh untuk Basis kegiatan Pembangunan dalam Areal Kerja PS.
- f. MoU dengan UNDP dan LPPM Unand untuk Fasilitasi Kegiatan *Livelihood* PHBM.

2. Perkembangan Luasan, Unit dan Manfaat dari PHBM

Perkembangan PHBM menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahunnya dimana PHBM dimulai pada Tahun 2012 dengan luas 2.700 Ha dari 8 unit/lokasi dengan penerima manfaat sebanyak 4.200 orang dan saat ini (Tahun 2016) telah mencapai luasan sebesar 210.400 Ha dengan lokasi sebanyak 124 lokasi dan memberikan manfaat sebanyak 150.200 orang. Adapun perkembangan PHBM dapat dilihat sebagaimana Gambar 4.8 berikut :

Gambar 4.8. Perkembangan PHBM Provinsi Sumatera Barat dalam Kurun waktu 2012 s/d 2016



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Tabel 4.2. Sebaran PHBM Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/Kelompok			Hutan Adat	Ket.
		Hutan Nagari	HKm	HTR		
1.	Pasaman Barat	2	8	1	-	
2.	Pasaman	9	12	-	-	
3.	Lima Puluh Kota	14	2	-	-	
4.	Tanah Datar	-	2	-	1*	
5.	Solok	5	1	-	-	
6.	Solok Selatan	7	-	-	-	
7.	Pesisir Selatan	-	-	2	-	
8.	Sijunjung	25	3	1	-	
9.	Dharmasraya	2	-	-	-	
10.	Kep. Mentawai	-	-	-	2*	
11.	Padang Pariaman	2	3	-	-	
12.	Padang	-	2	-	-	
13.	Sawahlunto	-	2	-	-	
14.	Agam	11	4	-	-	
15.	Padang Panjang	-	1	-	-	
Jumlah Total		77	40	4	3	

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

3. Kegiatan Livelihood PHBM

Kegiatan *livelihood* merupakan kegiatan pengembangan usaha bagi masyarakat yang berada dekat kawasan hutan atau masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Adapun kegiatan *livelihood* sebagai berikut :

- a. Pengembangan ternak sapi
 - Pengembangan ternak sapi di Hutan Kemasyarakatan Aur Serumpun Kabupaten Padang Pariaman.
 - Pengembangan ternak sapi di Hutan Nagari Pakan Rabaa Kabupaten Solok Selatan
 - Pengembangan sapi pedaging di Hutan Nagari Pasir Talang

- Timur Kabupaten Solok Selatan.
- Pengembangan ternak sapi di Hutan Nagari Simancuang Kabupaten Solok Selatan.
- Pengembangan ternak sapi di Hutan Kemasyarakatan Sontra Kabupaten Pasaman.
- Pengembangan ternak Kerbau di Hutan Nagari Paru Kabupaten Sijunjung.

Gambar 4.9. Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016

- b. Produk Kelompok PHBM
 - Produk gula semut (aren) Hutan Kemasyarakatan Setia Kabupaten Pasaman
 - Produk teh/kopi/serbuk kulit Manggis Hutan Nagari Ranah Pantai Cermin Kabupaten Solok Selatan.
 - Produk Madu dan Teh Asam Kandis/Gelugur dari Hutan Kemasyarakatan/Hutan Nagari di Kabupaten Sijunjung.
- c. Pengembangan PLTMH di Hutan Kemasyarakatan Patamuan Saiyo Kabupaten Pasaman.
- d. Pengembangan Ekowisata di Hutan Nagari Sungai Buluah Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 4.10.
Produk Kelompok PHBM di Kabupaten Pasaman,
Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016

Gambar 4.11. Pengembangan PLTMH di Hutan Kemasyarakatan
Patamuan Saiyo Kabupaten Pasaman



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016

Gambar 4.12. Pengembangan Ekowisata di Hutan Nagari Sungai Buluah
Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2016

4.5. Inovasi Daerah Kelembagaan, Penggangan dan Peningkatan SDM

Permasalahan lingkungan hidup adalah masalah serius yang membutuhkan penanganan dan pengelolaan lintas sektor. Pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari berbagai elemen pendukungnya yang saling terkait dan bersinergi satu sama lain. Elemen-elemen tersebut antara lain dukungan kebijakan dan komitmen kepala daerah yang diikuti oleh pendanaan yang memadai. Selain itu diperlukan perencanaan dan sinkronisasi perencanaan yang baik antar *stakeholders* yang terkait, mulai dari internal pemerintah daerah hingga pihak-pihak lain di luar lingkungan pemerintah daerah seperti BUMN, swasta, organisasi masyarakat dan lain sebagainya.

Dari sisi penganggaran untuk kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup, Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran yang cukup memadai dan terdapat kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, untuk

urusan wajib lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31.339.428.379 atau mencapai 0,66% dari total belanja pada APBD (Rp. 4.774.203.758.691).

Untuk tahun 2017 ini, proporsi anggaran disesuaikan dengan struktur OPD yang baru. Inovasi anggaran dilakukan dengan sinergitas program pemerintah dengan CSR perusahaan sehingga efektifitas anggaran dapat dilakukan dengan cakupan kegiatan relatif lebih luas.

Selain dari kesiapan anggaran, pengelolaan lingkungan hidup juga harus ditunjang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Hingga akhir Tahun 2016 sebagaimana yang termuat dalam lampiran Tabel Data 50 dan 51, dari total 63 orang ASN di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 14 orang diantaranya (22,2%) adalah ASN yang sudah mencapai tingkat pendidikan strata 2 (S2), dan terdapat kecenderungan peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Begitu juga halnya dengan ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas staf

dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis lainnya yang juga terus diupayakan peningkatannya.

Dari sisi kelembagaan, melalui Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, telah ditetapkan bahwa untuk organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan tipe B. Dengan nomenklatur kelembagaan yang baru ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dioptimalkan strukturnya dengan adanya penambahan tupoksi persampahan, yang selama ini lebih banyak dikelola oleh Dinas Prasarana Jalan, Penataan Ruang dan Pemukiman. Dengan ditambahkan pengelolaan sampah pada tupoksi Dinas Lingkungan Hidup, proses penanganan sampah mulai dari timbulan hingga pemrosesan akhir di TPA diharapkan akan dapat lebih terintegrasi dan terkoordinasi.

Keterlibatan stakeholders lain dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat diwujudkan antara lain melalui pelibatan pakar

lingkungan/akademisi dan berbagai pihak/sector dalam beberapa kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Pihak-pihak lain tersebut antara lain pihak swasta melalui program corporate social responsibility-nya dan salah satu LSM lingkungan (LSM jejaring pengelolaan Sampah Ranah Minang) sebagai pendamping masyarakat dalam pengelolaan/penanganan sampah domestik di Kota Bukittinggi.



BAB V PENUTUP

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat diimplementasikan secara riil di daerah.

Lingkungan hidup yang baik akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 merupakan dokumen yang menyajikan data dan penjelasan mengenai upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat sebagai respon terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat munculnya beragam tekanan terhadap lingkungan.

Dokumen ini telah disusun melalui tahapan-tahapan mulai dari inventarisasi dan *collecting* data dari berbagai pihak (Instansi Terkait Tingkat Provinsi, Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta dari Lembaga Pemerintahan lainnya), konsultasi publik untuk menjangkau isu prioritas dengan metoda pendekatan partisipasi dan dilanjutkan dengan proses analisis terhadap masing-masing isu lingkungan.

Dari proses perumusan isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sebagaimana Surat Pernyataan Gubernur Sumatera Barat Nomor

660/052/SP/DLH/2017 Tanggal 20 April 2017 sebanyak 4 (empat) isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat, yaitu (1) Pertambangan, (2) Pencemaran Air, (3) Kebencanaan dan (4) Pengelolaan Sampah.

Metode yang digunakan dalam penyusunan buku ini adalah metode P-S-R (*Pressure, State, Response*) yang menggambarkan hubungan antara sumber tekanan penyebab isu, kondisi lingkungan dan statusnya serta upaya dan inovasi yang telah dilakukan Sumatera Barat dalam mengelola isu dan pencapaian target. Analisis telah dilakukan terhadap seluruh isu sesuai dengan tabel yang terdapat dalam lampiran, namun pembahasan lebih terfokus pada 4 (empat) isu prioritas.

Dari hasil analisis isu pertambangan, dapat disimpulkan bahwa aktifitas pertambangan memberikan bencana dan kerugian yang sangat besar terhadap lingkungan, antara lain bencana banjir, longsor, pencemaran air dan hilangnya keanekaragaman hayati. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya seperti



penghijauan, reboisasi, penataan kembali terhadap izin pertambangan melalui evaluasi dan verifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan menetapkan Perda mengenai Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan.

Isu pencemaran air yang muncul dalam konsultasi publik adalah pencemaran Danau Maninjau akibat tekanan dari aktifitas perikanan Keramba Jaring Apung (KJA). Proses *up welling* yang terjadi di Danau Maninjau mengakibatkan naiknya residu pakan ikan yang telah mengendap di dasar danau, sehingga menyebabkan air danau menjadi keruh dan kualitas airnya menurun (menurunnya nilai DO). Akibatnya ikan danau mati secara massal. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan pemantauan kualitas air danau, melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait, mengikuti sosialisasi terkait penyelamatan danau, memfasilitasi kegiatan sosial bersama LSM dan mengikuti konferensi danau sedunia yang ke-16 di Bali. Khusus untuk Danau Maninjau, telah dibuat kebijakan pengurangan KJA, stop

KJA, pembersihan permukaan danau, pengerukan dan bioremediasi.

Isu kebencanaan yang dianalisis lebih difokuskan pada bencana banjir, gempa dan tanah longsor. Tekanan penyebab terjadinya banjir dan longsor adalah adanya alih fungsi lahan dan tingginya curah hujan di Sumatera Barat, sedangkan gempa sering terjadi disebabkan oleh kondisi geografis Sumatera Barat yang berada pada kawasan Mentawai Megathrust. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya mitigasi baik secara struktural dengan membangun tanggul atau bronjong di sepanjang aliran sungai yang memang rawan dengan banjir dan dekat dengan pemukiman penduduk maupun non struktural melalui perencanaan wilayah, pembentukan LSM peduli bencana seperti Kogami, Jemari Sakato dan organisasi-organisasi perguruan tinggi peduli bencana, pelatihan dan penyuluhan, pembentukan POKJA, *mapping* daerah rawan banjir disertai dengan petunjuk evakuasi, lokasi posko dan lokasi pos pengamat banjir, pembuatan SOP dan simulasi bencana banjir serta pembentukan

SATGAS seperti PUSDALOPS dan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Analisis terhadap isu persampahan menunjukkan bahwa isu ini selalu dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, terutama di wilayah perkotaan. Untuk Sumatera Barat, timbulan sampah terbesar berasal dari Kota Padang dan Bukittinggi. Sebagai Kota Wisata, jumlah timbulan sampah di Bukittinggi akan melonjak pada hari libur karena banyaknya wisatawan yang berasal dari luar Bukittinggi. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah antara lain melalui kelembagaan pengelolaan sampah, pengurangan beban sampah dan pembentukan klaster pengelolaan sampah di Sungai Batang Agam, sosialisasi pada masyarakat di sempadan sungai, penyerahan peralatan solar biodigester, gotong royong di lokasi klaster, dan pendampingan yang dilakukan oleh LSM.

Dari analisis yang dilakukan terhadap isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat serta analisis P-S-R terhadap sub bab isu lingkungan, maka perlu dilakukan beberapa tindak lanjut yang harus

diimplementasikan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Pada tataran kebijakan dalam konteks perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berbasis jasa ekosistem dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) perlu segera direalisasikan sehingga DDDTLH dan RPPLH dapat dijadikan acuan utama didalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Penanganan permasalahan pencemaran dan kerusakan Danau Maninjau tidak hanya menuntut kontribusi dan keterlibatan Pemerintah Daerah akan tetapi juga dituntut kontribusi nyata dari kementerian terkait karena Danau Maninjau termasuk kedalam salah satu Danau Strategis Nasional.
3. Sebagai tindak lanjut dari MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan

Penutup

kabupaten/kota terkait dalam konteks penanganan sungai Batang Agam, perlu dilakukan implementasi program penanganan secara riil di lapangan dengan tetap mengedepankan peran serta masyarakat.

4. Dinas Lingkungan Hidup perlu menjalin koordinasi yang intensif dengan Dinas ESDM dan Dinas PUPR dalam rangka mencari solusi pemecahan masalah dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktifitas pertambangan dan pengelolaan sampah.



DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2016. Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
- _____. 2016. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bapedalda Provinsi Sumatera Barat
- _____. 2016. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat
- _____. 2016. Laporan Akuntalitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- _____. 2015. Sumatera Barat dalam Angka, 2015/2016, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
- _____. 2016. Laporan Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
- _____. 2016. Neraca Sumber Daya Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN I TABEL DATA



DAFTAR TABEL DATA

Tabel 1	Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya di Provinsi Sumatera Barat	1
Tabel 1.A	Tutupan Lahan di Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat	4
Tabel 1.B	Pola Ruang Wilayah Darat Provinsi Sumatera Barat 2009 - 2029	6
Tabel 1.C	Pola Ruang Wilayah Pesisir Sumatera Barat Tahun 2009 - 2029	8
Tabel 1.D	Rencana Luas dan Perubahan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Provinsi Sumatera Barat Hingga Tahun 2029	9
Tabel 1.E	Rencana Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Barat Hingga Tahun 2029	10
Tabel 2	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di Provinsi Sumatera Barat	11
Tabel 2.A	Indeks Tutupan Lahan di Provinsi Sumatera Barat	12
Tabel 3	Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status di Provinsi Sumatera Barat	13
Tabel 3.A	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat	14
Tabel 3.B	Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	16
Tabel 3.C	Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati di Provinsi Sumatera Barat	17
Tabel 3.D	Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKLD) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat	17
Tabel 4	Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat	18
Tabel 4.A	Perbandingan Luas Lahan Kritis Tahun 2015-2016 di Provinsi Sumatera Barat	19
Tabel 4.B	Luas Lahan Potensial Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat	20
Tabel 5	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air di Provinsi Sumatera Barat	21
Tabel 5.A	Perbandingan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air Beberapa Kabupaten/Kota Tahun 2013 - 2016 di Provinsi Sumatera Barat	22
Tabel 6	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Provinsi Sumatera Barat	23
Tabel 6.A	Perbandingan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016	25
Tabel 7	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah di Provinsi Sumatera Barat	26
Tabel 7.A	Perbandingan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah di Provinsi Sumatera Barat	27
Tabel 8	Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove di Provinsi Sumatera Barat	28
Tabel 8.A	Penanaman Mangrove di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015	28
Tabel 9	Luas dan Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat	29
Tabel 9.A	Perbandingan Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat	29
Tabel 10	Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat	30
Tabel 10.A	Transplantasi Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2015	30
Tabel 11	Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Barat	31
Tabel 11.A	Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Barat	31



Tabel 12	Jenis Pemanfaatan Lahan di Provinsi Sumatera Barat	32
Tabel 13	Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Provinsi Sumatera Barat	33
Tabel 13.A	Rekapitulasi Produksi Minerba di Provinsi Sumatera Barat	35
Tabel 14	Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi di Provinsi Sumatera Barat	36
Tabel 14.A	Perbandingan Luas Area Penghijauan dan Reboisasi Tahun 2014 s/d 2016	37
Tabel 14.B	Perbandingan Realisasi Jumlah Pohon untuk Penghijauan dan Jumlah Pohon untuk Reboisasi	38
Tabel 15	Kondisi Sungai di Provinsi Sumatera Barat	39
Tabel 15.A	Inventarisasi Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Lintas Provinsi di Provinsi Sumatera Barat	40
Tabel 16	Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung di Provinsi Sumatera Barat	42
Tabel 16.A	Kapasitas dan Sumber Air Danau/Situ/Telaga/Embung di Provinsi Sumatera Barat	43
Tabel 17	Kualitas Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat	46
Tabel 17.A	Indeks Kualitas Air (IKA) 9 (Sembilan) Sungai Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	108
Tabel 18	Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung di Provinsi Sumatera Barat	109
Tabel 18.A	Perbandingan Kualitas Air Danau Tahun 2014 s/d 2016 di Provinsi Sumatera Barat	113
Tabel 19	Kualitas Air Sumur di Provinsi Sumatera Barat	117
Tabel 19.A	Ketersediaan Air Tanah di WS Silaut Tarusan	121
Tabel 19.B	Sumber Mata Air di Pulau-Pulau Kecil	122
Tabel 20	Kualitas Air Laut di Provinsi Sumatera Barat	123
Tabel 20.A	Perbandingan Kualitas Air Laut Tahun 2014 s/d 2016 di Provinsi Sumatera Barat	127
Tabel 21	Curah Hujan Rata-Rata Bulanan di Provinsi Sumatera Barat	129
Tabel 21.A	Nama dan Lokasi Stasiun di Provinsi Sumatera Barat	130
Tabel 22	Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Barat	131
Tabel 22.A	Perbandingan Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Tahun 2013-2016 di Provinsi Sumatera Barat	131
Tabel 23	Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Barat	132
Tabel 23.A	Perbandingan Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Barat	133
Tabel 24	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat	134
Tabel 24.A	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kategori Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Barat	135
Tabel 24.B	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kategori Pendidikan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat	136
Tabel 25	Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Provinsi Sumatera Barat	137
Tabel 25.A	Perbandingan Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Provinsi Sumatera Barat	137
Tabel 26	Jumlah Rumah Tangga Miskin di Provinsi Sumatera Barat	138



Tabel 26.A	Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2012-2016 di Provinsi Sumatera Barat	139
Tabel 27	Volume Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran di Provinsi Sumatera Barat	140
Tabel 27.A	Volume Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran di Provinsi Sumatera Barat	142
Tabel 28	Suhu Rata-Rata Bulanan di Provinsi Sumatera Barat	143
Tabel 28.A	Perbandingan Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2014 s/d 2016	144
Tabel 29	Kualitas Air Hujan di Provinsi Sumatera Barat	144
Tabel 29.A	Kimia Air Hujan Mingguan di Provinsi Sumatera Barat	145
Tabel 30	Kualitas Air Hujan di Provinsi Sumatera Barat	148
Tabel 30.A	Indeks Kualitas Udara Provinsi Sumatera Barat 2011-2014	152
Tabel 31	Penggunaan Bahan Bakar di Provinsi Sumatera Barat	153
Tabel 31.A	Penggunaan Bahan Bakar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	154
Tabel 32	Penjualan Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat	156
Tabel 32.A	Perbandingan Jumlah Angkutan Umum Berdasarkan Jenis Tahun 2012-2015	156
Tabel 33	Perubahan Penambahan Ruas Jalan di Provinsi Sumatera Barat	157
Tabel 33.A	Panjang Jalan di Provinsi Sumatera Barat	157
Tabel 34	Dokumen Izin Lingkungan di Provinsi Sumatera Barat	158
Tabel 34.A	Dokumen Lingkungan (Amdal) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kewenangan (Parsial) Kabupaten/Kota yang Telah Selesai Proses Penilaiannya pada Komisi Penilai Amdal Provinsi Sumatera Barat	159
Tabel 34.B	Dokumen Lingkungan Dalam Proses Penilaian/Pemeriksaan pada Komisi Penilai Amdal Provinsi Sumatera Barat/Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	160
Tabel 35	Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3 di Provinsi Sumatera Barat	161
Tabel 35.A	Perusahaan Pengumpul dan Pengangkut Limbah B3 Yang Melakukankerja Sama di Sumatera Barat	165
Tabel 36	Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)) di Provinsi Sumatera Barat	166
Tabel 36.A	Hasil Pengawasan Objek PROPER di Provinsi Sumatera Barat	167
Tabel 37	Bencana Banjir, Korban dan Kerugian di Provinsi Sumatera Barat	168
Tabel 37.A	Perbandingan Peristiwa Banjir antara 2013 s/d 2016 di Sumatera Barat	169
Tabel 38	Bencana Kekeringan, Luas dan Kerugian di Provinsi Sumatera Barat	170
Tabel 39	Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas dan Kerugian di Provinsi Sumatera Barat	171
Tabel 39.A	Jumlah Hotspot Pada Kejadian Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Barat	172
Tabel 40	Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, Kerugian di Provinsi Sumatera Barat	173
Tabel 40.A	Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat	174
Tabel 40.B	Kawasan Rawan Letusan Gunung Api di Provinsi Sumatera Barat	175
Tabel 41	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Sumatera Barat	176
Tabel 41.A	Perbandingan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2014 s/d 2016 di Provinsi Sumatera Barat	177



Tabel 42	Perkiraan Jumlah Timbunan Sampah per Hari di Provinsi Sumatera Barat	178
Tabel 42.A	Perkiraan Jumlah Timbunan Sampah yang masuk ke TPA Sampah per Hari di Provinsi Sumatera Barat	179
Tabel 42.B	Perkiraan Timbunan Sampah Menurut Sumber di Provinsi Sumatera Barat	180
Tabel 42.C	Perkiraan Sampah Terolah Harian di Provinsi Sumatera Barat	180
Tabel 42.D	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah di Provinsi Sumatera Barat	181
Tabel 43	Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi di Provinsi Sumatera Barat	182
Tabel 43.A	Kegiatan Penanaman Bibit Bambu di Beberapa Nagari oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	184
Tabel 44	Status Pengaduan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	185
Tabel 44.A	Jumlah Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Penanganan Pengaduan di Provinsi Sumatera Barat	188
Tabel 44.B	Jumlah Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Sektor Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat	188
Tabel 45	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat	189
Tabel 45.A	Jumlah Lembaga yang Menjadi Anggota WALHI di Provinsi Sumatera Barat	190
Tabel 46	Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat	191
Tabel 46.A	Perbandingan Perolehan Penghargaan Nasional Lingkungan Tahun 2012 s/d 2016 di Provinsi Sumatera Barat	196
Tabel 47	Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	197
Tabel 48	Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat	198
Tabel 48.A	Produk Hukum Berdasarkan Sektor Lingkungan Hidup yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2015	200
Tabel 49	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat	204
Tabel 49.A	Anggaran Pengelolaan Sampah di Provinsi Sumatera Barat	205
Tabel 50	Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat	206
Tabel 50.A	Jumlah Pegawai Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Berpendidikan S2 Berdasarkan Jurusan	206
Tabel 51	Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup dan Staf yang telah Mengikuti Diklat di Provinsi Sumatera Barat	207
Tabel 51.A	Jumlah Peserta Diklat Teknis yang diikuti Pegawai Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	207
Tabel 52	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Sumatera Barat	208
Tabel 53	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat	213



Tabel - 1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		791.671	783.858	316	7.405	92
		2. Kawasan Bergambut		-	-	-	-	-
		3. Kawasan Resapan Air		-	-	-	-	-
	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Sempadan Pantai		-	-	-	-	-
		2. Sempadan Sungai		-	-	-	-	-
		3. Kawasan Sekitar Danau		-	-	-	-	-
		4. Ruang Terbuka Hijau		-	-	-	-	-
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam		769.775	768.161	288	1.320	6
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya		-	-	-	-	-
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Marga Satwa Laut		-	-	-	-	-
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut		-	-	-	-	-
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau		-	-	-	-	-
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut		-	-	-	-	-
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		-	-	-	-	-	
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor		-	-	-	-	-	
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang		-	-	-	-	-	
		3. Kawasan Rawan Banjir		-	-	-	-	-	
	Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	-	-	-	-	-	
			ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam	-	-	-	-	-	
			iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi	-	-	-	-	-	
		2. Kawasan Rawan Bencana	i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi		109.108,50	107.045,87	806,01	0,00	1.256,62
			ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi		4.251.300,70	4.161.570,70	47.436,70	571,30	41.722,00
			iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah		3.601.499,70	3.532.881,47	47.609,00	582,23	20.427,00
			iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif		514.760,00	491.983,50	8.219,70	0,00	14.556,80
			v. Kawasan Rawan Tsunami		185.290,00	174.534,70	8.307,00	0,00	2.448,30
			vi. Kawasan Rawan Abrasi		-	-	-	-	-
			vii. Kawasan Rawan Gas Beracun		-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	i. Kawasan Imbuhan Air Tanah	-	-	-	-	-
			ii. Sempadan Mata Air	-	-	-	-	-
	Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfir		-	-	-	-	-
		2. Ramsar		-	-	-	-	-
		3. Taman Buru		-	-	-	-	-
		4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah		-	-	-	-	-
		5. Kawasan Pengungsian Satwa		-	-	-	-	-
		6. Terumbu Karang		-	-	-	-	-
	7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi		-	-	-	-	-	
Kawasan Budidaya				-	-	-	-	-

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel - 1.A. Tutupan Lahan di Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Kerentanan Gerakan Tanah / Segmen	Luas (Ha)	Tutupan Lahan Vegetasi (Ha)	Tutupan Lahan Area Terbangun (Ha)	Tutupan Lahan Tanah Terbuka (Ha)	Tutupan Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Gerakan Tanah					
1.	Sangat Rendah	832.800,00	796.485,50	26.480,00	538,50	9.296,00
2.	Rendah	1.017.000,00	996.355,10	14.070,00	37,90	6.537,00
3.	Menengah	1.291.000,00	1.282.689,69	4.933,00	4,31	3.373,00
4.	Tinggi	460.700,00	457.351,18	2.126,00	1,82	1.221,00
B	Terletak Pada Zona Patahan					
1.	Segmen Sumpur	66.570,00	66.178,90	248,70	-	142,40
2.	Segmen Sianok	102.000,00	96.646,60	4.499,00	-	854,40
3.	Segmen Sumani	117.500,00	103.921,00	2.459,00	-	11.120,00
4.	Segmen Suliki	228.700,00	225.237,00	1.013,00	-	2.450,00
C	Letusan Gunung Berapi					
I	Gunung Marapi					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	23.440,00	23.260,77	176,00	-	3,23
2.	Kawasan Rawan Bencana II	6.637,00	6.637,00	-	-	-
3.	Kawasan Rawan Bencana III	9.820,00	9.820,00	-	-	-
II	Gunung Tandikat					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	13.100,00	12.963,67	115,50	-	20,83
2.	Kawasan Rawan Bencana II	6.848,00	6.848,00	-	-	-
3.	Kawasan Rawan Bencana III	1.267,00	1.267,00	-	-	-
III	Gunung Talang					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	23.290,00	21.780,70	442,30	-	1.067,00
2.	Kawasan Rawan Bencana II	6.470,00	6.245,69	70,71	-	153,60



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Kawasan Rawan Bencana III	1.272,00	1.272,00	-	-	-
IV	Gunung Kerinci					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	12.070,00	12.056,54	1,50	-	11,96
2.	Kawasan Rawan Bencana II	3.957,00	3.957,00	-	-	-
3.	Kawasan Rawan Bencana III	937,50	937,50	-	-	-
D	Gempa Bumi					
1.	Zona Kerawanan Tinggi	1.558.000,00	1.511.040,00	19.810,00		27.150,00
2.	Zona Kerawan Menengah	2.331.000,00	2.293.288,70	25.720,00	571,3	11.420,00
3.	Zona Kerawanan Rendah	362.300,00	357.242,00	1.906,00		3.152,00
E	Tsunami					
1.	Zona Kerawanan Tinggi	53.410,00	49.416,00	2.607,00	-	1.387,00
2.	Zona Kerawan Menengah	56.530,00	53.092,20	2.895,00	-	542,80
3.	Zona Kerawanan Rendah	75.390,00	72.026,50	2.805,00	-	558,50

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 1.B. Pola Ruang Wilayah Darat Provinsi Sumatera Barat 2009 - 2029
Tahun : 2016

No	Nama Wilayah	Kawasan Lindung		Jumlah (A)	Kawasan Budidaya									Jumlah (B)	Jumlah A + B (Ha)
		Hutan Lindung	Suaka Alam & Cagar Budaya		Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Industri	Danau / Perairan Darat	Permukiman	Perkebunan	Pertanian	Pertambangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Kota Solok	1.141	2.038	3.179	-	-	-	-	-	479	142	1.964	-	2.585	5.764
2.	Kota BukitTinggi	-	-	-	-	-	-	185	-	1.191	-	1.148	-	2.524	2.524
3.	Kota Padang	13.433	16.427	29.860	-	-	-	-	462	13.920	-	25.039	214	39.636	69.496
4.	Kota Padang Panjang	-	333	333	-	-	-	-	-	594	-	1.373	-	1.967	2.300
5.	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	1.493	296	5.547	-	7.336	7.336
6.	Kota Payakumbuh	295	-	295	-	-	-	16	288	1.850	2.022	3.572	-	7.748	8.043
7.	Kota Sawahlunto	294	-	294	3.262	4.752	-	-	468	810	-	17.623	136	27.051	27.345
8.	Kabupaten Pesisir Selatan	23.096	293.602	316.698	5.299	25.378	40.004	-	1.845	4.906	59.150	126.215	-	262.797	579.495
9.	Kabupaten Solok Selatan	80.040	66.980	147.020	13.314	22.584	51.084	-	1.125	743	56.438	42.312	-	187.600	334.620
10.	Kabupaten Dharmasraya	8.660	12.532	21.192	10.172	42.881	26.341	-	1.461	4.905	81.674	107.487	-	274.921	296.113
11.	Kabupaten Solok	118.603	56.028	174.631	3.505	11.443	12.078	-	8.451	4.734	30.971	127.988	-	199.169	373.800
12.	Kabupaten Lima Puluh Kota	99.022	14.368	113.390	5.503	10.692	17.792	-	3.199	6.082	35.091	143.681	-	222.040	335.430
13.	Kabupaten Agam	22.451	25.180	47.631	1.320	11.038	7.049	148	9.880	3.967	43.312	98.816	-	175.529	223.160
14.	Kabupaten Padang Pariaman	13.334	28.992	42.326	-	-	-	70	141	4.291	1.515	84.588	17	90.623	132.949
15.	Kabupaten Tanah Datar	18.480	19.478	37.958	6.651	53	-	-	7.750	3.921	23.450	53.817	-	95.642	133.600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
16.	Kabupaten Pasaman	158.455	32.424	190.879	245	5.590	38.255	13	-	3.519	35.642	170.620	-	253.884	444.763
17.	Kabupaten Pasaman Barat	78.264	-	78.264	19.751	2.241	3.505	-	292	8.443	96.152	130.129	-	260.513	338.777
18.	Kabupaten Sijunjung	78.015	38.996	117.011	14.735	12.898	28.618	-	979	3.519	28.990	106.330	-	196.069	313.080
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	6.406	189.226	195.632	203.806	89.573	-	-	158	960	81.167	29.839	-	405.503	601.135
Jumlah (Ha)		719.989	796.604	1.516.593	287.563	239.123	224.726	432	36.499	70.327	576.012	1.278.088	367	2.713.137	4.229.730
Presentase (%)		17,02	18,83	35,86	6,8	5,65	5,31	0,01	0,86	1,66	13,62	30,22	0,01	64,14	100

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 1.C. Pola Ruang Wilayah Pesisir Sumatera Barat Tahun 2009 - 2029
Tahun : 2016

No.	Nama Wilayah	Kawasan Lindung/ Konservasi						Kawasan Budidaya								Jumlah (Ha)
		PPK (Suaka Pulau Kecil)	PPK (Suaka Pesisir)	PPK (Taman Pulau Kecil)	Konservasi Maritim	Hutan Sempadan Petani	Konservasi Perairan	Keramba Jaring Apung (KJA)	Perairan Untuk Pemanfaatan Umum dan Pelabuhan	Perikanan Tangkap Komersil (Pelagis)	Perikanan Tangkap Komersil (Lainnya)	Taman Wisata Perairan	Pariwisata Bahari	Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar	Kawasan Alur Pelataran dan Peruntukan Lainnya yang Belum Teralokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Kota Padang	-	-	-	-	-	757,08	-	629,93	42.808,58	-	-	155,4	-	-	44.350,99
2.	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	262,61	19.415,71	-	-	692,25	-	-	20.370,57
	Seluruh Wilayah Pesisir															
	Kabupaten/Kota (Perairan Laut)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.438.856,34	-	-	-	204.131,97	3.438.856,34
3.	Kabupaten Agam	450,82	-	-	-	-	-	-	-	29.195,46	-	-	-	-	-	29.646,28
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	171.183,31	5.893,25	-	3.827,33	-	-	-	613.427,59	-	2.908,51	220.190,51	1.348,85	-	1.018.779,34
5.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	50.931,63	-	23.865,30	688,9	-	-	75.485,82
6.	Kabupaten Pasaman Barat	-	6.840.650	-	-	714,17	-	-	5.50,032	70.094,37	-	-	204,43	-	-	78.403,65
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	-	16,29	-	1.551,23	2.368,06	183,37	371.909,70	-	-	2.188,75	-	-	378.217,40
Jumlah (Ha)		450,82	17.205.161	5.893,25	16,29	4.541,50	2.308,31	2.368,06	1.075,91	1.197.783,04	3.438.856,34	26.773,81	224.120,24	1.348,85	204.131,97	5.084.110,39

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 1.D. Rencana Luas dan Perubahan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Provinsi Sumatera Barat Hingga Tahun 2029

Tahun : 2016

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Luas Hutan Suaka Alam dan Wisata		Rencana Perubahan Luas		
			SK. Menhut 304	Rencana Tahun 2029	Ha	%1)	%2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	69.496	24.663	16.247	31.743,84	65,9	78,11
2.	Kota Padang Panjang	2.300	630	333	329,9	10.624,13	0,81
3.	Kota Bukittinggi	2.524	-	-	0	-	-
4.	Kota Solok	5.764	1.038	2.038	1.290,33	173	3
5.	Kota Pariaman	7.336	-	-	0	-	-
6.	Kota Payakumbuh	8.043	-	-	0	-	-
7.	Kota Sawahlunto	27.345	-	-	1	-	-
8.	Kabupaten Dharmasraya	296.113	9.400	12.532	-41.383,41	77	102
9.	Kabupaten Agam	223.230	22.511	25.180	2.632,10	11,67	6,48
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	579.496	274.348	295.629	45.483,61	18,18	111,92
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	335.430	18.031	14.368	-2.523,11	14,94	6,21
12.	Kabupaten Pasaman	444.763	30.414,00	32.424	4.724,43	17,06	11,63
13.	Kabupaten Solok	373.800	56.573	56.028	11.826,70	26,76	29,10
14.	Kabupaten Pasaman Barat	338.777	137	-	-54,51	100,00	0,13
15.	Kabupaten Sijunjung	313.080	38.542	38.996	4.627,14	13,46	11,39
16.	Kabupaten Padang Pariaman	132.879	14.097	28.992	15.182,70	109,95	37,36
17.	Kabupaten Solok Selatan	334.620	67.068	66.980	14.803,74	28,37	36,43
18.	Kabupaten Tanah Datar	133.600	22.986	19.478	1.920,28	10,94	4,73
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	601.135	177.555	189.226	28.975,67	18,08	71,30

Keterangan : 1) Presentase perubahan terhadap luas hutan lindung per Kabupaten/Kota.

2) Presentase perubahan terhadap jumlah.

3) Angka luasan rencana dapat saja berubah setelah ada perubahan dari Menteri Kehutanan.

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 1.E. Rencana Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Barat Hingga Tahun 2029
Tahun : 2016

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Luas Hutan Suaka Alam dan Wisata		Rencana Perubahan Luas		
			SK. Menhut 304	Rencana Tahun 2029	Ha	%1)	%2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	69.496	10.915,27	13.433	2.517,73	114,29	-0,39
2.	Kota Padang Panjang	2.300	531,1	-	329,9	10.624,13	0,81
3.	Kota Bukittinggi	2.524	0	0	0	-8,81	0
4.	Kota Solok	5.764	1.819,39	1.141	-678,39	8,81	0,39
5.	Kota Pariaman	7.336	0	-	0	20,08	0
6.	Kota Payakumbuh	8.043	313,72	295	-18,72	115,8	0,03
7.	Kota Sawahlunto	27.345	127,81	294	166,19	51,56	-0,06
8.	Kabupaten Dharmasraya	296.113	72.099,38	8.660	-63.439,38	102,67	30,4
9.	Kabupaten Agam	223.230	19.973,77	22.451	2.477,23	1,85	0,15
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	579.496	21378,01.	23.096	1.717,99	6,23	0,55
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	335.430	272.578,86	99.022	-173.556,86	10,77	12,06
12.	Kabupaten Pasaman	444.763	188.656,48	158.455	-30.201,48	30,26	23,45
13.	Kabupaten Solok	373.800	56.573	56.028	11.826,70	26,76	29,10
14.	Kabupaten Pasaman Barat	338.777	120.673,06	78.264	-42.409,06	50,3	24,93
15.	Kabupaten Sijunjung	313.080	68.589,56	78.015	9.425,44	0,9	0,25
16.	Kabupaten Padang Pariaman	132.879	13.769,98	13.334	-435,98	17,42	0,99
17.	Kabupaten Solok Selatan	334.620	73.821,73	80.040	6.218,27	6.218,27	1,83
18.	Kabupaten Tanah Datar	133.600	17.095,85	18.480	1.384,15	6,16	0,43
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	601.135	6.205,10	6.406	200,9	12,83	0,33

Keterangan : 1) Presentase perubahan terhadap luas hutan lindung per Kabupaten/Kota.
 2) Presentase perubahan terhadap jumlah.
 3) Angka luasan rencana dapat saja berubah setelah ada perubahan dari Menteri Kehutanan.

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel - 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	18.602,00	6.474,00	3.983,00	3.533,00	36.776,00	128,00
2.	Kota Padang Panjang	334,00	690,00	139,00	449,00	1.071,09	18,25
3.	Kota Bukittinggi	1.522,60	388,67	659,10	718,35	0,00	21,53
4.	Kota Solok	844,00	876,00	859,00	1.092,00	563,00	214,00
5.	Kota Pariaman	1.330,00	2.342,00	2.064,00	978,00	538,00	84,00
6.	Kota Payakumbuh	3.129,67	2.572,00	514,03	1.396,00	360,88	70,55
7.	Kota Sawahlunto	8.497	1.680	659	4.602	4.298	29
8.	Kabupaten Dharmasraya	15.742,50	2.914,19	92.693,63	218.007,40	51.822,49	1.690,00
9.	Kabupaten Agam	27.201,14	27.002,61	56.633,50	33.360,00	65.033,00	9.994,67
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	52.277,00	33.237,00	37.116,00	126.060,00	303.092,00	16.594,00
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	8.624,00	31.116,00	25.171,00	17.129,00	248.148,00	3.100,00
12.	Kabupaten Pasaman	112.076,00	22.486,00	103.397,00	42.721,00	114.083,00	42,30
13.	Kabupaten Pasaman Barat	73.331,00	13.105,00	2.706,00	146.200,00	27.284,00	7.756,00
14.	Kabupaten Solok	39.735,00	23.433,00	129.438,00	10.082,00	190.874,00	3.701,00
15.	Kabupaten Sijunjung	86.987,00	10.629,00	48.032,00	47.449,00	119.615,00	368,00
16.	Kabupaten Padang Pariaman	8.770,00	27.000,00	16.359,00	36.235,00	28.717,00	0,00
17.	Kabupaten Solok Selatan	5.921,00	12.975,00	19.452,00	96.800,00	192.400,00	5.507,00
18.	Kabupaten Tanah Datar	25.231,00	22.945,00	32.853,00	8.833,00	19.026,00	24.712,00
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3.096,00	740,00	55.168,00	85.630,00	456.301,00	200,00

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

**Tabel - 2.A. Indeks Tutupan Lahan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Kab/Kota (Km ²)	Luas Kawasan Hutan (Km ²)	Tutupan Hutan	Indeks Tutupan Hutan
1	Kota Padang	694,96	367,76	0,52918154	71,10
2	Kota Padang Panjang	23,00	10,7109	0,4656913	65,26
3	Kota Bukittinggi	25,24	0	0	
4	Kota Solok	57,64	5,63	0,09767523	31,37
5	Kota Pariaman	73,36	5,38	0,07333697	
6	Kota Payakumbuh	80,43	3,61	0,04486883	26,51
7	Kota Sawahlunto	273,45	42,98	0,15717681	36,85
8	Kabupaten Dharmasraya	2.961,13	518,2249	0,17500917	38,49
9	Kabupaten Agam	2.232,30	650,33	0,29132733	49,20
10	Kabupaten Pesisir Selatan	5.794,95	3030,92	0,52302781	70,54
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.354,30	2481,48	0,73979072	90,50
12	Kabupaten Pasaman	3.947,63	1140,83	0,28899112	48,99
14	Kabupaten Pasaman Barat	3.887,77	272,84	0,07017905	28,84
13	Kabupaten Solok	3.738,00	1908,74	0,51063135	69,40
15	Kabupaten Sijunjung	3.130,80	1196,15	0,3820589	57,56
16	Kabupaten Padang Pariaman	1.328,79	287,17	0,21611391	42,28
17	Kabupaten Solok Selatan	3.346,20	1924	0,57498057	75,32
18	Kabupaten Tanah datar	1.336,00	190,26	0,14241018	35,49
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	6.011,35	4563,01	0,75906577	92,27
	Total	42.297,30	18600,025	0,43974496	64,23

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	360.509
2.	Hutan Lindung	783.136
3.	Taman Nasional	523.317
4.	Taman Wisata Alam	610
5.	Taman Buru	0
6.	Cagar Alam	245.608
7.	Suaka Margasatwa	
8.	Taman Hutan Raya	240
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	1.913.420
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	36.886
3.	Hutan Kota	215,70
4.	Taman Hutan Raya	240
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	38

Keterangan : Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 yang telah mengakomodasi perubahan kawasan hutan (Tata Batas Kawasan Hutan, Pelepasan Kawasan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan)

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 3.A. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Taman Siberut	190.500	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2.	Taman Kerinci Seblat	353.780	Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan
3.	Taman Hutan Raya Dr. M.Hatta	240	Kota Padang
4.	Cagar Alam Rimbo Panti	2.250	Kabupaten Pasaman
5.	Cagar Alam Lembah Anai	221	Kabupaten Tanah Datar
6.	Cagar Alam Malampah	14.555	Kabupaten Pasaman
7.	Cagar Alam Alahan Panjang	17.664	Kabupaten Pasaman
8.	Cagar Alam Maninjau Utara Selatan	17.304	Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman
9.	Cagar Alam Air Putih	23.467	Kabupaten Lima Puluh Kota
10.	Cagar Alam Gunung Sago	5.486	Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota
11.	Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat	9.658	Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar
12.	Cagar Alam Gunung Merapi	9.670	Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar
13.	Cagar Alam Barisan I	74.821	Kota Padang' Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok
14.	Cagar Alam Batang Pagean I	12.200	Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung
15.	Cagar Alam Batang Pagean II	33.580	Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung
16.	Cagar Alam Air Tarusan	25.177	Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan
17.	Cagar Alam Arau Hilir	5.377	Kota Padang
18.	Cagar Alam Beringin Sakti	0,03	Kabupaten Tanah Datar
19.	Cagar Alam Lembah Harau	270,5	Kabupaten. Lima Puluh Kota
20.	Cagar Alam Batang Palupuh	3,4	Kabupaten Agam
21.	Taman Wisata Alam Mega Mendung	12,5	Kabupaten Tanah Datar
22.	Taman Wisata Alam Lembah Harau	27,5	Kabupaten Lima Puluh Kota
23.	Taman Wisata Alam Rimbo Panti	570	Kabupaten Pasaman



(1)	(2)	(3)	(4)
24.	Taman Wisata Laut Pulau Pieh	39.900	Kabupaten Padang Pariaman
25.	Taman Wisata Alam Bukit Batu Patah	500	Kabupaten Tanah Datar
26.	Taman Wisata Alam Laut Teluk Saibi Sarabua	21.200	Kabupaten Kepulauan Mentawai
27.	Kawasan Suaka Marga Satwa Pulau Pagai Selatan	24.952	Kabupaten Kepulauan Mentawai
28.	Taman Buru Sidoali	2.354	Kabupaten Tanah Datar
29.	Taman Buru Pulau Sipora	84.500	Kabupaten Kepulauan Mentawai
30.	Suaka Alam Sulasih Talang	6.150	Kabupaten Solok
31.	Suaka Marga Satwa Pulau Panjang	1.980	Kabupaten Padang Pariaman
32.	Suaka Margasatwa Pulau Penyu	450	Kabupaten Pesisir Selatan

Keterangan : -

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 3.B. Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Kabupaten/Kota	Fungsi Kawasan (HA)				
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kota Padang	24.247	12.174	246	0	0
2.	Kota Padang Panjang	4	608	0	0	0
3.	Kota Bukittinggi	0	0	0	0	0
4.	Kota Solok	771	346	0	0	0
5.	Kota Pariaman	0	0	0	0	0
6.	Kota Payakumbuh	0	351	0	0	0
7.	Kota Sawahlunto	0	122	139	4.427	4.405
8.	Kabupaten Dharmasraya	5.548	12.023	28.317	26.858	16.568
9.	Kabupaten Agam	26.563	20.711	7.704	2.544	8.820
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	285.764	23.571	44.891	4.514	32.327
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	20.390	121.118	19.454	3.939	11.492
12.	Kabupaten Pasaman	32.793	199.031	26.808	0	5.368
13.	Kabupaten Pasaman Barat	60	72.416	4.957	18.418	7.285
14.	Kabupaten Solok	48.070	117.673	11.222	4.674	10.235
15.	Kabupaten Sijunjung	40.123	78.488	29.749	19.865	10.014
16.	Kabupaten Padang Pariaman	16.148	12.901	0	0	0
17.	Kabupaten Solok Selatan	65.779	84.346	53.739	13.181	13.920
18.	Kabupaten Tanah Datar	20.163	19.876	0	9.411	101
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	183.351	7.383	0	252.678	53.039

Keterangan : 0 = Tidak ada luasan area yang dimaksud
 KSA-KPA = Kawasan Suaka Alam - Kawasan Pelestarian Alam
 HL = Hutan Lindung
 HPT = Hutan Produksi Terbatas
 HPK = Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
 Kawasan Hutan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 Batas provinsi sesuai dengan SK-35/Menhut-II/2013, Perhitungan dengan menggunakan GIS

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 3.C. Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Kabupaten/Kota	Nama Taman Kehati	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Padang	Taman Kehati Universitas Andalas	15
2.	Kota Solok	Taman Kehati Solok	3
3.	Kota Pariaman	Taman Kehati Sikapak	5
4.	Kota Sawahlunto	Taman Kehati Kandih	5
5.	Kabupaten Agam	Taman Kehati Koto Malintang	10
6.	Kabupaten Padang Pariaman	Taman Kehati Padang Pariaman	10
7.	Kabupaten Pasaman	Taman Kehati Lubuk Sikaping	10
8.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Taman Kehati Padang Mangateh	10

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 3.D. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKLD) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2016

No.	Lokasi KKPD	Nama Kawasan	Jenis Yang Dilindungi	Luas Kawasan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Padang	Taman Pulau Kecil	Penyu, Kima, Kuda Laut	2.274,96
2.	Kota Pariaman	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyu	11.525,00
3.	Kabupaten Pesisir Selatan	Suaka Alam Perairan	Penyu/Terumbu Karang	125,42
4.	Kabupaten Padang Pariaman	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Kec. Batang Gasan	Penyu dan Ikan Hias	684,00
5.	Kabupaten Pasaman Barat	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyu dan Ikan tertentu	6.154,25
6.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kawasan Perairan Selat Bunga Laut dan Sekitarnya Sebagai KKPD	Ekosistem Terumbu Karang	50.532,87

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 4. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Kabupaten/Kota	Kritis (Ha)				Sangat Kritis (Ha)				Penyebab Lahan Kritis
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kota Padang	0	1,0632	0,0000	29,5423	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1. Pola Penggunaan Lahan 2. Pola Tanam 3. Jenis Tanah
2.	Kota Padang Panjang	0	143,7531	0,0000	160,9966	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3.	Kota Bukittinggi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4.	Kota Solok	0	79,0813	64,8409	359,1955	0,0000	23,8852	17,0706	373,0300	
5.	Kota Pariaman	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6.	Kota Payakumbuh	0	330,7678	0,0000	247,3272	0,0000	10,7652	0,0000	1,2132	
7.	Kota Sawahlunto	3.274,6025	118,6170	0,0000	8.167,0950	578,2966		0,0000	991,0597	
8.	Kabupaten Dharmasraya	2.568,8081	615,3318	2,4117	24.494,1283	2.079,0244	1.707,5345	399,0343	4.129,4863	
9.	Kabupaten Agam	8,8152	1.877,4217	9,1364	3.887,4436	0,0000	117,9466	58,3606	784,2354	
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	84,6559	1.176,7408	90,6820	4.201,5349	0,0000	0,0000	43,1615	0,0000	
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	2.307,9405	34.250,1862	1.051,1346	49.328,7427	196,3826	18.679,5699	615,2680	17.025,5460	
12.	Kabupaten Pasaman	0,0000	13.852,6909	402,5949	25.951,0848	0,0000	13.269,4805	374,2437	10.898,5937	
13.	Kabupaten Pasaman Barat	817,1114	1.149,8181	0,0000	3.230,3794	55,8033	215,2974	0,0000	742,5346	
14.	Kabupaten Solok	2.697,2040	12.858,7122	4.438,7699	47.461,1859	921,5987	7.202,4786	906,2964	11.512,3364	
15.	Kabupaten Sijunjung	10.888,9085	15.748,0326	4.528,7534	41.264,4201	2.952,8137	8.622,2328	2.314,1845	12.950,8096	
16.	Kabupaten Padang Pariaman	0,0000	1,7716	0,0000	114,8069	0,0000	0,0000	9,9863	0,0000	
17.	Kabupaten Solok Selatan	1.745,5590	3.089,9036	7.577,1300	13.410,2905	0,0000	837,6177	1.797,7063	2.492,6752	
18.	Kabupaten Tanah Datar	5.780,9158	4.647,0518	1.259,7503	17.861,4565	2.357,2387	1.223,6528	419,4918	2.508,6860	
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	413,4852	2,5886	3,4642	206,0172	87,8508	0,0000	0,0000	0,0000	

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 4.A. Perbandingan Luas Lahan Kritis Tahun 2015-2016 di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016

No.	Kabupaten/Kota	Kritis (Ha)	
		2015	2016
1.	Kota Padang	6.686,40	30,60582
2.	Kota Padang Panjang	26,00	304,77297
3.	Kota Bukittinggi	-	-
4.	Kota Solok	-	503,15753
5.	Kota Pariaman	0,00	-
6.	Kota Payakumbuh	200,00	578,13348
7.	Kota Sawahlunto	2.932,65	12.822,99720
8.	Kabupaten Dharmasraya	2.936,00	40.576,82032
9.	Kabupaten Agam	29.600,00	6.148,46166
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	318.057,00	7.070,07640
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	130.690,10	96.616,49026
12.	Kabupaten Pasaman	201.723,00	49.180,23731
13.	Kabupaten Solok	158.301,00	83.150,54138
14.	Kabupaten Pasaman Barat	2.461,55	5.360,46000
15.	Kabupaten Sijunjung	73.925,00	97.769,52008
16.	Kabupaten Padang Pariaman	8.637,20	116,58913
17.	Kabupaten Solok Selatan	-	31.711,99451
18.	Kabupaten Tanah Datar	-	29.596,29344
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	625,64903

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 4.B. Luas Lahan Potensial Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Kabupaten/Kota	Potensial Kritis (Ha)				Agak Kritis (Ha)			
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kota Padang	-	7.541,8700	23.072,8118	17.436,6019	-	4.244,4137	842,4740	5.232,9117
2.	Kota Padang Panjang	-	454,3532	4,1409	1.068,0360	-	-	-	301,0598
3.	Kota Bukittinggi	-	-	-	2.313,9622	-	-	-	70,9027
4.	Kota Solok	-	146,0885	-	1.952,7481	-	93,9378	688,1002	1.940,1893
5.	Kota Pariaman	-	-	-	5.678,7722	-	-	-	-
6.	Kota Payakumbuh	-	5,7467	-	6.284,0849	-	-	-	646,3348
7.	Kota Sawahlunto	-	1,9877	-	580,9754	-	-	-	5.177,1702
8.	Kabupaten Dharmasraya	6.750,8095	125,6418	0,1465	28.102,0500	15.192,9597	8.748,5448	5.135,6243	148.560,8511
9.	Kabupaten Agam	1.665,0086	14.299,9252	21.521,6955	100.640,5494	699,9272	3.909,1875	4.788,6268	23.562,0718
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	3.468,6354	15.620,6163	271.113,7831	157.051,7838	825,7768	4.415,0059	14.405,7852	33.143,1386
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	261,4256	58.783,1843	17.766,0018	43.905,2593	1.133,9285	3.419,8390	724,4782	39.515,4302
12.	Kabupaten Pasaman		159.080,5007	28.610,1796	48.284,1180		10.621,3001	3.114,6207	40.076,8334
13.	Kabupaten Pasaman Barat	6.107,5800	48.894,3601	59,4377	157.944,9091	2.499,3337	16.641,1614		21.027,9456
14.	Kabupaten Solok	250,9014	32.592,5323	15.886,9421	33.637,2448	761,9890	63.930,6704	27.144,1951	37.438,4424
15.	Kabupaten Sijunjung	1.750,0580	46.268,4646	8.035,1042	32.195,1898	4.075,6270	7.135,0104	25.255,1555	43.944,9473
16.	Kabupaten Padang Pariaman		10.241,9038	13.365,0280	89.878,2380	-	2.495,8458	2.656,1614	8.350,1142
17.	Kabupaten Solok Selatan	488,5891	5.464,8538	3.639,4312	22.000,3021	10.815,7394	74.094,1658	52.735,5256	89.264,1973
18.	Kabupaten Tanah Datar	172,4823	-	17.025,3142	22.272,4966	1.006,5303	1.211,9483	1.418,0697	34.350,1449
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	173.161,8376	4.656,1297	152.792,8301	49.130,7712	12.011,4565	51,4653	17.340,5725	10.394,2459

Keterangan : (-) Tidak ada luasan area dimaksud

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 5. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran Erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Kota Padang			
1.	< 20 cm	0,2 - 1,3		
2.	20 - < 50 cm	1,3 - 4,0		
3.	50 - < 100 cm	4,0 - 9,0	1,815	Tidak
4.	100 - 150 cm	9,0 - 12		
5.	> 150 cm	> 12		
II.	Kota Bukittinggi			
1.	< 20 cm	0,2 - 1,3		
2.	20 - < 50 cm	1,3 - 4,0		
3.	50 - < 100 cm	4,0 - 9,0	2,08	Tidak
4.	100 - 150 cm	9,0 - 12		
5.	> 150 cm	> 12		
III.	Kota Pariaman			
1.	< 20 cm	0,2 - 1,3	0,4	Tidak
2.	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	2,96	Tidak
3.	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	5,81	Tidak
4.	100 - 150 cm	9,0 - 12	10,53	Tidak
5.	> 150 cm	> 12	10,89	Tidak
IV.	Kabupaten Dharmasraya			
1.	< 20 cm	0,2 - 1,3	1,98	Melebihi
2.	20 - < 50 cm	1,3 - 4,0	4,89	Melebihi
3.	50 - < 100 cm	4,0 - 9,0	4,98	Tidak
4.	100 - 150 cm	9,0 - 12	9,84	Tidak
5.	> 150 cm	> 12	12,83	Tidak
V.	Kabupaten Agam			
1.	< 20 cm	0,2 - 1,3	1,6	Melebihi
2.	20 - < 50 cm	1,3 - 4,0	4,28	Melebihi
3.	50 - < 100 cm	4,0 - 9,0	2,1	Tidak
4.	100 - 150 cm	9,0 - 12	4,3	Tidak
5.	> 150 cm	> 12	6,9	Tidak
VI.	Kabupaten Pesisir Selatan			
1.	< 20 cm	0,2 - 1,3	1,15	Tidak
2.	20 - < 50 cm	1,3 - 4,0	1,1	Tidak
3.	50 - < 100 cm	4,0 - 9,0	5,5	Tidak
4.	100 - 150 cm	9,0 - 12	8	Tidak
5.	> 150 cm	> 12	9	Tidak

Keterangan : -

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016



Tabel - 5.A. Perbandingan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air Beberapa Kabupaten/Kota Tahun 2013 - 2016 di Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2016

No.	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (mm/10 tahun)	Besaran Erosi (mm/10 tahun)			
			2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kota Padang					
	< 20 cm	0,2 - 1,3	±1,5	-	0	
	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	±4,2	-	1,82	
	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	±9,1	-	0	1,815
	100 - 150 cm	9,0 - 12	±11,5	-	0	
	> 150 cm	> 12	±10,0	-	0	
2.	Kabupaten Agam					
	< 20 cm	0,2 - 1,3	1,4	1,6	1,9	1,6
	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	4,1	4,22	4,88	4,28
	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	2,3	2,54	2,6	2,1
	100 - 150 cm	9,0 - 12	10,6	9,6	5,6	4,3
	> 150 cm	> 12	9,8	10,28	8,4	6,9
3.	Kabupaten Dharmasraya					
	< 20 cm	0,2 - 1,3	-	0	7,46	1,98
	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	-	1,52	0,38	4,89
	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	-	4,98	19,44	4,98
	100 - 150 cm	9,0 - 12	-	9,65	11,53	9,84
	> 150 cm	> 12	-	10,09	9,71	12,83

Keterangan : Ambang Kritis Erosi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

Sumber : Dokumen IKPLHD Kota Padang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Dharmasraya, 2015



Tabel - 6. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Kota Padang			
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	> 80 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	<1%	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	3,80%	Melebihi
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	41,60%	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,91 g/cm ³	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	65,84%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	0,37 cm/jam	Melebihi
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,87	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	1,1 mS/cm	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	32,5 mV	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,6 x 10 ⁷ cfu/g	Tidak
II.	Kota Bukittinggi			
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	58,12 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	1,12%	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	47,73%	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	16,15%	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,9 g/cm ³	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	65,81%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	2,97 cm/jam	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,51	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0,84	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	16,87 mV	Melebihi
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	3,75x10 ⁶ cfu/g	Tidak
III.	Kota Pariaman			
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	>84 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	none	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	24,76%	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	7,17%	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,9	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	66	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam ; > 8,0 cm/jam	7,25	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4,76	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik / DHL	> 4,0 mS/cm	0,97	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	30,1	Tidak
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,3 x 10 ⁵	Melebihi
IV.	Kabupaten Dharmasraya			
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	-	-
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	-	-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	-	-
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	-	-
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,30	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	50,94	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	7,71	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,0	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	15	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	-	-
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	-	-
V.	Kabupaten Solok			
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	30 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	2%	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	18,97	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	19,16	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,42	Melebihi
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	46,41	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	1,19	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	7,90	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	17,84	Melebihi
9.	Redoks	< 200 mV	-	-
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	-	-
VI.	Kabupaten Agam			
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	49	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	N/A	N/A
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	37,5	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	0,96 g/cm ³	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	86,41%	Melebihi
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	315cm/jam	Melebihi
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	5,8	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	0,09	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	268 mv	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	TAD	TAD
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	-	-
VII.	Kabupaten Pesisir Selatan			
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	19 cm	Tidak
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	35%	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	12%	Tidak
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	66%	Tidak
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	3,1 g/cm ³	Tidak
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	27,19%	Tidak
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	3 cm/jam	Tidak
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	6,33	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	565 mS/cm	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	131 mV	Tidak
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	17,8 cfu/ g tanah	Tidak
VII.	Kabupaten Pasaman			
1.	Ketebalan Solum	< 20 cm	-	-
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	-	-
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	-	-
4.	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	-	-
5.	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6.	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	-	-
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	6,14	Tidak
8.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	42,6 x 10 ⁻³	Tidak
9.	Redoks	< 200 mV	-	-
10.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	7,6 x 10 ⁵	Tidak

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

Tabel - 6.A. Perbandingan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Tahun : 2016

No	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan			
			2013	2014	2015	2016
Kota Padang						
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	-	111,3	0	> 80
2	Kebatuan Permukaan	> 40 %	-	<5	0	<1
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	-	59,3	20,62	3,80
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	-	1,23	24,82	41,60
4	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	-	53,71	1,56	0,91
5	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	3,97	41,32	65,84
6	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam ; > 8,0 cm/jam	-	4,99	0,4	0,37
7	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	-	4,99	6,54	5,87
8	Daya Hantar Listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	-	5,48	0,93	1,1
9	Redoks	< 200 mV	-	81	31,1	32,5
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	-	32.94 x 10 ⁷	4,5	1,6 x 10 ⁷
Kabupaten Agam						
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	48	15	57	49
2	Kebatuan Permukaan	> 40 %	-	0	-	N/A
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	10,4	47	29,85	37,5
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	-	1,1	-	0,96
4	Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	1,1	28	5	86,41
5	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	21,4	0,9	37,20	315
6	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam ; > 8,0 cm/jam	34	6,17	1,23	5,8
7	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,05	0,77	5,9	0,09
8	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0,01	132	0,1065	268
9	Redoks	< 200 mV	205	-	91	TAD
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	-	-	-	-

Keterangan : -

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

Tabel - 7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/ Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Kabupaten Agam			
1.	Subsistensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut \geq 3 m atau 10 % / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	1.8 cm/tahun	Tidak
2.	Kedalaman Lapisan Berpirit dari Permukaan Tanah	< 25 cm dengan pH \leq 2,5	N/A	
3.	Kedalaman Air Tanah Dangkal	> 25 cm	12	Tidak
II.	Kabupaten Pesisir Selatan			
1.	Subsistensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut \geq 3 m atau 10 % / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	38 cm	Tidak
2.	Kedalaman Lapisan Berpirit dari Permukaan Tanah	< 25 cm dengan pH \leq 2,5	20 cm	Tidak
3.	Kedalaman Air Tanah Dangkal	> 25 cm	23 cm	Tidak

Keterangan : -

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan, 2016

Tabel - 7.A. Perbandingan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan		
			2014	2015	2016
	Kabupaten Agam				
1.	Subsistensi gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut \geq 3 m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	8 cm/tahun	4,2 cm/tahun	1.8 cm/tahun
2.	Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH \leq 2,5	0	-	N/A
3.	Kedalaman Air Tanah Dangkal	> 25 cm	41,67	20	12
4.	Redoks untuk tanah berpirit	> - 100mV	2,99	45	-
5.	Redoks untuk gambut	> 200 mV	29,167	1	-
6.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,0 ; > 7,0	4,42	5,6	-
7.	Daya Hantar Listrik	> 4,0 mS/cm	0,062	0,,245	-
8.	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	-	-	-

Keterangan : -

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten Agam, 2016

Tabel - 8. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase Tutupan (%)	Kerapatan (Pohon/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Padang	1.050,50	52,00	25
2.	Kota Pariaman	22,00	184,00	1.035
3.	Kabupaten Agam	39,50	30,00	600
4.	Kabupaten Pesisir Selatan	1.911,26	31,34	1.110
5.	Kabupaten Pasaman Barat	6.046,50	-	-
6.	Kabupaten Padang Pariaman	138,50	-	-
7.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	24.619,43	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat dan Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

Tabel - 8.A. Penanaman Mangrove di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 Tahun : 2016

No.	Jenis Mangrove	Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah (Batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Rhizophora sp</i>	Kota Pariaman	2011	8.000
2.	<i>Rhizophora sp</i>	Kota Pariaman	2013	3.000
3.	<i>Rhizophora sp</i>	Kabupaten Pesisir Selatan	2013	10.000
4.	<i>Rhizophora sp</i>	Kabupaten Pesisir Selatan	2014	13.000
5.	<i>Rhizophora sp</i>	Kabupaten Pasaman Barat	2015	15.000
6.	<i>Rhizophora sp</i>	Kabupaten Padang Pariaman	2015	7.000

Keterangan : -

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 9. Luas dan Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Padang	21.978	38,60
2.	Kota Pariaman	-	-
3.	Kabupaten Agam	-	-
4.	Kabupaten Pesisir Selatan	17	23,00
5.	Kabupaten Pasaman Barat	75	20,00
6.	Kabupaten Padang Pariaman	50	-
7.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	20.000	18,21

Keterangan : Kota Pariaman dan Kabupaten Agam tidak memiliki Padang Lamun
 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat dan Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

Tabel - 9.A. Perbandingan Kerusakan Padang Lamun di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Kabupaten/Kota	Persentase Area Kerusakan (%)		
		2014	2015	2016
1.	Kota Padang	19	26,77	38,60
2.	Kota Pariaman	NA	NA	NA
3.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	33,22	-	18,21
4.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	
5.	Kabupaten Pesisir Selatan	43	23	23,00
6.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	20,00
7.	Kabupaten Agam	NA	NA	NA

Keterangan : Kota Pariaman dan Kabupaten Agam tidak memiliki Padang Lamun
 Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

Tabel - 10. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Kabupaten/Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kota Padang	1.124,73	0	0	56,7	43,3
2.	Kota Pariaman	14,52	19	47	70	164
3.	Kabupaten Agam	26,07	0	65,7	34,3	0
4.	Kabupaten Pesisir Selatan	1.032,14	10,67	15,33	20	54
5.	Kabupaten Pasaman Barat	1.360,00	7	29	51	12
6.	Kabupaten Padang Pariaman	343,49	75	25	0	0
7.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	17.589,61	-	-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat dan Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

Tabel - 10.A. Transplantasi Terumbu Karang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2015

Tahun : 2016

No.	Lokasi Penanaman	Kabupaten/Kota	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pulau Setan	Kabupaten Pesisir Selatan	2013
2.	Pulau Pagang	Kabupaten Pesisir Selatan	2014
3.	Pulau Angso	Kota Pariaman	2015
4.	Pulau Pasumpahan	Kota Padang	2015

Keterangan : -

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 11. Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Jenis Penggunaan	Luas Lahan (Ha)		Sumber Perubahan
		Lama	Baru	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Permukiman	484.978,09	572202,55	Lahan Pertanian
2.	Industri	492,50	15.174,5	Lahan Pertanian
3.	Perkebunan	426.935,93	1.032.352	Semak Belukar
4.	Pertambangan	298,89	46.539,17	
5.	Sawah	423.035,86	239.851	
6.	Pertanian lahan kering	410.514,20	506.568,94	
7.	Perikanan	6.542,24	3.451,20	

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 11.A. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Jenis Penggunaan Baru	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	87.224,55
2.	Industri	15.174,50
3.	Tanah Kering	101.901,00
4.	Perkebunan	256.359,00
5.	Semak Belukar	37.050,00
6.	Tanah Kosong	18.995,20
7.	Perairan/Kolam	3.451,20
8.	Lainnya	141.637,00

Keterangan : -

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

**Tabel - 12. Jenis Pemanfaatan Lahan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tambang	176	Besar	41.428,550	IUP Logam & Batubara
			Menengah	4.756,200	IUP Bukan Logam & Batubara (Luasan ≤ 10 Ha)
			Kecil	305,630	IUP Bukan Logam & Batubara (Luasan > 10 Ha)
			Rakyat	48,790	IPR
2.	Perkebunan	-	Besar	222.988	-
			Menengah	9.142	-
			Kecil	9.915	-
			Rakyat	790.307	-
3.	Pertanian	-	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	237,73	-
			Rakyat	950,94	-
4.	Pemanfaatan Hutan	-	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 13. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Batu kapur	PT. Semen Padang Indarung	206,96	206,96	5.672.003,00
2.	Batu silika	PT. Semen Padang Indarung	107,20	107,20	760.000,00
3.	Batu clay	PT. Semen Padang Indarung	88,91	88,91	34.000,00
4.	Sirtukil	CV. Intan Mandiri Alam Sejati (Kab. Pasaman Barat)	2,00	2,00	867.314,98
5.	Sirtukil	CV. Duo Duo Saudara (Kab. Pasaman)	3,70	3,70	6.333,00
6.	Batu kwarsa	PT. Da Niaga Alam Pasaman	2.389,00	2.389,00	9.880,00
7.	Batu kapur	PT. Bakapindo (Kab. Agam)	51,94	51,94	5.000,00
8.	Sirtukil	Bambang Irawan (Kab. Agam)	1,12	1,12	12.000,00
9.	Trass	Syamsul Bahri (Pariaman)	2,00	2,00	14.000,00
10.	Trass	CV. Zeta Bersaudara (Pariaman)	4,00	4,00	20.000,00
11.	Batuan	CV. Talago di Bawah Gunung (Kab. Pesisir Selatan)	5,00	5,00	3.827,00
12.	Andesit	PT. Nico Putra Utama (Kab. Pesisir Selatan)	6,27	6,27	9.400,00
13.	Sirtukil	PT. Citra Muda Noer Bersaudara (Kab. Pesisir Selatan)	6,00	6,00	5.600,00
14.	Sirtukil	CV. Mutia Anugrah Nusantara (Kab. Pesisir Selatan)	7,44	7,44	3.625,00
15.	Batuan	PT. Anshar Terang Crusindo 1 (Kab. Lima Puluh Kota)	20,00	20,00	120.000,00
16.	Batuan	CV. Afika Tunggal Mandiri (Kab. Lima Puluh Kota)	99,50	99,50	55.044,60
17.	Andesit	PT. Hasaba Global Materindo (Kab. Lima Puluh Kota)	17,70	17,70	12.000,00
18.	Andesit	PT. Mega Persada Sejahtera (Kab. Lima Puluh Kota)	44,20	44,20	114.908,67
19.	Batuan	PT. Sumbar Calcium Pratama (Kab. Lima Puluh Kota)	20,00	20,00	5.906,00
20.	Andesit	PT. Dempo Bangun Mitra (Kab. Lima Puluh Kota)	136,90	136,90	210.000,00
21.	Kalsit	PT. Sinar Asia Fortuna (Kab. Solok)	88,10	88,10	22.052,00
22.	Tanah urug/cadas	Joni Afrizon (Kab. Solok)	3,00	3,00	1.905,00
23.	B. Gampiang	Tanaka Putra Sawah Like (Kab. Solok)	4,65	4,65	400,00
24.	B. Gampiang	CV. Hervi Tankayo (Kab. Solok)	4,84	4,84	1.200,00
25.	Batuan	CV. Putra YLM	15,00	15,00	58.212,00
26.	Batuan	CV. Teja	1,96	1,96	31.440,00
27.	Batubara	PT. Allied Indo Cemerlang Sentosa (Kab. Sijunjung)	55,58	5,67	13.196,37
28.	Batubara	CV. Dian Purnama (Kab. Sijunjung)	33,00	2,00	4.095,00
29.	Batubara	KUD Sinamar Sakato (Kab. Dharmasraya)	197,33	20,00	14.345,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	Batubara	PT. Air Mata Emas (Kota Sawahlunto)	118,20	25,00	58.703,90
31.	Batubara	PT. Allied Indo Coaljaya (Kota Sawahlunto)	372,40	300,00	4.189,19
32.	Batubara	PT. Guguk Tinggi Coal (Kota Sawahlunto)	40,49	21,40	2.505,20
33.	Batubara	CV. Miyor Pratama Coal (Kota Sawahlunto)	44,67	11,00	47.807,00
34.	Batubara	PT. Putri Surya Pratama Natural (Kota Sawahlunto)	38,83	4,67	27.593,69
35.	Batubara	CV. Tahiti Coal (Kota Sawahlunto)	53,80	19,51	35.997,80
36.	Batubara	PT. Cahaya Bumi Perdana (Kota Sawahlunto)	103,10	3,50	22.600,99
37.	Batubara	PT. Dasrat Sarana Arang Sejati (Kota Sawahlunto)	125,40	35,00	24.976,00
38.	Batubara	PT. Nusa Alam Lestari (Kota Sawahlunto)	100,00	60,00	58.597,00
39.	Bijih besi	PT. Dharma Power Bersama	190,00	190,00	-
40.	Tembaga	PT. Anugrah Mineralindo	198,00	198,00	-
41.	Besi	PT. Dharma Power & Energy	200,00	200,00	-
42.	Besi	PT. Dharma Power Bersama	175,00	175,00	-
43.	Pasir besi	PT. Galian Endapan Buana	190,00	190,00	-
44.	Batubara	PT. Bangun Korin Utama	126,00	126,00	-
45.	Batubara	PT. Buah Sakato Mambangun Nagari	191,00	191,00	-
46.	Batubara	PT. Mutiara Bumi Manggilang	1.366,00	1.366,00	-
47.	Emas	PT. Inti Bumi Sejahtera Mandiri	400,70	400,70	-
48.	Emas	PT. Penta Bersama Gemilang	1.974,83	1.974,83	-
49.	Timah hitam	PT. Bina Bakti Pertiwi	6.740,60	6.740,60	-
50.	Timah hitam	PT. Mehad Inter Buana	47,81	47,81	-
51.	Timah hitam	PT. Miranti Mas Pratama	153,63	153,63	-
52.	Logam dasar	PT. Datacon Indojava	25.039,24	25.039,24	-
53.	Emas	PT. Emas Bumi Persada	3.000,00	3.000,00	-
54.	Emas	PT. Kuantan Resources	199,00	199,00	-
55.	Emas	PT. Makindo Mineral Sakti	182,00	182,00	-
56.	Zinc	PT. Mitra Mandiri Cemerlang	340,00	340,00	-
57.	Emas	PT. Mitra Mandiri Cemerlang	340,00	340,00	-
58.	Galena	PT. Mitra Mandiri Cemerlang	340,00	340,00	-
59.	Galena	PT. Triple Eight Energy	195,00	195,00	-
60.	Bijih Besi	PT. Panca Sona Jaya Pratama	612,00	612,00	-
61.	Batubara	PT. Talawi Jaya Coal	100,00	100,00	-
62.	Emas	PT. Geominex Sapek	332,00	332,00	-
63.	Emas	PT. Geominex Solok Selatan	195,80	195,80	-
64.	Logam dasar	Jessly Tambang Minerals	2.700,00	2.700,00	-
65.	Logam dasar	PT. Rivatama Minerals	76,10	76,10	-
66.	Bijih Besi	PT. Sumatera Ina Mineraindo	1.514,00	1.514,00	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel - 13.A. Rekapitulasi Produksi Minerba di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Bahan Galian	Kabupaten/Kota												Jumlah
		Kota Sawahlunto	Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Solok	Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten Pasaman	Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Agam	Kabupaten Padang Pariaman	Kota Padang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Batubara	289.563,37	16.965	14.345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.873,37
2.	Biji Besi	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3.	Obsidian	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-	900,00
4.	Marmar	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5.	Emas	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6.	Timah Hitam	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7.	Batu Silika	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883.005	883.005,00
8.	Tanah Liat (Clay) (m3)	0,00	-	-	-	-	-	13.180	-	-	-	-	144.405	157.585,00
9.	Batu Kapur	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	7.525.328	7.530.328,00
10.	Sirtukil (m3)	0,00	-	31.440	68.230	11.952	180.950,60	16.700	16.213	867.314	12.000	6.700	35.900	1.247.399,60
11.	Mangan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12.	Andesit	0,00	-	-	23.900	9.400	336.908,67	-	9.880	-	-	-	-	380.088,67
13.	Perlit/Gampieng	0,00	-	-	-	-	-	5.420	-	-	-	-	-	5.420,00
14.	Tanah Urug/Trass	0,00	-	-	23.000	9.800	-	-	-	-	-	34.000	-	66.800,00

Keterangan : -

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2016



**Tabel - 14. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Kabupaten/Kota	Penghijauan			Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	0	0	0	19	19	11.875
2.	Kota Padang Panjang	0	0	0	0	0	0
3.	Kota Bukittinggi	0	0	0	0	0	0
4.	Kota Solok	100	100	8.000	0	0	0
5.	Kota Pariaman	35	35	14.000	0	0	0
6.	Kota Payakumbuh	0	0	0	0	0	0
7.	Kota Sawahlunto	40	40	16.000	0	0	0
8.	Kabupaten Dharmasraya	0	0	0	170	0	0
9	Kabupaten Agam	135	135	14.000	0	0	0
10	Kabupaten Pesisir Selatan	200	200	80.000	0	0	0
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	200	200	80.000	250	0	0
12	Kabupaten Pasaman	50	50	20.000	0	0	0
13	Kabupaten Pasaman Barat	0	0	0	302	0	0
14	Kabupaten Solok	300	0	0	575	0	0
15	Kabupaten Sijunjung	250	0	0	0	0	0
16	Kabupaten Padang Pariaman	100	100	40.000	220	220	137.500
17	Kabupaten Solok Selatan	100	0	0	0	0	0
18	Kabupaten Tanah Datar	314	314	125.600	0	0	0
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0	0	0	0	0	0

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 14.A. Perbandingan Luas Area Penghijauan dan Reboisasi Tahun 2014 s/d 2016
Tahun : 2016

No	Kabupaten/Kota	Luas Areal Penghijauan (Ha)			Luas Areal Reboisasi (Ha)		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	300	108	0	19	94	19
2.	Kota Padang Panjang	2	4,69	0	-	0	0
3.	Kota Bukittinggi	6,5	0,5	0	0	-	0
4.	Kota Solok	6,8	-	100	-	-	0
5.	Kota Pariaman	31,9	34,21	35	230	230	0
6.	Kota Payakumbuh	776	838	0	150	150	0
7.	Kota Sawahlunto	250	250	40	-	-	0
8.	Kabupaten Dhamasraya	0	8,3	0	0	100	0
9.	Kabupaten Agam	297	125	135	-	200	0
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	0	1.743	200	0	3.400	0
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	326,25	200	-	1.750	0
12.	Kabupaten Pasaman	149,5	149,5	50	1.736,25	1.736,25	0
13.	Kabupaten Solok	3	100	0	-	300	0
14.	Kabupaten Pasaman Barat	50	30	0	202,01	5	0
15.	Kabupaten Sijunjung	110	-	0	400	-	0
16.	Kabupaten Padang Pariaman	225	635	100	-	-	220
17.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	0	2.250	-	0
18.	Kabupaten Tanah Datar	-	-	314	-	-	0
19.	Kabupaten Kep. Mentawai	-	-	0	-	-	0
	Jumlah	2.207,70	4.352,45	1.174,00	4.987,26	7.965,25	239,00

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 14.B. Perbandingan Realisasi Jumlah Pohon untuk Penghijauan dan Jumlah Pohon untuk Reboisasi Tahun : 2016

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Jumlah Pohon untuk Penghijauan (Batang)			Realisasi Jumlah Pohon untuk Reboisasi (Batang)		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Kota Padang	24.000	15.835	0	16.500	42.500	11.875
2.	Kota Padang Panjang	3.250	15.954	0	-	0	0
3.	Kota Bukittinggi	2.600	180	0	0	-	0
4.	Kota Solok	2.167	-	8.000	0	-	0
5.	Kota Pariaman	12.937	13.359	14.000	92.480	92.480	0
6.	Kota Payakumbuh	462.600	470.090	0	167.714	131.514	0
7.	Kota Sawahlunto	-	-	16.000	-	-	0
8.	Kabupaten Dhamasraya	1.000	7.450	0	-	121.000	0
9.	Kabupaten Agam	59.800	50.000	14.000	694.500	90.000	0
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	0	686.000	80.000	0	520.000	0
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	130.680	130.250	80.000	-	700.000	0
12.	Kabupaten Pasaman	2.150	59.800	20.000	112.800	694.500	0
13.	Kabupaten Solok	42.000	44.000	0	-	165.000	0
14.	Kabupaten Pasaman Barat	25.473	10.101	0	-	16.000	0
15.	Kabupaten Sijunjung	-	-	0	-	-	0
16.	Kabupaten Padang Pariaman	-	255	40.000	-	-	137.500
17.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	0	-	-	0
18.	Kabupaten Tanah Datar	90.000	-	125.600	-	-	0
19.	Kabupaten Kep. Mentawai	-	-	0	-	-	0
	Total	858.657	1.503.274		1.083.994	2.572.994	

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel – 15. Kondisi Sungai di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Batang Kuantan	54,08	-	-	-	-	-
2.	Batang Hari	144,4	70-150	-	5-10	130,43	34,02
3.	Batang Rokan (Sumpur)	104,2	25-40	10-35	0,5-6	210,97	7,24
4.	Batang Kampar (mahat)	83,7	40-70	25-50	0,5-5	40,58	2,25
5.	Batang Antokan	55,46	25-50	20-45	1-3	37,66	6,67
6.	Batang Tiku	59,5	5-35	5-20	1-2	-	-
7.	Batang Gasan Gadang	42,4	25-50	20-45	1-2	-	-
8.	Batang Paingan	17,91	5-35	3-20	1-2	-	-
9.	Batang Kalampian	12,36	5-15	3-20	1-2	-	-
10.	Batang Kamumuan	16,65	5-15	3-20	1-2	-	-
11.	Batang Sungai Limau	11,94	5-15	3-20	1-2	-	-
12.	Batang Sungai Sirah	18,88	5-15	3-20	1-2	14,62	2,59
13.	Batang Naras	74,55	25-50	20-45	1-3	-	-
14.	Batang Manggung	14,99	-	-	-	15,59	1,28
15.	Batang Pariaman	47,17	5-15	5-10	1-2	280,3	7,45
16.	Batang Mangau	54,84	40-80	20-30	1-8	6,86	3,93
17.	Batang Ulakan	35,32	8-25	5-20	1-2	6,13	1,62
18.	Batang Tapakis	26,08	5-20	5-10	1-2	33,32	4,82
19.	Batang Anai	69,6	40-60	20-55	1-8	-	-
20.	Batang Kandis	10,9	-	-	-	69,32	4,01
21.	Batang Air Dingin	23,4	40-60	20-30	0,5-7	112,15	1,65
22.	Batang Kuranji	21,6	25-50	20-45	1-3	144	1,12
23.	Batang Arau	21,4	40-60	20-30	1-7	-	-
24.	Batang Bungus	30,36	25-35	20-32	1-3	-	-
25.	Batang Timbulun	8,26	-	-	-	-	-
26.	Batang Indragiri	706	-	-	-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 15.A. Inventarisasi Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Lintas Provinsi di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Lokasi
(1)	(2)	(3)
1.	Batang Nareh	Kabupaten Agam/Kabupaten Padang Pariaman
2.	Batang Mangau	Kabupaten Agam/Kabupaten Padang Pariaman/Kota Pariaman
3.	Batang Malalak	Kabupaten Agam/Kabupaten Padang Pariaman
4.	Batang Kalulutan	Kabupaten Agam/Kabupaten Padang Pariaman
5.	Sungai Cikoto Gading	Kabupaten Agam/Kabupaten Padang Pariaman
6.	Batang Ulakan	Kabupaten Padang Pariaman/Kota Pariaman
7.	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman /Kabupaten Tanah Datar/Kota Padang
8.	Batang Singgalangkacik	Kabupaten Padang Pariaman/Kabupaten Tanah Datar
9.	Batang Hari	Kabupaten Dharmasraya/Kabupaten Solok Selatan
10.	Batang Pangean	Kabupaten Dharmasraya/Kabupaten Sijunjung
11.	Batang Usau	Kabupaten Dharmasraya/Kabupaten Sijunjung
12.	Batang Kasaitalang	Kabupaten Dharmasraya/Kabupaten Sijunjung
13.	Batang Momong	Kabupaten Dharmasraya/Kabupaten Solok
14.	Batang Sipotar	Kabupaten Dharmasraya/Kabupaten Solok
15.	Batang Gumanti	Kabupaten Solok/Kabupaten Solok Selatan
16.	Batang Sumpur	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
17.	Sungai K.Tais	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
18.	Aia Telagaan	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
19.	Aia Mailir	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
20.	Aia Simpangkapaton	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
21.	Aia Serilaweh	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
22.	Aia Tolang	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
23.	Sungai Tingkarang	Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
24.	Batang Mahat	Kabupaten Limapuluh Kota/Provinsi Riau
25.	Batang Kampar Kanan	Kabupaten Limapuluh Kota/Kabupaten Pasaman/Provinsi Riau
26.	Batang Kapur Gadang	Kabupaten Limapuluh Kota/Kabupaten Pasaman
27.	Batang Ombilin	Kabupaten Tanah Datar/Kabupaten Solok/Kota Sawahlunto
28.	Batang Silampan	Kabupaten Limapuluh Kota/Kabupaten Tanah Datar/ Kabupaten Sijunjung
29.	Batang Kumamis	Kabupaten Sijunjung/Kota Sawahlunto
30.	Batang Sukam	Kabupaten Sijunjung/Kabupaten Solok
31.	Batang Palangki	Kabupaten Sijunjung/Kabupaten Solok
32.	Batang Agam	Kabupaten Agam/Kabupaten Limapuluh Kota/Kabupaten Tanah Datar/ Kota Bukittinggi/ Kota Payakumbuh
33.	Batang Lampasi	Kota Payakumbuh/Kabupaten Lima Puluh Kota
34.	Batang Lasi	Kota Sawahlunto/Kabupaten Sijunjung
35.	Aia Lunto	Kota Sawahlunto/Kabupaten Sijunjung
36.	Aia Sigalut Gadang	Kota Sawahlunto/Kabupaten Sijunjung
37.	Batang Palangki	Kota Sawahlunto/Kabupaten Solok
38.	Batang Sukam	Kota Sawahlunto/Kabupaten Solok

(1)	(2)	(3)
39.	Batang Muarasele	Kabupaten Tanah Datar/Kabupaten Solok/Kota Sawahlunto
40.	Batang Sumpur	Kabupaten Tanah Datar/Kota Padang Panjang
41.	Batang Sumani	Kabupaten Solok/Kota Solok
42.	Batang Gawan	Kabupaten Solok/Kota Solok
43.	Sungai Buluh	Kabupaten Solok/Kota Solok
44.	Batang Pasaman	Kabupaten Pasaman/Kabupaten Pasaman Barat
45.	Batang Mangkijat	Kabupaten Pasaman/Kabupaten Pasaman Barat
46.	Batang Masang	Kabupaten Pasaman/Kabupaten Pasaman Barat
47.	Batang Sianok	Kabupaten Agam/Kota Bukittinggi
48.	Aia Kur	Kabupaten Pesisir Selatan/Kota Padang
49.	Batang Langsano	Kabupaten Pesisir Selatan/Kota Padang
50.	Sungai Pisang	Kabupaten Pesisir Selatan/Kota Padang
51.	Batang Siguntur	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Solok
52.	Aia Lolo Gadang	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Solok
53.	Batang Bayang Nyalo	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Solok
54.	Batang Bujang Gadang	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Solok
55.	Aia Gadang	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Solok
56.	Batang Aia Kamumuan	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Solok
57.	Batang Indrapura	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
58.	Batang Indrapura Besar	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
59.	Batang Indrapura-Tapan	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
60.	Sungai Sako Kanan	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
61.	Sungai Sako Kiri	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
62.	Batang Betung	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
63.	Sungai Gambir	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
64.	Sungai Penadah	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
65.	Aia Sako Kecil	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
66.	Sungai Sako Kanan	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
67.	Sungai Sako Kiri	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
68.	Sungai Membarung Baru	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
69.	Sungai Peraidak	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Kerinci
70.	Batang Silaut	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Muko-Muko
71.	Sungai Sarik	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Muko-Muko
72.	Sungai Napar	Kabupaten Pesisir Selatan/Kabupaten Muko-Muko/Kabupaten Kerinci

Keterangan : -

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 16. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m ³)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Danau Singkarak	107,8	51.876.000
2.	Danau Maninjau	97,9	558.000.000
3.	Danau Diatas	12,3	37.000.000
4.	Danau Dibawah	11,2	28.000.000
5.	Danau Talang	0,09	264.000
6.	Situ Danau Karuah (Kabupaten Pasaman Barat)	18,00	30.000
7.	Situ Danau Janiah (Kabupaten Pasaman Barat)	31,85	40.000
8.	Situ Danau Panampuang (Kabupaten Pasaman Barat)	3,00	10.000
9.	Situ Danau Tanang (Kabupaten Pasaman)	2,00	14.000
10.	Waduk Kotopanjang	0,00	-
11.	Waduk Pulai (Kabupaten Lima Puluh Kota)	1,60	4.800
12.	Waduk Tabek Pauh (Kabupaten Lima Puluh Kota)	-	3.500
13.	Waduk Sarasah Talang (Kabupaten Lima Puluh Kota)	0,02	2.800
14.	Areal Waduk Sarasah (Kabupaten Lima Puluh Kota)	0,02	2.800
15.	Waduk Padang Langang (Kabupaten Lima Puluh Kota)	0,50	3.500
16.	Embung Talago Bujur (Kabupaten Tanah Datar)	10,00	110
17.	Embung Ampiang Parak (Kabupaten Pesisir Selatan)	1,50	3.000.000
18.	Embung Lubuk Mato Kucing (Kabupaten Pesisir Selatan)	1,00	50
19.	Embung Gaung (Kabupaten Solok)	0,50	30
20.	Embung Ngalau (Kabupaten Sijunjung)	1,00	30
21.	Embung Lubuk Banio (Kabupaten Dharmasraya)	2,50	25
22.	Embung Simun (Kabupaten Limapuluh Kota)	0,96	44.000
23.	Embung Air Sonsang (Kabupaten Lima Puluh Kota)	1,00	100.000
24.	Embung Sarasah Tanggo (Kabupaten Lima Puluh Kota)	3,00	195.000
25.	Embung Lubuk Pinawa (Kabupaten Lima Puluh Kota)	3,50	120.000

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 16.A. Kapasitas dan Sumber Air Danau/Situ/Telaga/Embung di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Nama Danau/Situ/Embung	Kapasitas (m ³)	Sumber Mata Air
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kabupaten Pasaman Barat		
1.	Situ Danau Karuah	30.000	Mata Air
2.	Situ Danau Janiah	40.000	Mata Air
3.	Situ Danau Panampuang	10.000	Mata Air
	Kabupaten Sijunjung		
1.	Embung Tabek Dia	120.000	Mata Air
2.	Embung Batu Gadang	60.000	Tadah Hujan
3.	Embung Tabek Bilacan	20.000	Tadah Hujan
4.	Embung Tabek Pudak	20.000	Tadah Hujan
5.	Mata Air Sungai Kamang	50.000	Mata Air
6.	Mata Air Bukit Kubu	15.000	Mata Air
7.	Mata Air Sungai Ambau	22.500	Tadah Hujan
8.	Embung Bukit Bungo	10.000	Mata Air
	Kabupaten Pesisir Selatan		
1.	Waduk Kayu Jao	4.000	Mata Air
2.	Embung Lubuk Agung	100.000	Mata Air
	Kabupaten Solok		
1.	Danau Singkarak	51.876.000	Mata Air & Sungai
2.	Danau Di Atas	37.000.000	Mata Air & Sungai
3.	Danau Di Bawah	28.000.000	Mata Air & Sungai
4.	Danau Tamban	30.000	Mata Air
5.	Danau Talang	264.000	Mata Air
6.	Danau Tuo (D.Kasik)	51.000	Mata Air & T.Hujan
7.	Telaga Kariang	3.600	Tadah Hujan
8.	Telaga Sawahbilo	12.000	Mata Air
9.	Telaga Bunduang	1.080	Tadah Hujan
10.	Telaga Gabus	12.000	Mata Air
11.	Telaga Parupuk	20.000	Tadah Hujan
12.	Telaga Kubang Badak	50.000	Tadah Hujan
13.	Telaga Puyu	5.000	Tadah Hujan
14.	Telaga Anduang	1.690	Tadah Hujan
15.	Telaga Paninggahan	15.000	Tadah Hujan
16.	Pulau Belibis	54.000	Tadah Hujan
17.	Telaga Alang Lanyek	125.000	Tadah Hujan
18.	Telaga Tabek Panjang	54.000	Mata Air
19.	Telaga Dadok	6.250	Mata Air
20.	Telaga Basuang	1.690	Tadah Hujan
21.	Telaga Rawan Basuang	61.250	Mata Air
22.	Telaga Gando	1.690	Mata Air & Tadah Hujan
23.	Telaga Laweh	5.250	Mata Air & Tadah Hujan
	Kabupaten Tanah Datar		
1.	Telaga Danau(T.Nan Panjang)	18.750	Mata Air /Tadah Hujan
2.	Telaga Air Sirah	20.000	Tadah Hujan
3.	Telaga Angus	7.500	Tadah Hujan
4.	Telaga Bujur	15.000	Tadah Hujan



(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Telaga Duo	6.250	Tadah Hujan
6.	Telaga Sawah Gadang	10.000	Mata Air/Tadah Hujan
7.	Telaga Patoma	30.000	Mata Air/Tadah Hujan
8.	Telaga A.Taganang	150.000	Mata Air/Tadah Hujan
9.	Telaga Kayu Tanduk	10.000	Mata Air/Tadah Hujan
10.	Telaga Sibusuk	132.000	Mata Air/Tadah Hujan
11.	Telaga Atar	75.000	Mata Air/Tadah Hujan
12.	Telaga Pulai	90.000	Mata Air/Tadah Hujan
13.	Telaga Banta	5.000	Tadah Hujan
14.	Telaga Panjang	2.500	Tadah Hujan
15.	Telaga Rawang	37.500	Mata Air/Tadah Hujan
16.	Telaga Janiah	12.000	Mata Air/Tadah Hujan
17.	Telaga Darek	2.500	Tadah Hujan
18.	Telaga Ketek	2.000	Tadah Hujan
19.	Telaga Buruk	1.250	Tadah Hujan
20.	Telaga Bentang	3.750	Tadah Hujan
21.	Telaga Pakis	37.500	Mata Air/Tadah Hujan
22.	Telaga Air Taganang	90.000	Mata Air/Tadah Hujan
23.	Mata Air Bulakan	1.250	Mata Air/Tadah Hujan
24.	Mata Air Tabek Panjang	3.750	Mata Air/Tadah Hujan
25.	Mata Air Tabek Bonta	3.750	Mata Air/Tadah Hujan
26.	Telaga Lurah Batuang	25.000	Mata Air/Tadah Hujan
27.	Telaga Tanah Sirah	80.000	Mata Air/Tadah Hujan
28.	Telaga Beringin	20.000	Mata Air/Tadah Hujan
29.	Telaga Bunduang	85.000	Mata Air/Tadah Hujan
30.	Telaga Ganggam	2.000	Mata Air/Tadah Hujan
31.	Telaga Pincuran Gadang	2.800	Mata Air/Tadah Hujan
32.	Embung Rapuih	31.500	Mata Air/Tadah Hujan
33.	Mata Air Sungai Maruok	4.000	Mata Air/Tadah Hujan
34.	Telaga Luluih	18.000	Mata Air/Tadah Hujan
35.	Telaga Tengah Sawah	10.000	Mata Air/Tadah Hujan
36.	Telaga Pandan	10.000	Mata Air/Tadah Hujan
37.	Telaga Mingkudu	45.000	Mata Air/Tadah Hujan
38.	Telaga Palangeh	20.000	Mata Air/Tadah Hujan
39.	Telaga Ranguang	30.000	Mata Air/Tadah Hujan
40.	Telaga Sikubung	38.000	Mata Air/Tadah Hujan
	Kabupaten Pariaman		
1.	Lubuk Betung	0,13	Mata Air
2.	Ampang Bakuag	0,06	Tadah Hujan
3.	Sei. Abu	0,20	Mata Air
4.	Mata Air Lubuk Bonta	800	Mata Air
	Kabupaten Agam		
1.	Genangan Tarusan	20.000	Tadah Hujan
2.	Waduk Batu Kabau	3.000	Mata Air
3.	Danau Maninjau	80.000	Mata Air/Tadah Hujan
4.	Embung Kampal	5.000	Tadah Hujan
5.	Embung Padang Munta	8.000	Tadah Hujan
6.	Embung Luhung	3.000	Tadah Hujan
7.	Waduk Lapangan	3.000	Mata Air
8.	Embung Sungai Berawak	17.800	Mata Air

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Genangan Ranggomaisi	14.000	Tadah Hujan
10.	Embung Lurah	17.000	Tadah Hujan
	Kabupaten Lima Puluh Kota		
1.	Waduk Pulaui	4.800	Mata Air
2.	Waduk Sarasah Tabing	2.800	Mata Air
3.	Embung Lubuk Pinawa	120.000	Mata Air
4.	Embung Simun	44.000	Mata Air
5.	Embung Air Bonsang	100.000	Mata Air
6.	Embung Sarasah Tanggo	195.000	Mata Air
7.	Areal Waduk Sarasah	2.800	Mata Air
8.	Waduk Tabek Pauh	3.800	Mata Air
	Kabupaten Pasaman		
1.	Situ Danau Tanang	14.000	Mata Air

Keterangan : -

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel – 17. Kualitas Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Sungai Batang Sinamar	Periode 1												
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	13/05/2016	25.6			7,76	133	70	12	6,7	1,34	<5,7	0,006
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	13/05/2016	26.5			7,28	186	99	27	6,4	1,3	<5,7	0,243
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	13/05/2016	26.3			6,87	146	77	20	5,9	0,84	<5,7	0,06
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	13/05/2016	28.3			6,58	101	54	80	5,6	2,38	<5,7	0,13
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	13/05/2016	27.7			6,91	145	76	73	5,7	3,38	11,6	0,08
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	13/05/2016	27.6			7,24	141	74	65	5,8	3,34	8	0,08

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Sinamar	Periode 1											
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	4,16	<0,014	<0,02	1,13	<0,001	<0.1	<0.01	>2.400	35	<0,002	0,002
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	5,68	<0,014	<0,02	4,06	<0,001	<0.1	<0.01	920	350	<0,002	0,002
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	5,15	0,04	<0,02	2,31	<0,001	<0.1	<0.01	920	140	<0,002	0,002
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	4,47	0,04	<0,02	3,47	<0,001	<0.1	<0.01	1.600	350	<0,002	0,002
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	4,4	0,3	<0,02	2,63	<0,001	<0.1	<0.01	>2.400	44	<0,002	0,003
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	4,6	0,04	<0,02	2,68	<0,001	<0.1	<0.01	540	140	<0,002	0,004

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Sinamar	Periode 2												
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	13/05/2016	25.6			7,44	70	36	37	7,4	2,7	<5,7	<0,006
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	13/05/2016	26.5			7,27	106	57	73	6,7	2	25,6	0,012
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	13/05/2016	26.3			7,23	102	54	267	6,2	1,5	35	0,019
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	13/05/2016	28.3			7,35	129	68	92	5,9	1,8	25,6	0,016
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	13/05/2016	27.7			7,16	205	104	70	5,8	2,4	35	0,016
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	13/05/2016	27.6			8,4	196	93	18	6,1	1	<5,7	0,01

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Sinamar	Periode 2											
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,143	<0,014	0,02	<0,013	<0,001	<0.1	0,029	>2400	1.600	<0,005	0,001
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,377	<0,014	0,02	<0,013	<0,001	<0.1	0,029	>2400	>2400	<0,005	0,002
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,62	0,034	<0,01	<0,013	<0,001	<0.1	0,03	1.600	1.600	<0,005	0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,224	<0,014	<0,01	<0,013	<0,001	<0.1	0,036	1.600	140	<0,005	0,002
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	1,515	0,016	0,02	0,015	<0,001	<0.1	0,036	920	540	<0,005	0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,065	<0,014	0:01	<0,013	<0,001	<0.1	0,036	1.600	540	<0,005	<0,001

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.	Sungai Batang Mangor	Periode 1												
		Jorong Pasar Baru Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman	18/05/2016	25.6			6,87	149	79	5	7,2	2	12,8	<0,003
		Jorong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman	18/05/2016	26.5			7,41	162	86	4	6,8	2,4	13,2	0,003
		Jorong Toboh Mandahiling Nagari Balah Aia Desa Punggung Ladiang Kab. Padang Pariaman	18/05/2016	26.3			7,28	128	74	4	6,6	1,8	13,8	0,018
		Dusun Bari Korong Lareh Nan Panjang Jorong Toboh Nagari Sungai Sariak Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman	18/05/2016	28.3			7,11	142	74	3	6,5	1,7	20,8	0,008
		Jorong Kampuang Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Pariaman	18/05/2016	27.7			6,87	149	79	11	6,2	1,8	6,4	0,049
		Jorong Nyiur Nagari Sampan Pungguang Ladiang Malalak Selatan Kab. Padang Pariaman	18/05/2016	27.6			7,01	171	82	25	6,4	1,6	37,6	0,237

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Mangor	Periode 1											
		Jorong Pasar Baru Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman	2,69	<0,014	0,02	0,37	<0,001	<0.1	<0.01	170	17	<0,002	<0,002
		Jorong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman	3,52	<0,014	0,02	0,37	<0,001	<0.1	<0.01	920	540	<0,002	<0,002
		Jorong Toboh Mandahiling Nagari Balah Aia Desa Punggung Ladiang Kab. Padang Pariaman	2,16	<0,014	<0,02	0,29	<0,001	<0.1	<0.01	>2400	>2400	<0,002	<0,002
		Dusun Bari Korong Lareh Nan Panjang Jorong Toboh Nagari Sungai Sariak Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman	3,18	<0,014	0,02	0,41	<0,001	<0.1	<0.01	>2400	>2400	<0,002	<0,002
		Jorong Kampuang Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Pariaman	2,94	<0,014	0,02	0,37	<0,001	<0.1	<0.01	>2400	1.600	<0,002	<0,002
		Jorong Nyiur Nagari Sampan Pungguang Ladiang Malalak Selatan Kab. Padang Pariaman	3,58	<0,014	<0,02	4,02	<0,001	<0.1	<0.01	>2400	>2400	<0,002	<0,002

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Mangor	Periode 2												
		Jorong Pasar Baru Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman	18/05/2016	25.6			7,11	149	74	4	7,8	1,88	<5,7	<0,006
		Jorong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman	18/05/2016	26.5			8,09	114	58	5	7,6	1,84	<5,7	<0,006
		Jorong Toboh Mandahiling Nagari Balah Aia Desa Punggun Ladiang Kab. Padang Pariaman	18/05/2016	26.3			7,63	89	49	25,7	6,8	1,04	9,9	0,006
		Dusun Bari Korong Lareh Nan Panjang Jorong Toboh Nagari Sungai Sariak Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman	18/05/2016	28.3			7,35	104	51	22,8	6,2	1,12	6,6	0,006
		Jorong Kampuang Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Pariaman	18/05/2016	27.7			7,15	85	42	38,3	6	1,94	6,6	0,007
		Jorong Nyiur Nagari Sampan Pungguang Ladiang Malalak Selatan Kab. Padang Pariaman	18/05/2016	27.6			6,95	97	49	48,3	5,8	2,41	6,6	0,011

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Mangor	Periode 2											
		Jorong Pasar Baru Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman	0,189	0,027	<0,02	0,08	<0,001	<0.1	<0.01	170	36	<0,002	<0,002
		Jorong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman	0,281	<0,014	<0,02	0,1	<0,001	<0.1	<0.01	>2400	>24000	<0.002	<0.002
		Jorong Toboh Mandahiling Nagari Balah Aia Desa Punggung Ladiang Kab. Padang Pariaman	0,24	<0,014	<0.02	0,09	<0,001	<0.1	<0.01	>2400	1.600	<0.002	<0,002
		Dusun Bari Korong Lareh Nan Panjang Jorong Toboh Nagari Sungai Sariak Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman	0,306	<0,014	<0,02	0,11	<0,001	<0.1	<0.01	>2400	1.600	<0.002	<0.002
		Jorong Kampuang Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Pariaman	0,26	0,026	<0,02	0,16	<0,001	<0.1	<0.01	>2400	>2400	<0.002	<0,002
		Jorong Nyiur Nagari Sampan Pungguang Ladiang Malalak Selatan Kab. Padang Pariaman	0,438	0,029	<0.02	0,21	<0,001	<0.1	<0.01	350	350	<0.002	<0.002

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.	Sungai Batang Agam	Periode 1												
		Jorong Sawah Liek, Nagari Batipuah, Kec. Sungai Puar, Kab. Agam	02/09/2016	18,7	22,8	4	6,72	44,2	22,8	4	7,7	1,3	5,77	0,006
		Nagari Taluak, Kec. Banuhampu, Kab. Agam	02/09/2016	23,1	128	10	7,11	236	128	10	6,7	2,4	8,6	0,071
		Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguak Panjang, Kota Bukittinggi	02/09/2016	24,2	147	4	7,3	282	147	4	6,5	3,6	45,6	0,256
		Jorong Joho, Nagari Kamang, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam	02/09/2016	27,4	78	38	6,86	145	78	38	6,1	5,3	34,2	0,256
		Nagari Padang Tarok, Kec. Baso. Kab. Agam	02/09/2016	23,9	71	104	7,1	139	71	104	7,1	1,3	34,2	0,118
		Jorong Bumbung, Nagari Situjuh Batu, Kec. Situjuh V Nagari, Kab. Lima Puluh Kota	02/09/2016	24,3	69	114	7,34	128	69	114	7,8	2,5	45,3	2,84
		Kel. Balai Panjang, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh	02/09/2016	24,9	67	140	7	127	67	140	7,6	3	34,2	0,065
		Kel. Ibh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	02/09/2016	24,5	67	28	7,44	124	67	28	7,8	1,9	39,2	0,12
		Kel. Payobasuang, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh	17/02/2016	26,7	118	120	7,69	22,4	118	120	6,6	12,4	52,2	0,109
		Jorong Pintu Koto, Nagari Bukit Limbuku, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	17/02/2016	27,6	74	80	7,94	142	74	80	6,4	4,9	14,5	0,079



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Agam	Periode 1											
		Jorong Sawah Liek, Nagari Batipuah, Kec. Sungai Puar, Kab. Agam	0,76	0,014	0,02	0,02	0,0005	0,1	0,01	22	49	0,002	0,001
		Nagari Taluak, Kec. Banuhampu, Kab. Agam	2,93	0,06	0,03	0,02	0,0005	0,1	1,01	2.400	2.400	0,002	0,001
		Kel. Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	4,26	2,75	0,02	0,66	0,0005	0,1	1	2.400	2.400	0,002	0,006
		Jorong Joho, Nagari Kamang, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam	2,17	0,014	0,03	0,16	0,0005	0,1	1	350	350	0,002	0,001
		Nagari Padang Tarok, Kec. Baso, Kab. Agam	2,51	0,014	0,03	0,28	0,0005	0,1	1	48	2.400	0,002	0,001
		Jorong Bumbung, Nagari Situjuh Batu, Kec. Situjuh V Nagari, Kab. Lima Puluh Kota	2,84	0,014	0,02	0,19	0,0005	0,1	1,09	1.600	2.400	0,002	0,001
		Kel. Balai Panjang, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh	1,77	0,014	0,03	0,021	0,0005	0,1	1,09	2.400	2.400	0,002	0,001
		Kel. Ibul, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	0,59	1,47	0,03	0,007	0,0005	0,1	1	2.400	2.400	0,002	0,001
		Kel. Payobasuang, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh	5,83	0,03	0,02	0,25	0,0005	0,1	0,07	2.400	2.400	0,002	0,001
		Jorong Pintu Koto, Nagari Bukit Limbuku, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	1,43	0,06	0,02	0,25	0,0005	0,1	0,06	2.400	2.400	0,002	0,001



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Agam	Periode 2												
		Jorong Sawah Liek, Nagari Batipuah, Kec. Sungai Puar, Kab. Agam	08/04/2016	19,9	36	4	7,2	67	36	4	5,6	1,54	5,7	0,006
		Nagari Taluak, Kec. Banuhampu, Kab. Agam	08/04/2016	24,4	140	15	7,15	265	140	15	4,9	3,72	32,6	0,025
		Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguak Panjang, Kota Bukittinggi	08/04/2016	23,9	53	3,3	7,76	99	53	3,3	4,4	9,13	84,8	0,029
		Jorong Joho, Nagari Kamang, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam	08/04/2016	25,4	84	3,3	7,23	175	84	3,3	5,2	2,49	22,8	0,008
		Nagari Padang Tarok, Kec. Baso. Kab. Agam	08/04/2016	26,5	145	17	8,17	273	145	17	7,3	1,54	48,9	0,006
		Jorong Bumbung, Nagari Situjuh Batu, Kec. Situjuh V Nagari, Kab. Lima Puluh Kota	08/04/2016	25,9	132	19	6,33	250	132	19	6,6	1,18	6,5	0,006
		Kel. Balai Panjang, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh	08/04/2016	26,1	125	10	8,57	236	125	10	6,8	2,06	22,8	0,007
		Kel. Ibh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	08/04/2016	26,5	125	14	8,29	227	125	14	6,4	1,32	26,1	0,006
		Kel. Payobasuang, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh	08/04/2016	26,8	120	11	8,12	225	120	11	6,8	2,4	22,8	0,006
		Jorong Pintu Koto, Nagari Bukit Limbuku, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	08/04/2016	26,1	119	27	8,2	215	119	27	6,5	1,76	35,9	0,006



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Agam	Periode 2											
		Jorong Sawah Liek, Nagari Batipuah, Kec. Sungai Puar, Kab. Agam	0,236	0,04	0,02	0,03	0,001	0,1	0,01	920	920	0,005	0,001
		Nagari Taluak, Kec. Banuhampu, Kab. Agam	1,53	0,08	0,01	0,09	0,001	0,1	0,01	2.400	2.400	0,005	0,001
		Kel. Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	1,84	3,83	0,02	0,74	0,003	0,1	0,08	1.600	2.400	0,005	0,01
		Jorong Joho, Nagari Kamang, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam	0,379	0,26	0,02	0,12	0,001	0,1	0,01	1.600	2.400	0,005	0,002
		Nagari Padang Tarok, Kec. Baso, Kab. Agam	0,133	0,06	0,01	0,11	0,001	0,1	0,01	2.400	2.400	0,005	0,001
		Jorong Bumbung, Nagari Situjuh Batu, Kec. Situjuh V Nagari, Kab. Lima Puluh Kota	0,15	0,016	0,01	0,1	0,0005	0,1	0,01	540	2.400	0,005	0,001
		Kel. Balai Panjang, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh	0,178	0,03	0,02	0,08	0,0005	0,1	0,01	920	920	0,005	0,001
		Kel. Ibh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	0,234	0,016	0,02	0,13	0,0005	0,1	0,01	540	2.400	0,005	0,001
		Kel. Payobasuang, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh	0,28	0,06	0,01	0,02	0,0005	0,1	0,01	1.600	1.600	0,005	0,001
		Jorong Pintu Koto, Nagari Bukit Limbuku, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	0,322	0,09	0,01	0,11	0,0005	0,1	0,01	920	2.400	0,005	0,001



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.	Sungai Batang Anai	Periode 1												
		Nagari Singgalang, Jorong Subarang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	25/03/2016	26,4	151	22	7,78	304	151	22	7,60	1,11	23,7	0,015
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang	25/03/2016	25,7	158	32	8,01	299	158	32	7,8	1,11	10,2	0,009
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Barat, Kota Padang Panjang	25/03/2016	27,1	169	1	8,09	323	169	1	7,6	0,2	6,78	0,129
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	25/03/2016	26,6	153	17	8,04	292	153	17	7,8	1,6	13,6	0,017
		Jorong Air Terjun, Kab. Tanah Datar	25/03/2016	23,2	154	4	7,64	336	154	4	7,3	1,1	5,7	0,003
		Jorong Air Terjun, Kab. Tanah Datar	25/03/2016	25,7	184	14	7,81	299	184	14	7,2	2,5	5,7	0,009
		Jorong Air Terjun, Kab. Tanah Datar	25/03/2016	24,4	184	8	6,29	346	184	8	7,8	2,5	11,8	0,003
		Nagari Anduring, Kec. 2 x 11 Kayu, Kab. Padang Pariaman	25/03/2016	27,2	145	16	7,71	272	145	16	7,8	1,7	5,7	0,006
		Jembatan Baru Batang Anai Pasar Usang, Kab. Padang Pariaman	25/03/2016	28,7	93	82	6,83	176	93	82	7,7	1,7	6,78	0,012
Kanagarian Duku, Pasar Usang, Kab. Padang Pariaman	25/03/2016	27,1	31	48	5,97	58	31	48	5,9	2,7	10,2	0,024		
Batang Anai sebelum bermuara Jembatan BIM, Kab. Padang Pariaman	25/03/2016	26,3	98	49	7	186	98	49	6,6	3,2	6,78	0,018		



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Anai	Periode 1											
		Nagari Singgalang, Jorong Subarang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	4,23	0,014	0,02	0,86	0,0005	0,1	0,01	1.600	2.400	0,002	0,001
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang	2,06	0,014	0,02	1,63	0,0005	0,1	0,01	2400	2400	0,002	0,001
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Barat, Kota Padang Panjang	3,92	0,014	0,03	0,6	0,0005	0,1	0,01	2400	2400	0,002	0,001
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	0,87	0,014	0,03	1,45	0,0005	0,1	0,01	23	2400	0,002	0,001
		Jorong Air Terjun, Kab. Tanah Datar	0,48	0,014	0,03	1,56	0,0005	0,1	0,01	33	350	0,002	0,001
		Jorong Air Terjun, Kab. Tanah Datar	0,47	0,014	0,02	1,73	0,0005	0,1	0,01	44	2400	0,002	0,001
		Jorong Air Terjun, Kab. Tanah Datar	0,24	0,014	0,02	2,17	0,0005	0,1	0,01	280	2400	0,002	0,001
		Nagari Anduring, Kec. 2 x 11 Kayu, Kab. Padang Pariaman	1,96	0,014	0,02	2,43	0,0005	0,1	0,01	1600	2400	0,002	0,001
		Jembatan Baru Batang Anai Pasar Usang, Kab. Padang Pariaman	1,32	0,09	0,02	1,14	0,0005	0,1	0,01	23	1600	0,002	0,001
		Kanagarian Duku, Pasar Usang, Kab. Padang Pariaman	2,63	0,1	0,02	1,02	0,0005	0,1	0,01	1600	2400	0,002	0,002
		Batang Anai sebelum bermuara Jembatan BIM, Kab. Padang Pariaman	1,37	0,03	0,02	1,04	0,0005	0,1	0,01	48	2400	0,002	0,002



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Anai	Periode 2												
		Nagari Singgalang, Jorong Subarang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	18/10/2016	26	173	15	7,74	327	173	15	4,20	1,00	5,14	0,01
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang	18/10/2016	26,1	143	8	7,86	270	143	8	3,20	1,20	5,14	0,006
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Barat, Kota Padang Panjang	18/10/2016	26,6	165	6	7,9	310	165	6	4	1,20	5,14	0,006
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	18/10/2016	26,8	155	10	7,9	290	155	10	6,20	1,60	5,14	0,006
		Jorong Air Terjun, Kab. Tanah Datar	18/10/2016	26,9	185	8	7,47	351	185	8	3,8	1,4	5,14	0,006
		Jorong Air Terjun, Kab. Tanah Datar	18/10/2016	27,4	154	11	7,9	291	154	11	4	1,2	5,14	0,006
		Jorong Air Terjun, Kab. Tanah Datar	18/10/2016	29,7	166	14	6,8	344	166	14	3	1	5,14	0,006
		Nagari Anduring, Kec. 2 x 11 Kayu, Kab. Padang Pariaman	18/10/2016	29,7	123	14	6,8	234	123	14	2	1,2	5,14	0,006
		Jembatan Baru Batang Anai Pasar Usang, Kab. Padang Pariaman	18/10/2016	27,3	66	40	6,78	125	66	40	3,6	1,2	5,14	0,006
		Kanagarian Duku, Pasar Usang, Kab. Padang Pariaman	18/10/2016	26,9	67	27	6,74	127	67	27	3	1	5,14	0,006
		Batang Anai sebelum bermuara Jembatan BIM, Kab. Padang Pariaman	18/10/2016	27,1	90	20	6,52	171	90	20	3,5	1,1	5,14	0,007



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Anai	Periode 2											
		Nagari Singgalang, Jorong Subarang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	0,12	0,01	0,02	0,54	0,038	0,10	0,01	2.400	2.400	0,00	0,00
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang	0,10	0,014	0,02	0,42	0,0005	0,1	0,01	1.600	2.400	0,002	0,014
		Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Barat, Kota Padang Panjang	0,10	0,014	0,02	0,63	0,0005	0,10	0,01	2.400	2.400	0,004	0,001
		Jorong Air Terjun, Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar	0,10	0,014	0,02	0,52	0,061	0,10	0,01	48	2.400	0,002	0,001
		Jorong Air Terjun, Kab. Tanah Datar	0,1	0,014	0,02	0,25	0,0005	0,1	0,01	110	540	0,002	0,006
		Jorong Air Terjun, Kab. Tanah Datar	0,12	0,03	0,02	0,467	0,0005	0,1	0,01	44	1.600	0,002	0,012
		Jorong Air Terjun, Kab. Tanah Datar	0,1	0,014	0,02	0,65	0,0005	0,1	0,01	920	1.600	0,002	0,001
		Nagari Anduring, Kec. 2 x 11 Kayu, Kab. Padang Pariaman	0,1	0,014	0,02	0,462	0,0005	0,1	0,01	2400	2.400	0,004	0,002
		Jembatan Baru Batang Anai Pasar Usang, Kab. Padang Pariaman	0,1	0,033	0,02	0,31	0,0005	0,1	0,01	280	920	0,004	0,012
		Kanagarian Duku, Pasar Usang, Kab. Padang Pariaman	0,1	0,056	0,02	0,21	0,0005	0,1	0,01	920	2.400	0,003	0,001
		Batang Anai sebelum bermuara Jembatan BIM, Kab. Padang Pariaman	0,1	0,06	0,02	0,24	0,0005	0,1	0,01	46	220	0,004	0,009



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.	Sungai Batang Lampasi	Periode 1												
		Jorong Siamang Bunyi, Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	08/07/2016	25	33	29	7,36	62	33	29	5,8	0,7	42,4	0,016
		Jorong Suayan, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	08/07/2016	25	56	12	7,18	103	56	12	7,5	2,4	45,6	0,009
		Jorong Sawah Padang, Kanagarian Sariak, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	08/07/2016	25	47	18,3	7,18	88	47	18,3	7,2	2,5	16,3	0,013
		Kanagarian Durian Gadang, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	08/07/2016	25	61	22,5	7,11	115	61	22,5	6,6	0,8	5,7	0,016
		Jorong Koto Tengah, Kanagarian Sungai Baraangin Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	08/07/2016	25	91	41,67	7,52	172	91	41,67	7	1,9	42,4	0,029
		Kelurahan Koto Panjang, Kota Payakumbuh	08/07/2016	25	76	31,7	7,11	146	76	31,7	5,5	0,4	6,5	0,068
		Kelurahan Sungai Durian, Kec. Latina, Kota Payakumbuh	08/07/2016	25	76	56	7,4	153	76	56	6	2,3	6,5	0,141
		Kel. Padang Kampung, Kota Payakumbuh	08/07/2016	25	80	36,7	7,4	155	80	36,7	5,6	1,2	16,3	0,116
		Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	08/07/2016	25	82	33,3	7,6	163	82	33,3	6,7	2,6	45,6	0,124
Kel. Koto Baru Payobasung, Kota Payakumbuh	08/07/2016	25	90	46	7,44	169	90	46	5,8	0,7	26,1	0,115		

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Lampasi	Periode 1											
		Jorong Siamang Bunyi, Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	1,691	0,0117	0,01	0,04	0,0005	0,1	0,02	2.400	2.400	0,01	0,001
		Jorong Suayan, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	0,609	0,0078	0,01	0,1	0,0005	0,1	0,02	140	350	0,01	0,001
		Jorong Sawah Padang, Kanagarian Sariak, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	1,01	0,078	0,01	0,09	0,0005	0,75	0,2	2.400	2.400	0,01	0,001
		Kanagarian Durian Gadang, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	1,648	0,0156	0,01	0,05	0,0005	0,1	0,02	35	1.600	0,01	0,001
		Jorong Koto Tengah, Kanagarian Sungai Baraangin Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	2,809	0,014	0,01	0,17	0,0005	0,1	0,021	2.400	2.400	0,01	0,001
		Kelurahan Koto Panjang, Kota Payakumbuh	6,144	0,109	0,01	0,19	0,0005	0,1	0,022	350	1.600	0,01	0,001
		Kelurahan Sungai Durian, Kec. Latina, Kota Payakumbuh	11,39	0,078	0,01	0,26	0,0005	0,1	0,023	1.600	2.400	0,001	0,001
		Kel. Padang Kampung, Kota Payakumbuh	9,852	0,125	0,01	0,17	0,0005	0,1	0,022	1.600	2.400	0,001	0,001
		Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	10,15	0,126	0,01	0,19	0,0005	0,1	0,023	920	2.400	0,001	0,001
		Kel. Koto Baru Payobasung, Kota Payakumbuh	10,03	0,078	0,01	0,16	0,0005	0,1	0,023	920	2.400	0,01	0,001

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Lampasi	Periode 2												
		Jorong Siamang Bunyi, Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	27/10/2016	25,3	23,8	11	6,87	46	23,8	11	6,2	1	5,14	0,02
		Jorong Suayan, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	27/10/2016	26,4	79	12	7,35	148	79	12	7,2	2,4	5,14	0,017
		Jorong Sawah Padang, Kanagarian Sariak, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	27/10/2016	27,4	77	52	7,3	145	77	52	6,7	1,9	5,14	0,02
		Kanagarian Durian Gadang, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	27/10/2016	25,8	102	22	6,7	203	102	22	5,6	1,2	5,14	0,028
		Jorong Koto Tengah, Kanagarian Sungai Baraangin Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	27/10/2016	26,8	132	40	6,78	249	132	40	5,6	1,2	5,14	0,081
		Kelurahan Koto Panjang, Kota Payakumbuh	27/10/2016	26,2	46	53	6,7	86	46	53	4,3	1,1	5,14	0,102
		Kelurahan Sungai Durian, Kec. Latina, Kota Payakumbuh	27/10/2016	26,2	121	53	6,56	227	121	53	4,8	1,2	5,14	0,376
		Kel. Padang Kampung, Kota Payakumbuh	27/10/2016	25,4	114	67	6,05	224	114	67	4,8	1,2	5,14	0,222
		Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	27/10/2016	27,7	111	36	6,56	216	111	36	4,9	1,3	5,14	0,139
		Kel. Koto Baru Payobasung, Kota Payakumbuh	27/10/2016	26,9	140	93	6,74	273	140	93	4	1,4	5,14	0,338

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Lampasi	Periode 2											
		Jorong Siamang Bunyi, Nagari Kubang, Kab. Lima Puluh Kota	1,691	0,0117	0,01	0,04	0,0005	0,1	0,02	2.400	2.400	0,01	0,001
		Jorong Suayan, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	0,609	0,0078	0,01	0,1	0,0005	0,1	0,02	140	350	0,01	0,001
		Jorong Sawah Padang, Kanagarian Sariak, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	1,01	0,078	0,01	0,09	0,0005	0,75	0,2	2.400	2.400	0,01	0,001
		Kanagarian Durian Gadang, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	1,648	0,0156	0,01	0,05	0,0005	0,1	0,02	35	1.600	0,01	0,001
		Jorong Koto Tengah, Kanagarian Sungai Baraangin Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	2,809	0,014	0,01	0,17	0,0005	0,1	0,021	2.400	2.400	0,01	0,001
		Kelurahan Koto Panjang, Kota Payakumbuh	6,144	0,109	0,01	0,19	0,0005	0,1	0,022	350	1.600	0,01	0,001
		Kelurahan Sungai Durian, Kec. Latina, Kota Payakumbuh	11,39	0,078	0,01	0,26	0,0005	0,1	0,023	1.600	2.400	0,001	0,001
		Kel. Padang Kampung, Kota Payakumbuh	9,852	0,125	0,01	0,17	0,0005	0,1	0,022	1.600	2.400	0,001	0,001
		Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	10,15	0,126	0,01	0,19	0,0005	0,1	0,023	920	2.400	0,001	0,001
		Kel. Koto Baru Payobasung, Kota Payakumbuh	10,03	0,078	0,01	0,16	0,0005	0,1	0,023	920	2.400	0,01	0,001

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.	Sungai Batang Lembang	Periode 1												
		Jorong Bukit Subang, Nagari Lubuk Silasih, Kec. Gunung Talng, Kab. Solok	05/09/2016	24,2	67	5	7,3	126	67	5	7,7	2,9	6,7	0,008
		Kampung Batu Dalam Barat, Nagari Kampung Batu Dalam, Kec. Dananu Kembar	05/09/2016	28,9	93	38	7,16	176	93	38	7,2	3,28	30,2	0,081
		Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	05/09/2016	29,7	100	36	7,2	187	100	36	7,7	4,59	33,6	0,088
		Jorong Gelanggang Tanjung, Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	05/09/2016	28,4	96	39	7,21	184	96	39	6,9	3,36	13,4	0,173
		Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	05/09/2016	28,3	101	42	6,91	190	101	42	6,9	3,59	13,4	0,242
		Kel. Ampang jao, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	05/09/2016	29	98	46	7,2	187	98	46	6,4	19,9	75,6	0,236
		Kel. Ampang Jao, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	05/09/2016	28,6	103	33	7,08	196	103	33	6,2	2,26	51,1	0,215
		Kel. Tanah garam, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	05/09/2016	28,4	99	30	6,28	185	99	30	6,4	2,97	67,2	0,252
		Kanagarian Singkarak, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok	05/09/2016	27,8	109	78	7,62	207	109	78	7,9	4,15	70,5	0,042
		Kanagarian Sungayang, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok	05/09/2016	21,8	23	58	6,75	42,8	23	58	8,1	3,94	60,4	0,043

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Lembang	Periode 1											
		Jorong Bukit Subang, Nagari Lubuk Silasih, Kec. Gunung Talng, Kab. Solok	0,256	0,049	0,01	0,179	0,0005	0,1	0,01	5	5	0,002	0,001
		Kampung Batu Dalam Barat, Nagari Kampung Batu Dalam, Kec. Dananu Kembar	1,355	0,014	0,01	0,144	0,0005	0,1	0,01	1.600	2.400	0,002	0,001
		Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	2,4	0,014	0,01	0,093	0,0005	0,1	0,01	40	2.400	0,002	0,001
		Jorong Gelanggang Tanjuang, Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	1,872	0,014	0,02	0,218	0,0005	0,1	0,01	35	280	0,002	0,001
		Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	1,323	0,014	0,02	0,093	0,0005	0,1	0,01	2.400	2.400	0,002	0,001
		Kel. Ampang jao, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	1,89	0,014	0,02	0,121	0,0005	0,1	0,01	26	180	0,002	0,001
		Kel. Ampang Jao, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	2,724	0,014	0,02	0,093	0,0005	0,1	0,01	35	220	0,002	0,001
		Kel. Tanah garam, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	1,177	0,014	0,02	0,063	0,0005	0,1	0,01	350	1.600	0,002	0,002
		Kanagarian Singkarak, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok	0,914	0,014	0,03	0,073	0,0005	0,1	0,01	48	350	0,002	0,002
		Kanagarian Sungayang, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok	2,817	0,014	0,02	0,06	0,0005	0,1	0,01	1.600	1.600	0,002	0,001

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Lembang	Periode 2												
		Jorong Bukit Subang, Nagari Lubuk Silasih, Kec. Gunung Talng, Kab. Solok	25/10/2016	25	23,3	12	6,7	44,8	23,3	12	5,8	1,4	5,3	0
		Kampung Batu Dalam Barat, Nagari Kampung Batu Dalam, Kec. Dananu Kembar	25/10/2016	25	61	8	7,13	114	61	8	5,6	1,2	9,02	0,011
		Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	25/10/2016	25	150	50	7,3	283	150	50	5,6	1,3	5,14	0
		Jorong Gelanggang Tanjuang, Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	25/10/2016	25	93	38	6,74	171	93	38	5,7	1,1	5,14	0,032
		Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	25/10/2016	25	100	36	6,87	173	100	36	5,1	1	5,14	0,03
		Kel. Ampang jao, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	25/10/2016	25	107	32	7,17	202	107	32	4,8	1,2	5,14	0,295
		Kel. Ampang Jao, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	25/10/2016	25	93	38	6,7	198	93	38	5,7	1,1	5,14	0,032
		Kel. Tanah garam, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	25/10/2016	25	100	36	6,87	196	100	36	5,1	1	5,14	0,03
		Kanagarian Singkarak, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok	25/10/2016	25	150	36	7,3	71	150	36	5,6	1,3	5,14	0
		Kanagarian Sungayang, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok	27/10/2016	28	121	24	7,35	229	121	24	5,5	1,1	5,14	0,032

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Lembang	Periode 2											
		Jorong Bukit Subang, Nagari Lubuk Silasih, Kec. Gunung Talng, Kab. Solok	0,2	0,014	0,2	0,02	0,008	0,1	0,01	35	920	0,002	0
		Kampung Batu Dalam Barat, Nagari Kampung Batu Dalam, Kec. Dananu Kembar	0,1	0,051	0,24	0,02	0,009	0,1	0,01	17	17	0,002	0,001
		Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	0,5	0,1	0,3	0,5	0,013	0,1	0,01	44	2.400	0,002	0
		Jorong Gelanggang Tanjuang, Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	0,398	0,041	0,29	0,499	0,02	0,1	0,01	280	2.400	0,002	0,023
		Kanagarian Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok	0,524	0,058	0,23	0,339	0,002	0,1	0,01	2.400	2.400	0,002	0,012
		Kel. Ampang jao, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	0,395	0,103	0,21	0,527	0,002	0,1	0,01	33	2.400	0,002	0,026
		Kel. Ampang Jao, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	0,398	0,041	0,29	0,499	0,02	0,1	0,01	33	2.400	0,002	0,023
		Kel. Tanah garam, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok	0,524	0,058	0,23	0,339	0,002	0,1	0,01	920	2.400	0,002	0,012
		Kanagarian Singkarak, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok	0,5	0,014	0,3	0,02	0	0,1	0,01	1.600	1.600	0,002	0
		Kanagarian Sungayang, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok	0,275	0,04	0,27	0,429	0,002	0,1	0,01	1.600	2.400	0,002	0,018

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.	Sungai Batang Ombilin	Periode 1												
		Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simauang, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar	24/02/2016	28,3	106	10	8,18	207	106	10	7,1	1,2	25,9	0,006
		Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kab. Tanah Datar	24/02/2016	28,4	103	20	8,12	194	103	20	7,2	1,2	66,2	0,031
		Jorong Lubuk Pinang, Nagari Ombilin, Kec. Talawai, Kota Sawahlunto	24/02/2016	29,7	68	92	7,83	129	68	92	7,6	0,2	14,4	0,083
		Jorong Talago, Nagari Ombilin, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	24/02/2016	30	74	120	7,88	138	74	120	6,6	0,7	97,9	0,081
		Desa Kandis, Nagari Talawai Mudik, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	24/02/2016	30,1	92	124	7,93	170	92	124	7	1,7	14,4	0,054
		Desa Rantih, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	24/02/2016	29,4	96	88	7,89	181	96	88	7,3	0,7	34,6	0,058
		Jorong Batu Gadang, Nagari Limo Koto, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	24/02/2016	30,7	94	212	7,95	178	94	212	6,9	1,2	17,3	0,067
		Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	24/02/2016	30,6	94	132	8,04	178	94	132	7,6	0,7	40,3	0,061
		Jorong Ranah Sigading, Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	24/02/2016	28,7	85	128	8,08	160	85	128	6,9	2,2	2,9	0,068
Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	24/02/2016	28,9	85	188	8,04	160	85	188	6,7	1,7	25,9	0,063		



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Ombilin	Periode 1											
		Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simauang, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar	0,04	0,013	0,02	0,79	0,0005	0,1	0,01	920	2.400	0,002	0,001
		Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kab. Tanah Datar	1,65	0,013	0,02	0,064	0,0005	0,1	0,08	540	2.400	0,002	0,001
		Jorong Lubuk Pinang, Nagari Ombilin, Kec. Talawai, Kota Sawahlunto	6,7	0,051	0,02	0,384	0,0005	0,1	0,11	2.400	2.400	0,002	0,001
		Jorong Talago, Nagari Ombilin, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	6,81	0,01	0,02	0,445	0,0005	0,1	0,11	2.400	2.400	0,002	0,001
		Desa Kandis, Nagari Talawai Mudik, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	3,76	0,05	0,02	0,377	0,0005	0,1	0,08	2.400	2.400	0,002	0,001
		Desa Rantih, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	4,38	0,019	0,02	0,131	0,0005	0,1	0,11	2.400	2.400	0,002	0,001
		Jorong Batu Gadang, Nagari Limo Koto, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	4,88	0,028	0,025	0,0277	0,0005	0,1	0,11	2.400	2.400	0,002	0,001
		Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjuang, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	4,44	0,031	0,02	0,17	0,0005	0,1	0,11	350	2.400	0,002	0,001
		Jorong Ranah Sigading, Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	6,23	0,02	0,02	0,06	0,0005	0,1	0,09	2.400	2.400	0,002	0,001
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	4,47	0,053	0,02	0,437	0,0005	0,1	0,1	2.400	2.400	0,002	0,001



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Ombilin	Periode 2												
		Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simauang, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar	20/10/2016	28,5	121	3	7,93	246	121	3	4,7	1,1	40,7	0,006
		Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kab. Tanah Datar	20/10/2016	27,7	126	2	7,47	243	126	2	5,8	1,2	50,8	0,006
		Jorong Lubuk Pinang, Nagari Ombilin, Kec. Talawai, Kota Sawahlunto	20/10/2016	29,9	129	17	7,08	245	129	17	5,2	1,2	47,5	0,09
		Jorong Talago, Nagari Ombilin, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	20/10/2016	31,2	117	3	7,45	235	117	3	5,5	1,1	23,7	0,006
		Desa Kandis, Nagari Talawai Mudik, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	20/10/2016	31,3	149	16	7,57	286	149	16	5,7	1,3	33,9	0,006
		Desa Rantih, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	20/10/2016	31,4	50	10	7,29	94	50	10	5,6	1,6	33,9	0,006
		Jorong Batu Gadang, Nagari Limo Koto, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	20/10/2016	30,9	126	216	7,04	253	126	216	5,2	1,2	30,5	0,026
		Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	20/10/2016	30,2	147	208	7,22	296	147	208	4,5	1,1	44,1	0,025
		Jorong Ranah Sigading, Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	20/10/2016	29,4	123	140	7,08	244	123	140	4,6	1	64,4	0,018
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	20/10/2016	28,9	130	112	7,22	258	130	112	4,9	1,3	40,7	0,016



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Ombilin	Periode 2											
		Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simauang, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar	0,1	0,12	0,02	0,4	0,002	0,1	0,01	540	540	0,002	0,001
		Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kab. Tanah Datar	0,1	0,04	0,02	0,37	0,002	0,1	0,01	350	350	0,002	0,001
		Jorong Lubuk Pinang, Nagari Ombilin, Kec. Talawai, Kota Sawahlunto	0,17	0,05	0,02	0,82	0,002	0,1	0,01	2.400	2.400	0,003	0,001
		Jorong Talago, Nagari Ombilin, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	0,1	0,02	0,012	0,47	0,002	0,1	0,01	240	240	0,003	0,001
		Desa Kandis, Nagari Talawai Mudik, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	0,1	0,04	0,02	0,36	0,002	0,1	0,01	1.600	1.600	0,002	0,001
		Desa Rantih, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto	0,1	0,09	0,02	0,18	0,002	0,1	0,01	1.600	1.600	0,002	0,001
		Jorong Batu Gadang, Nagari Limo Koto, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	0,91	0,06	0,02	2,06	0,002	0,1	0,01	1.600	1.600	0,002	0,001
		Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjuang, Kec. Koto Tujuh, Kab. Sijunjung	0,67	0,05	0,02	2,29	0,002	0,1	0,01	2.400	2.400	0,002	0,002
		Jorong Ranah Sigading, Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	0,49	0,05	0,02	1,42	0,002	0,1	0,01	2.400	2.400	0,002	0,001
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	0,44	0,09	0,02	1,12	0,002	0,1	0,01	2.400	2.400	0,02	0,001



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.	Sungai Batang Pangian	Periode 1												
		Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjuang Gadang, Kab. Sijunjung	02/05/2016-03/05/2016	25	19	6	6,19	36	19	6	5,4	2,31	5,7	1,534
		Jorong Koto Lamo, Nagari Lubuak Tarangtang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	02/05/2016-03/05/2016	25	28	10	6,06	53	28	10	5,7	0,71	6,72	0,155
		Jorong Muarao Tiua, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	02/05/2016-03/05/2016	25	50	40	6,7	110	50	40	6,8	3,63	36,9	0,038
		Jorong Sialang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	02/05/2016-03/05/2016	25	55	50	8,6	104	55	50	7,6	3,57	36,9	0,023
		Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	02/05/2016-03/05/2016	25	65	17	6,83	123	65	17	7	2,68	5,7	0,443
		Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	02/05/2016-03/05/2016	25	74	27	6,58	136	74	27	6,2	1,94	5,7	0,012
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya	02/05/2016-03/05/2016	25	73	20	6,49	138	73	20	5,31	6,2	6,72	0,294

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Pangian	Periode 1											
		Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjuang Gadang, Kab. Sijunjung	6,52	0,25	0,04	0,06	0,0005	0,1	0,01	34	540	0,002	0,002
		Jorong Koto Lamo, Nagari Lubuak Tarangtang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,02	0,04	0,02	0,02	0,0005	0,1	0,01	34	920	0,002	0,002
		Jorong Muarao Tiua, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	5,35	0,2	0,04	0,02	0,0005	0,1	0,01	170	540	0,002	0,002
		Jorong Sialang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	0,03	0,12	0,04	0,02	0,0005	0,1	0,01	180	350	0,002	0,002
		Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	1,54	0,04	0,02	0,02	0,0005	0,1	0,01	540	540	0,002	0,002
		Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	0,89	0,21	0,04	0,02	0,0005	0,1	0,01	350	2.400	0,002	0,002
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya	0,86	0,06	0,04	0,02	0,0005	0,1	0,01	280	2.400	0,002	0,002

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Pangian	Periode 2												
		Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjuang Gadang, Kab. Sijunjung	16/09/2016	25	26,7	2	6	36,5	26,7	2	7	0,6	20,6	0,006
		Jorong Koto Lamo, Nagari Lubuak Tarangtang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	16/09/2016	28	27,3	26,7	6	47,4	27,3	26,7	6	0,4	16,7	0,006
		Jorong Muarao Tiua, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	05/02/2016	30,1	52	16,7	7,75	103	52	16,7	6,4	8,75	35,2	0,006
		Jorong Sialang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	05/02/2016	30	21	7	7,83	44	21	7	6,6	1,94	6,4	0,006
		Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	05/02/2016	30,2	54	13,3	7,27	105	54	13,3	5,7	1,2	5,7	0,008
		Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	05/02/2016	28,8	20	16,7	7,03	36	20	16,7	4,8	10,67	32	0,009
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya	05/02/2016	28,1	48	10	7,15	94	48	10	5,4	0,69	5,7	0,013

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Pangian	Periode 2											
		Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjuang Gadang, Kab. Sijunjung	0,066	0,01	0,01	0,017	0,0005	0,1	0,01	27	70	0,01	0,001
		Jorong Koto Lamo, Nagari Lubuak Tarangtang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,19	0,014	0,01	0,012	0,0005	0,1	0,01	33	540	0,01	0,001
		Jorong Muarao Tiua, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,067	0,08	0,01	0,013	0,0005	0,1	0,01	2.400	2.400	0,002	0,022
		Jorong Sialang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	0,116	0,014	0,01	0,013	0,0005	0,1	0,01	350	2.400	0,002	0,3
		Jorong Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	0,194	0,03	0,01	0,013	0,0005	0,1	0,01	280	1.600	0,002	0,64
		Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	0,245	0,014	0,01	0,013	0,0005	0,1	0,01	920	1.600	0,002	0,001
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya	0,341	0,014	0,01	0,013	0,0005	0,1	0,01	2.400	2.400	0,002	0,001

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
9.	Sungai Batang Hari	Periode 1												
		Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok	7/4/2016	19,4	51	3	7,18	99	51	3	8	1,02	6,72	0,09
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	7/4/2016	26,5	68	380	7,24	128	68	380	6,7	0,17	10,1	0,034
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	7/4/2016	26,7	63	145	7,22	119	63	145	6,2	3,55	10,1	0,035
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	7/4/2016	26,6	61	400	6,89	114	61	400	7,8	0,59	13,4	0,051
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	7/4/2016	27,6	60	495	6,66	112	60	495	7,8	2,29	10,1	0,059
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kab. Dharmasraya	7/4/2016	26,3	64	200	7,11	121	64	200	6,7	1,44	23,5	0,056
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan	7/4/2016	27,5	54	104	6,78	101	54	104	6,3	1,02	6,72	0,026
	Sungai Batang Momong*	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	7/4/2016	27,9	51	185	6,43	97	51	185	6,4	1,02	10,1	0,043
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya	7/4/2016	27,3	55	455	6,7	104	55	455	7,3	0,59	13,4	0,067
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kab. Solok Selatan	7/4/2016	27,5	59	535	6,68	110	59	535	6,7	1,02	30,2	0,075

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Hari	Periode 1											
		Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok	0,87	0,017	<0,02	0,44	<0,0005	<0,1	<0,01	16.000	> 24.000	<0,002	<0,001
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kab. Solok	1,36	0,056	0,03	2,11	<0,0005	<0,1	<0,01	3.500	3.500	<0,002	0,002
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	1,6	<0,014	0,02	1,69	<0,0005	<0,1	<0,01	> 24.000	> 24.000	<0,002	0,002
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	0,05	<0,014	0,02	0,13	<0,0005	<0,1	<0,01	3.500	> 24.000	<0,002	
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	0,06	0,056	0,02	<0,02	<0,0005	<0,1	<0,01	> 24.000	> 24.000	<0,002	0,002
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kab. Dharmasraya	2,59	<0,014	0,02	0,08	<0,0005	<0,1	<0,01	> 24.000	> 24.000	<0,002	0,002
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan	0,97	0,038	<0,02	<0,02	<0,0005	<0,1	0,011	3.500	> 24.000	<0,002	0,002
	Sungai Batang Momong*	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	1,82	0,014	0,03	<0,02	<0,0005	<0,1	0,013	> 24.000	> 24.000	<0,002	0,002
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya	2,9	< 0,014	< 0,02	<0,02	<0,0005	<0,1	0,33	> 24.000	> 24.000	<0,002	0,002
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kab. Solok Selatan	3,19	0,034	0,03	<0,02	<0,0005	<0,1	0,01	> 24.000	> 24.000	<0,002	0,002



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Hari	Periode 2 Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok	23/5/2016	21,1	47	7	7,36	82	47	7	6,5	0,87	11,2	<0,003
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	23/5/2016	26,1	62	57	7,89	117	62	57	5,8	0,87	19,2	0,011
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	23/5/2016	26	60	295	7,38	118	60	295	5,2	1,3	22,4	0,027
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	23/5/2016	29,7	49	545	7,46	92	49	545	5,9	2,6	20,8	0,08
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	23/5/2016	26,3	52	295	7,12	98	52	295	5,8	1,3	30,4	0,097
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kab. Dharmasraya	23/5/2016	24,5	58	540	6,86	111	58	540	5,4	0,87	17,6	0,03
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan	23/5/2016	26	52	66	7,08	97	52	66	4,8	1,3	17,6	0,009
	Sungai Batang Momong*	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	23/5/2016	27,2	53	66	6,87	100	53	66	5,6	1,3	19,2	0,098
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya	23/5/2016	26,3	49	335		92	49	335	5,9	2,16	30,4	0,089
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kab. Solok Selatan	23/5/2016	25	62	310	6,83	117	62	310	5	1,3	24	0,114

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Hari	Periode 2 Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok	< 0,11	<0,014	<0,02	0,41	<0,0005	<0,1	<0,01	2.800	> 24.000	<0,002	<0,001
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	<0,11	0,018	<0,02	0,41	<0,0005	<0,1	<0,01	2.200	5.400	<0,002	<0,001
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	0,57	<0,014	<0,02	0,6	<0,0005	<0,1	<0,01	330	1.700	<0,002	<0,001
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	1,63	0,028	<0,02	0,58	<0,0005	<0,1	<0,01	2.800	2.800	<0,002	<0,001
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya	2,46	0,046	<0,02	0,41	<0,0005	<0,1	<0,01	9.200	16.000	<0,002	<0,001
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kab. Dharmasraya	0,15	0,064	<0,02	0,42	<0,0005	<0,1	<0,01	16.000	16.000	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan	<0,13	<0,014	<0,02	0,4	<0,0005	<0,1	<0,01	270	1.300	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Momong*	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	2,69	<0,014	<0,02	0,15	<0,0005	<0,1	<0,01	280	5.400	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya	2,42	< 0,014	< 0,02	0,12	<0,0005	<0,1	<0,01	16.000	> 24.000	<0,002	0,002
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kab. Solok Selatan	3,93	0,067	<0,02	0,63	<0,0005	<0,1	<0,01	260	1.100	<0,002	<0,001



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Hari	Periode 3 Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok	27/6/2016	17,5	72	5	6,97	135	72	5	8,1	2,2	6,7	<0,003
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	27/6/2016	26,7	68	148	7,29	134	68	148	6,2	3,25	36,9	0,06
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	27/6/2016	27,3	74	94	7,75	142	74	94	6,4	4,19	26,8	0,067
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	27/6/2016	27,2	84	104	7,5	149	84	104	6,4	3,08	16,8	0,061
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	27/6/2016	26,3	79	60	7,04	148	79	60	6,2	3,25	40,6	0,078
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kab. Dharmasraya	27/6/2016	26,2	89	75	7,84	161	89	75	5,8	2,85	30,2	0,05
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	27/6/2016	27,2	73	5	7,56	130	73	5	6,6	3,22	40,2	0,041
	Sungai Batang Momong*	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	27/6/2016	29,8	80	70	6,95	150	80	70	5,9	2,65	10	0,017
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	27/6/2016	27,2	31	34	7,24	57	31	34	5,7	2,75	30,2	0,109
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	27/6/2016	28,2	83	16	7,03	159	83	16	5,6	3,65	10	0,036

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Hari	Periode 3 Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok	< 0,11	<0,014	<0,02	1,1	<0,0005	<0,1	<0,01	1.300	9.200	<0,002	<0,001
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	6,7	0,02	0,02	1,31	<0,0005	<0,1	<0,01	3.500	3.500	<0,002	<0,001
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	7,8	0,02	0,02	0,81	<0,0005	<0,1	<0,01	3.500	3.500	<0,002	<0,001
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	6,56	<0,014	<0,02	1,42	<0,0005	<0,1	<0,01	> 24.000	> 24.000	<0,002	<0,001
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya	8,35	0,02	0,02	1,17	<0,0005	<0,1	<0,01	16.000	16.000	<0,002	<0,001
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kab. Dharmasraya	5,51	0,05	0,02	1,63	<0,0005	<0,1	<0,01	9.200	16.000	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	4,74	0,03	0,02	0,88	<0,0005	<0,1	<0,01	1.100	1.700	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Momong*	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	1,21	0,04	0,02	0,64	<0,0005	<0,1	<0,01	16.000	> 24.000	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	0,56	0,03	<0,02	1,14	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	9.200	> 24.000	< 0,002	<0,001
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	3,44	0,03	0,02	1,44	<0,0005	<0,1	<0,01	1.300	2.400	<0,002	<0,001



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Hari	Periode 4 Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok	1/9/2016	19,2	21	16	7,16	39,7	21	16	6,3	1,2	<5,7	0,015
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	1/9/2016	27,6	55	440	6,27	102	55	440	6	3	38,4	0,567
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	1/9/2016	27,6	53	436	6,16	98	53	436	6,1	3,1	32	0,019
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	1/9/2016	28,2	50	244	6,3	95	50	244	6,8	2,4	22,4	0,017
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	1/9/2016	28,2	50	160	6,27	94	50	160	6,1	2	<5,7	0,015
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kab. Dharmasraya	1/9/2016	26,9	20	216	6,41	37,2	20	216	6,2	3,2	<5,7	0,013
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	1/9/2016	29,3	42	232	6,48	79	42	232	4,4	1	9,6	0,258
	Sungai Batang Momong*	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	1/9/2016	27,2	32	273	6,42	60	32	273	4,9	5,6	22,4	0,015
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	1/9/2016	28,1	48	132	6,62	94	48	132	5,4	1,7	9,6	0,009
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	1/9/2016	30,2	82	100	6,32	154	82	100	6,6	2,5	9,6	0,007

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Hari	Periode 4 Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok	0,015	0,08	<0,02	<0,013	0,004	<0,1	<0,01	9.200	> 24.000	<0,002	<0,001
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kab. Solok Selatan	0,567	0,01	<0,02	0,04	0,008	<0,1	<0,01	16.000	> 24.000	<0,002	0,82
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	0,441	<0,014	<0,02	0,017	<0,0005	<0,1	<0,01	> 24.000	> 24.000	<0,002	0,6
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	0,2	<0,014	<0,02	0,02	0,015	<0,1	<0,01	> 24.000	> 24.000	<0,002	0,43
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	0,133	<0,014	<0,02	0,013	0,005	<0,1	<0,01	> 24.000	> 24.000	<0,002	0,3
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kab. Dharmasraya	0,145	<0,014	<0,02	<0,013	0,015	<0,1	<0,01	> 24.000	> 24.000	<0,002	0,44
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	0,258	<0,014	<0,02	0,013	0,007	<0,1	<0,01	16.000	> 24.000	<0,002	0,22
	Sungai Batang Momong*	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	0,162	0,072	<0,02	<0,013	0,615	<0,1	<0,01	350	> 24.000	<0,002	0,63
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	0,151	<0,014	<0,02	<0,013	0,006	<0,1	<0,01	> 24.000	> 24.000	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	0,263	<0,014	<0,02	<0,013	<0,0005	<0,1	<0,01	1.700	1.700	<0,002	0,3



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Hari	Periode 5 Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok	2/11/2016	27,1	29,8	26	7,23	57	29,8	26	6,5	2,1	6,4	0,01
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	2/11/2016	27,2	81	195	7,31	152	81	195	6	1,2	<5,14	0,023
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	2/11/2016	27,2	57	172	7,92	111	57	172	6,5	1,7	<5,14	0,036
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	2/11/2016	27,2	56	15	8,08	105	56	15	7,8	2,6	<5,14	0,014
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya	2/11/2016	27,2	60	220	7,84	113	60	220	7,4	2,2	<5,14	0,047
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kabupaten Dharmasraya	2/11/2016	26,5	76	120	8,04	143	76	120	6,7	3,1	<5,14	0,024
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	2/11/2016	26,9	67	68	8,1	127	67	68	5,9	1,1	<5,14	0,016
	Sungai Batang Momong*	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	2/11/2016	26,9	24,8	40	8,04	47	24,8	40	6	1,6	<5,14	0,018
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	2/11/2016	26,8	50	8	7,71	97	50	8	4,6	1	<5,14	0,012
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	2/11/2016	26,9	60	56	7,92	113	60	56	6,3	1,1	<5,14	0,022

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Hari	Periode 5 Jorong Batanghari, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kabupaten Solok	0,292	<0,014	<0,02	<0,013	<0,02	<0,1	<0,01	>24.000	>24.000	0,002	0,023
		Jorong Gasing, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kec. Sangir Batanghari, Kab. Solok Selatan	0,601	<0,014	<0,02	<0,013	<0,02	<0,1	<0,01	490	490	0,007	<0,001
		Jorong Muaro Sangir, Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	1,238	<0,014	<0,02	0,018	<0,02	<0,1	<0,01	>24.000	>24.000	0,01	0,014
		Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	0,273	<0,014	<0,02	<0,013	<0,02	<0,1	<0,01	16.000	16.000	<0,002	0,011
		Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya	1,353	<0,014	<0,02	0,046	<0,02	<0,1	<0,01	5.400	>24.000	0,006	<0,001
		Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang, Kabupaten Dharmasraya	0,568	<0,014	<0,02	<0,013	<0,02	<0,1	<0,01	3.500	>24.000	0,004	<0,001
	Sungai Batang Sangir*	Bt. Sangir pada Jorong Muaro Sangir Nagari Kampung Baru, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan	0,504	<0,014	<0,02	<0,013	<0,02	<0,1	<0,01	2.800	9.200	0,002	0,012
	Sungai Batang Momong*	Bt. Momong pada Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	0,653	<0,014	<0,02	0,029	<0,02	<0,1	<0,01	9.200	9.200	0,003	0,03
	Sungai Batang Pangian*	Bt. Pangian pada Jorong Siguntur, Nagari Siguntur Kec. Sitiung Kabupaten Dharmasraya	0,412	<0,014	<0,02	<0,013	<0,02	<0,1	<0,01	440	>24.000	<0,002	0,023
	Sungai Batang Sipotar*	Bt. Sipotar pada Jorong Koto Ranah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kec. Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan	0,626	<0,014	<0,02	0,033	<0,02	<0,1	<0,01	400	>24.000	0,004	0,022

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10.	Sungai Batang Kampar	Periode 1												
		Jorong Pertemuan, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	22-23/06/2016	25,5	21	4,0	6,53	37	21	4,0	6,60	1,74	10,1	0,004
		Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	22-23/06/2016	26,8	32	3,0	7,19	59	32	3,0	6,20	1,59	16,8	0,005
		Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	22-23/06/2016	26,2	39	29,0	7,00	44	39	29,0	6,20	1,34	17,0	0,010
		Jorong Koto Tengah, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	22-23/06/2016	25,6	38	36	7,21	37	38	36	6,20	1,34	13,4	0,01
		Jorong Galugur, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	22-23/06/2016	27,6	39	31	6,91	59	39	31	5,60	1,50	47	0,01
		Jorong Tanjung Jajaran, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	22-23/06/2016	26,0	39	39,0	7,08	76	39	39,0	6,20	2,10	16,8	0,014
	Sungai Batang Mogan*	Jorong Kayu Godang, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	22-23/06/2016	26,7	34	2,0	5,73	44	34	2,0	5,00	0,65	< 5,3	0,005
	Sungai Batang Lolo*	Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman.	22-23/06/2016	27,3	71	90	7,16	133	71	90	5,80	1,19	30,2	0,022

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kampar	Periode 1 Jorong Pertemuan, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	1,16	0,02	< 0,02	0,55	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	2,400	920	< 0,002	< 0,001
		Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	1,80	0,03	< 0,02	0,72	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	> 24.000	5,400	< 0,002	< 0,001
		Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	1,94	0,03	< 0,02	0,75	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	16,000	1,700	< 0,002	< 0,001
		Jorong Koto Tengah, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	1,84	0,03	< 0,02	0,62	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	> 24.000	> 24.000	< 0,002	< 0,001
		Jorong Galugur, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	1,97	0,03	< 0,02	0,76	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	> 24.000	16,000	< 0,002	< 0,001
		Jorong Tanjung Jajaran, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	1,98	0,04	< 0,02	0,65	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	> 24.000	3,500	< 0,002	< 0,001
	Sungai Batang Mogan*	Jorong Kayu Godang, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	1,27	0,03	< 0,02	0,23	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	5,400	5,400	< 0,002	< 0,001
	Sungai Batang Lolo*	Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman.	3,32	0,03	< 0,02	0,42	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	16,000	16,000	< 0,002	< 0,001

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Kampar	Periode 2 Jorong Pertemuan, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	11 - 12/07/2016	26,1	23	2,0	6,92	42	23	2,0	5,20	1,62	< 5,3	< 0,006
		Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	11 - 12/07/2016	25,8	37	3,0	6,71	73	37	3,0	6,10	4,75	23,5	0,005
		Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	11 - 12/07/2016	25,7	38	29,0	6,59	78	38	29,0	6,40	2,27	23,5	0,017
		Jorong Koto Tengah, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	11 - 12/07/2016	26,2	38	36	6,79	74	38	36	5,40	1,87	13,3	0,005
		Jorong Galugur, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	11 - 12/07/2016	26,8	36	26	6,69	74	36	26	5,20	2,63	16,7	0,006
		Jorong Tanjung Jajaran, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	11 - 12/07/2016	26,5	26	27,0	5,73	73	26	27,0	5,20	0,87	< 5,7	0,005
	Sungai Batang Mogan*	Jorong Kayu Godang, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	11 - 12/07/2016	25,7	21	4,0	6,59	39	21	4,0	6,40	2,27	23,5	0,017
	Sungai Batang Lolo*	Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman.	11 - 12/07/2016	27,6	68	92	7,2	178	68	92	5,60	1,32	33,0	<0,003

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kampar	Periode 2											
		Jorong Pertemuan, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	1,48	0,02	< 0,02	0,45	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	1,400	1,400	< 0,002	< 0,001
		Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	2,27	0,03	< 0,02	0,65	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	9,200	9,200	< 0,002	< 0,001
		Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	4,29	0,03	< 0,02	0,54	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	> 24.000	> 24.000	< 0,002	< 0,001
		Jorong Koto Tengah, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	2,03	0,027	< 0,02	0,52	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	5,400	1,400	< 0,002	< 0,001
		Jorong Galugur, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	2,03	0,022	< 0,02	0,51	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	> 24.000	16,000	< 0,002	< 0,001
		Jorong Tanjung Jajaran, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	2,24	0,026	< 0,02	0,45	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	> 24.000	> 24.000	< 0,002	< 0,001
	Sungai Batang Mogan*	Jorong Kayu Godang, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	4,29	0,03	< 0,02	0,54	< 0,0005	< 0,1	< 0,01	> 24.000	> 24.000	< 0,002	< 0,001
	Sungai Batang Lolo*	Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman.	1,52	0,024	< 0,02	0,70	< 0,0005	< 0,1	0,02	> 24.000	> 24.000	< 0,002	< 0,001



No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Kampar	Periode 3												
		Jorong Pertemuan, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.		30,2	23	5	6,52	44	23	5	5,4	1,4	5,14	0,006
		Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.		31,5	27	8	6,14	50	27	8	5,8	1	5,14	0,006
		Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota		30,7	41	12	6,18	78	41	12	6	2	5,14	0,006
		Jorong Koto Tengah, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota		31,4	41	15	6,39	78	41	15	5,6	1,2	5,14	0,006
		Jorong Galugur, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota		31	42	14	6,62	80	42	14	5,4	1,4	5,14	0,006
		Jorong Tanjung Jajaran, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota		30,4	42	16	6,26	80	42	16	5,7	1,3	5,14	0,006
	Sungai Batang Mogan*	Jorong Kayu Godang, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota		31,6	85	31	6,64	168	85	31	6,5	1,7	5,14	0,011
	Sungai Batang Lolo*	Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman.		30,5	27	5	5,46	51	27	5	5	1	5,14	0,006

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kampar	Periode 3 Jorong Pertemuan, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	0,359	0,014	0,01	0,221	0,0005	0,1	330	2.800	0,01	0,002	0,001
		Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	0,1	0,014	0,01	0,253	0,0005	0,1	480	3.500	0,01	0,002	0,001
		Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	0,1	0,014	0,02	0,166	0,0005	0,1	24.000	24.000	0,01	0,002	0,001
		Jorong Koto Tengah, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	0,162	0,014	0,02	0,156	0,0005	0,1	190	2.800	0,01	0,002	0,001
		Jorong Galugur, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	0,149	0,014	0,02	0,237	0,0005	0,1	480	3.500	0,01	0,002	0,001
		Jorong Tanjung Jajaran, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	0,15	0,014	0,01	0,759	0,0005	0,1	380	24.000	0,01	0,002	0,001
	Sungai Batang Mogan*	Jorong Kayu Godang, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	0,305	0,014	0,02	0,175	0,0005	0,1	2.800	3.500	0,01	0,003	0,001
	Sungai Batang Lolo*	Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman.	0,212	0,014	0,02	0,228	0,0005	0,1	24.000	24.000	0,01	0,002	0,001

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Kampar	Periode 4												
		Jorong Pertemuan, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	10/11/2016	30,2	23	5,0	6,52	44	23	5,0	5,4	1,4	<5,14	<0,006
		Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	10/11/2016	31,5	27	8	6,14	50	27	8	5,8	1,0	<5,14	<0,006
		Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	10/11/2016	30,7	41	12	6,18	78	41	12	6,0	2,0	<5,14	<0,006
		Jorong Koto Tengah, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	10/11/2016	31,4	41	15,0	6,39	78	41	15,0	5,6	1,2	<5,14	<0,006
		Jorong Galugur, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	10/11/2016	31,0	42	14	6,62	80	42	14	5,4	1,4	<5,14	<0,006
		Jorong Tanjung Jajaran, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	10/11/2016	30,4	42	16	6,26	80	42	16	5,7	1,3	<5,14	<0,006
	Sungai Batang Mogan*	Jorong Kayu Godang, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	10/11/2016	30,5	27	5,0	5,46	51	27	5,0	5,0	1,0	<5,14	<0,006
	Sungai Batang Lolo*	Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman.	10/11/2016	31,6	85	31	6,64	168	85	31	6,5	1,7	<5,14	0,011

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kampar	Periode 4 Jorong Pertemuan, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	0,359	<0,014	0,01	0,221	<0,0005	<0,1	<0,01	2.800	330	0,002	<0,001
		Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.	<0,1	<0,014	0,01	0,253	<0,0005	<0,1	<0,01	3.500	480	<0,002	<0,001
		Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	<0,1	<0,014	0,02	0,166	<0,0005	<0,1	<0,01	> 24.000	> 24.000	<0,002	<0,001
		Jorong Koto Tengah, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	0,162	<0,014	0,02	0,156	<0,0005	<0,1	<0,01	2.800	190	0,002	<0,001
		Jorong Galugur, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	0,149	<0,014	0,02	0,237	<0,0005	<0,1	<0,01	3.500	480	0,002	<0,001
		Jorong Tanjung Jajaran, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	0,15	<0,014	<0,01	0,759	<0,0005	<0,1	<0,01	> 24.000	380	0,002	<0,001
	Sungai Batang Mogan*	Jorong Kayu Godang, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	0,212	<0,014	0,02	0,228	<0,0005	<0,1	<0,01	> 24.000	> 24.000	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Lolo*	Jorong Muaro, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman.	0,305	<0,014	0,02	0,175	<0,0005	<0,1	<0,01	3.500	2.800	0,003	<0,001

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
11.	Sungai Batang Kuantan	Periode 1												
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	04/01/2016	28,5	77	126	6,76	146	77	126	6,7	3,0	13,18	0,021
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	04/01/2016	28,4	76	164	6,88	144	76	164	6,8	3,0	6,59	0,018
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	04/01/2016	28,1	77	134	7,07	145	77	134	7,3	3,0	6,59	0,016
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	04/01/2016	28,7	28	180	6,95	53	28	180	7,0	4,9	9,88	0,010
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	04/01/2016	28,2	68	1970	7,03	115	68	1970	6,8	3,0	3,29	0,012
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	04/01/2016	28,9	69	186	7,01	129	69	186	7,6	4,9	5,29	0,01
	Sungai Batang Kulampi*	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	04/01/2016	29,3	46	8,0	6,92	96	46	8,0	7,8	1,2	9,88	<0,006
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	04/01/2016	28,0	131	4,0	7,67	244	131	4,0	7,2	2,6	3,29	<0,006
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	04/01/2016	27,8	56	3,0	7,03	128	56	3,0	6,8	2,6	3,29	0,007
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Ilia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	04/01/2016	29,2	46	4,0	6,92	86	46	4,0	7,6	0,7	8,23	<0,006

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 1 Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	3,07	<0,014	0,19	0,81	<0,0005	<0,1	<0,01	1.400	330	<0,002	<0,001
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	2,72	0,016	0,16	0,59	<0,0005	<0,1	<0,01	2.800	2.800	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	2,47	0,11	0,08	0,49	<0,0005	<0,1	0,04	330	330	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	3,79	0,076	0,13	0,85	<0,0005	<0,1	0,05	>24.000	>24.000	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	2,45	0,115	0,18	0,58	<0,0005	<0,1	0,05	16.000	16.000	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	3,03	0,075	0,18	0,53	<0,0005	<0,1	0,77	>24.000	>24.000	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Kulampi*	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,8	<0,014	0,08	0,68	<0,0005	<0,1	<0,01	9.200	9.200	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,23	<0,014	0,04	0,67	<0,0005	<0,1	<0,01	490	490	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	1,08	0,11	0,04	0,68	<0,0005	<0,1	<0,01	>24.000	>24.000	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Ilia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,94	0,08	0,05	0,68	<0,0005	<0,1	<0,01	260	170	<0,002	<0,001

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 2												
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	05/11/2016	28,4	61	72	6,89	111	61	72	7,36	0,88	13,4	0,072
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	05/11/2016	29,3	52,6	58	7,08	96,8	52,6	58	7,36	0,84	<5,77	0,096
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	05/11/2016	28,2	43	87	6,80	77,2	43	87	7,25	2,88	20,16	0,042
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	05/11/2016	29	89	143	7,39	157	89	143	7,43	0,40	50,4	0,077
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	05/11/2016	28,8	51,8	100	7,12	93,8	51,8	100	7,53	2,56	70,5	0,074
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	05/11/2016	28,8	35,3	60	7,15	63,5	35,3	60	7,10	3,02	28,6	0,023
	Sungai Batang Kulampi*	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	05/11/2016	33,7	51,4	102	5,47	94,2	51,4	102	7,29	4,35	28,56	0,084
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Iliia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	05/11/2016	28,2	131	30	6,62	237	131	30	7,35	1,38	<5,77	0,021
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	05/11/2016	27,7	100	3	7,78	180	100	3	7,02	2,42	13,36	0,007
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	05/11/2016	27,4	35,1	22	7,23	63,1	35,1	22	7,33	2,81	<5,77	0,018

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 2											
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	3,02	<0,014	<0,02	0,22	<0,0005	<0,1	<0,01	>24.000	16.000	<0,002	<0,001
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	3,47	<0,014	<0,02	0,04	<0,0005	<0,1	<0,01	>24.000	16.000	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	1,62	<0,014	<0,02	0,07	<0,0005	<0,1	<0,01	>24.000	16.000	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	3,83	<0,014	<0,02	0,31	<0,0005	<0,1	<0,01	9.200	9.200	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	4,08	0,04	<0,02	0,04	<0,0005	<0,1	<0,01	2.800	1.800	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	14,29	0,07	<0,02	0,66	<0,0005	<0,1	<0,01	9.200	9.200	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Kulampi*	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	4,53	0,01	<0,02	0,059	<0,0005	<0,1	<0,01	>24.000	2.200	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Ilia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,74	0,01	<0,02	0,13	<0,0005	<0,1	<0,01	>24.000	>24.000	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	1,27	<0,014	<0,02	0,10	<0,0005	<0,1	<0,01	2.800	1.800	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	2,50	0,01	<0,02	0,22	<0,0005	<0,1	<0,01	>24.000	2.200	<0,002	<0,001

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 3												
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	19/06/2016	28,8	78	4,0	7,24	148	78	4,0	6,30	1,56	50,4	0,040
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	19/06/2016	27,5	81	148	7,25	153	81	148	6,30	1,90	50,4	0,045
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	19/06/2016	28,9	78	94	7,37	148	78	94	6,30	0,88	40,3	0,059
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	19/06/2016	28,5	59	94	6,98	152	59	94	6,00	0,58	80,60	0,022
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	19/06/2016	27,8	79	98	7,08	150	79	98	6,20	0,78	80,6	0,027
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	19/06/2016	27,8	79	70	7,37	149	79	70	6,60	1,86	30,2	0,02
	Sungai Batang Kulampi*	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	19/06/2016	28,3	42	16	7,03	79	42	16	6,00	1,94	36,9	0,024
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Iliia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	19/06/2016	29,1	46	5,0	7,33	87	46	5,0	6,80	1,04	20,1	0,006
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	19/06/2016	28,2	122	34	7,54	230	122	34	6,60	0,84	6,7	0,007
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	19/06/2016	28,2	56	47	6,87	104	56	47	6,4	0,98	16,8	0,013

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 3 Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	0,74	0,14	<0,02	0,92	<0,0005	<0,1	<0,01	> 24.000	> 24.000	<0,002	<0,001
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,63	< 0,014	<0,02	1,3	<0,0005	<0,1	<0,01	> 24.000	9.400	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,75	0,05	<0,02	1,32	<0,0005	<0,1	<0,01	16.000	16.000	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,49	0,07	<0,02	0,97	<0,0005	<0,1	<0,01	2.800	2.200	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,24	0,13	< 0,02	0,83	<0,0005	<0,1	<0,01	9.200	9.200	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,40	0,12	< 0,02	0,77	<0,0005	<0,1	<0,01	16.000	9.200	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Kulampi*	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,23	0,11	< 0,02	1,13	<0,0005	<0,1	<0,01	3.500	3.500	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Ilia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	< 0,10	0,03	<0,02	0,89	<0,0005	<0,1	<0,01	9.200	2.800	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	<0,10	< 0,014	< 0,02	0,50	<0,0005	<0,1	<0,01	330	140	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,18	0,017	<0,02	0,58	<0,0005	< 0,1	< 0,01	> 24.000	3.500	< 0,002	<0,001

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 4												
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	22/08/2016				6,19	36			5,40	2,31	< 5,7	1,534
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	22/08/2016				6,06	53			5,70	0,71	6,72	0,155
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	22/08/2016				6,19	36			5,40	2,31	< 5,7	1,534
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	22/08/2016				6,41	108			4,70	0,81	6,72	1,197
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	22/08/2016				6,06	53			5,70	0,71	6,72	0,155
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	22/08/2016				6,19	36			5,40	2,31	< 5,7	1,534
	Sungai Batang Lolo*	BKN Lolo	22/08/2016				6,41	108			4,70	0,81	6,72	1,197
	Sungai Batang Mogan*	BKN Mogan	22/08/2016				6,41	108			4,70	0,81	6,72	1,197

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 4 Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	6,52	0,25	0,04	0,06	<0,0005	<0,1	<0,01	280	140	<0,002	0,002
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,74	0,04	0,02	<0,02	<0,0005	<0,1	<0,01	3.500	1.400	<0,002	0,002
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	6,52	0,25	0,04	0,06	<0,0005	<0,1	<0,01	>24.000	>24.000	<0,002	0,002
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,77	<0,014	0,03	<0,02	<0,0005	<0,1	<0,01	>24.000	>24.000	<0,002	0,002
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,74	0,04	0,02	<0,02	<0,0005	<0,1	<0,01	>24.000	>24.000	<0,002	0,002
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	6,52	0,25	0,04	0,06	<0,0005	<0,1	<0,01	>24.000	16.000	<0,002	0,002
	Sungai Batang Lolo*	BKN Lolo	0,77	<0,014	0,03	<0,02	<0,0005	<0,1	<0,01	>24.000	16.000	<0,002	0,002
	Sungai Batang Mogan*	BKN Mogan	0,77	<0,014	0,03	<0,02	<0,0005	<0,1	<0,01	16.000	1.700	<0,002	0,002

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 5												
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	27/09/2016	31,2	88	83,0	7,91	166	88	83,0	6,00	1,60	17,16	0,016
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	27/09/2016	30,7	100	80,0	7,91	188	100	80,0	6,70	3,01	5,84	0,015
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	27/09/2016	31,3	80	80	8,25	149	80	80	6,50	1,42	11,23	0,023
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	27/09/2016	31,5	32	103,0	7,94	59	32	103,0	5,70	1,30	14,83	0,020
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	27/09/2016	32,8	76	65,0	7,66	149	76	65,0	6,00	1,94	9,43	0,019
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	27/09/2016	31,6	81	76,7	7,9	150	81	76,7	6,40	1,32	10,59	0,019
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	27/09/2016	30,4	103	2,0	8,31	197	103	2,0	7,30	2,22	8,5	0,014
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	27/09/2016	32,9	22,7	8,0	8,32	42,4	22,7	8,0	7,70	2,62	20,05	<0,006
	Sungai Batang Kulampi*	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	27/09/2016	31,1	45	3,0	7,47	84	45	3,0	6,80	3,41	10,72	<0,006
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Iliia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	27/09/2016	30,7	51	8,0	8,03	98	51	8,0	6,40	1,76	11,50	<0,006

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Kuantan	Periode 5 Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	0,988	0,126	<0,01	0,054	<0,0005	<0,1	<0,01	2.200	400	<0,002	<0,001
		Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,814	0,309	<0,01	0,049	<0,0005	<0,1	<0,01	2.400	2.400	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	1,496	0,049	<0,01	0,086	<0,0005	<0,1	<0,01	1.100	1.100	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	1,463	0,036	<0,01	0,021	<0,0005	<0,1	<0,01	9.200	9.200	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	1,761	0,064	<0,01	0,025	<0,0005	<0,1	<0,01	1.700	360	<0,002	<0,001
		Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec.Kamang Baru, Kab. Sijunjung	1,368	0,045	<0,01	0,032	<0,0005	<0,1	<0,01	1.800	290	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Nunuk*	Bt. Nunuk berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,854	0,028	<0,01	<0,013	<0,0005	<0,1	<0,01	90	70	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Nuang*	Bt. Nuang berada di Jorong Pintu Batu, Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	<0,1	0,015	<0,01	<0,013	<0,0005	<0,1	<0,01	1.100	1.100	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Kulampi*	Bt. Kulampi berada di Jorong Kulampi, Nagari Aia Angek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	0,118	0,079	<0,01	<0,013	<0,0005	<0,1	<0,01	>24.000	>24.000	<0,002	<0,001
	Sungai Batang Kako*	Bt. Kako berada di Jorong Koto Ilia Nagari Durian Gadang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung	<0,1	0,083	<0,01	<0,013	<0,0005	<0,1	<0,01	2.800	390	<0,002	<0,001

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
12.	Sungai Batang Nili*	Periode 1												
		a. Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	02/05/2016-03/05/2016	25	29	25	6,2	56	29	25	7,3	3,73	13,4	0,805
		Periode 2												
		a. Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	05/02/2016	27,7	20	83,3	6,35	39	20	83,3	6,3	5,6	22,4	0,014
13.	Sungai Batang Takung	Periode 1												
		a. Jorong Koto Rona, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	02/05/2016-03/05/2016	25	96	43	6,96	181	96	43	5,9	1,91	5,7	0,006
		Periode 2												
		a. Jorong Koto Rona, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	05/02/2016	30	79	10	7,95	156	79	10	7,2	0,4	5,7	0,006
14.	Sungai Batang Langki	Periode 1												
		a. Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjung Gadang, Kab. Sijunjung	02/05/2016-03/05/2016	25	59	23	6,41	108	59	23	4,7	0,81	6,72	1,197
		Periode 2												
		a. Jorong Koto Langki, Nagari Langki, Kec. Tanjung Gadang, Kab. Sijunjung	16/09/2016	30	46,9	33	6	76,3	46,9	33	6	1,6	44,7	0,006

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Sungai Batang Nili*	Periode 1											
		a. Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	1,75	0,18	0,02	0,02	0,0005	0,1	0,01	240	1.600	0,002	0,002
		Periode 2											
		a. Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	0,487	0,014	0,01	0,013	0,0005	0,1	0,01	350	2.400	0,002	0,61
	Sungai Batang Takung	Periode 1											
		a. Jorong Koto Rona, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,03	0,11	0,04	0,02	0,0005	0,1	0,01	220	280	0,002	0,002
		Periode 2											
		a. Jorong Koto Rona, Nagari Muaro Takuang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung	0,054	0,014	0,01	0,013	0,0005	0,1	0,01	180	1.600	0,002	0,001
	Sungai Batang Langki	Periode 1											
		a. Jorong Koto Langki, Kec. Tanjuang Gadang, Kab. Sijunjung	0,77	0,014	0,03	0,02	0,0005	0,1	0,01	350	1.600	0,002	0,002
		Periode 2											
		a. Jorong Koto Langki, Kec. Tanjuang Gadang, Kab. Sijunjung	0,055	0,031	0,01	0,054	0,0005	0,1	0,01	39	2.400	0,01	0,001

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 17.A. Indeks Kualitas Air (IKA) 9 (Sembilan) Sungai Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Sungai	Indeks Kualitas Air (IKA) (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Sungai Batang Agam	61,25
2.	Sungai Batang Anai	70,00
3.	Sungai Batang Pangian	76,25
4.	Sungai Batang Lembang	70,00
5.	Sungai Batang Ombilin	56,25
6.	Sungai Batang Lampasi	65,00
7.	Sungai Batang Hari	64,00
8.	Sungai Batang Kuantan	74,38
9.	Sungai Batang Kampar	68,75
	Rata-rata	67,32

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel – 18. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Danau Maninjau												
	a. Musim Kemarau	15 s/d 16 Juni 2016											
	'- PLTA Muko-Muko		-	-	-	6	-	-	3	4,9	0,8	5,7	-
	'- Koto Malintang		-	-	-	6,3	-	-	2	5,2	5,7	5,7	-
	'- Hotel Tandırh		-	-	-	6	-	-	2	6	1,6	5,7	-
	'- Kubu Baru		-	-	-	6,3	-	-	3	6,2	2,6	13,1	-
	-Musim Hujan	14 s/d 15 Sept 2016											
	'- PLTA Muko-Muko		-	-	-	6,12	-	-	5	5,9	3,3	16,8	-
	'- Koto Malintang		-	-	-	6,3	-	-	6	6,6	4,3	28	-
	'- Hotel Tandırh		-	-	-	6	-	-	4	6,6	3,1	22,4	-
	'- Kubu Baru		-	-	-	6,1	-	-	3	6,9	2,3	16,8	-
2.	Danau Singkarak												
	a. Musim Kemarau	21 s/d 22 Juli 2016											
	'- Batang Sumani		-	-	-	7,5	-	-	26	5,2	0,8	5,77	-
	'- Pasar Ombilin		-	-	-	8,2	-	-	2	5,6	1,54	16,6	-
	'- Batang Sumpur		-	-	-	8,1	-	-	2	5,8	0,72	5,77	-
	'- PLTA Malalo		-	-	-	8,1	-	-	7	5,6	0,52	13,3	-
	b. Musim Hujan	1 s/d 2 Nov 2016											
	'- Batang Sumani		-	-	-	6,8	-	-	44	4,8	1,6	13,5	-
	'- Pasar Ombilin		-	-	-	7	-	-	8	4,5	1,7	13	-
	'- Batang Sumpur		-	-	-	6,8	-	-	24	6,2	1,4	7,05	-
	'- PLTA Malalo		-	-	-	6,5	-	-	6	6,2	3	12	-

No.	Nama	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1.	Danau Maninjau											
	a. Musim Kemarau											
	'- PLTA Muko-Muko	0,35	0,03	-	0,11	-	-	-	-	110	-	0,002
	'- Koto Malintang	0,16	0,1	-	0,09	-	-	-	-	5.400	-	0,002
	'- Hotel Tandirih	0,1	0,04	-	0,09	-	-	-	-	9.200	-	0,002
	'- Kubu Baru	0,1	0,02	-	0,01	-	-	-	-	16.000	-	0,002
	-Musim Hujan											
	'- PLTA Muko-Muko	3,8	0,2	-	0,06	-	-	-	-	24.000	-	0,02
	'- Koto Malintang	2,9	0,3	-	0,08	-	-	-	-	24.000	-	0,02
	'- Hotel Tandirih	3	0,2	-	0,031	-	-	-	-	1.800	-	0,01
	'- Kubu Baru	4,5	0,014	-	0,031	-	-	-	-	24.000	-	0,01
2.	Danau Singkarak											
	a. Musim Kemarau											
	'- Batang Sumani	0,1	0,01	-	1,96	-	-	-	-	24.000	-	0,001
	'- Pasar Ombilin	0,1	0,014	-	1,67	-	-	-	-	24.000	-	0,001
	'- Batang Sumpur	0,03	0,014	-	1,29	-	-	-	-	24.000	-	0,001
	'- PLTA Malalo	0,24	0,014	-	2,64	-	-	-	-	24.000	-	0,001
	b. Musim Hujan											
	'- Batang Sumani	1,1	0,014	-	0,013	-	-	-	-	2.200	-	0,023
	'- Pasar Ombilin	0,43	0,014	-	0,02	-	-	-	-	1.400	-	0,012
	'- Batang Sumpur	0,37	0,014	-	0,013	-	-	-	-	24.000	-	0,01
	'- PLTA Malalo	0,086	0,014	-	0,013	-	-	-	-	210	-	0,01

No.	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.	Danau Diatas												
	a. Musim Kemarau	26 s/d 27 April 2016											
	'- Dermaga		-	-	-	7	-	-	6	8	1,3	6,7	-
	'- Taluak Dalam		-	-	-	6	-	-	18	8	1,3	33,6	-
	'- Taluak Kinari		-	-	-	6	-	-	24	7	1,6	10,1	-
	'- Usak		-	-	-	16	-	-	16	8	1,6	13,4	-
	b. Musim Hujan	12 s/d 13 Okt 2016											
	'- Dermaga		-	-	-	7,5	-	-	3	5,7	1,6	5,14	-
	'- Taluak Dalam		-	-	-	7,4	-	-	11	5,5	1,1	5,14	-
	'- Taluak Kinari		-	-	-	7,5	-	-	18	5,7	1,3	5,9	-
	'- Usak		-	-	-	3	-	-	3	5,5	1,1	5,14	-
4.	Danau Dibawah												
	a. Musim Kemarau	26 s/d 27 April 2016											
	'- Kepala Danau Bawah		-	-	-	6	-	-	10	6,8	1,63	16,8	-
	'- Air Tawar Selatan		-	-	-	7	-	-	10	8,3	2,9	33,6	-
	'- Air Tawar Utara		-	-	-	6	-	-	4	7,5	2,3	53,7	-
	'- Kampung Batu Dalam		-	-	-	6	-	-	6	7,7	1,3	26,8	-
	b. Musim Hujan	12 s/d 13 Okt 2016											
	'- Kepala Danau Bawah		-	-	-	7,3	-	-	5	5,3	1,24	5,14	-
	'- Air Tawar Selatan		-	-	-	7,3	-	-	7	5,8	1,4	5,14	-
	'- Air Tawar Utara		-	-	-	7,3	-	-	2	5,7	2,9	6,9	-
	'- Kampung Batu Dalam		-	-	-	7,2	-	-	7,2	5,6	1,2	5,14	-

No.	Nama	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
3.	Danau Diatas											
	a. Musim Kemarau	0,1	0,1	-	0,01	-	-	-	-	1.300	-	0,02
	'- Dermaga	1,78	0,02	-	0,01	-	-	-	-	1.100	-	0,01
	'- Taluak Dalam	0,79	0,01	-	0,01	-	-	-	-	1.400	-	0,02
	'- Taluak Kinari	0,66	0,01	-	0,01	-	-	-	-	790	-	0,03
	'- Usak											
	b. Musim Hujan	0,1	0,01	-	0,43	-	-	-	-	24.000	-	0,002
	'- Dermaga	0,1	0,01	-	0,32	-	-	-	-	170	-	0,002
	'- Taluak Dalam	0,1	0,01	-	0,3	-	-	-	-	330	-	0,002
	'- Taluak Kinari	0,1	0,03	-	0,3	-	-	-	-	70	-	0,002
	'- Usak											
4.	Danau Dibawah											
	a. Musim Kemarau	0,23	0,014	-	0,014	-	-	-	-	2.800	-	0,02
	'- Kepala Danau Bawah	0,1	0,014	-	0,01	-	-	-	-	1.700	-	0,01
	'- Air Tawar Selatan	0,1	0,014	-	0,01	-	-	-	-	490	-	0,02
	'- Air Tawar Utara	0,97	0,014	-	0,01	-	-	-	-	1.100	-	0,02
	'- Kampung Batu Dalam											
	b. Musim Hujan	0,1	0,096	-	0,5	-	-	-	-	80	-	0,002
	'- Kepala Danau Bawah	0,1	0,06	-	0,4	-	-	-	-	20	-	0,002
	'- Air Tawar Selatan	0,1	0,028	-	0,4	-	-	-	-	20	-	0,003
	'- Air Tawar Utara	0,1	0,014	-	0,5	-	-	-	-	130	-	0,002
	'- Kampung Batu Dalam	0,1	0,1	-	0,01	-	-	-	-	1.300	-	0,02

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



**Tabel - 18.A. Perbandingan Kualitas Air Danau Tahun 2014 s/d 2016 di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

A. Danau Singkarak

No	Parameter	Satuan	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			
			1Sk	2Sk	3Sk	4Sk	1Sk	2Sk	3Sk	4Sk	1Sk	2Sk	3Sk	4Sk
1.	Zat Padat Tersuspensi	mg/L	37	6	9	7	24,5	3,5	6,5	5,5	35	5	13	6,5
2.	pH	-	6,62	8,25	8,06	7,63	7,46	7,35	7,83	7,66	7,15	7,6	7,45	7,3
3.	Amoniak sebagai N	mg/L	0,09	0,098	0,119	0,076	0,12	0,049	0,123	0,071	0,012	0,014	0,014	0,014
4.	Nitrat sebagai NO ₃	mg/L	3,11	1,87	2,21	1,19	2,21	1,49	2,07	1,74	0,6	0,265	0,2	0,163
5.	BOD ₅	mg/L	1,58	1,23	1,97	1,58	2,9	1,49	2,07	1,74	1,2	1,62	1,06	1,76
6.	COD	mg/L	20,91	10,45	5,23	7,84	19,3	13,81	12,4	11,36	9,635	14,8	6,41	12,65
7.	DO	mg/L	5,33	5,29	6,46	5,28	5,15	17,11	5,53	5,41	5	5,05	6	5,9
8.	Posfat sebagai P	mg/L	0,152	<0,013	0,053	0,067	0,196	0,219	0,13	0,088	0,9865	0,845	0,6515	1,3265
9.	Sulfida sebagai H ₂ S	mg/L	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,02	<0,02	0,02	0,03	0,012	0,0065	0,0055	0,0055
10.	Coliform sebagai MPN	Jml/ 100ml	22.000	<2.000	17.000	22.000	>24.000	4.995	>12.165	>13.100	13.100	12.700	24.000	12.105

Keterangan : Lokasi Sampel

A. Danau Singkarak

1Sk : Inlet Batang Sumani

2 Sk : Outlet Pasar Ombilin

3 Sk : Inlet Batang Sumpur

4 Sk : PLTA Malalo

B. Danau Diatas

No	Parameter	Satuan	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			
			1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A	1A	2A	3A	4A
1.	Zat Padat Tersuspensi	mg/L	6	3	4	6	12,5	12,5	18	18	4,5	14,5	21	9,5
2.	pH	-	8,21	8,13	7,98	7,67	6,35	6,5	6,5	6,05	7,25	6,7	6,75	9,5
3.	Amoniak sebagai N	mg/L	0,15	0,124	0,231	0,192	0,053	0,071	0,058	0,098	0,055	0,015	0,01	0,02
4.	Nitrat sebagai NO ₃	mg/L	0,32	1,54	1,32	2,13	0,75	1,3	0,95	1,25	0,1	0,94	0,445	0,38
5.	BOD ₅	mg/L	2,2	2,18	2,77	2,82	0,85	1,55	2,0	1,2	1,45	1,2	1,45	1,35
6.	COD	mg/L	10,67	10,67	13,33	16	5,79	7,45	12,96	8,7	5,92	19,37	8	9,27
7.	DO	mg/L	5,2	5,71	5,16	5,22	6,20	6,20	6,28	6,00	6,85	6,75	6,35	,6,75
8.	Posfat sebagai P	mg/L	0,023	0,056	0,443	0,037	0,051	0,053	0,052	0,055	0,22	0,165	0,155	0,155
9.	Sulfida sebagai H ₂ S	mg/L	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	0,001	0,002	0,003	0,011	0,006	0,011	0,016
10.	Coliform sebagai MPN	Jml/ 100ml	26	2	2	26	12.165	2.865	150	2.500	12.650	635	865	430

Keterangan : Lokasi Sampel

B. Danau Diatas

1A : Dermaga

2A : Taluak Dalam

3A : Taluak Kinari

4A : Usak



C. Danau Dibawah

No	Parameter	Satuan	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			
			1B	2B	3B	4B	1B	2B	3B	4B	1B	2B	3B	4B
1.	Zat Padat Tersuspensi	mg/L	5	11	8	13	20	8,5	5,5	10,7	7,5	8,5	3	6,6
2.	pH	-	7,89	7,82	7,85	7,86	6,4	6	6,3	6,3	6,65	7,15	6,65	6,6
3.	Amoniak sebagai N	mg/L	0,12	0,16	0,13	0,11	0,099	0,27	0,082	0,078	0,055	0,037	0,021	0,014
4.	Nitrat sebagai NO3	mg/L	1,89	2,89	3,12	7,31	1,1	0,27	0,95	0,5	0,165	0,1	0,1	0,535
5.	BOD5	mg/L	3	2,98	3,12	7,31	2,1	1,05	3,2	1,9	1,435	2,15	2,6	1,25
6.	COD	mg/L	21,33	21,33	16	21,33	11,47	8,60	11,60	11,60	10,97	19,37	30,3	15,97
7.	DO	mg/L	4,9	5,16	5,05	4,21	6,45	5,75	6,32	5,70	6,05	7,05	6,6	6,65
8.	Posfat sebagai P	mg/L	<0,02	0,01	0,137	<0,02	0,064	0,600	0,054	0,051	0,257	0,205	0,205	0,255
9.	Sulfida sebagai H2S	mg/L	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	0,007	0,005	0,001	0,011	0,006	0,0115	0,011
10.	Coliform sebagai MPN	Jml/100ml	280	11	32	140	1.920	165	12.010	4.845	1.440	860	255	615

Keterangan : Lokasi Sampel

C. Danau Dibawah

1B : Kpl. Danau Bawah

2B : Air Tawar Selatan

3B : Air Tawar Tengah

4B : Kam. Batu Dalam



D. Danau Maninjau

No	Parameter	Satuan	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			
			1Mj	2Mj	3Mj	4Mj	1Mj	2Mj	3Mj	4Mj	1Mj	2Mj	3Mj	4Mj
1.	Zat Padat Tersuspensi	mg/L	4	3	4	4	11	9,5	10	9	4	4	3	3
2.	pH	-	7,74	8,08	7,7	7,57	6,06	6,16	6,09	6,05	6,06	6,3	6	6,2
3.	Amoniak sebagai N	mg/L	0,096	0,098	0,295	0,094	0,184	0,195	0,206	0,101	0,115	0,2	0,12	0,017
4.	Nitrat sebagai NO3	mg/L	1,87	2,05	2,12	2,41	3,07	2,65	2,85	3,4	2,075	1,53	1,55	2,3
5.	BOD5	mg/L	2,60	2,02	1,98	1,67	2,9	3,15	2,3	2,1	2,05	5	2,35	2,45
6.	COD	mg/L	10,67	<5,77	10,67	<5,77	30,13	19,33	14,08	13,73	11,25	16,85	14,05	14,95
7.	DO	mg/L	6,27	6,23	6,31	6,3	5,9	6,3	6,28	6,59	5,4	5,9	6,3	6,55
8.	Posfat sebagai P	mg/L	0,035	0,054	0,066	0,037	0,117	0,129	0,103	0,104	0,085	0,085	0,0605	0,0205
9.	Sulfida sebagai H2S	mg/L	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,01	0,01	0,011	0,011	0,011	0,011	0,006	0,006
10.	Coliform sebagai MPN	Jml/100ml	920	35	17	140	14.700	13.250	1.700	>24.000	12.055	14.700	5.500	20.000

Keterangan : Lokasi Sampel

D. Danau Maninjau

1Mj : PLTA Muko-Muko

2Mj : Koto Malintang

3Mj : Hotel Tandirih

4Mj : Kubu Baru

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



**Tabel – 19. Kualitas Air Sumur di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO3 sebagai N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Sele nium (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	PT. AMP Plantation Kabupaten Agam																
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	18/5/2016	-	-	-	6,85	6,39	-	6,53	-	2.046	4.312	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Land Aplikasi	18/5/2016	-	-	-	6,92	12,51	-	6,37	-	3.230	4.593	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Pemukiman Penduduk	18/5/2016	-	-	-	7,68	0,42	-	6,38	-	5.893	0,012	-	-	-	-	-
2.	PT. Binapratama Sakatojaya Dharmasraya																
	Lahan Pengkajian	01/05/2016	-	-	-	7,58	0,74	-	6,33	-	2.168	0,106	-	-	-	-	-
	Lahan Kontrol	01/05/2016	-	-	-	7,18	0,76	-	6,35	-	2.263	0,281	-	-	-	-	-
	Sumur Penduduk	01/05/2016	-	-	-	7,05	0,72	-	5,71	-	4.058	0,234	-	-	-	-	-
	Lahan Pengkajian	20/5/2016	-	-	-	6,53	0,84	-	4,86	-	7.400	0,040	-	-	-	-	-
	Lahan Kontrol	20/5/2016	-	-	-	5,25	0,73	-	5,15	-	0,975	0,027	-	-	-	-	-
	Sumur Penduduk	20/5/2016	-	-	-	6,79	0,49	-	6,71	-	1.046	< 0,003	-	-	-	-	-
3.	PT. Bintara Tani Nusantara, Kabupaten Pasaman Barat																
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	03/02/2016	-	-	-	6,3	1,39	-	4,48	-	0,435	0,032	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	03/02/2016	-	-	-	7,2	0,62	-	5,41	-	5.614	0,043	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Masyarakat	03/02/2016	-	-	-	7,1	0,63	-	5,28	-	1.036	0,051	-	-	-	-	-
4.	PT. Kencana Sawit Indonesia, Kabupaten Solok Selatan																
	Lahan Kontrol	27/4/2016	-	-	-	7,07	2,60	-	6,29	-	0,159	0,030	-	-	-	-	-
	Land Aplikasi	27/4/2016	-	-	-	4,65	0,35	-	6,59	-	1.859	< 0,021	-	-	-	-	-
	Perumahan Penduduk	27/4/2016	-	-	-	6,24	0,27	-	6,66	-	1.379	< 0,021	-	-	-	-	-

No.	Lokasi Sumur	Kadmium (mg/L)	Kromium (mg/L)	Tempaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sbg N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin Bebas (mg/L)	Belerang sebagai H ₂ S (mg/L)	Fecal Coli form (jml/100 ml)	Total Coli form (jml/100 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
1.	PT. AMP Plantation Kabupaten Agam																			
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	0,052	9,34	-	-	-	21,47	-	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Land Aplikasi	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	0,019	59,79	-	-	-	23,26	-	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Pemukiman Penduduk	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	19,62	-	-	-	17,76	-	-	-	-	-	-
2.	PT. Binapratama Sakatojaya Dharmasraya																			
	Lahan Pengkajian	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,004	16,19	-	-	-	19,54	-	-	-	-	-	-
	Lahan Kontrol	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,004	15,23	-	-	-	19,42	-	-	-	-	-	-
	Sumur Penduduk	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,004	27,61	-	-	-	31,46	-	-	-	-	-	-
	Lahan Pengkajian	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	31,77	-	-	-	17,16	-	-	-	-	-	-
	Lahan Kontrol	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	10,28	-	-	-	8,070	-	-	-	-	-	-
	Sumur Penduduk	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	25,23	-	-	-	5,911	-	-	-	-	-	-
3.	PT. Bintara Tani Nusantara, Kab. Pasaman Barat																			
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	0,005	12,26	-	-	-	5,951	-	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Lahan Kajian	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	0,006	418,7	-	-	-	5,248	-	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Masyarakat	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,004	11,32	-	-	-	0,947	-	-	-	-	-	-
4.	PT. Kencana Sawit Indonesia, Kab. Solok Selatan																			
	Lahan Kontrol	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	0,93	-	-	-	0,289	-	-	-	-	-	-
	Land Aplikasi	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	7,41	-	-	-	0,907	-	-	-	-	-	-
	Perumahan Penduduk	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	1,85	-	-	-	1,236	-	-	-	-	-	-



No.	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO3 sebagai N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.	PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Solok Selatan																
	Sumur Masyarakat	06/06/2016	-	-	-	5,13	0,77	-	6,55	-	0,387	< 0,003	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	06/06/2016	-	-	-	4,70	1,28	-	6,12	-	1,736	0,009	-	-	-	-	-
	Sumur Pantau Lahan Pengkajian	06/06/2016	-	-	-	5,52	1,01	-	6,46	-	1,311	0,034	-	-	-	-	-
6.	PT. Tindar Kerinci Agung, Kab. Dharmasraya																
	Lahan Kontrol	04/06/2016	-	-	-	6,76	2,28	-	6,91	-	0,699	0,150	-	-	-	-	-
	Land Aplikasi	04/06/2016	-	-	-	7,17	1,06	-	6,70	-	0,058	0,174	-	-	-	-	-
	Lahan Penduduk	04/06/2016	-	-	-	6,36	1,11	-	6,59	-	0,159	0,157	-	-	-	-	-
	Lahan Perumahan	04/06/2016	-	-	-	6,73	0,74	-	6,83	-	0,774	0,152	-	-	-	-	-
	Mess	04/06/2016	-	-	-	6,71	1,26	-	6,74	-	0,558	0,158	-	-	-	-	-
7.	PT. Sumbar Andalas Kencana Unit Sawit MA. Timpeh, Kabupaten Dharmasraya																
	Lahan Pengkajian		-	-	-	6,30	1,16	-	6,60	-	2,693	0,259	-	-	-	-	-
	Lahan Kontrol	04/06/2016	-	-	-	4,96	2,83	-	6,71	-	2,492	0,168	-	-	-	-	-
	Pemukiman Penduduk	04/06/2016	-	-	-	6,30	1,50	-	6,75	-	0,118	0,165	-	-	-	-	-

No.	Lokasi Sumur	Kadmium (mg/L)	Khrom (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sbg N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin Bebas (mg/L)	Belerang sebagai H ₂ S (mg/L)	Fecal Coli form (jml/100 ml)	Total Coli form (jml/100 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
5.	PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Solok Selatan																			
	Sumur Masyarakat	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	1,89	-	-	-	0,989	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-
	Sumur Pantau Lahan Kontrol	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	1,41	-	-	-	14,69	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-
	Sumur Pantau Lahan Pengkajian	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	1,89	-	-	-	9.376	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-
6.	PT. Tindar Kerinci Agung, Kab. Dharmasraya																			
	Lahan Kontrol	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	1,85	-	-	-	2.196	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-
	Land Aplikasi	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	1,85	-	-	-	1.226	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-
	Lahan Penduduk	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	1,85	-	-	-	2.163	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-
	Lahan Perumahan	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	0,93	-	-	-	0,166	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-
	Mess	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	1,85	-	-	-	1.037	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-
7.	PT. Sumbar Andalas Kencana Unit Sawit MA. Timpeh, Kabupaten Dharmasraya																			
	Lahan Pengkajian	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	13,88	-	-	-	10,62		-	-	-		-
	Lahan Kontrol	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	215,7	-	-	-	146,00	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-
	Pemukiman Penduduk	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-	-	< 0,005	12,96	-	-	-	10,33	< 0,001	-	< 0,001	-	< 0,003	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 19.A. Ketersediaan Air Tanah di WS Silaut Tarusan Tahun : 2016

No	DAS	Ketersediaan Air Tanah (m ³ /s)
1.	Kur	0,61
2.	Langsano	0,63
3.	Pisang	0,44
4.	Pinang	1,23
5.	Nyalo	0,72
6.	Mandeh	0,60
7.	Gemuruh	0,26
8.	Salak bundek	1,19
9.	Tarusan	14,06
10.	Bayang	12,66
11.	Lumpo	5,35
12.	Laban	0,66
13.	Salido	2,90
14.	Painan	1,31
15.	Jalamu	3,00
16.	Kapas	13,07
17.	Taluak	1,02
18.	Timbulu	0,73
19.	Surantih	10,20
20.	Amping	4,41
21.	Kambang	15,85
22.	Lakitan	5,03
23.	Pulakek	0,27
24.	Pudung	0,21
25.	Palangai	16,64
26.	Tunu	1,28
27.	Punggasan	4,68
28.	Air haji	13,76
29.	Bentayan	3,45
30.	Tapan	86,00
31.	Silaut	13,73

Keterangan : -

Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, 2016



**Tabel - 19.B. Sumber Mata Air di Pulau-Pulau Kecil
Tahun : 2016**

No	Lokasi Mata Air	Kapasitas Air (m3)	Koordinat Geografis	
			Bujur	Lintang
1.	Kota Padang			
	a.Pulau Bindalang	3	100'12"30 BT	00'59"04 LS
	b.Pulau Pandan	3	100'08"23 BT	00'56"58 LS
	c.Pulau Sikuai	6	100'21"10 BT	01'07"40 LS
	d.Pulau Pisang Gadang	4	100'20"10 BT	00'59"35 LS
	e.Pulau Sironjong	1	100'21"29 BT	01'08"38 LS
	f.Pulau Sinyaru	3	100'17"49 BT	01'04"32 LS
	g.Pulau Air	2	100'12"18 BT	00'52"17 LS
2.	Kota Pariaman			
	a.Pulau Angso (3 sumur)	2,4	100'06'39"	00'39'37"
3.	Kabupaten Pesisir Selatan			
	a.Pulau Cingkuak	0,4	100'56'31"	01'34'70"
	b.Pulau Penyau	0,6	100'36'52"	01'50'31"
	c.Pulau Beringin	0,4	100'65'45"	01'89'00"
	d.Pulau Marak	-	100'20'02"	01'12'05"
	e.Pulau Pagang	-	100'20'54"	01'09'40"
4.	Kabupaten Padang Pariaman			
	a.Pulau Pieh	2	100°05'7" LS	00°52'17 LS
	b.Pulau Bando	2	100°0'00" BT	00°45'36"LS
5.	Kabupaten Pasaman Barat			
	a.Pulau Panjang	0,05 L/dtk	99 17' 54"	00 11' 17"
6.	Kabupaten Kepulauan Mentawai			
	a.Labuan Korong	5000	99,15583289	-1,44507471
	b.Bose	200	98,96748711	-1,09670386
	c.Jujuat	250	99,04282545	-1,80678148
	d.Niau	100	99,08402607	-1,86043237
	e.Pulau Nyangnyang	100	99,27072381	-1,81548795
	f.Muara Sikabalu	100	98,995739	-1,11176803

Keterangan : (-)Tidak ada data

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera



**Tabel – 20. Kualitas Air Laut di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Nama Lokasi	Waktu Sampling	Lokasi Sampling	Warna (Mr)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/L)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)	pH	Salinitas (0/00)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Kota Padang												
	a. Musim Kemarau												
	Pantai Muaro 50 m			-	-	-	-	41	-	-	-	7	8,72
	Pantai Muaro 100 m			-	-	-	-	42	-	-	-	7	16,8
	Pantai Pasir Jambak 50 m			-	-	-	-	4	-	-	-	7	11,7
	Pantai Pasir Jambak 100 m			-	-	-	-	6	-	-	-	7	18,4
	Pelabuhan Teluk Bayur 50 m			-	-	-	-	2	-	-	-	6,8	21,4
	Pelabuhan Teluk Bayur 100 m			-	-	-	-	3	-	-	-	7	26,3
	Muaro Batang Arau			-	-	-	-	21	-	-	-	7	0,2
	b. Musim Hujan												
	Pantai Muaro 50 m			-	-	-	-	8	-	-	-	7,7	9,13
	Pantai Muaro 100 m			-	-	-	-	8	-	-	-	7,1	9,9
	Pantai Pasir Jambak 50 m			-	-	-	-	2	-	-	-	7	56,92
	Pantai Pasir Jambak 100 m			-	-	-	-	4	-	-	-	7	41,6
	Pelabuhan Teluk Bayur 50 m			-	-	-	-	3	-	-	-	7,6	65
	Pelabuhan Teluk Bayur 100 m			-	-	-	-	4	-	-	-	7,8	65,2
	Muaro Batang Arau			-	-	-	-	9	-	-	-	7,7	16,7
2.	Kab. Padang Pariaman												
	a. Musim Kemarau												
	Pantai Tiram 50 m			-	-	-	-	6	-	-	-	6	23,1
	Pantai Tiram 100 m			-	-	-	-	7	-	-	-	6	26,8
	Pantai Arta 50 m			-	-	-	-	3	-	-	-	7	20,3
	Pantai Arta 100 m			-	-	-	-	2	-	-	-	7	22,8
	Muaro Batang Tapakis			-	-	-	-	12	-	-	-	6	0,98
	b. Musim Hujan												
	Pantai Tiram 50 m			-	-	-	-	3	-	-	-	8	65,16
	Pantai Tiram 100 m			-	-	-	-	5	-	-	-	8,6	65,66
	Pantai Arta 50 m			-	-	-	-	3	-	-	-	7,5	64,78
	Pantai Arta 100 m			-	-	-	-	2	-	-	-	7,5	63,94
	Muaro Batang Tapakis			-	-	-	-	23,3	-	-	-	6	0,28

No.	Nama Lokasi	DO (mg/L)	BOD5 (mg/L)	COD (mg/L)	Amonia Total (mg/L)	NO2- N (mg/L)	NO3- N (mg/L)	PO4- P (mg/L)	Siani da (CN) (mg/L)	Sulfid a (H2S) (mg/L)	Klor bebas (mg/L)	Miny ak Bumi (mg/L)	Fenol (µg/L)	Pestis ida (mg/L)	PCB (mg/L)
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1.	Kota Padang														
	a. Musim Kemarau														
	Pantai Muaro 50 m	2,9	1,38	42,8	0,41	-	2,46	0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Muaro 100 m	5,7	0,92	65,9	0,44	-	2,75	0,08	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Pasir Jambak 50 m	6	1,66	20,1	0,014	-	2,05	0,49	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Pasir Jambak 100 m	6	0,74	10,1	0,014	-	2,25	0,46	-	-	-	-	-	-	-
	Pelabuhan Teluk Bayur 50 m	5,2	0,92	39,6	0,16	-	0,7	0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Pelabuhan Teluk Bayur 100 m	4,9	0,46	32,9	0,05	-	0,38	0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Muaro Batang Arau	2,1	0,9	46,1	0,53	-	3,64	0,23	-	-	-	-	-	-	-
	b. Musim Hujan														
	Pantai Muaro 50 m	4,4	3,26	5,14	1,84	-	0,36	1,03	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Muaro 100 m	3,7	4,09	5,14	1,37	-	0,49	1,13	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Pasir Jambak 50 m	6,4	1,8	5,14	0,01	-	0,132	0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Pasir Jambak 100 m	6,4	1,5	33,6	0,014	-	0,226	0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Pelabuhan Teluk Bayur 50 m	3,7	1	5,14	0,015	-	0,2	0,41	-	-	-	-	-	-	-
	Pelabuhan Teluk Bayur 100 m	4	2,2	5,14	0,016	-	0,11	0,03	-	-	-	-	-	-	-
	Muaro Batang Arau	2,4	2,1	5,14	1,3	-	0,37	0,8	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kab. Padang Pariaman														
	a. Musim Kemarau														
	Pantai Tiram 50 m	5,5	2,12	36,9	0,014	-	6,3	0,49	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Tiram 100 m	5,7	2,12	20,5	0,014	-	4,43	0,47	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Arta 50 m	5,8	1,18	20,2	0,014	-	0,53	0,62	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Arta 100 m	5,3	0,34	16,8	0,014	-	0,41	0,41	-	-	-	-	-	-	-
	Muaro Batang Tapakis	5,7	1,2	13,4	0,014	-	6,69	0,59	-	-	-	-	-	-	-
	b. Musim Hujan														
	Pantai Tiram 50 m	7,2	3,3	5,14	0,014	-	0,214	0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Tiram 100 m	6,4	0,8	5,03	0,056	-	0,216	0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Arta 50 m	6,4	1,5	5,14	0,014	-	0,174	0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Arta 100 m	6,4	1,2	5,14	0,014	-	0,217	0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Muaro Batang Tapakis	6,8	1,2	7,86	0,062	-	0,659	0,013	-	-	-	-	-	-	-

No.	Nama Lokasi	Waktu Sampling	Lokasi Sampling	Warna (Mr)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/L)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)	pH	Salinitas (0/00)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.	Kab. Agam												
	a. Musim Kemarau												
	Pantai Tiku, Kab. Agam (50 m)			-	-	-	-	4	-	-	-	7	18,4
	Pantai Tiku, Kab. Agam (100 m)			-	-	-	-	2	-	-	-	7	21,8
	Muaro Pantai Tiku			-	-	-	-	27	-	-	-	7	6,78
	b. Musim Hujan												
	Pantai Tiku, Kab. Agam (50 m)			-	-	-	-	7	-	-	-	7	62,8
	Pantai Tiku, Kab. Agam (100 m)			-	-	-	-	4	-	-	-	7	55,04
	Muaro Pantai Tiku			-	-	-	-	36	-	-	-	7	18,28
4.	Kab. Pesisir Selatan												
	a. Musim Kemarau												
	Pantai Cerocok, Painan (50 m)			-	-	-	-	8	-	-	-	7	19,7
	Pantai Cerocok, Painan (100 m)			-	-	-	-	15	-	-	-	7	21,2
	Pantai Cerocok, Tarusan, (50 m)			-	-	-	-	11	-	-	-	7	23,3
	Pantai Cerocok, Tarusan (100 m)			-	-	-	-	7	-	-	-	7	28,2
	Muara Batang Mandeh			-	-	-	-	23	-	-	-	6,5	11,6
	b. Musim Hujan												
	Pantai Cerocok, Tarusan, (50 m)			-	-	-	-	14	-	-	-	7,8	63,7
	Pantai Cerocok, Tarusan (100 m)			-	-	-	-	12	-	-	-	7,9	40,8
	Pantai Cerocok, Tarusan, (50 m)			-	-	-	-	20	-	-	-	7,4	40,8
	Pantai Cerocok, Tarusan (100 m)			-	-	-	-	16	-	-	-	7,8	59,4
	Muara Batang Mandeh			-	-	-	-	40	-	-	-	7,4	22,53
5.	Kab. Pasaman Barat												
	a. Musim Kemarau												
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (50 m)			-	-	-	-	88	-	-	-	7,2	31,8
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (100 m)			-	-	-	-	36	-	-	-	7,2	32,1
	Muara Sungai Pantai Sasak			-	-	-	-	26	-	-	-	6,5	20,3
	b. Musim Hujan												
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (50 m)			-	-	-	-	6	-	-	-	7,5	50,44
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (100 m)			-	-	-	-	8	-	-	-	7,7	50,93

No.	Nama Lokasi	DO (mg/L)	BOD5 (mg/L)	COD (mg/L)	Amonia Total (mg/L)	NO2-N (mg/L)	NO3-N (mg/L)	PO4-P (mg/L)	Sianida (CN) (mg/L)	Sulfida (H2S) (mg/L)	Klor bebas (mg/L)	Minyak Bumi (mg/L)	Fenol (µg/L)	Pestisida (mg/L)	PCB (mg/L)
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
3.	Kab. Agam														
	a. Musim Kemarau														
	Pantai Tiku, Kab. Agam (50 m)	4,2	1,18	5,7	0,014	-	0,32	0,35	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Tiku, Kab. Agam (100 m)	5	1,61	5,7	0,014	-	0,7	0,37	-	-	-	-	-	-	-
	Muaro Pantai Tiku	5	2,45	10,1	0,014	-	2,26	0,52	-	-	-	-	-	-	-
	b. Musim Hujan														
	Pantai Tiku, Kab. Agam (50 m)	6,8	2	7,54	0,014	-	0,1	0,143	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Tiku, Kab. Agam (100 m)	6,4	2	5,14	0,014	-	0,1	0,153	-	-	-	-	-	-	-
	Muaro Pantai Tiku	6	1,2	5,14	0,164	-	0,1	0,481	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kab. Pesisir Selatan														
	a. Musim Kemarau														
	Pantai Cerocok, Painan (50 m)	3,5	1,02	5,7	0,019	-	1,69	0,023	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Cerocok, Painan (100 m)	3,8	1,02	5,7	0,014	-	0,74	0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Cerocok, Tarusan, (50 m)	3,8	2,03	29,6	0,014	-	1,42	0,35	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Cerocok, Tarusan (100 m)	3,9	1,69	26,3	0,014	-	1,19	0,013	-	-	-	-	-	-	-
	Muara Batang Mandeh	3,5	3,05	29,6	5,14	-	11,7	0,013	-	-	-	-	-	-	-
	b. Musim Hujan														
	Pantai Cerocok, Tarusan, (50 m)	6,7	0,9	5,14	0,155	-	0,161	0,223	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Cerocok, Tarusan (100 m)	6,9	0,5	5,14	0,014	-	0,182	0,062	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Cerocok, Tarusan, (50 m)	6,6	1,9	5,14	0,095	-	0,137	0,054	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Cerocok, Tarusan (100 m)	6,3	0,9	5,14	0,014	-	0,136	0,029	-	-	-	-	-	-	-
	Muara Batang Mandeh	6,8	0,7	5,14	0,15	-	0,131	0,056	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kab. Pasaman Barat														
	a. Musim Kemarau														
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (50 m)	4	0,74	6,5	0,014	-	1,02	0,04	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (100 m)	4,5	0,37	9,8	0,014	-	0,45	0,05	-	-	-	-	-	-	-
	Muara Sungai Pantai Sasak	4	0,55	5,7	0,05	-	0,38	0,5	-	-	-	-	-	-	-
	b. Musim Hujan														
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (50 m)	6,7	2,7	5,14	0,025	-	0,144	0,047	-	-	-	-	-	-	-
	Pantai Sasak Kab. Pasbar (100 m)	6,1	1,5	5,14	0,015	-	0,068	0,019	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 20.A. Perbandingan Kualitas Air Laut Tahun 2014 s/d 2016 di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

A. Kabupaten Padang Pariaman

No	Parameter	Satuan	Lokasi Sampel Tahun 2014		Lokasi Sampel Tahun 2015		Lokasi Sampel Tahun 2016	
			2534	2535	2534	2535	2534	2535
1.	Zat Tersuspensi (TSS)	mg/L	13	16	3	2	4,5	6
2.	pH	-	7	7,3	7,2	7,0	7	7,3
3.	Amoniak (NH ₃ -N)	mg/L	0,042	0,023	0,22	<0,014	0,014	0,035
4.	Nitrat (NO ₃)	mg/L	2,15	2,67	1,3	0,5	3,257	2,323
5.	BOD.5	mg/L	3,08	2,17	2,1	3,4	2,71	1,46
6.	DO	mg/L	8,33	8,17	6,86	7,14	6,35	6,05
7.	Posfat (PO ₄ -P)	mg/L	<0,02	<0,02	0,242	0,296	0,2515	0,2415

Keterangan : Kode Sampel
 2534 : Pantai Tiram Jarak 50 m
 2535 : Pantai Tiram Jarak 100 m

B. Kabupaten Pesisir Selatan

No	Parameter	Satuan	Lokasi Sampel Tahun 2014		Lokasi Sampel Tahun 2015		Lokasi Sampel Tahun 2016	
			3504	3505	3504	3505	3504	3505
1.	Zat Tersuspensi (TSS)	mg/L	4	3	18	15	11	13,5
2.	pH	-	8,13	7,95	8,0	8,2	7,4	7,45
3.	Amoniak (NH ₃ -N)	mg/L	0,141	0,238	0,044	0,009	0,087	0,014
4.	Nitrat (NO ₃)	mg/L	0,61	0,58	1,4	1,2	0,9255	0,461
5.	BOD.5	mg/L	2,26	2,47	3,8	4,2	0,96	0,76
6.	DO	mg/L	5,16	5,53	6,43	6,10	5,1	5,35
7.	Posfat (PO ₄ -P)	mg/L	0,029	0,019	0,262	3,610	0,123	0,0375

Keterangan : Kode Sampel
 3504 : Pantai Cerocok Jarak 50 m
 3505 : Pantai Cerocok Jarak 100 m

C. Kabupaten Agam

No	Parameter	Satuan	Lokasi Sampel Tahun 2014			Lokasi Sampel Tahun 2015			Lokasi Sampel Tahun 2016		
			3607	3608	3609	3607	3608	3609	3607	3608	3609
1.	Zat Tersuspensi (TSS)	-	2	2	3	10	15	12	5,5	3	31,5
2.	pH		7,16	6,99	6,98	7,8	8,0	8,0	7	7	7
3.	Amoniak (NH ₃ -N)	mg/L	0,217	0,127	0,158	<0,014	<0,014	<0,014	0,014	0,014	0,089
4.	Nitrat (NO ₃)	mg/L	2,03	2,57	2,21	2,36	2,24	2,36	0,21	0,4	1,18
5.	BOD 5	°/00	1,12	2,24	1,26	4,5	2,0	1,5	1,59	1,805	1,825
6.	DO	mg/L	6,45	6,56	6,62	6,2	4,9	5,10	5,5	5,7	5,5
7.	Posfat (PO ₄ -P)	mg/L	0,043	0,072	<0,013	0,033	0,041	0,058	0,2465	0,2615	0,5005

Keterangan : Kode Sampel

3607 : Pantai Tiku Jarak 50 m

3608 : Pantai Tiku Jarak 100 m

3609 : Muara Pantai Tiku

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel – 21. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Stasiun Klimatologi Padang Pariaman	318	244	636	620	340	286	174	423	409	279	708	405
2	Stasiun Meteorologi BIM	245	360	688	427	477	622	150	375	387	182	301	443
3	Stasiun Geofisika Padang Panjang	203	171	373	368	215	90	84	209	381	258	701	659
4	Stasiun Maritim Teluk Bayur	275	249	465	392	618	762	514	383	407	781	316	498
5	Sta. Gaw Bukit Kototabang	302	140	241	215	322	95	103	168	169	148	260	361
6	Balitbu Aripan Sumani	258	261	373	178	154	56	113	87	59	88	105	94
7	Sitiung	234	202	328	384	293	137	286	58	105	51	512	68
8	Muara Siberut	170	237	268	291	379	143	229	341	357	538	377	353
9	BPP Talao	193	160	165	246	143	65	114	108	109	99	218	119
10	Payakumbuh Barat	292	124	264	183	172	62	75	49	81	55	176	115
11	Kolok	369	183	134	334	118	49	100	23	119	69	133	55
12	Lubuk Sikarah	485	391	272	211	152	45	39	95	57	94	158	95
13	Pangkalan	445	376	290	129	390	107	142	99	154	67	295	238
14	Jalan Baru	473	222	638	547	360	201	235	318	407	457	391	321
15	Rao	179	208	30	202	185	73	91	38	51	73	269	94
16	Sei Baremas	329	233	270	267	227	133	123	226	291	360	361	771
17	PU Batang Kapas	389	252	278	407	471	257	273	243	192	584	250	272
18	BPK Sijunjung	408	213	300	225	310	147	51	240	12	15	341	51
19	Muara Labuh	367	429	193	327	288	109	152	217	232	130	321	64
20	Rambatan	362	222	143	291	79	40	64	29	47	40	142	35

Keterangan : -

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sicincin, 2016

**Tabel - 21.A. Nama dan Lokasi Stasiun di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Nama Stasiun Pengamatan	Lokasi Stasiun
(1)	(2)	(3)
1.	Stasiun Klimatologi Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman
2.	Stasiun Meteorologi BIM	Kab. Padang Pariaman
3.	Stasiun Geofisika Padang Panjang	Kota Padang Panjang
4.	Stasiun Maritim Teluk Bayur	Kota Padang
5.	Sta. Gaw Bukit Kototabang	Kab. Agam
6.	Balitbu Aripan Sumani	Kab. Solok
7.	Sitiung	Kab. Dharmasraya
8.	Muara Siberut	Kab. Kep. Mentawai
9.	BPP Talao	Kota Bukit Tinggi
10.	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
11.	Kolok	Kota Sawah Lunto
12.	Lubuk Sikarah	Kota Solok
13.	Pangkalan	Kab. Limapuluh Kota
14.	Jalan Baru	Kota Pariaman
15.	Rao	Kab. Pasaman
16.	Sei Baremas	Kab. Pasaman Barat
17.	PU Batang Kapas	Kab. Pesisir Selatan
18.	BPK Sijunjung	Kab. Sijunjung
19.	Muara Labuh	Kab. Solok Selatan
20.	Rambatan	Kab. Tanah Datar

Keterangan : -

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sicincin, 2016



**Tabel – 22. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Kabupaten/Kota	Ledeng	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Padang	132.767	58.117	5.304	734	15.056	4.154
2.	Kota Padang Panjang	7.462	2.582	5	100	0	126
3.	Kota Bukittinggi	12.676	9.736	0	759	14.909	236
4.	Kota Solok	15.540	928	0	19	8.808	0
5.	Kota Pariaman	5.293	50.329	0	141	26.508	109
6.	Kota Payakumbuh	24.061	2.358	0	0	0	446
7.	Kota Sawahlunto	6,08	1,435	145	1,173	-	4,234
8.	Kabupaten Dharmasraya	3.358	41.447	1.487	446	0	1.808
9.	Kabupaten Agam	47.655	35.099	0	9.806	22.360	19.548
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	15.723	91.311	4.782	322	0	25.697
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	17.348	36.803	1.306	3.789	-	13.688
12.	Kabupaten Pasaman	148.721	7.178	23.751	90	2.731	209
13.	Kabupaten Pasaman Barat	8.697	66.376	0	373	0	2.498
14.	Kabupaten Solok	12.911	-	-	-	-	-
15.	Kabupaten Sijunjung	27.619	8.684	9.569	517	0	185
16.	Kabupaten Padang Pariaman	16.538	47.148	5.355	10.500	-	11.623
17.	Kabupaten Solok Selatan	247.557	257.500	44.763	15.591	2.731	53.900
18.	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-	-	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

**Tabel - 22.A. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Tahun 2013-2016 di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Sumber Air Minum	Jumlah Rumah Tangga (KK)			
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Ledeng	330.998	292.214	421.096	743.932
2	Sumur	288.239	336.031	321.869	715.597
3	Sungai	47.423	19.317	10.579	96.467
4	Hujan	25.896	25.238	29.090	43.188
5	Kemasan	99.868	70.587	95.296	93.103
6	Lainnya	97.831	67.759	81.433	134.231

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 23. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kota Padang	208.361	180.970	28.728	2.719	6.526
2.	Kota Padang Panjang	12.347	180970	28728	2719	6526
3.	Kota Bukittinggi	31.532	15.242	576	18	0
4.	Kota Solok	15.635	14.012	0	8	0
5.	Kota Pariaman	17.388	12.952	2.620	1.513	303
6.	Kota Payakumbuh	31.189	25.668	84	0	1.117
7.	Kota Sawahlunto	14.433	10.746	496	313	797
8.	Kabupaten Dharmasraya	53.542	43.899	2.121	0	5.345
9.	Kabupaten Agam	112.843	108.096	14.003	6.029	6.510
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	102.367	98.976	7.437	63	31.359
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	93.453	50.298	756	-	41.219
12.	Kabupaten Pasaman	64.215	27.314	4.777	0	38.351
13.	Kabupaten Pasaman Barat	93.469	23.443	20.628	8.353	41.458
14.	Kabupaten Solok	84.529	20.233	-	-	-
15.	Kabupaten Sijunjung	50.974	28.153	9.758	1.343	14.966
16.	Kabupaten Padang Pariaman	89.514	42.358	27.260	11.071	8.868
17.	Kabupaten Solok Selatan	37.482	-	-	-	-
18.	Kabupaten Tanah Datar	85.302	-	-	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	20.735	-	-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016



Tabel - 23.A. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			
		Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
1.	Kota Padang	176.769	12.117	6.103	10.038	220.788	11.518	6.190	9.964	180.970	28.728	2.719	6.526
2.	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	9.737	314	97	44	9.786	132	107	22
3.	Kota Bukittinggi	97.925	1	18	-	27.585	933	465	23	15.242	576	18	0
4.	Kota Solok	11.842	1.505	849	2.684	13.347	187	1.046	2.294	14.012	0	8	0
5.	Kota Pariaman	61.952	6.664	2.395	11.569	61.952	6.664	2.395	11.569	12.952	2.620	1.513	303
6.	Kota Payakumbuh	22.126	31	-	1.095	23.719	26	0	985	25.668	84	0	1.117
7.	Kota Sawahlunto	1.501	-	185	700	10.746	496	313	797	10.746	496	313	797
8.	Kabupaten Dharmasraya	41.926	1.954	-	7.475	40.640	2.043	0	5.815	43.899	2.121	0	5.345
9.	Kabupaten Agam	769.523	144.440	82.488	167.895	108.096	14.003	6.029	6.510	108.096	14.003	6.029	6.510
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	83.305	14.410	7.021	45.312	-	-	-	-	98.976	7.437	63	31.359
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	33.831	889	-	39.317	50.298	756	-	41.219	50.298	756	-	41.219
12.	Kabupaten Pasaman	285.314	72.204	41.235	83.400	28.342	3.936	-	-	27.314	4.777	0	38.351
13.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-	-	23.443	20.628	8.353	41.458	23.443	20.628	8.353	41.458
14.	Kabupaten Solok	-	-	-	-	29.278	165	-	-	20.233	-	-	-
15.	Kabupaten Sijunjung	41.743	20.387	21.356	4.254	41.743	20.387	21.356	4.254	28.153	9.758	1.343	14.966
16.	Kabupaten Padang Pariaman	43.045	27.284	9.429	11.406	42.358	27.260	11.071	8.868	42.358	27.260	11.071	8.868

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

Tabel – 24. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Kabupaten/Kota	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Kota Padang	84.563	78.095	108.266	112.685	70.006	74.235	107.038	114.737	28.733	29.052	30.493	30.617	3.350	2.685	249	167
2.	Kota Padang Panjang	5.087	4.643	6.518	6.196	4.126	3.648	7.570	6.992	703	1.654	1.612	2.186	193	174	14	9
3.	Kota Bukittinggi	11.697	10.971	14.543	14.398	8.510	7.602	17.383	15.940	2.004	3.753	3.954	5.128	414	391	21	22
4.	Kota Solok	12.939	12.102	10.482	10.420	4.598	4.158	2.236	2.298	734	1.337	1.873	2.404	182	92	3	4
5.	Kota Pariaman	15.100	14.183	12.584	11.288	5.539	4.913	2.384	2.220	812	1.927	2.129	2.810	178	116	4	5
6.	Kota Payakumbuh	11.810	11.742	9.254	8.672	4.487	4.831	5.682	6.419	1.976	5.979	4.153	5.729	241	157	2	0
7.	Kota Sawahlunto	-	-	3.612	3.487	1.611	1.580	1.351	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kabupaten Dharmasraya	38.696	32.732	21.371	20.761	14.263	12.893	3.856	4.134	1.164	2.493	2.278	2.887	159	90	5	3
9.	Kabupaten Agam	78.884	75.866	45.614	43.278	30.048	26.746	8.174	7.485	4.969	9.410	9.045	12.748	481	456	31	32
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	51.836	52.536	60.047	59.251	47.301	40.788	57.487	51.343	2.642	5.506	5.257	7.834	351	213	12	14
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	2.308	2.513	36.004	33.375	23.954	21.132	6.956	6.665	21.479	25.731	1.309	3.109	2.762	6.605	-	-
12.	Kabupaten Pasaman	78.275	78.067	34.676	35.485	21.932	20.671	21.317	19.221	1.554	3.375	3.191	4.350	213	116	17	12
13.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	43.043	41.261	29.406	26.193	7.091	7.510	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kabupaten Solok	45.628	43.650	36.446	35.918	25.261	22.761	6.770	7.334	1.588	3.814	3.666	5.693	238	160	34	32
15.	Kabupaten Sijunjung	1.906	1.170	24.102	23.482	16.085	14.642	4.456	4.615	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Kabupaten Padang Pariaman	53.245	45.461	44.712	42.938	27.810	25.188	9.565	9.066	15.907	17.483	4.290	4.848	247	101	2	0
17.	Kabupaten Solok Selatan	-	-	16.691	16.032	10.549	9.551	3.038	3.009	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Kabupaten Tanah Datar	-	-	33.555	32.025	21.166	19.221	6.443	6.147	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	12.461	11.710	8.021	7.163	2.501	2.552	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

Tabel - 24.A. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kategori Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Kategori Pendidikan Dasar - Menengah (jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Kota Padang	285.310	301.657
2.	Kota Padang Panjang	18.214	16.836
3.	Kota Bukittinggi	40.436	37.940
4.	Kota Solok	17.316	16.876
5.	Kota Pariaman	20.507	18.421
6.	Kota Payakumbuh	19.423	19.922
7.	Kota Sawahlunto	6.574	6.467
8.	Kabupaten Dharmasraya	39.490	37.788
9.	Kabupaten Agam	83.836	77.509
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	164.835	151.382
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	66.914	61.172
12.	Kabupaten Pasaman	77.925	75.377
13.	Kabupaten Pasaman Barat	79.540	74.964
14.	Kabupaten Solok	68.477	66.013
15.	Kabupaten Sijunjung	44.643	42.739
16.	Kabupaten Padang Pariaman	82.087	77.192
17.	Kabupaten Solok Selatan	30.278	28.592
18.	Kabupaten Tanah Datar	61.164	57.393
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	22.983	21.425

Keterangan : Kategori pendidikan dasar-menengah adalah SD, SLTP dan SLTA

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

Tabel - 24.B. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kategori Pendidikan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Kategori Pendidikan Tinggi (jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Kota Padang	34.092	33.469
2.	Kota Padang Panjang	1.819	2.369
3.	Kota Bukittinggi	4389	5541
4.	Kota Solok	2.058	2.500
5.	Kota Pariaman	2311	2931
6.	Kota Payakumbuh	4396	5886
7.	Kota Sawahlunto	-	-
8.	Kabupaten Dharmasraya	2.442	2.980
9.	Kabupaten Agam	9.557	13.236
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	5620	8061
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-
12.	Kabupaten Pasaman	3421	4478
13.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-
14.	Kabupaten Solok	3.938	5.885
15.	Kabupaten Sijunjung	-	-
16.	Kabupaten Padang Pariaman	4.539	4.949
17.	Kabupaten Solok Selatan	-	-
18.	Kabupaten Tanah Datar	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data
 Kategori pendidikan tinggi adalah Diploma, S1, S2 dan S3

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

**Tabel – 25. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)
1.	ISPA	438.610
2.	Gastritis	198.731
3.	Rematik	151.243
4.	Hipertensi	140.930
5.	Diare	89.392
6.	Penyakit Kulit Alergi	79.717
7.	Commond Cold	63.972
8.	Penyakit Kulit Infeksi	54.442
9.	Asma	44.250

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel - 25.A. Perbandingan Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita (jiwa)		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	ISPA	716031	749.985	438.610
2.	Diare	65701	78.176	89.392
3.	Kulit	105081	189.506	54.442
4.	Gastritis	21506	177.286	198.731
5.	Rheumatik	20808	164.065	151.243
6.	Hipertensi	18598	136.204	140.930

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel – 26. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Padang	210.881	43.104
2.	Kota Padang Panjang	11.891	2.093
3.	Kota Bukittinggi	29.676	3.881
4.	Kota Solok	15.530	2.454
5.	Kota Pariaman	17.388	3.312
6.	Kota Payakumbuh	30.563	6.431
7.	Kota Sawahlunto	14.864	1.582
8.	Kabupaten Dharmasraya	53.983	7.046
9.	Kabupaten Agam	115.885	21.452
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	103.758	38.010
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	92.616	32.148
12.	Kabupaten Pasaman	63.397	25.504
13.	Kabupaten Pasaman Barat	96.279	40.038
14.	Kabupaten Solok	85.984	30.046
15.	Kabupaten Sijunjung	52.769	12.015
16.	Kabupaten Padang Pariaman	92.268	28.495
17.	Kabupaten Solok Selatan	38.408	9.334
18.	Kabupaten Tanah Datar	87.141	19.982
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	20.343	8.035

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 26.A. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2012-2016 di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Miskin		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Kota Padang	13.056	27.861	43.104
2.	Kota Padang Panjang	395	394	2.093
3.	Kota Bukittinggi	691	3.052	3.881
4.	Kota Solok	778	2.496	2.454
5.	Kota Pariaman	1.595	1.121	3.312
6.	Kota Payakumbuh	995	2.167	6.431
7.	Kota Sawahlunto	1.050	1.114	1.582
8.	Kabupaten Dharmasraya	3.049	10.421	7.046
9.	Kabupaten Agam	14.833	839	21.452
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	9.624	30.625	38.010
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	9.577	12.937	32.148
12.	Kabupaten Pasaman	15.514	1.427	25.504
13.	Kabupaten Pasaman Barat	14.685	13.966	40.038
14.	Kabupaten Solok	9.01	8.709	30.046
15.	Kabupaten Sijunjung	6.180	9.106	12.015
16.	Kabupaten Padang Pariaman	8.444	6.123	28.495
17.	Kabupaten Solok Selatan	3.797	8.709	9.334
18.	Kabupaten Tanah Datar	4.421	18.634	19.982
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	5.898	10.303	8.035

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel – 27. Volume Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m ³ /hari)	Volume Limbah Cair (m ³ /hari)	Volume Limbah B3 Padat (m ³ /hari)	Volume Limbah B3 Cair (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Bergerak						
1.	Terminal Jati Kota Pariaman	Terminal	5.012,00	3,00	-	-	-
2.	Terminal Muaro Kota Pariaman	Terminal	3.803,00	3,00	-	-	-
3.	Terminal Transit Sungai Betung Kab. Dharmasraya	Terminal Barang	2,00	1,0	-	-	-
4.	Pelabuhan Sungai di Batu Bakawik Kab. Dharmasraya	Dermaga Sungai	0,25	0,50	-	-	-
5.	Penyeberangan Sungai Lansat Kab. Dharmasraya	Dermaga Ponton	0,20	0,05	-	-	-
6.	Penyeberangan Jorong Siguntur Kab. Dharmasraya	Dermaga Ponton	0,10	0,01	-	-	-
	b. Tidak Bergerak						
1.	PT. Bina Pratama Sakato Jaya KJ	Industri	8,25	337,50	531,8	0,00042	0,261
2.	PT. Tidar Kerinci Agung	Industri	83	404,00	636,4	0,00146	4,6488
3.	PT. Pasaman Marama Sejahtera	Industri	5	-	510,701	-	0,22
4.	PT. Lembah Karet	Industri	6	-	328,359	0,00233	0,7222
5.	PT. Teluk Luas	Industri	3	-	234,722	0,00024	1
6.	PT. Bintara Tani Nusantara	Industri	-	-	587,258	0,00031	0,2044
7.	PT. Japfa Comfeed Indonesia	Industri	7,5	-	1,367	0,00283	0,32222
8.	PT. Batang Hari Barisan	Industri	1,6	-	89,291	0,0008	1,8
9.	PT. Perkebunan Pelalu Raya	Industri	59	-	533,87	0,00088	0,23
10.	PT. Bakrie Pasaman Plantation	Industri	4,8	-	353,1	0,00544	1,327
11.	PT. Transco Pratama	Industri	-	41,40	21,7	-	1
12.	PT. Family Raya	Industri	3,245	-	26,663	0,00074	0,3
13.	PT. AMP Plantation	Industri	20,9	-	657,145	0,00754	1,5522
14.	PT. Kilang V Gunung	Industri	2,7879	-	747,207	0,00069	0,8
15.	PT. Bina Pratama Sakato Jaya SS	Industri	4,8729	476,12	11.788,98	0,00097	2,276
16.	PT. PN VI (Danau Kembar)	Industri	12	-	-	0,00122	0,03
17.	PT. Usaha Inti Padang	Industri	3,1505	-	-	0,00002	0,2844
18.	PT. Gersindo Minang Plantation	Industri	-	-	-	0,00034	0,0667
19.	PT. Mutiara Agam/ Minang Agro	Industri	10,32	-	2,05	0,00126	1,12
20.	PT. Nusantara Beta Farma	Industri	1,2235	-	0,303	-	0,0089
21.	PT. PN VI (Pasaman Barat)	Industri	3.256	-	359,9	-	0,1044
22.	PT. Kencana Sawit Indonesia	Industri	10,33	-	262,444	-	5,3233
23.	PT. Incasi Raya Pangian Dharmasraya	Industri	4,5	347,60	547,6	-	0,55
24.	PT. PN VI (Solok Selatan)	Industri	-	80,55	128,598	-	0,14
25.	PT. Kemilau Permata Sawit	Industri	29,5	-	59,617	-	0,218
26.	PT. Sumbar Andalas Kencana	Industri	-	358,80	565,3	-	0,31
27.	PT. Selago Makmur Plantation	Industri	-	525,40	827,7	-	0,724
28.	PT. Pertamina DPPU BIM	Industri	-	-	-	0,00397	0,2889
29.	PT. Coca Cola Botling Indonesia	Industri	-	-	-	0,00013	0,20825
30.	PT. Andalas Agro Industri	Industri	-	-	-	0,0006	0,405
31.	PT. Sumbar Andalas Kencana	Industri	-	-	-	0,00322	0,825
32.	PT. Dharmasraya Sawit Lestari	Industri	-	365,60	576	-	-
33.	PT. Dharmasraya Lestarindo	Industri	-	487,50	768,1	-	-
34.	PT. Agrowiratama	Industri	-	-	-	-	1,1033



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35.	PT. Semen Padang	Industri	-	-	-	-	9,122
36.	PT. PLN PLTG Pauh Limo	Industri	-	-	-	-	0,00133
37.	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Ombilin	Industri	-	-	-	-	0,5864
38.	PT. Pertamina (Persero Terminal BBM Teluk Kabung)	Industri	-	-	-	-	6,6667
39.	PT. Berkat Sawit Sejahtera	Industri	-	-	-	-	0,048
44.	PT. PLN Unit PLTA Maninjau	Industri	-	-	-	-	0,181
45.	PT. Sari Buah Sawit	Industri	-	-	-	-	0,32
46.	PT. Incasi Raya Pesisir Selatan	Industri	-	-	-	-	1,59667
47.	PT. PLN Unit PLTA Singkarak	Industri	-	-	-	-	0,181
48.	PT. Usaha Sawit Mandiri	Industri	-	-	-	-	0,68
49.	PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman	Industri	-	-	-	-	0,277
50.	Hotel Nuansa Maninjau	Penginapan	1,265	-	-	0,00111	-
51.	RSI Ibnu Sina Bukittinggi	Kesehatan	0,6796	-	-	0,00556	-
52.	RS Yos Sudarso	Kesehatan	2,5	-	56,937	0,00499	0,09
53.	RSUD M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan	Kesehatan	-	-	-	0,03889	0,024
54.	RS Madina Bukittinggi	Kesehatan	0,1355	-	-	0,01297	-
55.	RS Stroke Nasional Bukittinggi	Kesehatan	1,3	-	-	0,06667	-
56.	RSI Ibnu Sina Padang Panjang	Kesehatan	-	-	-	0,00074	-
57.	RSI Ibnu Sina Simpang Ampek	Kesehatan	-	-	-	0,01667	-
58.	RSI Ibnu Sina Lubuk Sikaping	Kesehatan	-	-	-	0,00056	-
59.	RSI Siti Rahmah	Kesehatan	-	-	-	0,00186	-
60.	RSUD Kota Solok	Kesehatan	-	-	-	0,05574	-
61.	RSUD Kota Pariaman	Kesehatan	-	-	-	0,00644	-
62.	RST Padang	Kesehatan	-	-	-	0,00022	-
63.	RST Solok	Kesehatan	-	-	-	0,00922	-
64.	RST Bukittinggi	Kesehatan	-	-	-	0,00444	-
65.	RSUD Sijunjung	Kesehatan	-	-	-	0,01778	-
66.	RSUD Padang Pariaman	Kesehatan	-	-	-	0,00092	-
67.	RSUD Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota	Kesehatan	-	-	-	0,00186	-
68.	RSUD Lubuk Basung	Kesehatan	-	-	-	0,05556	-
69.	RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya	Kesehatan	-	-	-	0,00556	-
70.	RSUD Solok Selatan	Kesehatan	-	-	-	0,01852	-
71.	RS BKM Painan/Sago Kab. Pesisir Selatan	Kesehatan	-	-	-	0,00056	-
72.	RS Permata Hati Painan	Kesehatan	-	-	-	0,00056	-
73.	RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh	Kesehatan	-	-	-	0,05556	-
74.	RSUD Lubuk Sikaping	Kesehatan	-	-	-	0,0037	-
75.	RSUD Pasaman Barat	Kesehatan	-	-	-	0,02778	-
76.	RSUD Arosuka Kabupaten Solok	Kesehatan	-	-	-	0,00556	-
77.	RS Semen Padang	Kesehatan	-	-	-	-	-
78.	RSUD Rasyidin Padang	Kesehatan	-	-	-	0,03333	-
79.	RSUP Dr. M Djamil Padang	Kesehatan	-	-	-	0,03703	-
80.	RSUD Padang Panjang	Kesehatan	-	-	-	0,00444	-
81.	RSUD Hanafiah Batusangkar Tanah Datar	Kesehatan	-	-	-	0,03889	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dan Dokumen IKPLHD Kab. Dharmasraya dan Kota Pariaman, 2016



Tabel 27.A. Volume Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Sumber Pencemaran	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m ³ /hari)	Volume Limbah Cair (m ³ /hari)	Volume Limbah B3 Padat (m ³ /hari)	Volume Limbah B3 Cair (m ³ /hari)	Volume Limbah B3 Cair (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Bergerak						
1.	Terminal	8.817,00	7,00	3,00	-	-	-
2.	Dermaga	0,55	0,56	3,00	-	-	-
	b. Tidak Bergerak						
1.	Industri	3.536,98	3.424,47	21.146,18	0,04	48,03	
2.	Kesehatan	4,62	-	56,94	0,53	0,11	

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dan Dokumen IKPLHD Kab. Dharmasraya dan Kota Pariaman, 2016

**Tabel – 28. Suhu Rata-Rata Bulanan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Nama dan Lokasi Stasiun	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Sta. Klimatologi Padang Pariaman	26,6	27,0	26,9	26,6	26,3	24,9	25,6	25,6	24,7	25,5	25,5	25,3
2.	Sta. Meteorologi BIM	27,3	27,1	27,4	27,7	27,4	26,9	26,4	26,5	26,5	26,3	26,4	26,1
3.	Sta. Geofisika Padang Panjang	21,6	23,0	23,1	23,6	23,3	22,2	22,0	22,2	21,8	21,8	21,8	21,5
4.	Sta. Maritim Teluk Bayur	27,9	27,9	27,9	28,2	27,9	27,2	26,9	27,1	27,2	26,8	26,9	29,7
5.	Sta. Gaw Bukit Kototabang	22,8	22,7	23,2	23,5	23,0	23,2	22,0	21,9	21,7	21,6	21,8	21,5
6.	Balitbu Aripan Sumani	25,0	24,7	25,7	25,1	26,1	24,8	25,0	26,2	25,3	26,0	24,8	25,1

Keterangan : -

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sicincin , 2016

Tabel - 28.A. Perbandingan Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2014 s/d 2016 Tahun : 2016

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Suhu Udara Rata-rata Bulanan		
		2014	2015	2016
1.	Sicincin	25,15	25,68	25,87
2.	Padang BIM	26,48	26,44	26,83
3.	Padang Panjang	22,34	24,47	22,32
4.	Gaw Bukit Tinggi	22,24	23,33	22,41
5.	Teluk Bayur	27,5	-	27,63

Keterangan : -

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sicincin, 2016

Tabel – 29. Kualitas Air Hujan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

Waktu Pemantauan	pH	DHL	SO4	NO3	Cr	NH4	Na	Ca ²⁺	Mg ²⁺
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Januari	5,07	2.297,30	2,21	1,76	-	0,03	479,34	0,11	0,02
Februari	5,14	127,10	0,44	0,30	-	0,00	26,15	0,21	0,02
Maret	5,30	6,60	0,85	0,47	-	0,17	0,17	0,13	0,00
April	5,39	12,70	0,63	0,26	-	0,16	0,07	0,08	0,02
Mei	5,30	14,90	0,53	0,26	-	0,08	0,03	0,00	0,00
Juni	5,52	7,90	1,02	0,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Juli	6,08	6,70	0,76	0,71	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Agustus	5,10	7,14	0,61	0,37	-	0,61	0,33	0,31	0,06
September	5,53	4,08	0,16	0,17	-	0,08	0,19	0,14	0,03
Oktober	6,22	5,36	0,09	0,24	-	0,54	0,32	0,18	0,03
November	5,35	3,70	0,28	0,33	-	0,05	0,10	0,28	0,03
Desember	5,22	8,52	0,28	0,27	-	1,04	0,45	0,19	0,09

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sicincin , 2016



**Tabel 29.A. Kimia Air Hujan Mingguan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

Tahun	Bulan	Minggu	pH	DH	Ca	Mg	Na	K	NH4	Cl	SO4	NO3	KT	AC	AL	CH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2016	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1	2	5,15	389,8615	0,2	0,016	78,215	0,192	0,108	188,754	0,961	0,622	0,168	18,588	0	29,5
2016	1	3	5,02	1572,241	0,1	0,018	331,748	0,16	0	752,366	2,348	1,919	0,088	19,169	0	118,2
2016	1	4	5,19	5713,565	0,1	0,02	1188,925	0,191	0	3157,87	3,506	2,842	0,123	18,588	0	82
2016	1	5	4,97	50,56092	0,1	0,004	9,28	0,116	0,103	16,349	0,817	0,548	0,123	26,72	0	61,5
2016	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2	1	5,05	1968,6	0,3	0,042	396,016	0,406	0	924,17	2,275	2,17	0,365	0	0	6
2016	2	2	5,15	7,02439	0,2	0,017	2,032	0,245	0	0,911	0,321	0,173	0,232	18,588	0	92
2016	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	3	1	5,91	2,327995	0,090175	0	0,12	0,052	0	0,366	0,382	0,208	0,097	8,756	0	31
2016	3	2	4,95	10,23961	0,198596	0	0,248	0,097	0,238	0,389	1,25	0,881	0,231	18,137	0	47
2016	3	3	5,09	9,248725	0,158596	0	0,156	0,285	0,368	0,562	0,956	0,668	0,184	21,89	0	58,6
2016	3	4	5,32	6,71088	0,189122	0	0,235	0,214	0,208	0,42	0,99	0,256	0,209	13,759	0	36,2
2016	3	5	5,46	3,60459	0,032982	0	0,123	0,006	0,006	0,051	0,61	0,238	0,042	11,883	0	64,1
2016	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	4	2	5,64	22,16867	0,1	0,015	0,115	5,034	0,271	4,753	0,637	0,222	0,127	13,759	0	60,6
2016	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	4	4	5,42	4,04092	0,1	0,008	0,018	0,048	0	0,049	0,601	0	0,127	11,883	0	47,6
2016	4	5	4,9	7,771005	0	0,025	0,04	0,226	0,166	0,221	0,658	0,677	0,06	27,519	0	33,9
2016	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	5	2	5,26	3,9432	0	0	0,033	0,019	0,08	0,147	0,508	0,241	0,004	12,462	0	105,7
2016	5	3	5,15	5,91828	0	0	0,048	0,014	0,078	0,152	0,69	0,323	0,006	13,028	0	72,5
2016	5	4	5,24	5,36425	0	0	0,009	0,007	0,065	0,208	0,577	0,247	0,012	15,86	0	13,5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2016	5	5	5,48	37,1371	0	0	0,006	4,814	0,067	8,28	0,417	0,24	0	10,762	0	86,8
2016	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	6	1	5,55	7,533045	0	0	0	0	0	0,537	1,007	0,206	0	0	0	50,5
2016	6	2	5,28	70,64085	0	0	0	0	0	16,725	2,011	0,757	0	0	0	3,7
2016	6	3	5,46	4,85811	0	0	0	0	0	0,292	1,03	0,163	0	0	0	62,5
2016	6	4	5,69	6,650728	0	0	0	0	0	0,654	0,768	0,171	0	0	0	16,1
2016	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	7	3	6,72	8,25675	0	0	0	0	0	0,165	0,896	0,905	0	16,317	0	23,5
2016	7	4	5,55	5,35665	0	0	0	0	0	0,215	0,651	0,556	0	22,436	0	28,5
2016	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	8	1	5.25	8.17	0.41	0.06	0.43	0.09	0.41	0.71	0.46	0.47	0	36.70	0.00	46.50
2016	8	2	4.94	6.10	0.21	0.06	0.23	0.10	1.81	1.06	0.75	0.27	0	34.72	0.00	7.00
2016	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	9	1	5.60	4.59	0.07	0.04	0.24	0.12	0.15	0.68	0.18	0.11	0	7.85	0.00	47.30
2016	9	2	5.53	3.59	0.21	0.02	0.13	0.09	0.11	0.47	0.14	0.23	0	10.75	0.00	33.14
2016	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	9	4	5.62	2.98	0.06	0.03	0.17	0.07	0.11	0.42	0.00	0.09	0	11.99	0.00	57.80
2016	9	5	5.38	6.12	0.10	0.06	0.40	0.13	0.43	0.55	0.07	0.15	0	12.40	0.00	15,44
2016	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	10	3	6.39	2.95	0.14	0.03	0.10	0.04	0.14	0.34	0.09	0.17	0	5.88	0	61.00
2016	10	4	6.01	9.94	0.32	0.02	0.76	0.11	1.39	0.57	0.26	0.35	0	11.77	0	6.90
2016	10	5	6.25	3.18	0.08	0.04	0.09	0.06	0.10	0.44	0.13	0.12	0	0	37.83	53.30
2016	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2016	11	1	5.25	3.25	0.22	0.03	0.12	0.07	0.07	0.34	0.46	0.25	0	29.67	0	50.50
2016	11	2	5.34	2.56	0.27	0.03	0.05	0.03	0.03	0.38	0.48	0.30	0	20.70	0	107.10
2016	11	3	5.48	2.19	0.31	0.02	0.04	0.03	0.00	0.26	0.44	0.33	0	11.73	0	42.10
2016	11	4	5.31	2.50	0.22	0.02	0.05	0.02	0.14	0.21	0.00	0.24	0	10.69	0	278.00
2016	11	5	5.35	8.02	0.38	0.05	0.24	0.91	0.01	0.28	0.00	0.43	0	0.00	0.00	2.60
2016	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	12	1	5.15	5.87	0.15	0.05	0.20	0.09	0.22	0.75	0.37	0.20	0	21.60	0.00	129.40
2016	12	2	5.19	4.09	0.09	0.06	0.26	0.13	0.28	0.40	0.12	0.15	0	23.51	0.00	164.40
2016	12	3	5.37	23.80	0.41	0.20	1.53	2.07	4.14	1.11	0.78	0.60	0	26.05	0.00	2.50
2016	12	4	5.30	3.39	0.20	0.06	0.12	0.09	0.12	0.50	0.11	0.26	0	19.06	0.00	44.60
2016	12	5	5.10	5.43	0.10	0.06	0.25	0.06	0.43	0.38	0.00	0.16	0	13.98	0.00	17.80
2016	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan : -

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sicincin , 2016

**Tabel – 30. Kualitas Air Hujan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

Lokasi	Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm ³)	NO2 (µg/Nm ³)	O3 (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)	PM 10 (µg/Nm ³)	PM 2,5 (µg/Nm ³)	TSP (µg/Nm ³)	Pb (µg/Nm ³)	Dustfall (µg/Nm ³)	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm ³)	Fluor Index (µg/Nm ³)	Klorine dan Klorine Dioksida (µg/Nm ³)	Sulphat Index (µg/Nm ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Depan Pasar Sumani Kabupaten Solok															
1. Pagi	24 jam	3,44	881	1,05	18,42	-	-	-	181	< 0,016	-	-	-	-	-
2. Siang		4,59	1271	1,76	17,7	-	-	-			-	-			
3. Malam		3,42	1259	1,4	17,86	-	-	-			-	-			
Depan Pelabuhan Tuapejat															
1. Pagi	24 jam	7,91	774	2,11	17,68	-	-	-	53,14	0,029	-	-	-	-	-
2. Siang		13,01	792	1,76	20,28	-	-	-			-	-			
3. Malam		27,0	684	1,05		-	-	-			-	-			
Depan Kantor Lingkungan Hidup Pasaman															
1. Pagi	24 jam	22,8	1475	2,81	19,91	-	-	-	106,5	0,305	-	-	-	-	-
2. Siang		9,46	738	4,56	19,54	-	-	-			-	-			
3. Malam		8,606	1007	2,81		-	-	-			-	-			
Bundaran Simpang Tiga Lubuk Basung															
1. Siang		2,58	810	3,16	17,68	-	-	-	76,11	0,07	-	-	-	-	-
2. Sore		1,8	780	1,05	12,45	-	-	-			-	-			
Depan Kantor Bupati Lima Puluh Kota															
1. Pagi	24 jam	11,61	1655	15,45	20,84	-	-	-	74,79	0,185	-	-	-	-	-
2. Siang		6,02	2303	2,81	21,21	-	-	-			-	-			
3. Malam		9,03	1763	7,72		-	-	-			-	-			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Depan RSUD Kabupaten Sijunjung																
1. Siang	24 jam	3,87	1061	1,78	16,75	-	-	-	85	< 0,016	-	-	-	-	-	
2. Sore		12,04	971	2,81	17,0	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		6,88	1200	1,05		-	-	-			-	-	-	-	-	-
Tugu Monumen Polisi Polwan Bukittinggi																
1. Siang	24 jam	20,54	756	1,40	26,8	-	-	-	120,72	0,247	-	-	-	-	-	
2. Sore		19,73	702	1,76	20,84	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		Hujan	Hujan	Hujan		-	-	-			-	-	-	-	-	-
Lapangan Cindua Mato Batusangkar																
1. Siang	24 jam	2,63	1007	5,27	16,75	-	-	-	73,48	< 0,016	-	-	-	-	-	
2. Sore		2,18	1043	5,62	17,12	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		5,5	774	1,09		-	-	-			-	-	-	-	-	-
Depan Kantor PSDA PU Kab. Pesisir Selatan																
1. Pagi	24 jam	2,19	1040	1,05	16,75	-	-	-	43,65	< 0,016	-	-	-	-	-	
2. Siang		1,14	917	1,40	16,75	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		2,29	1240	1,45		-	-	-			-	-	-	-	-	-
Depan Kantor Wali Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat																
1. Siang	24 jam	22,80	1510	2,37	20,84	-	-	-	193	0,261	-	-	-	-	-	
2. Sore		10,75	1691	3,86	21,21	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		8,66	1691	3,60		-	-	-			-	-	-	-	-	-
Halaman Mesjid Al-Akhwan Sei. Rumbai Kabupaten Dharmasraya																
1. Pagi	24 jam	19,39	6,120	11,24	24,38	-	-	-	190,8	0,107	-	-	-	-	-	
2. Siang		19,50	7,350	12,14	27,54	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		28,4	8,200	12,29		-	-	-			-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Depan Masjid Nurul Iman Kota Padang Panjang																
1. Pagi	24 jam	6,42	2260	1,35	27,35	-	-	-	56	< 0,016	-	-	-	-	-	
2. Siang		7,45	2370	2,4	26,61	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		7,8	2240	1,30		-	-	-			-	-	-	-	-	-
Depan UKM Kota Payakumbuh																
1. Siang	24 jam	44,75	1,619	5,27	15,63	-	-	-	209	0,125	-	-	-	-	-	
2. Sore		40,96	917	1,05	15,82	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		42,22	773	3,16		-	-	-			-	-	-	-	-	-
Simpang Segitiga Depan Kantor Bukit Asam Kota Sawahlunto																
1. Siang	24 jam	42,22	2260	9,13	18,79	-	-	-	46	0,017	-	-	-	-	-	
2. Sore		48,76	3920	6,67	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		41,76	1760	11,24	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Pasar Lubuk Alung																
1. Siang	24 jam	30,63	1219	22,47	16,19	-	-	-	371,61	0,116	-	-	-	-	-	
2. Sore		30,4	1230	14,75	14,20	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		29,83	1583	5,97	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Lampu Merah Simpang Rumbio Kota Solok																
1. Siang	24 jam	44,29	1835	11,94	52,4	-	-	-	169,9	0,048	-	-	-	-	-	
2. Sore		44,86	2482	17,21	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		45,44	1799	12,29	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Depan RPH Pasar Muaro Labuh Kabupaten Solok Selatan																
1. Pagi	24 jam	28,6	845	8,08	24	-	-	-	129	< 0,016	-	-	-	-	-	
2. Siang		36,9	630	8,43	23	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		21,3	684	9,48		-	-	-			-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Lampu Merah Simpang Lapai Kota Pariaman																
1. Siang	24 jam	42,68	1547	9,13	17,12	-	-	-	169,46	0,195	-	-	-	-	-	
2. Sore		42,45	1940	7,02	18,24	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		40,16	2660	14,4	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Perumnas Siteba																
1. Pagi	24 jam	2,41	1040	2,81	15,26	-	123	-		< 0,016	-	-	-	-	-	
2. Siang		2,29	917	2,46	16,4	-		-			-	-	-	-	-	-
3. Malam		2,29	1241	2,81	-	-		-			-	-	-	-	-	-
Depan Kantor KAN Ulu Gadut																
1. Pagi	24 jam	1,14	896	0,70	14,84	-	37	-		< 0,016	-	-	-	-	-	
2. Siang		1,20	881	0,71	15,63	-		-			-	-	-	-	-	
3. Malam		-	-	-	-	-		-			-	-	-	-	-	
Simpang Lubuk Begalung ex Kantor Lurah Pitameh Tj. Saba																
1. Pagi	24 jam	3,94	3958	2,46	17,31	-	-	-	429	0,07	-	-	-	-	-	
2. Siang		2,52	3130	0,70	16,75	-	-	-			-	-	-	-		
3. Malam		2,18	3634	2,8	-	-	-	-			-	-	-	-		

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 30.A. Indeks Kualitas Udara Provinsi Sumatera Barat 2011-2014
Tahun : 2016

No	Tahun	IKU
1.	2014	89.16
2.	2013	86.41
3.	2012	86.02
4.	2011	91.05

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel – 31. Penggunaan Bahan Bakar di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri											
1.	Kimia dasar	-	20.000	-	-	864	-	-	-	-	117.560	-
2.	Mesin dan logam dasar	-	8.000	7.000	-	-	-	-	-	-	31.000	24.162
3.	Industri kecil	-	75.235	60.000	-	-	9.984	-	-	15.060	-	-
4.	Aneka Industri	-	21.800	222.370	-	34.471	62.034	-	-	30	186.000	487.996
B	Rumah Tangga	3.441.121	-	-	-	-	16.582.316	5	42.008	-	-	-
C	Kendaraan											
1.	Mobil beban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.816	12.488
2.	Penumpang pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.036	16.632
3.	Penumpang umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.889	33.333
4.	Bus besar pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
5.	Bus besar umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
6.	Bus kecil pribadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.963	31
7.	Bus kecil umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449	902
8.	Truk besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12.866
9.	Truk kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740	16.031
10.	Roda tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	58
11.	Roda dua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601.917	-

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel - 31.A. Penggunaan Bahan Bakar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Klasifikasi Industri	LPG (Kg)	Minyak Bakar (Liter)	Minyak Diesel (Liter/Hari)	Solar (Liter/Hari)	Minyak Tanah (Liter)	Gas (MMSCF)	Batubara (Ton/Hari)	Biomassa (Ton/Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kota Padang								
1	Industri Karet								
	a. PT. Kilang Lima Gunung								8
	b. PT. Teluk Luas			800	24.000				14
	c. PT. Lembah Karet				2.200				
	d. PT. Family Raya				170				8
	e. PT. Batang Hari Barisan				1.800				
2	Industri logam mesin dan elektronik				24.162				
3	Industri aneka	48.925				2.815		1	
	Kota Padang Panjang								
1.	Industri pangan	13.109	0	0	23.329	82.555	0	0	0
2.	Industri sandang	0	0	0	17.497	0	0	0	0
3.	Industri kimia dan bahan bangunan	0	0	0	0	0	0	864	0
4.	Industri logam dan elektronika	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Industri kerajinan	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kota Bukittinggi								
1.	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan Daging Unggas	270	0	0	0	0	0	0	0
2.	Industri Tahu Kedelai	0	0	0	0	0	0	0	210
3.	Industri makaroni, mie, spageti, bihun, so'un dan sejenisnya	540	0	0	0	0	0	0	0
4.	Industri Kue Basah	6192	0	0	0	0	0	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	Industri makanan dan kebele dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe	2430	0	0	0	0	0	0	0
6.	Industri Kerupuk dan sejenisnya	0	0	0	0	0	0	0	14850
7.	Industri Pengolahan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain	552	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Pasaman									
1.	Industri Asphalt Mixing Plant (AMP)	-	-	-	12.000	-	-	-	-
Kab. Pasaman Barat									
1.	PT. Anam Koto	-	-	-	60.000	-	-	-	-
2.	PT. Bintara Tani Nusantara	-	-	-	100.000	-	-	-	-
3.	PT. Pasaman Marama Sejahtera	-	-	-	150.000	-	-	-	-
4.	PT. Sawita Pasaman Jaya	-	-	-	20.000	-	-	-	-
5.	PT. Sari Buah sawit	-	-	-	27.000	-	-	-	-
6.	PT. Berkat Sawit Sejahtera	-	-	-	20.000	-	-	-	-
7.	PT. Andalas Agro Industri	-	-	-	30.000	-	-	-	-
Kab. Pesisir Selatan									
A	Industri :								
1.	Kimia Dasar	-	-	20.000		-	-	-	-
2.	Mesin dan Logam Dasar	-	-	8.000		7.000	-	-	-
3.	Industri Kecil	-	-	75.235		60.000	-	-	-
4.	Aneka Industri	34.470	-	21.000		137.000	-	-	-
B	Rumah Tangga :	7.802.280	-	-		2.828.832	-	-	-

Keterangan : -

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, 2016

Tabel – 32. Penjualan Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mobil Beban	0	0	0	0
2.	Penumpang Pribadi	0	0	0	0
3.	Penumpang Umum	202	275	17	31
4.	Bus Besar Pribadi	3	12	4	13
5.	Bus Besar Umum	20	7	6	48
6.	Bus Kecil Pribadi	33	29	24	72
7.	Bus Kecil Umum	49	43	49	56
8.	Truk Besar	2.233	1.729	1.191	935
9.	Truk Kecil	141	243	193	267
10.	Roda Tiga	-	-	-	-
11.	Roda Dua	7.070	7.990	8.243	2.030

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 32.A. Perbandingan Jumlah Angkutan Umum Berdasarkan Jenis Tahun 2012-2015 Tahun : 2016

No.	Jenis Angkutan Umum	Jumlah Angkutan Umum			
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	1.897	1.888	1.875	1.781
2	Angkutan Antar Kota Luar Provinsi (AKAP)	535	535	525	525

Keterangan : -

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel – 33. Perubahan Penambahan Ruas Jalan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Jenis Jalan	Panjang Jalan (km)		
		2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jalan Tol	-	-	-
2.	Jalan Kelas I	-	-	-
3.	Jalan Kelas II	-	-	-
4.	Jalan Kelas IIIA	-	-	-
5.	Jalan Kelas IIIB	1.230,53	1.230,53	1.230,53
6.	Jalan Kelas IIIC	-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 33.A. Panjang Jalan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Jenis Jalan	Panjang Jalan (km)
(1)	(2)	(3)
1.	Jalan Nasional	1.448,81
2.	Jalan Provinsi	1.017,10

Keterangan : -

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel – 34. Dokumen Izin Lingkungan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	UKL-UPL	Rencana Penambangan Mineral Non Logam/Clay di Nagari Teluk Kabung Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	CV. Putra Idola
2.	UKL-UPL	Rencana Pembangunan Pengamanan Muara dan Pantai Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
3.	UKL-UPL	Rencana Kegiatan Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal Mandeh di Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
4.	UKL-UPL	Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Naras – Sungai Limau Kota Pariaman – Kabupaten Padang Pariaman	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat
5.	AMDAL	Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Muara Kalaban – Muaro Sijunjung di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 34.A. Dokumen Lingkungan (Amdal) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kewenangan (Parsial) Kabupaten/Kota yang Telah Selesai Proses Penilaiannya pada Komisi Penilai Amdal Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Dokumen	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Amdal Rencana Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Luas Areal Pencadangan ± 6.799 Ha) di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung oleh PT. Karbindo Internasional	Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan rencana kegiatan telah diterbitkan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung pada tanggal 18 dan 19 April 2016
2.	Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (Luas 6.083,5 Ha) di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung oleh PT. Oscar Padang Agro Lestari	Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan rencana kegiatan telah diterbitkan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung pada tanggal 8 Januari 2016
3.	Amdal Rencana Pembangunan Islamic Centre Kota Padang Panjang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang	Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan rencana kegiatan telah diterbitkan Pemerintahan Kota Padang Panjang pada tanggal 4 Maret 2016 dan 4 April 2016
4.	Amdal Rencana Pembangunan Main Stadium oleh Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan rencana kegiatan telah diterbitkan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 3 Februari 2016
5.	Amdal Rencana Kegiatan Pembangunan Pasar Pusat Padang Panjang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan rencana kegiatan telah diterbitkan Pemerintahan Kota Padang Panjang pada tanggal 23 Februari 2016
6.	Amdal Rencana Peningkatan Daerah Irigasi Koto Salapan dari luasan 1.673 Ha menjadi 3.570 Ha di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V	Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan rencana kegiatan telah diterbitkan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 26 Agustus 2016
7.	Amdal Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (luas 6.794 Ha) di Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung oleh PT. Surya Padang Khatulistiwa	Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan rencana kegiatan telah diterbitkan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung pada tanggal 14 September 2016
8.	Amdal Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Koto VII dan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung oleh PT. Padang Sumatera Sawindo	Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan rencana kegiatan telah diterbitkan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung pada tanggal 14 September 2016
9.	Amdal Rencana Operasi Produksi Tambang Bijih Tembaga (Luas 6.473 Ha) di Kanagarian Sulit Air, Pasilihan dan Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok oleh PT. Punakawan Sumatera Internasional	Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan rencana kegiatan sedang diproses oleh Pemerintah Kabupaten Solok

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 34.B. Dokumen Lingkungan Dalam Proses Penilaian/Pemeriksaan pada Komisi Penilai Amdal Provinsi Sumatera Barat/Bapedalda Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2016

No.	Jenis Dokumen	Usaha dan/atauKegiatan	ProgressTerakhir
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Amdal	Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (Luas 3.543 Ha) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan oleh PT. Agro Sukses Plantation	Persetujuan Kerangka Acuan telah diterbitkan
2	Amdal	Rencana Kegiatan OperasiProduksi Pertambangan Logam Dasar (Emas) di Kabupaten Solok Selatan oleh PT. Cahaya Selatan Gemilang	Persetujuan Kerangka Acuan telah diterbitkan
3	Amdal	Rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan Ngarai Sianok sepanjang 5.475 m di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Persetujuan Kerangka Acuan telah diterbitkan
4	Amdal	Rencana kegiatan Pembangunan Kampus II IAIN Batusangkar di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar oleh IAIN Batusangkar	Persetujuan Kerangka Acuan telah diterbitkan
5	Amdal	Interkoneksi Daerah Irigasi Batang Pensi di Kabupaten Tanah Datar oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Telah selesai rapat pemeriksaan perbaikan KA (finalisasi dokumen KA oleh konsultan)
6	Amdal	Rencana Pembangunan Hotel dan Shopping Arcade Padang Pariaman City yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman oleh PT. Gerbang Minang Perkasa	Telah selesai rapat pemeriksaan perbaikan KA (finalisasi dokumen KA oleh konsultan)
7	Addendum Andal, RKL-RPL	Addendum Andal dan RKL-RPL Penambahan Kapasitas Pabrik Kelapa Sawit 60 Ton Tbs/Jam Menjadi 120 Ton Tbs/Jam dan Pembangunan <i>Kernel Crushing Plant</i> (Kcp) Kapasitas 400 Ton/Hari di Kabupaten Solok Selatan oleh PT. Binapratama Sakato Jaya Unit Solok Selatan	Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL (pengecekan final setelah rapat pemeriksaan perbaikan)

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 35. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3 di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/ Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RSUD Kota Solok	Kesehatan	Penyimpanan	
2.	RSUD Kota Pariaman	Kesehatan	Penyimpanan	SK Walikota Pariaman No. 389/660/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 RSUD Pariaman
3.	RSUD Dr.Achmad Mukhtar Kota Bukittinggi	Kesehatan	Penyimpanan	SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi No. 04/B3/KLH-BKT/I-2015
4.	RSI Ibnu Sina Padang	Kesehatan	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No. 77 tahun 2015 tanggal 21 September 2015
5.	RS Yos Sudarso	Kesehatan	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No. 42 tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015
6.	RSU Madina Bukittinggi	Kesehatan	Penyimpanan	SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi No. 02/B3/KLH-BKT/V-2013
7.	RS Stroke Nasional Bukittinggi	Kesehatan	Penyimpanan	SK kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi No. 03/B3/KLH-BKT/IX-2015
8.	RSUD Sijunjung	Kesehatan	Penyimpanan	SK Bupati Sijunjung No. 188.45/88/XIII/PTSP/BLHPMPT-2016 tanggal 9 Februari 2016
9.	Pangeran Beach Hotel	Penginapan	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No. 73 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015
10.	Hotel Rocky Bukittinggi	Penginapan	Penyimpanan	SK Kepala Kantor LH Bukittinggi No. 01/B3/KLH-BKT/IV-2015 tanggal 9 April 2015
11.	PT. Japfa Comfeed Indonesia	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No. 379/KEP/BPP/2015 tanggal 28 Oktober 2015
12.	PT. Batang Hari Barisan (PT.BHB)	Industri	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No. 38 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013
13.	PT. Andalas Agro Industri (PT.AAI)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasbar No.188.45/333/BUP-PASBAR/2015
14.	PT. Perkebunan Pelalu Raya	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Agam No : 330 tahun 2015, tanggal 1 oktober 2015
15.	PT. Bakrie Pasaman Plantation	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasaman Barat No. 188.45/861/BUP-PASBAR/2013
16.	PT. Transco Pratama	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No 198.1/230/KPTS-BUP/2013



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	PT. Family Raya	Industri	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No. 48 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015
18.	PT. AMP Plantation	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Agam No 344 Tahun 2015 Tanggal 13 Oktober 2015
		Kebun	Penyimpanan	SK Bupati Agam No 276 Tahun 2013
19.	PT. Kilang V Gunung	Industri	Penyimpanan	SK Bapedalda Kota Padang No 43 Tahun 2015, tanggal 21 Mei 2015
20.	PT. Bina Pratama Sakato Jaya SS	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Solok Selatan No : 660.447-2015
21.	PT. Bina Pratama Sakato Jaya KJ	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No. 189.1/313/KPTS-BUP/2014 tanggal 12 Desember 2014
		Kebun	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No. 189.1/451/KPTS-BUP/2013 tanggal 12 Desember 2013
22.	PT. PN VI (Danau Kembar)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Solok No. 660.113-2013 tanggal 6 Mei 2013
23.	PT. Family Raya	Industri	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No. 48 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015
24.	PT. AMP Plantation	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Agam No 344 Tahun 2015 Tanggal 13 Oktober 2015
		Kebun	Penyimpanan	SK Bupati Agam No 276 Tahun 2013
25.	PT. Kilang V Gunung	Industri	Penyimpanan	SK Bapedalda Kota Padang No 43 Tahun 2015, tanggal 21 Mei 2015
26.	PT. Bina Pratama Sakato Jaya SS	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Solok Selatan No : 660.447-2015
27.	PT. Bina Pratama Sakato Jaya KJ	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No. 189.1/313/KPTS-BUP/2014 tanggal 12 Desember 2014
		Kebun	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No. 189.1/451/KPTS-BUP/2013 tanggal 12 Desember 2013
28.	PT. PN VI (Danau Kembar)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Solok No. 660.113-2013 tanggal 6 Mei 2013
29.	PT. Usaha Inti Padang	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No 201/KEP/BPP/2013
30.	PT. Gersindo Minang Plantation	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasbar No :188.45/383/BUP-PASBAR 2013 tgl 9 April 2013
31.	Mutiara Agam/Minang Agro	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Agam No: 380 Tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014
32.	PT. Pertamina DPPU BIM	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No 257/KEP/BPP/2016
33.	PT. Nusantara Beta Farma	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No 104/Kep/Bup/2016



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	PT. Tidar Kerinci Agung (TKA)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No. 189.1/316/KPTS-BUP/2014 dan No. 660-5-2014
		Kebun	Penyimpanan	SK Bupati Solok Selatan No. 660-5-2014
35.	PT. Coca Cola Botling Indonesia	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No. 660.1/68/Wasdal/KLH-2015
36.	PT. Bintara Tani Nusantara	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasaman Barat No. 188.45/1265/BUP-PASBAR/2013
37.	PT. Limbah Karet	Industri	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No.65 tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015
		Industri	PenyimpananL B3 Terpentin	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No.67 tahun 2015 tanggal 21 Agustus 2015
38.	PT. Teluk Luas	Industri	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No : 44 tahun 2015
39.	PT. Sumbar Andalas Kencana (Pessel)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pessel No.660/25/KLH/BPT-PS/2014
40.	PT. Pasaman Marama Sejahtera	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasaman Barat No.188.45/575/BUP-PASBAR/2014 tanggal 30 Juni 2014
		Kebun	Penyimpanan	SK Bupati Pasaman Barat No.188.45/351/BUP-PASBAR/2014 tanggal 3 April 2014
41.	PT. PN VI (Pasaman Barat)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasaman Barat No. 188.45/781/BUP-PASBAR/2013 tanggal 23 Juli 2013
42.	PT. Agrowiratama	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasbar No.188.45/130/BUP-Pasbar/2014
43.	PT. Kencana Sawit Indonesia	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Solok Selatan No. 660.450-2015
44.	PT. Semen Padang	Industri	Pemanfaatan LB3	SK Kemen LH No 07.22.02 Tahun 2015
			Penyimpanan LB3	SK Kepala Bapedalda Padang No. 47 Tahun 2014
			Penyimpanan LB3 berupa Copper Slag	SK Kepala Bapedalda Padang No. 44 Tahun 2014
			Penyimpanan LB3 berupa Fly Ash	SK Kepala Bapedalda Padang No. 45 Tahun 2014
			Penyimpanan LB3 berupa DCC	SK Kepala Bapedalda Padang No. 40 Tahun 2014
45.	PT. Sinamarinda Lintas Nusantara	Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No. 189.1/450/KPTS-BUP/2013 tanggal 12 Desember 2013



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46.	PT. Allied Indo Coal Jaya	Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK Kepala Kantor PTSP Kota Sawahlunto No. 188.47/01/KPTSPM-SWL/2016 tanggal Mei 2016
47.	PT. PLN (Persero) PLTG Pauh Limo	Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda kota Padang No. 82 tahun 2015 tanggal 21 September 2015
48.	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Ombilin	Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK Walikota Sawahlunto No : 182.2/246/WAKO-SWL/2013
49.	PT. Berkat Sawit Sejahtera	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasbar No.188.45/932/BUP-PASBAR/2015
50.	PT. Incasi Raya Pangan Dharmasraya	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No : 189.1/.315/KPTS-BUP/2014
51.	PT. PLN Unit PLTA Maninjau	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Agam No 343 Tahun 2015 tanggal 18 Oktober 2015
52.	PT. Bukit Raya Mudisa (BRM)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No : 189.1/300/KPTS-BUP/2015
53.	PT. Incasi Raya Pesisir Selatan	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pesisir Selatan No. 660/24/Kpts/BPT-PS/2014
54.	PT. PN VI (Solok Selatan)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Kab Solok Selatan No : 660.113 2013
55.	PT. Kemilau Permata Sawit	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pesisir Selatan No.188.45/490/XIII/PTSP/BLHP MT- 2015
56.	PT. PLN Unit PLTA Batang Agam	Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK DLH Kab. Lima Puluh Kota No 08/BLHKP/2010 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010
57.	PT. PLN Unit PLTA Singkarak	Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No 317/KEP/BPP/2015 Tanggal 7 September 2015
58.	PT. PLN Unit PLTA Maninjau	Pertambangan, Energi dan Mineral	Penyimpanan	SK Bupati Agam No. 343 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015
59.	PT. Karya Agung Megah Utama	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Agam No 266 Tanggal 30 Mei Tahun 2013
60.	PT. Incasi Raya Edible Oils	Industri	Penyimpanan	SK Kepala Bapedalda Kota Padang No 52 tahun 2014
61.	PT. Primatama Muliajaya	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasaman Barat No. 188.45/127/BUP-Pasbar/2013
62.	PT. Abaisiat Raya	Industri	Penyimpanan	SK N0 46 tahun 2015 masa berlaku : 25 Mei 2015-25 Mei 2020
63.	PT. Usaha Sawit Mandiri	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasbar No. 188.45/365/BUP-PASBAR/2016
64.	PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Pasbar No 188.45/265/BUP-PASBAR/2013



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65.	PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi-Sumbar	Industri	Penyimpanan	SK Bupati kab Solok Selatan No : 660.113 2013
66.	PT. Bumi Sarimas Indonesia	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Padang Pariaman No 104/KEP/BPP/2016
67.	PT. Tirta Investama	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Solok No : 440-208-2015 tanggal 10 April 2015
68.	PT. Selago Makmur Plantation (Pabrik)	Industri	Penyimpanan	SK Bupati Dharmasraya No : 189.1/304/KPTS-BUP/2016

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 35.A. Perusahaan Pengumpul dan Pengangkut Limbah B3 Yang Melakukan Kerja Sama di Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Izin	Limbah B3	Perusahaan Yang Melakukan Kerjasama di Sumatera Barat
1.	PT. Multazam	Makassar, Sulawesi Selatan	Pengumpul	Olibekas, pelumas bekas, aki bekas, minyak pelumas	RSUP M.Djamil
			Pengangkut	Minyak pelumas bekas, solvent bekas, residu dasar tangki dari pengolahan oli, Sludge IPAL dari industri	
2.	PT. Shali Riau Lestari	Payung Sekaki, Pekanbaru	Pengumpul	Minyak pelumas bekas	PT. Kencana Sawit Indonesia
			Pengangkut	Aki bekas, solvent bekas, coolant bekas, sludge minyak, sisa bahan lainnya, bahan kimia kadaluarsa, logam terkontaminasi	PT. Usaha Inti Padang
					PT. Gersindo Minang Plantation
PT. AMP Plantation					
3.	PT. Prima Jaya	Manggalegok, Tangerang	Pengumpul	Oli bekas/ pelumas bekas Minyak kotor/ slop oil sludge oil ,aki bekas	PT. Agro Wiratama
			Pengangkut	IPAL Industry, lampu TL bekas, copper slag, tanah terkontaminasi	
4.	PT. Horas Miduk	Serang Baru, Bekasi	Pengumpul	Oli bekas, minyak kotor, oil sludge, slope oil, bottom residue, grease bekas, filter oil bekas	PT. Lembahkaret
					PT. Kilang lima Gunung
					PT. Family Raya
5.	PT. BioTekhnika		Pengangkut		

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 36. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)) di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	RSUD Achmad Darwis Kab. 50 Kota	25-26 Jan 2016	40%
2.	RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh	25-26 Jan 2016	50%
3.	RSUD Kabupaten Pasaman	1-2 Maret 2016	40%
4.	RSUD Arosuka Kabupaten Solok	3-4 Maret 2016	40%
5.	RSUD Kabupaten Solok Selatan	10-11 Maret 2016	40%
6.	RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya	10-11 Maret 2016	10%
7.	RSIA Fadhila Kabupaten Tanah Datar	17-18 Maret 2016	30%
8.	PT. Incasi Raya Pangian Dharmasraya	22-23 April 2016	100%
9.	PT. Sumbar Andalas Kencana Dharmasraya	2-3 Mei 2016	100%
10.	RSUD Mentawai	18-20 Juli 2016	10%
11.	RSI Ibnu Sina Kota Bukittinggi	27-28 Sept 2016	70%
12.	RSUD Kota Sawahlunto	10-11 Nov 2016	50%
13.	RSUD Kota Padang Panjang	23-24 Nov 2016	70%
14.	RSU Madina Kota Bukittinggi	25-26 Nov 2016	100%
15.	RSUD Sijunjung	25-26 Nov 2016	70%
16.	RSUD Kota Solok	28-29 Nov 2016	70%
17.	RSUD M.Zein Kab. Pesisir Selatan	1-2 Des 2016	60%
18.	TPA Regional Kota Payakumbuh	14-15 Nov 2016	80%
19.	Jalan Raya by Pass	Juni 2016	60%
20.	PT. Peconina di Kab. Solok Selatan	20-21 Mei 2016	20%
21.	PT. Sumatera Jaya Agro Lestari di Kab. Pesisir Selatan	15-16 Agustus 2016	37,50%
22.	PT. Gasindo Abadi Semesta (SPPBE untuk tabung LPG 12 kg dan 50 kg	17-18 Mei 2016	40%
23.	PT. Pratama Abadi Semesta (SPPBE untuk tabung LPG 3 kg	17-18 Mei 2016	40%
24.	PT. Pratama Abadi Semesta (SPPBE untuk retest, repair dan repaint plant tabung LPG 3 kg	17-18 Mei 2016	60%
25.	PT. Gasindo Abadi Semesta (SPPBE untuk retest, repair, dan repaint plant tabung LPG 12 kg dan 50 kg	17-18 Mei 2016	60%

Keterangan : Realisasi berdasarkan pengawasan perizinan pengelolaan limbah cair, limbah B3, sampah dan dokumen lingkungan
 Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel - 36.A. Hasil Pengawasan Objek PROPER di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Izin Lingkungan	PPA	PPU	PLB3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PT. Pasaman Marama Sejahtera Kabupaten Pasaman Barat	28-30 April 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
2.	PT. Bintara Tani Nusantara, Pasaman Barat	28-30 April 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
3.	PT. Kemilau Permata Sawit, Sijunjung	28 s/d 29 April 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
4.	PT. Incasi Raya Pangian POM, Dharmasraya	2 s/d 4 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
5.	PT Bina Pratama Sakato Jaya, Dharmasraya	2 s/d 4 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
6.	PT . Usaha Inti Padang	3 s/d 4 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
7.	PT. Tirta Investama Pabrik Solok	9 s/d 10 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
8.	PT. Tidar Kerinci Agung, Dharmasraya	9 s/d 11 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
9.	PT. Bakrie Pasaman Plantation, Pasaman Barat	9 s/d 11 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
10.	PT. Family Raya, Padang	11 s/d 12 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
11.	PT. PLN Maninjau, Agam	12 s/d 13 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
12.	PT. Kencana Sawit Indonesia, Solok Selatan	12 s/d 14 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
15.	PTPN VI Ophir, Pasaman Barat	16 s/d 18 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
16.	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, Padang Pariaman	16 s/d 17 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
17.	PT. Teluk Luas, Padang	17 s/d 18 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
18.	PT. Mutiara Agam, Agam	17 s/d 18 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
19.	PT. Nusantara Beta Farma, Padang Pariaman	19 s/d 20 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
20.	PT. Lembah Karet, Padang	19 s/d 20 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
23.	PT. AIC Jaya, Sawahlunto	23 s/d 24 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
24.	PT. Batanghari Barisan	23 s/d 24 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
26.	PT. AMP Plantation, Agam	25 s/d 26 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
28.	PT. Kilang Lima Gunung, Padang	26 s/d 27 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
29.	PT. Mitra Kerinci Solok Selatan	26 s/d 28 Mei 2016	Taat	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat
31.	PT. PLN Pembangkit Pauh Limo	30 s/d 31 Mei 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
32.	PT. Bara Mitra Kencana, Sawahlunto	1 s/d 2 Juni 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
34.	PTPN VI Unit Usaha Solok Selatan	1 s/d 3 Juni 2016	Taat	Taat	Taat	Taat
40.	PT. Sinamarinda Lintas Nusantara	13 s/d 15 Juni 2016	Tidak Taat	Taat	Taat	Tidak Taat

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 37. Bencana Banjir, Korban dan Kerugian di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Kabupaten/Kota	Total Area Terendam (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
			Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kota Padang	348	0	2	45.820.449.680
2.	Kota Padang Panjang	0	0	0	0
3.	Kota Bukittinggi	6	0	0	21.500.000
4.	Kota Solok	-	176	0	1.300.000.000
5.	Kota Pariaman	270	0	0	10.000.000
6.	Kota Payakumbuh	141,25	2.052	0	901.070.000
7.	Kota Sawahlunto	-	0	1	0
8.	Kabupaten Dharmasraya	115	636	0	1.400.000.000
9.	Kabupaten Agam	-	4	0	180.000.000
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	118	200	0	646.500.00
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	1.626	7.400	1	79.645.000.000
12.	Kabupaten Pasaman	847	3.033	0	32.521.234.000
13.	Kabupaten Pasaman Barat	0	0	0	0
14.	Kabupaten Solok	5	1.761	0	3.885.650.000
15.	Kabupaten Sijunjung	238,5	129	0	901.000.000
16.	Kabupaten Padang Pariaman	-	823	1	30.000.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	2.295	6.318	7	103.000.000.000
18.	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel - 37.A. Perbandingan Peristiwa Banjir antara 2013 s/d 2016 di Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Total Area Terendam (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)	Total Area Terendam	Perkiraan Kerugian (Rp)	Total Area Terendam (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)	Total Area Terendam (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
1	Kota Padang	0	0	0	0	156	2.110.500.000	348	45.820.449.680
2	Kota Padang Panjang	-	-	6	-	-	-	0	0
3	Kota Bukittinggi	6,75	40.000.000	0	-	5,85	65.000.000	6	21.500.000
4	Kota Solok	20	70.000.000	6	1.980.000.000	457,07	-	-	1.300.000.000
5	Kota Pariaman	-	-	-	-	0	0	270	10.000.000
6	Kota Payakumbuh	43,99	22.050.000	-	-	34	49.500.000	141,25	901.070.000
7	Kota Sawahlunto	3	-	-	-	-	-	-	0
8	Kabupaten Dharmasraya	95	1.011.550.000	30	500.000.000	2	900.000	115	1.400.000.000
9	Kabupaten Agam	167	14.791.760.000	9	490.000.000	6	.733.000.000	-	180.000.000
10	Kabupaten Pesisir Selatan	25	4.447.500.000	-	2.081.000.000	3.369	-	118	646.500.00
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	765	5.150.000.000	187,5	18.025.000	-	-	1.626	79.645.000.000
12	Kabupaten Pasaman	870,95	4.407.560.000	20	-	415	415.000.000	847	32.521.234.000
13	Kabupaten Solok	0	203.350.000	16	203.350.000	-	-	0	0
14	Kabupaten Pasaman Barat	-	6.896.250.000	9,75	5.368.650.000	22	559.000	5	3.885.650.000
15	Kabupaten Sijunjung	72,06	56.500.000	10	438.700.000	40	1.062.350.000	238,5	901.000.000
16	Kabupaten Padang Pariaman	23,5	195.000.000	42,5	4.285.000.000	34,56	210.000.000	-	30.000.000
17	Kabupaten Solok Selatan	110	4.400.000.000	-	1.000.000.000	-	-	2.295	103.000.000.000
18	Kabupaten Tanah datar	-	1.060.000.000	-	-	-	-	-	-
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	98.947,80	-	-	-	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 38. Bencana Kekeringan, Luas dan Kerugian di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Kabupaten/Kota	Total Area (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Padang	-	-
2.	Kota Padang Panjang	-	-
3.	Kota Bukittinggi	-	-
4.	Kota Solok	-	-
5.	Kota Pariaman	-	-
6.	Kota Payakumbuh	-	-
7.	Kota Sawahlunto	-	-
8.	Kabupaten Dharmasraya	-	-
9.	Kabupaten Agam	-	-
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-
12.	Kabupaten Pasaman	-	-
13.	Kabupaten Pasaman Barat	-	-
14.	Kabupaten Solok	-	-
15.	Kabupaten Sijunjung	-	-
16.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-
17.	Kabupaten Solok Selatan	-	-
18.	Kabupaten Tanah Datar	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-

Keterangan : Tidak terjadi bencana kekeringan selama tahun 2016

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 39. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas dan Kerugian di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016

No	Kabupaten/Kota	Perkiraan Luas Hutan/Lahan Terbakar (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Padang	13,00	81.200.000
2.	Kota Padang Panjang	-	-
3.	Kota Bukittinggi	0,68	71.000.000
4.	Kota Solok	7,00	-
5.	Kota Pariaman	0,00	-
6.	Kota Payakumbuh	8,00	4.000.000
7.	Kota Sawahlunto	20,00	-
8.	Kabupaten Dharmasraya	39	1.680.000.000
9.	Kabupaten Agam	-	-
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	300,00	-
12.	Kabupaten Pasaman	266,00	1.400.000.000
13.	Kabupaten Pasaman Barat	154,00	-
14.	Kabupaten Solok	30,00	-
15.	Kabupaten Sijunjung	7,50	-
16.	Kabupaten Padang Pariaman	-	-
17.	Kabupaten Solok Selatan	-	-
18.	Kabupaten Tanah Datar	-	-
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada kebakaran hutan dan kerugian

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2016



**Tabel - 39.A. Jumlah Hotspot Pada Kejadian Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Kota Padang	1
2.	Kota Padang Panjang	0
3.	Kota Bukittinggi	0
4.	Kota Solok	0
5.	Kota Pariaman	0
6.	Kota Payakumbuh	1
7.	Kota Sawahlunto	1
8.	Kabupaten Dharmasraya	59
9.	Kabupaten Agam	1
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	56
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	26
12.	Kabupaten Pasaman	73
13.	Kabupaten Pasaman Barat	19
14.	Kabupaten Solok	9
15.	Kabupaten Sijunjung	19
16.	Kabupaten Padang Pariaman	0
17.	Kabupaten Solok Selatan	20
18.	Kabupaten Tanah Datar	0
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2

Keterangan : -

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 40. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, Kerugian di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah Korban Meninggal (Jiwa)	Perkiraan Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Padang	-	-	-
2.	Kota Padang Panjang	Tanah Longsor	0	0
3.	Kota Bukittinggi	Gempa Bumi	0	0
		Tanah Longsor	1	0
4.	Kota Solok	Tanah Longsor	0	0
5.	Kota Pariaman	-	-	-
6.	Kota Payakumbuh	-	-	-
7.	Kota Sawahlunto	Tanah Longsor	0	0
8.	Kabupaten Dharmasraya	Tanah Longsor	0	0
9.	Kabupaten Agam	Tanah Longsor dan gempa	1	0
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	Gempa Bumi	0	0
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tanah Longsor	0	0
12.	Kabupaten Pasaman	Tanah Longsor dan gempa	0	0
13.	Kabupaten Pasaman Barat	Gempa Bumi	0	0
14.	Kabupaten Solok	Tanah Longsor	0	0
15.	Kabupaten Sijunjung	Tanah Longsor	0	0
16.	Kabupaten Padang Pariaman	Tanah Longsor	0	0
17.	Kabupaten Solok Selatan	Tanah Longsor	6	0
18.	Kabupaten Tanah Datar	Tanah Longsor dan gempa	0	0
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tanah Longsor dan gempa	0	0

Keterangan : (-) Tidak terjadi bencana alam di Tahun 2016

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2016



**Tabel - 40.A. Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

1. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Provinsi Sumatera Barat

No	Kerentanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)	Tutupan Lahan Vegetasi (Ha)	Tutupan Lahan Area Terbangun (Ha)	Tutupan Lahan Tanah Terbuka (Ha)	Tutupan Lahan Badan Air (Ha)
1.	Sangat Rendah	832.800,00	796.485,50	26.480,00	538,50	9.296,00
2.	Rendah	1.017.000,00	996.355,10	14.070,00	37,90	6.537,00
3.	Menengah	1.291.000,00	1.282.689,69	4.933,00	4,31	3.373,00
4.	Tinggi	460.700,00	457.351,18	2.126,00	1,82	1.221,00

2. Kawasan Yang Terletak Pada Zona Patahan

No	Segmen	Luas (Ha)	Tutupan Lahan Vegetasi (Ha)	Tutupan Lahan Area Terbangun (Ha)	Tutupan Lahan Tanah Terbuka (Ha)	Tutupan Lahan Badan Air (Ha)
1.	Segmen Sumpur	66.570,00	66.178,90	248,70	-	142,40
2.	Segmen Sianok	102.000,00	96.646,60	4.499,00	-	854,40
3.	Segmen Sumani	117.500,00	103.921,00	2.459,00	-	11.120,00
4.	Segmen Suliti	228.700,00	225.237,00	1.013,00	-	2.450,00

3. Kawasan Rawan Tsunami

No	Zona Kerawanan	Luas (Ha)	Tutupan Lahan Vegetasi (Ha)	Tutupan Lahan Area Terbangun (Ha)	Tutupan Lahan Tanah Terbuka (Ha)	Tutupan Lahan Badan Air (Ha)
1.	Zona Kerawanan Tinggi	53.410,00	49.416,00	2.607,00	-	1.387,00
2.	Zona Kerawan Menengah	56.530,00	53.092,20	2.895,00	-	542,80
3.	Zona Kerawanan Rendah	75.390,00	72.026,50	2.805,00	-	558,50

4. Kawasan Rawan Gempa Bumi

No	Zona Kerawanan	Luas (Ha)	Tutupan Lahan Vegetasi (Ha)	Tutupan Lahan Area Terbangun (Ha)	Tutupan Lahan Tanah Terbuka (Ha)	Tutupan Lahan Badan Air (Ha)
1.	Zona Kerawanan Tinggi	1.558.000,00	1.511.040,00	19.810,00	-	27.150,00
2.	Zona Kerawan Menengah	2.331.000,00	2.293.288,70	25.720,00	571,3	11.420,00
3.	Zona Kerawanan Rendah	362.300,00	357.242,00	1.906,00	-	3.152,00

Keterangan : -

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 40.B. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Kawasan	Luas (Ha)	Tutupan Lahan Vegetasi (Ha)	Tutupan Lahan Area Terbangun (Ha)	Tutupan Lahan Tanah Terbuka (Ha)	Tutupan Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Gunung Marapi					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	23.440,00	23.260,77	176,00	-	3,23
2.	Kawasan Rawan Bencana II	6.637,00	6.637,00	-	-	-
3.	Kawasan Rawan Bencana III	9.820,00	9.820,00	-	-	-
II.	Gunung Tandikat					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	13.100,00	12.963,67	115,50	-	20,83
2.	Kawasan Rawan Bencana II	6.848,00	6.848,00	-	-	-
3.	Kawasan Rawan Bencana III	1.267,00	1.267,00	-	-	-
III.	Gunung Talang					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	23.290,00	21.780,70	442,30	-	1.067,00
2.	Kawasan Rawan Bencana II	6.470,00	6.245,69	70,71	-	153,60
3.	Kawasan Rawan Bencana III	1.272,00	1.272,00	-	-	-
IV.	Gunung Kerinci					
1.	Kawasan Rawan Bencana I	12.070,00	12.056,54	1,50	-	11,96
2.	Kawasan Rawan Bencana II	3.957,00	3.957,00	-	-	-
3.	Kawasan Rawan Bencana III	937,50	937,50	-	-	-

Keterangan : -

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 41. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kota Padang	694,96	927.011	1,32	1.334
2.	Kota Padang Panjang	23,00	52.422	1,37	2.279
3.	Kota Bukittinggi	25,24	126.804	1,68	5.024
4.	Kota Solok	57,64	68.602	1,92	1.190
5.	Kota Pariaman	73,36	88.502	1,23	1.247
6.	Kota Payakumbuh	80,43	131.819	1,55	1.639
7.	Kota Sawahlunto	273,45	61.398	1,02	225
8.	Kabupaten Dharmasraya	2.961,13	235.476	2,69	80
9.	Kabupaten Agam	2.232,30	484.288	0,74	217
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	5.794,95	457.285	0,76	79
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.354,30	376.072	0,94	112
12.	Kabupaten Pasaman	3.947,63	275.728	1,07	70
13.	Kabupaten Pasaman Barat	3.887,77	427.295	2,03	110
14.	Kabupaten Solok	3.738,00	368.691	0,68	99
15.	Kabupaten Sijunjung	3.130,80	230.104	1,68	73
16.	Kabupaten Padang Pariaman	1.328,79	411.003	0,59	309
17.	Kabupaten Solok Selatan	3.346,20	165.603	1,77	49
18.	Kabupaten Tanah Datar	1.336,00	346.578	0,25	259
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	6.011,35	88.692	1,97	15

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2016



**Tabel - 41.A. Perbandingan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2014 s/d 2016 di
Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Penduduk (%)		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Padang	1,47	1,44	1,32
2	Kota Padang Panjang	1,36	1,39	1,37
3	Kota Bukittinggi	1,89	1,74	1,68
4	Kota Solok	6,88	2,01	1,92
5	Kota Pariaman	1,18	1,32	1,23
6	Kota Payakumbuh	1,65	1,67	1,55
7	Kota Sawahlunto	1,08	1,01	1,02
8	Kabupaten Dharmasraya	2,96	2,86	2,69
9	Kabupaten Agam	0,86	0,82	0,74
10	Kabupaten Pesisir Selatan	0,86	0,83	0,76
11	Kabupaten Lima Puluh Kota	1,04	0,99	0,94
12	Kabupaten Pasaman	1,16	1,12	1,07
13	Kabupaten Pasaman Barat	2,22	2,17	2,03
14	Kabupaten Solok	-0,11	0,72	0,68
15	Kabupaten Sijunjung	1,88	1,78	1,68
16	Kabupaten Padang Pariaman	0,66	0,64	0,59
17	Kabupaten Solok Selatan	1,92	1,85	1,77
18	Kabupaten Tanah Datar	0,29	0,26	0,25
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,15	2,03	1,97

Keterangan : -

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2016



**Tabel – 42. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (kg/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Padang	927.011	494.000
2.	Kota Padang Panjang	52.422	50.450
3.	Kota Bukittinggi	126.804	183.000
4.	Kota Solok	68.602	55.580
5.	Kota Pariaman	86.618	25.985
6.	Kota Payakumbuh	131.819	44.970
7.	Kota Sawahlunto	61.398	45.000
8.	Kabupaten Dharmasraya	235.476	157.653
9.	Kabupaten Agam	484.288	145.286
10.	Kabupaten Pesisir Selatan	457.285	155.639
11.	Kabupaten Lima Puluh Kota	376.072	112.822
12.	Kabupaten Pasaman	275.728	162.250
13.	Kabupaten Pasaman Barat	427.295	162.175
14.	Kabupaten Solok	368.691	224.868
15.	Kabupaten Sijunjung	230.104	69.031
16.	Kabupaten Padang Pariaman	411.003	123.301
17.	Kabupaten Solok Selatan	165.603	49.681
18.	Kabupaten Tanah Datar	346.578	103.973
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	88.692	26.608

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 42.A. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah yang masuk ke TPA Sampah per Hari di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah (kg/hari)
(1)	(2)	(4)
1.	TPA Reg Payakumbuh	150.390
	Kota Bukittinggi	110.000
	Kota Payakumbuh	22.390
	Kabupaten 50 Kota	8.000
	Kabupaten Agam	10.000
2.	TPA Reg Solok	50.030
5.	Kota Solok	40.030
6.	Kabupaten Solok	10.000
3.	TPA Aia Dingin Padang	323.000
4.	TPA Sungai Andok Padang Panjang	39.900
5.	TPA Sawahlunto	38.000
6.	TPA Gunung Bungkok Pesisir Selatan	15.558
7.	TPA Koto Tangah Pasaman	12.000
8.	TPA Bukit Sangkiang Tanah Datar	39.170

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



**Tabel - 42.B. Perkiraan Timbulan Sampah Menurut Sumber di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga (kg/hari)	Kantor (kg/hari)	Pasar Tradisional (kg/hari)	Pusat Perniagaan (kg/hari)	Fasilitas Publik (kg/hari)	Kawasan (kg/hari)	Lainnya (kg/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kota Padang	142.650	22.260	80.000	44.500	21.200	21.000	20.000
2.	Kota Padang Panjang	26.740	1.450	7.340	2.720	9.880	60	2.260
3.	Kota Bukittinggi	67.000	16.000	44.000	21.000	18.000	15.000	0
4.	Kota Solok	31.210	3.700	8.190	2.850	2.270	2.030	5.330
5.	Kota Payakumbuh	32.090	1.640	4.240	3.040	3.100	270	590
6.	Kota Sawahlunto	15.000	1.000	7.500	3.000	5.000	10.000	3.500
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	60	10	14.600	2.800	90	3.400	3.000
8.	Kabupaten Pasaman	13.940	320	2.070	420	200	1.200	200
9.	Kabupaten Tanah Datar	32.000	1.040	1.690	3.380	500	0	1.830

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel - 42.C. Perkiraan Sampah Terolah Harian di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Kabupaten/Kota	Komposting (kg/hari)	Daur ulang untuk bahan baku (kg/hari)	Daur ulang untuk produk kreatif (kg/hari)	Bahan Bakar, RDF (kg/hari)	Dikelola Bank Sampah (kg/hari)	Daur ulang menjadi biogas (kg/hari)	Lainnya (kg/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kota Padang	350	100	10	10.000	100	160.570	0
2.	Kota Padang Panjang	6.930	400	10	0	40	0	650
3.	Kota Bukittinggi	11.000	49.000	6.000	0	7.000	0	0
4.	Kota Solok	4.110	2.500	300	0	1.520	0	0
5.	Kota Payakumbuh	15.060	3.420	620	0	3.480	0	0
6.	Kota Sawahlunto	3.000	0	1.000	0	2.000	0	0
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	5.000	2.400	2	0	1.000	0	0
8.	Kabupaten Pasaman	30	10.000	10	0	40	0	0
9.	Kabupaten Tanah Datar	760	500	0	0	10	0	0

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



**Tabel - 42.D. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Kabupaten/Kota	Gerobak Sampah (unit)	Gerobak Motor Sampah (unit)	Truk Terbuka (unit)	Dump Truck (unit)	Arm Roll (unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kota Padang	249	33	0	42	29
2.	Kota Padang Panjang	50	13	3	9	2
3.	Kota Bukittinggi	48	23	0	14	2
4.	Kota Solok	8	17	0	13	5
5.	Kota Payakumbuh	91	33	1	18	1
6.	Kota Sawahlunto	22	17	0	3	4
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	16	23	0	14	7
8.	Kabupaten Pasaman	0	14	1	2	4
9.	Kabupaten Tanah Datar	20	1	0	5	2

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



**Tabel – 43. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemeriksaan Kualitas Air Fisik, Kimia, Bakteriologis	18 Kab/Kota	Dinas Kesehatan Kab/Kota
2.	Pembangunan Embung Taratak	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
3.	Pembangunan Embung Salido	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
4.	Pembangunan Embung Payo Talao	Kab. Sijunjung	Dinas PSDA Prov. Sumbar
5.	Pembangunan Embung Kandih Bukik Kandung	Kab. Solok	Dinas PSDA Prov. Sumbar
6.	Rehabilitasi Jetty Banjir Kanal Pantai Purus	Kota Padang	Dinas PSDA Prov. Sumbar
7.	Operasi & Pemeliharaan Sungai Balai PSDA Sungai Dareh	Wil. Sungai Dareh	Dinas PSDA Prov. Sumbar
8.	Operasi & Pemeliharaan Sungai Balai PSDA Bukittinggi	Wil. Bukittinggi	Dinas PSDA Prov. Sumbar
9.	Pembangunan Chekdam Batang Malana	Kab.Tanah Datar	Dinas PSDA Prov. Sumbar
10.	Pembangunan Chekdam Batang Timbalun	Kota Padang	Dinas PSDA Prov. Sumbar
11.	Pembangunan Chekdam Sei.Tanuik Barung-Baruang Belantai	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
12.	Pembangunan Grounsill Batang Agam Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Dinas PSDA Prov. Sumbar
13.	Pengendalian Muara Batang Maligi	Kab.Pasaman Barat	Dinas PSDA Prov. Sumbar
14.	Monitoring Kualitas Air/Lingkungan SDA	Wil. Sumatera Barat	Dinas PSDA Prov. Sumbar
15.	Pengendalian Banjir Batang Pasaman	Kab.Pasaman Barat	Dinas PSDA Prov. Sumbar
16.	Normalisasi Sungai Batang Pulakek, Kecamatan Pauh Duo	Kab. Solok Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
17.	Penguatan Tebing Ma.Tanjung Mukapeh Sumedang	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
18.	Penguatan Tebing Bt.Bayang Sani Kapeh Panji Pes.Selatan	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
19.	Penguatan Tebing Sungai Bt.Kapas Pes.Selatan	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
20.	Penguatan Tebing Bt.Bayang Kp.Ganting Sw.Laweh Pes.Selatan	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
21.	Penguatan Tebing Bt.Tapan, Kec.Tapan Pes.Selatan	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
22.	Penguatan Tebing Bt.Indrapura, Kec.Air Pura Pes.Selatan	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
23.	Penguatan Tebing Bt.Bayang,Nag.Kapelgam Pes.Selatan	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar



(1)	(2)	(3)	(4)
24.	Normalisasi Sungai Banda Luruih Kota Padang	Kota Padang	Dinas PSDA Prov. Sumbar
25.	Penguatan Tebing Btg Byg Sani Ken. Kapeh Panji Pes Sel	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
26.	Penguatan Sei.Btg Bayang Kampung Ganting Pes.sel	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
27.	Penguatan Tebing Btg Bayang Nag. Kapelgam Pes.sel	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
28.	Penguatan Tebing Sei. Batang Kapas Kec.Batang Kapas Pesel	Kab.Pesisir Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
29.	Normalisasi Sei. Btg Pulakek Kec. Pauh Duo	Kab. Solok Selatan	Dinas PSDA Prov. Sumbar
30.	Operasional & Pemeliharaan Embung Balai PSDA Bukittinggi	Wil. Bukittinggi	Dinas PSDA Prov. Sumbar
31.	Operasional & Pemeliharaan Embung Balai PSDA Sei. Dareh	Wil. Sungai Dareh	Dinas PSDA Prov. Sumbar
32.	Pemeliharaan jalan, irigasi dan jembatan	Kab/Kota di Sumatera Barat	Dinas Prasjal Tarkim Prov. Sumbar
33.	Rehabilitasi drainase	Ruas Jl. Panti Simpang Empat Kab. Pasaman Barat Dan Kab. Pasaman	Dinas Prasjal Tarkim Prov. Sumbar
		Ruas Jl. Manggopo Padang Lua Kab. Agam	
		Ruas Jl. Baso Batusangkar	
		Ruas Jl. Indrapura Muara Sakai	
		Ruas Jl. Alahan Panjang Kiliran Jao	
		Ruas Jl. Tanjung Ampalu Sijunjung	
		Ruas Jl.Koto Baru Tanjung Simalidu	
34.	Pembangunan sumber air baku dan pipa transmisi	Batang Tabik Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Prasjal Tarkim Prov. Sumbar
35.	Peningkatan infrastruktur TPA sampah regional	TPA Regional Solok	Dinas Prasjal Tarkim Prov. Sumbar
36.	Pengendalian dan pengelolaan TPA sampah regional	TPA Regional Payakumbuh dan Solok	Dinas Prasjal Tarkim Prov. Sumbar

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 43.A. Kegiatan Penanaman Bibit Bambu di Beberapa Nagari oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Nagari	Jumlah Bibit Bambu (Batang)
(1)	(2)	(3)
1.	Nagari VII KotoTalago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota	250
2.	Nagari Parik Panjang Kabupaten Agam	250
3.	Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman	500
	Jumlah	1.000

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 44. Status Pengaduan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Surat Ka. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Prov. Sumbar No.540/508/MBPA/DESDM-2016 Tanggal 21 Maret 2016 Perihal Penyelesaian Permasalahan Reklamasi Lahan Bekas Tambang PT. Sinamar Lintas Nusantara	Permasalahan Reklamasi Lahan Bekas Tambang PT. Sinamar Lintas Nusantara	PT. SLN dan PT. KUD Sinamar sepakat akan menyiapkan dan menandatangani MoU terkait dengan pemanfaatan overboden dari PT. KUD Sinamar akan dimanfaatkan sebagai penutupan lubang bekas tambang di PT. SLN.
2.	Surat Ka. Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Pasaman Barat No. 660/86/Wsd/BLHKP-2016 Tanggal 8 Maret 2016 perihal Hasil Verifikasi Tindak Lanjut Kasus /Pengaduan Masyarakat Jorong Kampung Masjid	Pencemaran Sungai Batang Taming Kocik akibat limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) yang beralamat di Kecamatan Ranto Baik kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara	Telah dilakukan pertemuan ditingkat KLHK secara terkoordinasi yang melibatkan dua Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 s/d 28 April 2016. Telah dilakukan verifikasi lanjutan secara terkoordinasi antara KLHK, Bapedalda Prov. Sumbar dan BLH Kab. Pasabar pada tanggal 13 s/d 15 September 2016 dan direncanakan akan dilakukan pertemuan yang akan difasilitasi oleh KLHK antara masyarakat Jorong Kampung Masjid dengan perusahaan (PT. TBS)
3.	Ka. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan No. 660/107/TL-PHL/BLH-PS/IV/2016 Tanggal 20 April 2016 perihal Mohon Pendampingan Klarifikasi dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat Kampung Rimbo Panjang Kecamatan Pancung Soal	Masyarakat Kampung Rimbo Panjang menyatakan “Tidak Setuju” berdirinya usaha industri Pemecah Batu (stone crusher)	Telah dilakukan verifikasi lapangan pada tanggal 25 /d 26 April 2016 dan telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan hasil verifikasi lapangan ke BLH Kab. Pesisir Selatan melalui surat No 660/426/TLPHL/BPDL-2015 tanggal 17 April 2015 perihal Tindak Lanjut Verifikasi dan Klarifikasi.
4.	Perwakilan Masyarakat Nagari Parit Melintang Kecamatan Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman No.540/844/N-PM/VI-2016 tanggal 22 Juni 2016 perihal Laporan Penambangan Tanah Urug Galian C dalam wilayah Nagari Parit Malintang	Penambangan Tanah Urug Galian C dalam wilayah Nagari Parit Malintang	Menyampaikan Mohon Segera Dilakukan Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan ke KLH Kab. Pasaman Barat melalui surat Ka. Bapedalda Prov. Sumbar No. 660/696/TLPHL-BPLD-2016 tanggal 28 Juli 2016 perihal Mohon Segera Dilakukan Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan



(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Peristiwa musibah ledakan dilokasi penambangan PT. NAL	Peristiwa musibah ledakan dilokasi penambangan PT. NAL	Murni Kecelakaan Tambang berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Inspektur Tambang Dinas ESDM Prov. Sumbar.
6.	Surat Ka. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kab. Pasaman Barat No.05/Pengurus/AWPI DPC PSB/VI-2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditujukan kepada Ka. Polres Pasaman Barat dengan tembusan disampaikan kepada Bapedalda Prov. Sumbar perihal Laporan Polisi	Dugaan pencemaran lingkungan Sungai Batang Siduampan akibat bocornya kolam limbah tiga pabrik kelapa sawit tersebut yang melebihi kapasitas sehingga berdampak matinya ikan larangan masyarakat di Jorong Simpang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka	Melakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan secara terkoordinasi dengan BLHKP Kab. Pasaman Barat pada tanggal 3 s/d 5 Agustus 2016
	Laporan oleh Ketua DPC AWPI ke Kapolres Pasaman Barat terkait dengan Laporan Pengaduan Wartawan Tabloid Integritas pada tanggal 17 Juni 2016 An. Samsuriman anggota AWPI No. KTA NRP/KTA.KI-13-077/C-011-DPC yang dihalang-halangi oleh pihak perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT. Usaha Sawit Mandiri (PT. USM) saat melaksanakan liputan tugas jurnalistik atas dugaan pencemaran lingkungan Sungai Batang Siduampan akibat bocornya kolam limbah tiga pabrik kelapa sawit tersebut yang melebihi kapasitas sehingga berdampak matinya ikan larangan masyarakat di Jorong Simpang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2016		
7.	Surat Ninik Mamak Kampung Parit Lubang tanggal 8 Juni 2016 yang ditujukan ke Bupati Pasaman dengan tembusan disampaikan ke Bapedalda Prov. Sumbar.	Pengaduan Ninik Mamak Kampung Parit Lubang berkaitan dengan pembangunan Intek PDAM yang mempengaruhi kepala banda (pintu air irigasi) untuk mengaliri hamparan sawah seluas ± 150 Ha.	Menyampaikan Mohon Segera Dilakukan Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan ke KLH Kab. Pasaman melalui surat Ka. Bapedalda Prov. Sumbar No. 660/738/TLPHL-BPLD-2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Mohon Segera Dilakukan Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan
8.	Dugaan penyimpangan dalam melakukan penimbunan (reklamasi) Danau Singkarak yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Kab. Solok	Dugaan penyimpangan dalam melakukan penimbunan (reklamasi) Danau Singkarak	Pada tanggal 22 September 2016 dilakukan pertemuan antara Pemerintah Prov. Sumbar dengan Pemerintah Kab. Solok dan tanggal 6 Oktober 2016 dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi penimbunan Danau Singkarak



(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Pengaduan tokoh masyarakat Nagari Saniangbaka secara langsung ke Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 9 Oktober 2016 terkait dengan operasional penambangan galian C di Nagari Panyinggahan Kab. Solok	Operasional penambangan galian C di Nagari Panyinggahan Kab. Solok	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Pemberitahuan Ka. BKPM dan PPT No. 540/861-Periz/BKPM&PPT/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 menghentikan sementara kegiatan izin usaha penambangan bahan batuan sampai dengan terpenuhinya kewajiban yang termuat pada masing-masing pemegang IUP Operasi Produksi sesuai peraturan perundang-undangan
10.	Surat Ka. Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Pasaman Barat No. 660/86/Wsdl/BLHKP-2016 Tanggal 8 Maret 2016 perihal Hasil Verifikasi Tindak Lanjut Kasus /Pengaduan Masyarakat Jorong Kampung Masjid	Pencemaran Sungai Batang Taming Kocik akibat limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) yang beralamat di Kecamatan Ranto Baik kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara	<p>Diskusi secara langsung dengan Dirjen Pnaatan Hukum Lingkungan saat pembahasan Sengketa Lingkungan PT. Bumi Sarimas Indonesia dan diserahkan bahan-bahan hasil klarifikasi dan verifikasi lapangan mengingat hal ini merupakan kewenangan KLHK.</p> <p>Telah dilakukan pertemuan ditingkat KLHK secara terkoordinasi yang melibatkan dua Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 s/d 28 April 2016.</p> <p>Telah dilakukan verifikasi lanjutan secara terkoordinasi antara KLHK, Bapedalda Prov. Sumbar dan BLH Kab. Pasabar pada tanggal 13 s/d 15 September 2016 dan direncanakan akan dilakukan pertemuan yang akan difasilitasi oleh KLHK antara masyarakat Jorong Kampung Masjid dengan perusahaan (PT. TBS)</p> <p>Telah dilakukan verifikasi secara terkoordinasi dengan KLHK dalam rangka penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada tanggal 13 s/d 15 September 2016</p>

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel - 44.A. Jumlah Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Penanganan Pengaduan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Kewenangan Penanganan Pengaduan	Jumlah Pengaduan
(1)	(2)	(3)
1	Pemerintah Pusat (Lintas Provinsi)	1
2	Pemerintah Provinsi (Lintas Kabupaten/Kota)	1
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	10

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 44.B. Jumlah Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Sektor Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Sektor Kegiatan dan/atau Usaha	Jumlah Pengaduan/Kasus Lingkungan Hidup
(1)	(2)	(3)
1	Agroindustri	3
2	Pertambangan	5
3	Air (PDAM)	1
4	Reklamasi	1

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 45. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WALHI Sumbar	SK Kementerian Kehakiman Indonesia No. C-364.AT.0302-TH.1998 tanggal 12 oktober 1998 dan SK Kepala Badan Pertahanan Nasional RI No.886-XVII-2006 tanggal 18 Desember 2006	Jl. Beringin 3A No. 9 Lolong Ulak Karang Padang
2.	Andalas Bumi Lestari	025/Not/X-2006 tanggal 20 September 2006	Komplek Graha Andalas Asri Blok C/4 Andalas Padang
3.	Qbar	-	Jl. Bambu No. 3 Ujung Gurun Padang
4.	Forum Kota Sehat	-	Jl. SMP 21 No 30 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang
5.	Wali Nusa	-	Jl Gajah no 10 Air Tawar Barat Kota Padang
6.	Sahabat Alam	-	Komplek Pegambiran Permai II Blok E No. 5 Kel. Pagambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang
7.	KOGAMI	-	Jl. Cindur Mato No. 9 Kel. Gunung Pangilun Padang
8.	Komunitas Earth Hour	-	Radio Classy Jl. Raya Indarung Kota Padang
9.	Azzam Kreatif	-	Jln. M. Yamin Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
10.	KOMPILASI (Komunitas Peduli Lingkungan Lestari)	-	Jl. Perwira III No. 13 Belakang Balok, Bukittinggi Telp. (0752) 7006264
11.	Garuda	-	Banto Trade Center, Bukittinggi
12.	Matahari	-	Jl. Melati No.12 Inkorba, Bukittinggi
13.	Forum Komunitas Hijau Assosiasi Bukittinggi Go Green (ABG)	-	Jln.Syekh M. Jamil Djambek no.40 Bukittinggi
14.	Komunitas Dahlia Saligurasi	-	Hotel Kharisma Jln.Sudirman Bukittinggi
15.	Forum Kota Bersih (Fortasih)	-	Jl. Soekarno - Hatta Kota Bukittinggi
16.	Fenomena Alam Sahabatku (FALS)	-	Jl. Dt Mangkuto Ameh Kel.Koto Selayan No.65 Bukittinggi
17.	Limbubu	-	Naras Pariaman Utara Kota Pariaman
18.	Caredek	-	Desa Rawang Pariaman Tengah Kota Pariaman



(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Forum Bahtera Serambi	-	Jl. Urip Sumoharjo No 16 Rt II Kelurahan Tanah Pak Lambik Kota Padang Panjang
20.	Pemandu Wisata Lingkungan	-	Maninjau Kabupaten Agam
21.	P3MTBPI (Persatuan Petani Pemandu Masyarakat Tangguh Bencana dan Perubahan iklim)	-	Sunur, Kecamatan Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman
22.	Peduli Lingkungan Bumi Andalas (Pelindas)	-	Jln. Ternate Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat
23.	LSM Simpati Masyarakat	-	Kabupaten Lima Puluh Kota
24.	Forum Pasaman Peduli (FPP)	-	Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
25.	Satria Rimba	-	Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman
26.	Tunas Muda	-	Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman
27.	Sinar Fajar	-	Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman
28.	Karya Peduli Pasaman	-	Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 45.A. Jumlah Lembaga yang Menjadi Anggota WALHI di Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2016

No	Nama Lembaga
(1)	(2)
1.	Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM)
2.	Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat Bina Kelola (LPSM BILA)
3.	Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam Fakultas Pertanian Universitas Andalas (KOMMA FP-UA)
4.	Sekretariat Pengembangan Kawasan Mentawai (SPKM)
5.	Yayasan Taratak
6.	Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)
7.	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sumatera Barat
8.	Perkumpulan Qbar
9.	Perkumpulan Siberut Hijau (PASIH)
10.	Mapala Alphicanameru IAIN Imam Bonjol Padang

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 46. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Provinsi Sumatera Barat	SLHD Peringkat 3 Nasional	Wakil Presiden RI	2016
2.	Kabupaten Dhamasraya	SLHD Peringkat 2 Nasional	Wakil Presiden RI	2016
3.	Kabupaten Dhamasraya	SLHD Peringkat 1 Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
4.	Kota Padang	SLHD Peringkat 2 Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
5.	Kota Pariaman	SLHD Peringkat 3 Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
6.	Kabupaten Agam	SLHD Peringkat 4 Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
7.	Kabupaten Padang Panjang	SLHD Peringkat 5 Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
8.	SMKN 1 Bukittinggi	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
9.	SDN 9 Surau Gadang	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
10.	SMPN 1 Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
11.	SDN 03 Mungo Kabupaten Lima Puluh Kota	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
12.	SMPN 1 Kecamatan Luak kabupaten Lima Puluh Kota	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
13.	SMPN 3 Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
14.	MTS Swasta Baitul Ihza Kabupaten Solok Selatan	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
15.	SDN 16 Nan Balimo Kota Solok	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
16.	SDN 09 Balai Satu Kabupaten Agam	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
17.	SMAN 1 IV Koto Kabupaten Agam	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
18.	SDN 07 Sitapung Kabupaten Agam	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
19.	SMAN 1 Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
20.	MTSN Lubung Sikaping Kabupaten Pasaman	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
21.	SDN 10 Gantiang Kota Padang	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
22.	SDN 20 Dadok Tunggul Hitam Kota Padang	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	SDN 15 Dharma Caraka Ngalau Kota Padang Panjang	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
24.	SMPN 9 Padang	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
25.	SMAN 3 Pariaman	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
26.	SMPN 1 Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
27.	SDN 13 Bukit Apit Puhun Kota Bukittinggi	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
28.	SMP Pembangunan UNP	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
29.	SMPN 2 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
30.	SDN 01 Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
31.	SDN 40 Koto Panjang Kabupaten Pesisir Selatan	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
32.	SDN 12 Koto Baru Kabupaten Dhamasraya	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
33.	SDN 11 Payakumbuh	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
34.	MAN 1 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
35.	SDN 36 Payakumbuh	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
36.	SMPN 3 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
37.	SDN 3 Bungo Tanjung Kota Pariaman	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
38.	SDN 22 Manggung Kota Pariaman	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
39.	SMAN 7 Solok Selatan	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
40.	SD Swasta Anwar Karim III Kabupaten Pasaman Barat	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
41.	SMAN 3 Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
42.	SDN 12 Pincuran Tujuh Kabupaten Solok Selatan	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
43.	MTSN Koto Baru Kabupaten Solok	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
44.	SDN 23 Tuapejat Kabupaten Kepulauan Mentawai	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
45.	SMPN 4 Bukittinggi	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
46.	SDN Percobaan Kota Padang	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
47.	MIN Gunung Pangilun Kota Padang	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48.	SMA Pembangunan UNP Kota Padang	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
49.	SDN 05 VI Suku Kota Solok	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
50.	MA KM Muhammadiyah Kota Padang Panjang	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
51.	SMAN 1 V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
52.	SMPN 1 Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
53.	SMPN 2 Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
54.	SMPN 5 Bukittinggi	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
55.	SDN 22 Ujung Gurun Kota Padang	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
56.	SMKN 3 Padang	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
57.	SDN 07 Kampung Jawa Kota Solok	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
58.	SDN 10 Nan Balimo Kota Solok	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
59.	SDN 05 Marabau Kota Pariaman	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
60.	SMPN 3 Gunung Talang Kabupaten Solok	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
61.	SDN 01 Pasar Tiku, Kab. Agam	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
62.	MTsN Matur, Kab. Agam	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
63.	MTsN Kamang, Kab. Agam	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
64.	SMAN 1 Tilatang Kamang, Kab. Agam	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
65.	SDN 06 Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
66.	MTsN Salido, Kab. Pesisir Selatan	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
67.	SDN 13 Muaro, Kab. Sijunjung	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
68.	SMPN 13 Sijunjung	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69.	MAN Koto Baru, Kab. Solok	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
70.	SDN 04 Garegeh, Kota Bukittinggi	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
71.	SDN 08 Kubu Tanjung, Kota Bukittinggi	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
72.	SDN 12 Bukit Canggih, Kota Bukittinggi	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
73.	MAN 1 Bukittinggi	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
74.	SDN 08 Surau Gadang Kota Padang	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
75.	SMPN 31 Padang	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
76.	SMAN 14 Padang	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
77.	SDN 08 Marunggi Kota Pariaman	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
78.	SDN 19 Kampung Jawa Kota Solok	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
79.	SDN 21 Taluak, IV Suku	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
80.	SDN 14 Nan Sabaris	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
81.	SDN 03 Alai	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
82.	SD Semen Padang 1 dan 2	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
83.	SMPN 11 Padang	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
84.	MTsN Parak Lawas	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
85.	MTsN Koto Tangah	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
86.	SMK Semen Padang	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
87.	SDN 13 Pasar Remaja Kota Sawahlunto	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
88.	Kota Bukittinggi	Adipura Kirana	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
89.	Kota Payakumbuh	Adipura Buana	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
90.	Kota Padang Panjang	Adipura Buana	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
91.	Kota Sawahlunto	Sertifikat Adipura	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
92.	Kota Batusangkar	Sertifikat Adipura	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
93.	Jasman, S.Ag	Kalpataru (piagam) Tingkat Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
94.	Kelompok Tani "Suka Menang Aia Kacang" Kabupaten Pasaman	Kalpataru Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
95.	Perkumpulan Petani Organik Santiago Kota Solok	Kalpataru Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
96.	Busril	Kalpataru Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
97.	RSUD Pariaman	Propelike Biru	Gubernur Sumatera Barat	2016
98.	RSUD Solok	Propelike Biru	Gubernur Sumatera Barat	2016
99.	RSUD Achmad Mochtar	Propelike Biru	Gubernur Sumatera Barat	2016
100.	RSUD Padang Panjang	Propelike Biru	Gubernur Sumatera Barat	2016
101.	PT. Japta Comfeed	Propelike Biru	Gubernur Sumatera Barat	2016
102.	PT. Tirta Investama Unit Solok (PT. AQUA)	Propelike Biru	Gubernur Sumatera Barat	2016
103.	PT. Batanghari Barisan	Propelike Biru	Gubernur Sumatera Barat	2016
104.	Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan dan Kelurahan/Desa Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
105.	Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota	Kecamatan dan Kelurahan/Desa Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
106.	Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman	Kecamatan dan Kelurahan/Desa Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
107.	Kelurahan Pakan Sinayan, Kota Payakumbuh	Kecamatan dan Kelurahan/Desa Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
108.	Kelurahan Pasar Usang, Kota Padang Panjang	Kecamatan dan Kelurahan/Desa Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016
109.	Kelurahan Tanah Lapang, Kota Sawahlunto	Kecamatan dan Kelurahan/Desa Bersih Tingkat Provinsi	Gubernur Sumatera Barat	2016

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 46.A. Perbandingan Perolehan Penghargaan Nasional Lingkungan Tahun 2012 s/d 2016 di Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2016

No	Jenis Penghargaan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	SLHD	4	4	4	4	2
2	Adipura	5	6	2	1	5
3	Adiwiyata	18	34	39	42	27
4	Kalpataru	1	3	3	4	1
5	PROPER (biru)	26	17	26	25	33
6	PROPER (hijau)	1	1	1	1	3

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



**Tabel – 47. Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sosialisasi pembangunan yang berwawasan lingkungan bagi nagari/kelurahan Tahun 2016	Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	Masyarakat Nagari Alahan Mati, Nagari Parik Panjang, dan Nagari VII Koto Talago	April s/d Agustus 2016
2.	Workshop Pengelolaan Sampah melalui bank sampah	Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	Pengelola Bank Sampah di 19 kabupaten/kota	Mei 2016
3.	Penyuluhan Gerakan Sadar Wisata	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Masyarakat, tokoh masyarakat, agama, pengiat pariwisata	April, Mei, September, Oktober 2016
4.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	BPBD Prov. Sumbar	Masyarakat	April dan Mei 2016
5.	Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan	BPBD Prov. Sumbar	Masyarakat	Juli 2016
6.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana	BPBD Prov. Sumbar	Masyarakat	September 2016
7.	Workshop Pelatihan Air Minum	Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat	PAMSIMAS dan PDAM	2016
8.	Pendampingan bidang teknis percepatan pembangunan sanitasi permukiman	Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat	Aparatur Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat	2016
9.	Sosialisasi Peraturan LH Bidang Ke PU an	Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat	Aparatur Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat	2016

Keterangan : -

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, BPBD Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 48. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	No. 7 Tahun 2015	Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
2.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	No. 11 Tahun 2015	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
3.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	No. 4 Tahun 2014	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
4.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	No. 8 Tahun 2014	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
5.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	No. 3 Tahun 2012	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
6.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	No. 7 Tahun 2012	Pengelolaan Panas Bumi
7.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	No. 13 Tahun 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat
8.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	No. 14 Tahun 2012	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	No. 20 Tahun 2011	Irigasi
10.	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	No. 2 Tahun 2010	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
11.	Peraturan Gubernur Sumatera Barat	No. 19 Tahun 2016	Status Mutu Air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Anai
12.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-127-2016	Pembentukan Tim Penilai Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan atau kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
13.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-129-2016	Pembentukan Tim Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi Tahun 2016
14.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-332-2016	Pembentukan Tim Penilaian Lomba Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan Hijau Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
15.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-338-2016	Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Lingkungan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat



(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-342-2016 28 Maret 2016	Pembentukan Tim Supervisi Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
17.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-349-2016 29 Maret 2016	Pembentukan Tim Pembinaan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016
18.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-488-2016 3 Mei 2016	Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
19.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat (Kepala BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat)	660-390-2016 8 April 2016	Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Muara Kalaban - Muaro Sijunjung di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat
20.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat (Kepala BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat)	660-326-2016 21 Maret 2016	Izin Lingkungan Rencana Penambangan Mineral Non Logam/Clay di Nagari Teluk Kabung Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan oleh CV. Putra Idola
21.	Keputusan Gubernur Sumatera Barat (Kepala BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat)	660-998.2-2016 25 Agustus 2016	Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Pengamanan Muara dan Pantai Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
22.	Keputusan Ka. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	660/026/SK/TL-PHL/BPDL-2016 27 Juni 2016	Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (luas 6.794 Ha) di Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung oleh PT. Surya Padang Khatulistiwa
23.	Keputusan Ka. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	660/031/SK/TL-PHL/BPDL-2016 2 November 2016	Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Logam Dasar (Emas) di Kabupaten Solok Selatan oleh PT. Cahaya Selatan Gemilang



(1)	(2)	(3)	(4)
24.	Keputusan Ka. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	660/032/SK/TL-PHL/BPDL-2016 30 November 2016	Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan Ngarai Sianok sepanjang 5.475 m di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
25.	Keputusan Ka. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	660/033/SK/TL-PHL/BPDL-2016 9 Desember 2016	Persetujuan Kerangka Acuan Rencana kegiatan Pembangunan Kampus II IAIN Batusangkar di Batusangkar Kabupaten Tanah oleh IAIN Batusangkar

Keterangan : -

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 48.A. Produk Hukum Berdasarkan Sektor Lingkungan Hidup yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2015
Tahun : 2016

No	Sektor	Bentuk peraturan atau Pedoman Teknis	No dan tanggal Pelaksanaan	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah	No.7 / tahun 2015	Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
2.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah	Nomor 14 Tahun 2012	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Peraturan Daerah	No.11/ tahun 2015	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
4.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Peraturan Gubernur	Nomor 92 Tahun 2012	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031
5.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Peraturan Gubernur	Nomor 99 Tahun 2012	Pengelolaan Daerah Penyangga Kawasan Lembah Anai
6.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Peraturan Gubernur	Nomor 75 Tahun 2009	Petunjuk Pelaksana Operasional Pos Jaga Terpadu Pengamanan Bersama Kawasan Taman Nasional Kerinci Sablan (TNKS) di Kabupaten Dhamasraya dan Wilayah Operasi Kabupaten Pesisir Selatan serta Kabupaten Solok Selatan



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-43-2012	Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada Kawasan Hutan Lindung Seluas lebih kurang 650 (Enam Ratus Lima Puluh Hektar) kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
8	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-44-2012	Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada Kawasan Hutan Lindung Seluas lebih kurang 1.088H kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
9	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-483-2012	Pembentukan Tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat
10	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-550-2013	Pembentukan Tim Penilai Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012 Tingkat Provinsi Sumatera Barat
11	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	520-390-2014	Pembentukan Tim Penilai Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014
12	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-673-2013	Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012 Tingkat Provinsi Sumatera Barat
13	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-286-2011	Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Barat
14	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	660-415-2011	Pembentukan Tim Pengembangan Kawasan Terpadu Lembah Anai
15	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Keputusan Gubernur	522-570-2011	Pembentukan Tim Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Nagari
16	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-223-2012	Pembentukan Tim Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Batang Pangian Tahun 2012
17	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-252-2012	Pembentukan Tim Pemantauan Kualitas Air Sungai Skala Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012
18.	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-486-2012	Pembentukan Tim Pemantauan Sungai Skala Nasional Tahun 2012



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-378-2012	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batang Karimo Ibukota Kecamatan (IKK) Lubuk Tarok Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung
20	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-720-2012	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Wilayah Prov. Sumbar
21	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-721-2012	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Gasan Gadang Terpadu Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat
22	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	522-74-2011	Pembentukan Forum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Multi Pihak Sumatera Barat
23	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	522-136-2011	Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Barat
24	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-191-2011	Pembentukan Tim Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Batang Agam Tahun 2011
25	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	610-374-2011	Pembentukan Tim Penyusunan dan Konsultasi Publik Konsep Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air
26	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	610-380-2011	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Antokan Terpadu di Wilayah Provinsi Sumatera Barat
27	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-429-2011	Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Batang Karimo Ibu Kota Kecamatan (IKK) Lubuk Tarok
28	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	050-448-2011	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tindak Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Batang Hari
29	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	660-87-2010	Pembentukan Tim Studi Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Batang Lembang Tahun 2010



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	Pengendalian Kerusakan Perairan	Keputusan Gubernur	610-263.1-2010	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Daerah Tangkapan Air Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010
31	Pengendalian Kerusakan Perairan	Peraturan Daerah	Nomor 9 Tahun 2011	Irigasi
32	Pengendalian Kerusakan Perairan	Peraturan Daerah	Nomor 24 Tahun 2010	Baku Mutu Air Danau dan Telaga Provinsi Sumatera Barat
33	Pengendalian Kerusakan Perairan	Peraturan Daerah	Nomor 28 Tahun 2009	Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Ombilin dan Batang Anai
34	Pengendalian Kerusakan Perairan	Peraturan Daerah	Nomor 5 Tahun 2008	Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat
35	Pengendalian Kerusakan Perairan	Peraturan Daerah	Nomor 10 Tahun 2008	Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Masang Gadang, Batang Lampasi dan Batang Sinamar
36	Pengendalian Kerusakan Perairan	Peraturan Daerah	Nomor 40 Tahun 2008	Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang
37	Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut	Keputusan Bersama Bupati Solok, Bupati Solok Selatan, Bupati Sijunjung dan Bupati Dharmasraya	100 – 1.A – 2009 130.4.2009 188.45/685/KPTS-BPT-2009 189.1/240/KPTS-BPT-2009	Pembentukan Sekretariat Bersama Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari
38	Perlindungan tumbuhan dan satwa dilindungi dan endemik	Peraturan Daerah	Nomor 2 Tahun 2010	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
39	Perlindungan tumbuhan dan satwa dilindungi dan endemik	Peraturan Daerah	Nomor 3 Tahun 2009	Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang
40	Perlindungan tumbuhan dan satwa dilindungi dan endemik	Peraturan Daerah	Nomor 4 Tahun 2012	Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan

Keterangan : -

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 49. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	APBD	SPM Informasi Status Mutu Air : Status dan daya tampung sungai	74.843.500	135.000.000
2.	APBD	SPM Informasi Status Mutu Air : Danau Lestari	79.853.500	-
3.	APBD	SPM Informasi Status Mutu Air : Konservasi Kualitas Air Danau	-	80.000.000
4.	APBD	SPM Informasi Status Mutu Air : Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	174.806.500	225.000.000
5.	APBD	SPM Informasi Status Mutu Air : Pemantauan Kualitas Air Laut	74.911.500	-
6.	APBD	SPM Informasi Status Mutu Air : Konservasi Wilayah Pesisir Laut	-	75.000.000
7.	APBD	SPM Informasi Mutu Udara Ambien : Pemantauan Kualitas Udara Ambien	159.894.250	1.100.000.000
8.	APBD	SPM Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat : Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	55.650.500	-
9.	APBD	SPM Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat : Penataan Hukum Lingkungan	-	120.000.000
10.	APBD	SPM Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat : Pembinaan dan Penegakan Hukum	91.948.000	-
11.	APBD	SPM Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat : Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan	-	100.000.000
12.	APBD	Kegiatan penunjang SPM : SLHD	218.849.000	221.750.000
14.	APBD	Kegiatan penunjang SPM : SIL	40.000.000	120.000.000
15.	APBD	Kegiatan penunjang SPM : Pembinaan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Lingkungan	70.000.000	80.000.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	APBN	SPM Informasi Status Mutu Air : Pemantauan Sungai Skala Nasional dan/atau Lintas Batas Negara	762.677.000	397.917.315
17.	APBN	SPM Informasi Mutu Udara Ambien : Pemantauan Kualitas Udara di Wilayah Perkotaan yang Bersifat Strategis Nasional	448.003.000	382.167.900
18.	APBN	SPM Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat : Pembinaan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	-	91.817.000
19.	Bantuan Luar Negeri	-	-	-

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel 49.A. Anggaran Pengelolaan Sampah di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Padang	34.117.000.000	32.048.460.667
2.	Kota Padang Panjang	14.329.678.500	12.240.633.700
3.	Kota Bukittinggi	24.702.282.276	36.949.923.919
4.	Kota Solok	4.667.370.000	4.904.217.000
5.	Kota Payakumbuh	3.654.433.700	8.259.992.130
6.	Kota Sawahlunto	2.646.612.000	3.439.420.000
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	5.437.427.300	8.141.993.380
8.	Kabupaten Pasaman	3.254.198.000	4.052.260.000
9.	Kabupaten Tanah Datar	1.337.520.500	3.202.598.000

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



Tabel – 50. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Doktor (S3)	0	0	0
2.	Master (S2)	5	9	14
3.	Sarjana (S1)	12	16	28
4.	Diploma (D3/D4)	1	3	4
5.	SLTA	10	7	17
	Jumlah	28	35	63

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 50.A. Jumlah Pegawai Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Berpendidikan S2 Berdasarkan Jurusan Tahun : 2016

No.	Jurusan	Jumlah Pegawai
1.	Ilmu lingkungan	6
2.	Perencanaan Wilayah	4
3.	Manajemen	2
4.	Hukum	1
5.	Ilmu Pemerintahan	1

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel – 51. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup dan Staf yang telah Mengikuti Diklat di Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	Arsiparis	0	1	0	1
2.	Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	PPNS	0	0	2	1
3.	Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	PPLHD	0	0	3	1

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Tabel - 51.A. Jumlah Peserta Diklat Teknis yang diikuti Pegawai Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun : 2016

No	Nama Diklat Teknis	Jumlah Peserta
1.	Amdal A (Dasar-dasar Amdal)	15
2.	Amdal B (Penyusun)	2
3.	Amdal C (Penilai)	6
4.	Perencanaan	2
5.	Audit Lingkungan	1
6.	Adipura	2
7.	Adiwiyata	2
8.	Pengelolaan Limbah B3	4
9.	Pengelolaan Limbah Industri	1
10.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan untuk analisis Lingkungan	1
11.	Management Proyek	2
12.	Penyetaraan Kompetensi Pengawasan Lingkungan Hidup	1
13.	Peningkatan Kapasitas Sertifikat Mediator Verifikator Proklamasi	2
14.	Pengelolaan Kualitas Air	2
15.	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1
16.	Pengembangan, Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan	1
17.	Fasilitator, Negosiator, dan Mediator Bagi Pejabat dan Staf	2
18.	Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	1
19.	Inventarisasi Lahan Akses Terbuka	1

Keterangan : -

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016



**Tabel – 52. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	30 541 807,60	32.886.694,9	36.256.489,0	41.223.979,4	44.438.992,0	47.083.541,1
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>	24 902 955,32	26.754.890,3	29.357.015,0	33.156.254,2	35.266.436,9	37.131.804,3
	a. Tanaman Pangan / <i>Food Crops</i>	8 544 813,35	9.630.645,6	10.570.323,2	12.332.550,3	13.103.446,5	13.071.819,3
	b. Tanaman Hortikultura/ <i>Horticultural Crops</i>	5 034 997,37	4.813.238,0	5.070.384,6	5.622.211,7	6.167.319,6	6.689.768,7
	c. Tanaman Perkebunan/ <i>Plantation Crops</i>	8 574 704,82	9.238.301,7	10.292.221,5	11.508.353,9	11.982.757,8	13.092.231,2
	d. Peternakan/ <i>Livestock</i>	2 084 700,97	2.342.364,5	2.614.525,8	2.832.387,3	3.078.763,8	3.253.942,9
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan/ <i>Agriculture Services and Hunting</i>	663 738,82	730.340,5	809.559,9	860.751,1	934.149,1	1.024.042,2
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu/ <i>Forestry and Logging</i>	1 761 763,64	1.887.143,5	2.077.587,1	2.324.590,2	2.787.579,2	2.985.263,9
3.	Perikanan/ <i>Fishery</i>	3 877 088,63	4.244.661,1	4.821.886,9	5.743.135,0	6.384.975,9	6.966.472,9
B.	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	5 291 962,96	5.838.177,6	6.756.660,6	8.049.321,1	8.682.040,0	8.878.437,7
1.	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ <i>Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal</i>	0,00	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2.	Pertambangan Batubara dan Lignit/ <i>Coal and Lignite Mining</i>	800 759,19	831.492,1	866.600,2	829.461,5	711.687,3	509.958,9
3.	Pertambangan Bijih Logam/ <i>Iron Ore Mining</i>	231,93	223,0	213,6	217,7	182,6	189,6
4.	Pertambangan dan Penggalian Lainnya/ <i>Other Mining and Quarrying</i>	4 490 971,83	5.006.462,5	5.889.845,7	7.219.641,9	7.970.170,0	8.368.289,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
C.	Industri Pengolahan/Manufacturing	13 902 660,10	15.148.968,9	16.185.516,3	17.424.296,5	18.321.503,2	19.791.728,1
1.	Industri Batubara dan Pengilangan Migas/ <i>Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products</i>	746,24	672,0	856,8	794,2	708,4	600,1
2.	Industri Makanan dan Minuman/ <i>Manufacture of Food Products and Beverages</i>	6 365 600,88	6.919.284,5	7.322.909,8	7.741.793,3	8.393.933,9	9.346.024,3
3.	Industri Pengolahan Tembakau/ <i>Manufacture of Tobacco Products</i>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/ <i>Manufacture of Textiles; and Wearing Apparel</i>	2 808 181,73	3.095.620,7	3.421.052,6	3.695.273,6	3.612.970,0	3.844.393,4
5.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/ <i>Manufacture of Leather and Related Products and Footwear</i>	5 616,21	5.998,5	6.770,1	8.272,2	8.836,5	8.912,7
6.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/ <i>Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials</i>	7 293,19	7.394,9	8.129,0	7.908,8	8.385,7	8.864,6
7.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/ <i>Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media</i>	6 157,41	6.488,0	6.995,1	6.833,2	7.350,4	7.582,1
8.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/ <i>Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products</i>	27 077,33	27.804,7	30.636,4	31.582,7	36.204,4	34.159,8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ <i>Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Products</i>	2 012 483,99	2.130.929,0	2.173.934,7	2.263.190,6	2.598.655,2	2.898.920,6
10.	Industri Barang Galian bukan Logam/ <i>Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products</i>	2 526 054,42	2.801.480,7	3.048.685,0	3.497.912,0	3.461.484,7	3.439.010,4
11.	Industri Logam Dasar/ <i>Manufacture of Basic Metals</i>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik/ <i>Manufacture of Fabricated Metal Products, Computer, and Optical Products, and Electrical Equipment</i>	92 044,74	98.374,0	106.659,0	108.603,6	127.719,5	135.408,5
13.	Industri Mesin dan Perlengkapan / <i>Manufacture of Machinery and Equipment</i>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Industri Alat Angkutan/ <i>Manufacture of Transport Equipment</i>	4 364,53	4.569,3	4.821,2	5.055,1	5.515,3	5.620,9
15.	Industri Furnitur/ <i>Manufacture of Furniture</i>	18 947,67	20.146,1	22.206,1	21.614,9	21.523,9	22.407,8
16.	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/ <i>Other Manufacturing, Repair and Installation of Machinery and Equipment</i>	28 091,75	30.206,4	31.860,4	35.462,4	38.215,2	39.822,9
D.	Pengadaan Listrik dan Gas/<i>Electricity and Gas</i>	99 715,13	95.752,5	91.668,5	122.700,2	175.373,0	207.279,3
1.	Ketenagalistrikan/ <i>Electricity</i>	98 990,70	94.961,1	90.755,6	121.731,3	174.280,3	206.088,2
2.	Pengadaan Gas dan Produksi Es/ <i>Manufacture of Gas and Production of Ice</i>	724,43	791,5	912,9	968,9	1.092,7	1.191,1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/<i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	117 925,13	126.163,4	130.186,3	140.304,5	160.975,8	180.305,6
F.	Konstruksi/<i>Construction</i>	9 540 048,66	10.999.832,1	12.884.434,9	14.996.623,3	16.877.049,4	18.209.710,8
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/<i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	17 862 359,6	19.861.159,9	21.696.811,6	23.714.611,1	26.265.514,8	29.155.712,9
1.	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya/ <i>Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2 466 880,93	2.784.329,0	3.122.042,3	3.316.141,3	3.584.321,5	3.731.167,5
2.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale Trade and Retail Trade Except of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	15 395 478,67	17.076.830,9	18.574.769,4	20.398.469,8	22.681.193,2	25.424.545,4
H.	Transportasi dan Pergudangan/<i>Transportation and Storage</i>						
1.	Angkutan Rel/ <i>Railways Transport</i>	19 633,51	20.322,0	21.127,8	23.435,7	30.680,2	35.536,1
2.	Angkutan Darat/ <i>Land Transport</i>	8 981 609,15	9.699.246,3	11.377.711,7	13.351.435,4	14.513.180,6	15.959.641,1
3.	Angkutan Laut/ <i>Sea Transport</i>	544 819,13	594.291,6	638.515,7	755.636,2	784.761,9	716.077,8
4.	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/ <i>River, Lake, and Ferry Transport</i>	342 959,98	358.926,9	402.311,6	478.253,3	522.775,1	562.511,9
5.	Angkutan Udara/ <i>Air Transport</i>	1 660 148,81	2.042.412,8	2.678.270,4	3.254.007,1	4.037.999,6	4.757.144,8
6.	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir/ <i>Warehousing and Support Services for Transportation, Postal and Courier</i>	1 056 647,19	1.187.073,5	1.375.558,4	1.542.861,5	1.756.121,5	1.967.629,9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/<i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1 218 851,97	1.375.626,9	1.570.829,7	1.860.850,5	2.200.166,5	2.600.388,3
1.	Penyediaan Akomodasi/ <i>Accommodation</i>	294 041,64	348.334,5	414.269,1	498.946,4	584.300,3	672.553,0
2.	Penyediaan Makan Minum/ <i>Food and Beverage Service Activities</i>	924 810,32	1.027.292,4	1.156.560,6	1.361.904,0	1.615.866,2	1.927.835,4
J.	Informasi dan Komunikasi/<i>Information and Communication</i>	6 408 955,98	7.312.023,1	7.731.431,6	8.462.241,4	8.497.199,9	9.521.218,1
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi/<i>Financial and Insurance Activities</i>	3 492 052,8	4.149.724,0	4.633.408,7	5.119.029,7	5.583.951,5	6.227.234,4
1.	Jasa Perantara Keuangan/ <i>Financial Intermediary Services</i>	2 121 612,70	2.631.848,0	2.998.125,9	3.290.098,4	3.519.130,2	4.002.371,5
2.	Asuransi dan Dana Pensiun/ <i>Insurance and Pension Fund</i>	118 402,63	128.086,8	141.529,3	159.169,9	179.162,8	201.604,5
3.	Jasa Keuangan Lainnya/ <i>Other Financial Services</i>	1 219 821,27	1.355.075,0	1.456.204,7	1.625.973,3	1.834.656,2	1.966.991,7
4.	Jasa Penunjang Keuangan/ <i>Financial Supporting Service</i>	32 216,20	34.714,2	37.548,9	43.788,1	51.002,3	56.266,7
L.	Real Estat/<i>Real Estate Activities</i>	2 346 483,92	2.526.562,6	2.836.591,7	3.244.297,3	3.602.550,7	3.935.823,8
M,N.	Jasa Perusahaan/<i>Business Activities</i>	501 058,67	556.437,8	626.817,0	692.296,1	773.942,9	851.304,5
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/<i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	7 557 672,48	8.393.194,3	9.244.650,3	9.709.099,6	10.249.240,9	11.432.303,9
P.	Jasa Pendidikan/<i>Education</i>	3 938 506,24	4.548.881,1	5.418.348,5	5.972.000,3	6.663.436,8	7.654.043,3
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/<i>Human Health and Social Work Activities</i>	1 455 913,27	1.735.125,6	1.969.005,9	2.110.453,0	2.238.744,2	2.456.440,4
R,S,T	Jasa lainnya/<i>Other Services Activities</i>	1 792 494,55	1.979.047,5	2.373.483,7	2.696.523,6	3.028.540,2	3.498.511,3
PRODUK DOMESTIK BRUTO		118 674 286,83	131.435.645,6	146.899.829,9	164.944.256,8	179.404.740,7	195.682.525,0
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS							

Keterangan : -

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2016

**Tabel – 53. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2016**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/<i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	28 535 019,88	29.284.904,6	30.372.991,0	32.151.489,7	33.551.976,4	34.210.361,7
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>	23 334 182,77	23.868.222,5	24.582.356,3	25.984.156,1	26.876.365,0	27.310.126,1
	a. Tanaman Pangan / <i>Food Crops</i>	8 002 570,25	8.359.606,9	8.598.113,3	9.143.501,8	9.487.665,5	9.417.462,1
	b. Tanaman Hortikultura/ <i>Horticultural Crops</i>	4 976 592,3	4.659.552,1	4.739.589,1	5.030.681,8	5.167.773,8	5.279.779,7
	c. Tanaman Perkebunan/ <i>Plantation Crops</i>	7 851 210,6	8.240.186,6	8.564.089,0	9.064.919,1	9.389.697,3	9.729.428,0
	d. Peternakan/ <i>Livestock</i>	1 897 205,88	1.974.021,8	2.020.910,7	2.063.429,5	2.103.861,0	2.140.747,3
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan/ <i>Agriculture Services and Hunting</i>	606 603,75	634.855,1	659.654,2	681.623,8	727.367,5	742.709,0
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu/ <i>Forestry and Logging</i>	1 652 245,78	1.690.930,5	1.804.438,7	1.841.308,1	1.969.166,5	2.020.025,7
3.	Perikanan/ <i>Fishery</i>	3 548 591,32	3.725.751,7	3.986.196,0	4.326.025,6	4.706.444,9	4.880.209,8
B.	Pertambangan dan Pengekstrakan/<i>Mining and Quarrying</i>						
1.	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ <i>Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal</i>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Pertambangan Batubara dan Lignit/ <i>Coal and Lignite Mining</i>	776 568,2	759.558,2	801.323,9	807.014,0	790.647,9	636.548,4
3.	Pertambangan Bijih Logam/ <i>Iron Ore Mining</i>	205,94	189,2	174,5	192,0	171,6	167,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Pertambangan dan Penggalian Lainnya/ <i>Other Mining and Quarrying</i>	4 251 413,7	4.561.259,7	4.921.322,9	5.116.359,2	5.353.757,9	5.630.891,0
C.	Industri Pengolahan/Manufacturing						
1.	Industri Batubara dan Pengilangan Migas/ <i>Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products</i>	784,87	773,0	802,3	805,7	803,6	677,1
2.	Industri Makanan dan Minuman/ <i>Manufacture of Food Products and Beverages</i>	5 814 949,91	6.281.922,8	6.594.351,4	6.947.088,0	7.032.798,7	7.612.901,8
3.	Industri Pengolahan Tembakau/ <i>Manufacture of Tobacco Products</i>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/ <i>Manufacture of Textiles; and Wearing Apparel</i>	2 604 699,06	2.759.813,0	2.976.720,5	3.170.529,9	3.139.166,8	3.215.819,5
5.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/ <i>Manufacture of Leather and Related Products and Footwear</i>	5 441,4	5.662,3	6.200,7	6.843,2	6.925,3	6.632,2
6.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/ <i>Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials</i>	6 969,16	6.952,3	7.265,2	6.990,4	6.829,6	6.967,3
7.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/ <i>Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media</i>	5 952,19	6.117,0	6.278,4	5.772,7	5.946,0	5.908,1
8.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/ <i>Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products</i>	26 226,46	25.575,4	26.675,1	26.441,8	27.167,9	25.480,1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ <i>Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Products</i>	1 829 687,83	1.872.858,4	1.901.206,5	1.938.634,6	2.049.321,9	2.201.058,2
10.	Industri Barang Galian bukan Logam/ <i>Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products</i>	2 425 967,02	2.586.903,8	2.719.665,7	2.885.006,6	2.991.463,1	2.936.339,8
11.	Industri Logam Dasar/ <i>Manufacture of Basic Metals</i>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik/ <i>Manufacture of Fabricated Metal Products, Computer, and Optical Products, and Electrical Equipment</i>	88 216,56	91.813,4	96.355,1	96.381,0	101.499,9	105.246,1
13.	Industri Mesin dan Perlengkapan/ <i>Manufacture of Machinery and Equipment</i>	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Industri Alat Angkutan/ <i>Manufacture of Transport Equipment</i>	4 234,22	4.317,6	4.477,8	4.668,3	4.803,6	4.750,5
15.	Industri Furnitur/ <i>Manufacture of Furniture</i>	18 745,66	19.413,9	19.985,3	20.600,9	20.894,4	20.984,1
16.	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/ <i>Other Manufacturing, Repair and Installation of Machinery and Equipment</i>	27 305,51	28.351,0	28.539,5	30.308,8	30.919,3	31.332,0
D.	Pengadaan Listrik dan Gas/<i>Electricity and Gas</i>	108 050,56	116.845,9	120.837,2	140.011,7	145.686,1	161.628,9
1.	Ketenagalistrikan/ <i>Electricity</i>	107 339,76	116.102,9	120.039,3	139.172,7	144.811,5	160.711,3
2.	Pengadaan Gas dan Produksi Es/ <i>Manufacture of Gas and Production of Ice</i>	710,81	743,0	797,9	839,0	874,6	917,6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/<i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	118 293,	122.654,9	128.686,9	133.696,9	141.707,8	150.771,1
F.	Konstruksi/<i>Construction</i>	8 925 027,2	9.814.012,1	10.825.242,4	11.523.579,9	12.315.040,2	13.126.836,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/<i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	16 837 268,7	18.288.086,3	19.442.017,8	20.523.147,0	21.611.238,2	22.760.290,4
1.	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya/ <i>Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2 385 923,22	2.568.212,4	2.687.977,7	2.775.297,6	2.828.861,7	2.771.802,1
2.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale Trade and Retail Trade Except of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	14 451 345,48	15.719.873,9	16.754.040,1	17.747.849,5	18.782.376,6	19.988.488,3
H	Transportasi dan Pergudangan/<i>Transportation and Storage</i>	11 872 033,93	12.794.029,0	13.877.715,0	14.929.948,9	16.250.657,2	17.493.490,8
1.	Angkutan Rel/ <i>Railways Transport</i>	18 837,78	19.063,8	19.443,5	20.953,7	22.395,9	24.118,5
2.	Angkutan Darat/ <i>Land Transport</i>	8 538 542,54	9.210.208,4	10.090.148,0	10.973.911,8	12.066.220,9	13.105.320,4
3.	Angkutan Laut/ <i>Sea Transport</i>	528 429,19	576.432,5	610.855,8	652.041,2	635.425,5	563.875,0
4.	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/ <i>River, Lake, and Ferry Transport</i>	323 787,32	327.898,9	334.366,1	359.624,7	367.933,8	377.621,8
5.	Angkutan Udara/ <i>Air Transport</i>	1 472 117,72	1.587.073,1	1.646.433,6	1.669.248,9	1.854.617,3	2.016.847,8
6.	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir/ <i>Warehousing and Support Services for Transportation, Postal and Courier</i>	990 319,39	1.073.352,4	1.176.468,0	1.254.168,5	1.304.063,7	1.405.707,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1 120 069,91	1.179.358,9	1.248.916,0	1.329.396,2	1.420.410,3	1.578.746,2
1.	Penyediaan Akomodasi/Accommodation	268 864,38	291.305,1	315.718,6	334.893,6	352.358,9	377.611,6
2.	Penyediaan Makan Minum/Food and Beverage Service Activities	851 205,53	888.053,8	933.197,5	994.502,6	1.068.051,4	1.201.134,6
J.	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	6 295 711,64	7.035.415,3	7.676.467,0	8.322.873,3	9.052.781,5	9.882.963,8
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	3 316 572,02	3.641.341,8	3.856.679,9	4.041.345,2	4.188.231,5	4.524.388,3
1.	Jasa Perantara Keuangan/Financial Intermediary Services	2 007 561,49	2.255.319,5	2.428.343,2	2.540.773,0	2.616.338,6	2.901.037,0
2.	Asuransi dan Dana Pensiun/Insurance and Pension Fund	113 605,25	118.773,2	123.874,6	130.801,0	136.239,3	144.791,2
3.	Jasa Keuangan Lainnya/Other Financial Services	1 164 640,5	1.235.553,0	1.271.721,7	1.334.883,4	1.398.994,0	1.440.294,2
4.	Jasa Penunjang Keuangan/Financial Supporting Service	30 764,78	31.696,2	32.740,4	34.887,7	36.659,5	38.265,9
L.	Real Estat/Real Estate Activities	2 240 336,58	2.343.383,3	2.472.327,4	2.609.894,3	2.748.095,8	2.895.556,3
M,N.	Jasa Perusahaan/Business Activities	481 784,27	510.495,6	547.782,0	585.985,9	622.034,1	657.039,7
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	7 224 736,54	7.236.016,1	7.362.767,6	7.511.115,6	7.895.347,4	8.286.949,1
P.	Jasa Pendidikan/Education	3 650 530,39	4.020.437,8	4.357.636,2	4.657.618,6	5.068.148,0	5.498.575,4
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1 360 529,93	1.504.009,2	1.620.725,6	1.749.926,0	1.862.357,0	1.947.648,1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	1 706 160,74	1.821.952,7	1.918.497,7	2.067.170,0	2.268.046,7	2.493.800,1
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	111 679 492,97	118.724.424,7	125.940.634,3	133.340.836,4	140.704.876,1	148.110.750,5
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS						

Keterangan : -

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2016



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN II

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. Surat Tugas Tim Penulis DIKPLHD
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tentang Tim Supervisi Penulisan DIKPLHD
3. Biodata Tim Supervisi (Akademisi dan LSM)
4. Lampiran Surat-Surat Undangan, absensi dll terkait proses penyusunan DIKPLHD





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

No. 094.4/68/SP/TL/DLH-2017

I. DASAR

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. DPA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.156/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra;

II. MENUGASKAN KEPADA :

No.	Nama	Rincian Tugas
1.	Ir. Yantoni	Editor
2.	Ir. Siti Aisyah, M.Si	Editor
3.	Ir. Vianti Zami, M.Si	Menulis Inovasi Terkait Gerakan Sumbar Bersih
4.	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Menulis Ringkasan Eksekutif
5.	Desrizal, ST	Menulis BAB II dan Inovasi Pengelolaan Hutan Berbasis Nagari
6.	Devi Hendra, S.Si, M.Si	Menulis BAB I
7.	Adrian, ST, M.Si	Menulis Inovasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah, Penganggaran, Dan lain-lain
8.	M. Arief Noviandi, ST, M.Si	Menulis Inovasi terkait Pengelolaan Sungai Terpadu
9.	M. Sidik Pramono, ST	Menulis Sub Bab Kualitas Air
10.	Aulia Ramadhani, S.Si, M.Si	Menulis Sub Bab Kebencanaan
11.	Siska Wardeni, ST, M.Sc, M.Eng	Menulis Sub Bab Kualitas Udara dan Bab V
12.	Zaki Fatramansia, ST, M.Si	Menulis Sub Bab Wilayah Perkotaan
13.	Dedi Harian, ST	Menulis Sub Bab Tata Guna Lahan
14.	Prisilla Yumeri, SE	Entri Buku Data
15.	Roza Zulfita, ST	Membuat Daftar Isi, Gambar, Tabel dan Lampiran-Lampiran
16.	M. Taufik	Menyiapkan Lampiran-Lampiran

III. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan (Maret dan April) 2017.

IV. PEMBIAYAAN

DPA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Surat perintah ini dikeluarkan, untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 22 Februari 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT


Drs. ASRIZAL ASNAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19570803 198503 1 005



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660 - 449 - 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENYUSUNAN BUKU DATA DAN BUKU ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT SERTA TIM PENILAI BUKU DATA DAN BUKU ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Buku Data dan Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta Tim Penilai Buku Data dan Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2017, perlu membentuk Tim Supervisi Penyusunan Buku Data dan Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta Tim Penilai Buku Data dan Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S. 156/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Tim Supervisi Penyusunan Buku Data dan Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta Tim Penilai Buku Data dan Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :
- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Supervisi Buku Data Kualitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyempurnaan terhadap Buku Data Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 terkait validasi data; dan
 - b. melakukan supervisi terhadap penyusunan draf Buku Data Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
2. Tim Supervisi Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
 - a. melakukan supervisi terhadap penyusunan Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 terkait arahan kebijakan; dan
 - b. melakukan pembinaan terhadap penyusunan Buku Data dan Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
3. Tim Penilai Buku Data dan Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas: Melakukan Penilaian Buku Data dan Buku Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2016.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 pada Kegiatan Penyusunan Buku Data dan Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 12 April 2017



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Sdr. Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
3. Sdr. Ka. Dinas/Instansi Terkait;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660 - 449 - 2017

TANGGAL : 12 April

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENYUSUNAN BUKU DATA DAN BUKU ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT SERTA TIM PENILAI BUKU DATA DAN BUKU ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SUPERVISI PENYUSUNAN BUKU DATA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM DATA
1.	Drs. ASRIZAL ASNAN, MM	Ka. Dinas Lingkungan Hidup	Pengarah
2.	Ir. YANTONIUS	Kabid Tata Lingkungan	Ketua
3.	DESRIZAL, ST	Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor	Sekretaris
4.	RILA ILLAHI, SKM	Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	Anggota
5.	MILONA ILZA SAKANTIRA, ST, M.Eng	Dinas ESDM Prov. Sumbar	Anggota
6.	PALASTRI, ST.M.Eng	Dinas PU dan Penataan Ruang	Anggota
7.	EKA PUTRA	Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sumbar	Anggota
8.	RONI YOHANDI, ST	Dinas PSDA Prov. Sumbar	Anggota
9.		Dinas Kehutanan Prov. Sumbar	Anggota
10.		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prov. Sumbar	Anggota
11.	YOSI YONARA, A.Md	Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	Anggota
12.	AFRIZAL,S.Sos	BAPPEDA Prov. Sumbar	Anggota
13.	SUGENG	BMKG Sicincin	Anggota
14.	HARTANTO	BMKG Koto Tabang	Anggota
15.	WELDA ROZA, S.Si	BPS Prov. Sumbar	Anggota
16.	ANDRIANI, S.Sos, MM	Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	Anggota
17.	MASNAIDI, ST	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Anggota
18.	HILDA PERWINA LIDIA, A.Md	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar	Anggota
19.	LINA MARNI, S.Pt, MM	Dinas Peternakan Prov. Sumbar	Anggota
20.	PRISILLA YUMERI, SE	Staf DLH	Sekretariat
21.	ROZA ZULFITA, ST	Staf DLH	Sekretariat
22.	SISKA WADENI, ST, M.Sc, M.Eng	Staf DLH	Sekretariat
23.	MUHAMMAD TAUFIK	Staf DLH	Sekretariat
24.	ANDRIANSYAH	Staf DLH	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660-449-2017

TANGGAL : 12 April 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENYUSUNAN BUKU DATA DAN BUKU ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT SERTA TIM PENILAI BUKU DATA DAN BUKU ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SUPERVISI PENYUSUNAN BUKU ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM ANALISIS
1.	Drs. ASRIZAL ASNAN, MM	Ka. Dinas Lingkungan Hidup	Pengarah
2.	Ir. YANTONIUS	Kabid. Tata Lingkungan	Ketua
3.	DESRIZAL, ST	Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor	Sekretaris
4.	Ir. NOVARITA	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Ir. SITI AISYAH, M.Si	Kabid. Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan	Anggota
6.	PETRIAWATY, SE.MM	Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	Anggota
7.	Drs. BUSTANUL ARIFIN, MSI	PSLH Universitas Andalas	Anggota
8.	DR. KHAIRUL MS	PSLH Universitas andalas	Anggota
9.	DR. MARGANOF, MSi	Universitas Muhammadiyah	Anggota
10.	SYAIFUDDIN ISLAMI, STP, MSi	LSM Andalas Bumi Lestari	Anggota
11.	SISKA WARDENI, ST, M.Sc, M.Eng	Staf DLH	Sekretariat
12.	ROZA ZULFITA, ST	Staf DLH	Sekretariat
13.	MUHAMMAD TAUFIK	Staf DLH	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660-449-2017
 TANGGAL : 12 April 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENYUSUNAN BUKU DATA DAN BUKU ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT SERTA TIM PENILAI BUKU DATA DAN BUKU ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BUKU DATA DAN BUKU ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI
1.	Drs. ASRIZAL ASNAN, MM	Ka. Dinas Lingkungan Hidup	Pengarah
2.	Ir. YANTONIUS	Kabid Tata Lingkungan	Ketua
3.	DESRIZAL, ST	Kasi. Kebijakan Wilayah dan Sektor	Sekretaris
4.	Ir. NOVARITA	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Ir. SITI AISYAH, M.Si	Kabid. Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan	Anggota
6.	PETRIAWATY, SE, MM	Kabid. Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas	Anggota
7.	YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si	Kasi. Kajian Dampak Lingkungan	Anggota
8.	DEVI HENDRA, S.Si. M.Si	Kasi. Pemeliharaan Lingkungan	Anggota
9.	SISKA WARDENI, ST, M.Sc, M.Eng	Staf DLH	Anggota
10.	ROZA ZULFITA, ST	Staf DLH	Anggota
11.	MUHAMMAD TAUFIK	Staf DLH	Anggota
12.	PRISILLA YUMERI, SE	Staf DLH	Anggota
13.	DWI ELVIA NINGSIH, ST	Staf DLH	Anggota
14.	FERI ALDI	Staf DLH	Anggota
15.	ARMIATI, S.Sos	Staf DLH	Anggota
16.	YON FATITI	Staf DLH	Anggota
17.	LINA OKTAVIA, AMKL	Staf DLH	Anggota



 GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 IRWAN PRAYITNO

BIODATA

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Drs. Bustanul Arifin, M.Si
2.	Jenis kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan struktural	Kepala Laboratorium Kimia UPT Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas
4.	NIP	19600228 199003 1 001
5.	Tempat dan tanggal lahir	Sicincin, 28 Februari 1960
6.	Alamat rumah	Bawah Buluh No. 34 Komplek Andalas Makmur Padang
7.	No. HP	08126752199
8.	Alamat e-mail	ba_arifin@yahoo.co.id
9.	Alamat kantor	Kampus Limau Manis Universitas Andalas Padang

B. Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan	Nama Perguruan Tinggi	Bidang Ilmu	Tahun Lulus
1.	Strata 1 (S1)	Universitas Andalas	Kimia	1987
2.	Strata 2 (S2)	Pascasarjana Universitas Andalas	Kimia Organik Bahan Alam	1997

C. Pengalaman Penelitian

No	Judul Penelitian	Tahun
1	Analisis kandungan logam berat Pb, Cu, Cr dan Cd di Teluk Sirih kota Padang	2008
2	Kandungan BOD air sumur pantau selama pengkajian pemanfaatan air limbah pabrik pengolahan kelapa sawit pada lahan perkebunan kelapa sawit	2008
3	Teknik bioremediasi pengendalian pencemaran air danau Maninjau Sumatera Barat	2009
4	Pemakalah Seminar Judul: Dampak pemanfaatan air limbah pabrik pengolahan kelapa sawit terhadap nilai pH air sumur pantau	2010
5	Pengaruh pemanfaatan air limbah Pabrik pengolahan kelapa sawit terhadap kualitas air tanah	2011
6.	Pemanfaatan Abu Gosok Dari Sekam Padi Untuk Meningkatkan Kualitas Minyak Jelantah Di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tepakis Kabupaten Padang Pariaman	2011

7	Penentuan Kadar Amonia, Nitrat, Posfat dan Sulfida Air Danau Maninjau	2011
8	Analisis Kandungan Logam Cd, Cu, Cr dan Pb Dalam Air Laut di sekitar Perairan Bungus Teluk Kabung Kota Padang	2012
9	Analisis pH, BOD, COD, Logam (Pb, Cu, Cd, Fe dan Zn) Pada Drainase Fakultas MIPA dan Fakultas Farmasi Unand	2013
10	Fermetasi Anaerobik Limbah Kulit Singkong dan Kotoran Kelinci Untuk Produksi Biogas	2013

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat

No	Judul Penelitian	Tahun
1	Penyuluhan tentang Bahaya Limbah Plastik Terhadap Kesuburan Tanah dan Erosi di Desa Sijangek, Sungai Sariak, Kab. Padang	2003
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pembuatan Nata de Pachy/Bengkuang, di Korong Titian Panjang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang-Pariaman	2012
3	Penyuluhan tentang dampak kegiatan perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan hidup di kenagarian Lubuk Ulang Aling Selatan, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan	2012
4	Pelatihan Pembuatan Kompos dari limbah pertanian pada kelompok tani Perpapil di Jorong Dalam Koto, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam	2012
5	Peningkatan nilai ekonomis bahan pangan lokal tomat berbasis teknologi dan modifikasi pembuatan nata de tomato di Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	2013
6	Penyuluhan bahaya penggunaan minyak bekas bagi kesehatan dan penerapan teknologi proses pengolahan minyak bekas pada kelompok jajanan gorengan di Kawasan Wisata Pantai Tiram, Pariaman	2013
7	Penyuluhan Pengaruh Bahan Tambahan Makanan Bagi Kesehatan dan Penggunaan Zat Warna Alami Pada Makanan dan Minuman, Di Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.	2014

E. Pengalaman Penulisan Dokumen Lingkungan

No	Jenis Dokumen
1	Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan PLTU Teluk Sirih 2 x 100 MW, Kota Padang
2	Dokumen DELH Kampus Universitas Andalas, Padang
3	Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Jaringan 150 KV Indarung-Bungus, Padang
4	Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Jembatan Kincir kabupaten Pesisir Selatan
5	Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Jembatan Batang Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
	Dokumen AMDAL Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Muara Laboh 250 KV, Kabupaten Solok Selatan
6	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Solok

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 5 Mei 2017



Drs. Bustanul Arifin, M.Si

Curriculum Vitae

1. Nama : Dr. Chairul, MS
2. Pangkat/GoL. : Pembina Utama Madya/ Gol. IV C
3. NIP : 195710071987031002 ; NIDN 0007105712
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Pendidikan : S1 Univ.Andalas FMIPA Biologi 1984
S2 Institut Teknologi Bandung 1987
S3 Kagoshima University 2010
6. Pekerjaan : 1. Staf Pengajar FMIPA UNAND
2.Wakil Direktur Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH)UNAND
7. Bidang Keahlian : Biologi(Ekologi Tumbuhan & Biokonservasi)
8. Alamat Kantor : FMIPA Biologi Univ. Andalas Padang
9. Alamat Rumah : Komp. Unand Blok B II 05/03 Ulu Gadut Padang
10. No.Telp.HP : (0751) 73069 / HP.081372092457
11. Email : chairul57@yahoo.com

12. Training/Kursus : 1.Kursus Dasar-Dasar AMDAL Tipe A 1993 Pusat Studi
Lingkungan Hidup Univ.Andalas Padang
2.Training Course in Plant Ecology at Osaka Kyoiku
University Japan 1995
3.Training Course in Rehabilitation Tropical Rain Forest
at Kagoshima University Japan 2006
4.Training of Trainer (TOT) KLH – UI 2012

13. Penelitian : 1. Analisis Anakan Pohon di Hutan Kebun Raya Setia Mulia
(TAHURA) Padang 1983.
2. Struktur Dan Komposisi Tumbuhan Habitat Rafflesia
Di Sumatra Barat 1994
3. Jatuhan Serasah Hutan Tropika Di SUMBAR 1995
4. Comparison of several litter-fall of fagaceus in tropical forest
in west Sumatra 1995
5. Inventarisasi dan Analisis Vegetasi Hutan Cagar Alam Lembah
Anai Sumatra Barat 2000
6. Ecological Study on Growth Properties of Major trees Species
at a selective Logging Forest stand in the Equatorial rain forest
area west Sumatra 2002
7. Comparative study on Decomposition of leaf litter Between a
Warm-temperate evergreen oak forest and Tropical rain forest
2002
8. Leaf Longevity of Tropical Shrub Species in a open Forest in
Sumatra 2006
9. Phenological study on a tropical secondary forest in West
Sumatera, Indonesia 2010

14. Pengalaman Kerja :
1. Tim Studi Potensi Danau-Danau Di Sumatra Barat Pusat Studi lingkungan Hidup Univ.Andalas 1984
 2. Tim Studi Penyajian Evaluasi Lingkungan AMDAL PT Polyguna Nusantara, 1991
 3. Tim Studi Penyajian Evaluasi Lingkungan AMDAL Usaha Penggilingan Minyak Kelapa CV Usaha Setia Pariaman 1992
 4. Tim Studi AMDAL Pembuatan Depot Minyak PERTAMINA Teluk Kabung Padang 1994
 5. Tim Studi Revisi AMDAL HPH Bukit Raya Madusa Sawah Lunto Sijunjung 2003
 6. Tim Studi Penyajian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Perkebunan Sawit PT.TIDAR KERINCI AGUNG Sawah Lunto Sijunjung 2004
 7. Tim Studi AMDAL Pemasangan Jaringan Listrik Tegangan Tinggi (SUTET) Maninjau-Pasaman 2005
 8. Tim Studi AMDAL Tambang Batubara di Salido Kab. Pesisir Selatan.Pt. Tapak konsultan 2008.
 9. Tim Studi AMDAL Tambang Logam Dasar PT. Wira Patriot Di Solok Selatan 2008
 10. Tim Studi AMDAL Penambangan Bijih Besi PT. Sumber Minera Bersama 2010
 11. Tim Studi UKL-UPL Tambang Bijih Besi di Aia Dingin Kab. Solok 2010
 12. Tim Studi AMDAL Kebun Sawit PT. Hastika di Kab.Solok Selatan 2011
 13. Tim Studi AMDAL Tambang Bukit Kapur 412 PT. Semen Padang 2011
 14. Tim Studi AMDAL Pelabuhan Peti Kemas PELINDO II Medan 2011
 15. Tim Studi AMDAL Pembangunan Monumen Bela Negara di Koto Tinggi Kab. 50 Kota
 16. Tim Studi Penyusunan AMDAL Rumah Sakit Univ. Andalas Padang 2012
 17. Tim Teknis Penilai AMDAL Kota Padang Tahun 2016

Padang, 04 Mei 2017



(Dr.Chairul MS)

CURRICULUM VITAE

- 1 Nama : DR. H. Marganof, M.Si
- 2 Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 21 September 1965
- 3 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4 Kemampuan Bhs Inggris : Baik
- 5 Alamat : Perumahan Taman Citra Berlindo II Blok DD No. 2 Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah Padang 25172
- 6 Telp/HP : 081310928345/082384654329
- 7 E-mail : marganofkarani@ymail.com
- 8 Pendidikan : S-1: Program Studi Kimia, FPMIPA IKIP Padang (1990)
S-2: Program Studi Kimia FMIPA, PPS-UN Malang (1999)
S-3: Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana IPB Bogor (2007)
- 9 Bidang Keahlian : Pencemaran Lingkungan
- 10 Pelatihan : 2005 Kursus Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) A, Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor
2009 Kursus Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) B, Pusat Penelitian dan Lingkungan Hidup (PPLH) IPB, Bogor
2010 Bimbingan Teknis (Bintek) KLHS Bagi Konsultan Nasional- DANIDA`KEMENDAGRI-ESP2 : Jakarta
2010 Bimbingan Teknis (Bintek) KLHS: *National and Local Consultant: SEA Applied in Local Development Plans*, DANIDA, *SEA in Bangda*- Jakarta: Penerapan KLHS di Provinsi Sumatera Barat
2014 Kursus Auditor Lingkungan, PSLH UGM Yogyakarta

11. Pengalaman Menyusun Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL & KLHS)

- 2017 : Ketua Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* Provinsi Sumatera Barat 2017-2037, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Pembangunan Auditorium Kantor Bupati Pesisir Selatan, Kota Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Pembangunan Mess GOR H. Ilyas Yacub, Kota Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Pembangunan IPAL Komunal Kota Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Pembangunan Puskesmas Air Pura Kampung Air Mati Nagari Muara Indrapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Anggota Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

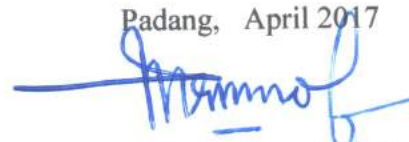
- 2016 : Anggota Tim Pembinaan dan Supervisi Penerapan/Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Sumatera Barat
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Penambangan Mineral Batuan Sungai a/n Sri Wahyuni di Kampung Padang Sawah Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi di Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi di Nagari Surantih, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Anggota Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Padang 2015-2025
- 2015 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan Sungai CV. Merapi Anugrah Mandiri di Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan Pengamanan Muara dan Pantai Salido di Nagari Sago-Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Normalisasi Batang Salido di Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Ketua Tim Penyusun SPPL Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Tripa Bara Di Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Ketua Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan AMDAL Pengamanan dan Reklamasi Pantai Carocok Painan Semester I Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Anggota Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Padang 2014-2019
- 2014 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan/Bahan Galian C di Sungai Batang Inderapura Nagari Tanah Bakali Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan/Bahan Galian C di Sungai Batang Kumbang Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Anggota Team Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Padang Tahun 2014
- 2013 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan Sungai Batang Inderapura, Nagari Tiga Sepakat, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan oleh CV. Mutia Anugrah Nusantara
- 2013 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu IUIPHHK Rudi Hartono, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya
- 2013 : Anggota Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Limah Puluh Kota Tahun 2012-2032
- 2013 : Anggota Team Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Padang Tahun 2013

- 2013 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan PLTM Ngalau Gadang 2 Pancung Taba PT. Taruko Hidro Energi Indonesia
- 2013 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan SPBU PT. Putra Ampalu Pratama Nagari Taratak Kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan
- 2013 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan *Stone Crusher* dan *AMP* CV. Kurnia di Kampung Sindang, Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
- 2013 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pembangunan PLTM Tuik 6,294 MW di Kampung Koto Gunung Nagari Tuik IV Koto Mudik, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
- 2012 : Anggota Team Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Padang Tahun 2012
- 2012 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan Sungai Batang Tapan PT. Dekky Karya Bestari di Kampung Muaro Sirih Nagari Muaro Sako, Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2012 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan CV. Teknik Sarana Mandiri di Kampung Sei Sirah Nagari Surantih, Kecamatan Sutra Kabupaten Pesisir Selatan
- 2012 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan Sungai Batang Tapan PT. Dekky Karya Bestari di Kampung Muaro Sirih Nagari Muaro Sako, Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2012 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan CV. Dua Putra di Kampung Gunung Malelo Nagari Rawang, Gunung Malelo, Kecamatan Sutra Kabupaten Pesisir Selatan
- 2012 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan di Kampung Mandarahan Nagari Palangai Kaciak Balai Selasa, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

12. Organisasi Profesi

- 2014-sekarang : Anggota Tim Pembinaan dan Supervisi Penerapan/Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Sumatera Barat
- 2013-sekarang : Anggota Tim Teknis/Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Barat
- 2012-sekarang : Wakil Ketua INKALINDO-KLHS Provinsi Sumatera Barat
- 2010-2016 : Anggota Peneliti *Dewan Riset Daerah* (DRD) Provinsi Sumatera Barat
- 2010-sekarang : *University Networking* KLHS/Pembina Anggota Jejaring Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perguruan Tinggi se- Indonesia
- 2010-sekarang : Ketua Bidang Pengkajian Teknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan (PERWAKU) Provinsi Sumatera Barat
- 2009-sekarang : Direktur Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB)
- 2008-sekarang : Anggota Tim Teknis/Penilai AMDAL Kota Padang

Padang, April 2017



DR. H. Marganof, M.Si

CURRICULUM VITAE

BIODATA

Nama : **SYAIFUDDIN ISLAMI, STP, M.Si**
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Gading/ 14 Juli 1980
Status : Kawin
Jabatan : Ketua LSM Andalas Bumi Lestari
Alamat : Komplek Graha Andalas Asri Blok C/4 Padang
Hp/WA : 081266074423
E-mail : il_lam@yahoo.co.id
Web Site : www.syaifuddinislami.blogspot.com
Keahlian : Pemberdayaan masyarakat khusus Manajemen Bank Sampah, Penyusunan dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), Dokumen SLHD, Profil Kehati, Map Info, SPSS, Teknologi Tepat Guna.

A. PENDIDIKAN FORMAL

1. *Sarjana (S1) Program Studi Teknologi Hasil Pertanian* Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang (Tahun 1999-2004).
2. *Magister (S2) Program Studi Ilmu Lingkungan* Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang (Tahun 2004-2007).

B. PENGALAMAN KERJA

1. **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGELOLA SAMPAH DENGAN METODE "BANK SAMPAH".**

Tahun	Jenis Pelatihan	Peserta/ Narasumber/ Pembina/ Konsultan	Audiens	Tempat	Pelaksana
2017	Sosialisasi Bank Sampah	Narasumber	Pengurus Bank Sampah dan pengurus Desa	DLH Kota Pariaman	DLH Kota Pariaman
2017	Penetapan Bank Sampah Mutiara Indah sebagai Bank Sampah Induk	Konsultan	RT III RW IV ATTS Kota Bukittinggi	Kantor Bank Sampah Mutiara Indah	Pengurus Bank Sampah Mutiara Indah
2017	Pendirian Bank Sampah Kamboja	Konsultan	Warga RW V Kelurahan ATTS Kota Bukittinggi	Gedung Serba Guna RT III ATTS	DLH Prop. Sumbar
2017	Pendirian Bank Sampah Serunai	Konsultan	Warga RW IV Kelurahan ATTS Kota Bukittinggi	Kantor BAZ RT III ATTS	DLH Prop. Sumbar
2017	Pendirian Bank Sampah Anggrek	Konsultan	Warga RW III Kelurahan ATTS	Gedung Serba Guna	DLH Prop. Sumbar

			Kota Bukittinggi	RT III ATTS	
2017	Pendirian Bank Sampah Rose	Konsultan	Warga RW II Kelurahan ATTS Kota Bukittinggi	Kantor BAZ RT III ATTS	DLH Prop. Sumbar
2017	Pendirian Bank Sampah Dahlia	Konsultan	Warga RW I Kelurahan ATTS Kota Bukittinggi	Gedung Serba Guna RT III ATTS	DLH Prop. Sumbar
2017	Workshop Jejaring Bank Sampah 2017	Narasumber	Bank Sampah Se Sumatera Barat	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumbar	JPSM Ranah Minang dan DLH Sumbar
2017	Sosialisasi Bank Sampah	Narasumber	Dalam Rangka KKN Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	Masyarakat Nagari Kubang	FKM Unand
2016	Sosialisasi Pengelolaan sampah berbasis masyarakat; Manajemen Bank Sampah	Narasumber	Pengurus Bank sampah dan calon pengurus Bank Sampah di Kab. Solok Selatan	Kantor Lingkungan Hidup Solok Selatan	Kantor Lingkungan Hidup Solok Selatan
2016	Role Model Komunitas Peduli Lingkungan: Jejaring Bank Sampah Sumbar	Narasumber	LSM dan Jejaring Bank Sampah Sumbar	Bapdalda Propinsi Sumatera Barat	Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
2016	Pendirian Bank Sampah AFTA	Pembina	Alumni Fakultas Pertanian Unand	GOR Haji Agus Salim Padang	Yayasan AFTA
2016	Pendirian Bank Sampah Tarok Dipo Beseri	Narasumber	Warga Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi	Kantor Lurah Tarok Dipo	Asosiasi Bank Sampah Kota Bukittinggi
2016	Pendirian Bank Sampah Mitra Keluarga	Pembina	Warga Komplek Perumahan Wahana Tarok Kuranji Padang	Komplek Perumahan Wahana Tarok Kuranji Padang	Mandiri
2016	Kunjungan Prof. Toru dari Kitakyushu Unievrstity Ke Bank Sampah di Kota Padang	Pendamping	Bank Sampah Handayani	Bank Sampah Handayani	Kerjasama Universitas Andalas dengan JPSM Ranah Minang
2016	Pendirian Bank Sampah Handayani	Pembina	Warga Jl. Handayani RT 01 RW 14 Siteba Kec.	Jl. Handayani RT 01 RW 14 Siteba Kec. nanggalo	Mandiri

			nanggalo Padang	Padang	
2016	Manajemen Bank Sampah	Narasumber	Ibu Ibu PKK se Kecamatan Bonjol	Kantor Camat Bonjol Pasaman	BLH Pasaman
2016	Pendirian Bank Sampah Mutiara Indah	Konsultan	Warga Kelurahan ATTS Kota Bukittinggi	RT 4 RW 3 Kelurahan ATTS Kota Bukittinggi	Bapedalda Propinsi Sumbar
2016	Pendirian Bank Sampah Saayun Salangkah	Konsultan	Warga Kelurahan Puhun Tembok	RT 3 RW 5 Kelurahan Puhun Tembok Kota Bukittinggi	Bapedalda Propinsi Sumbar
2016	Sosialisasi Persampahan dan Pelatihan Pengelolaan sampah dengan Metode Bank Sampah	Narasumber	Ibu-Ibu PKK Kecamatan dan Jorong SeKecamatan Panti Kab. Pasaman	Kantor Camat Panti	BLH Kab. Pasaman
2016	Sosialisasi Persampahan dan Pelatihan Pengelolaan sampah dengan Metode Bank Sampah	Narasumber	Ibu-Ibu PKK Kecamatan dan Jorong SeKecamatan Bonjol Kab. Pasaman	Kantor Camat Bonjol	BLH Kab. Pasaman
2016	Workshop Jejaring Bank Sampah Tahun 2016	Nara sumber bersama Bambang Suwerda	Pengurus Bank Sampah SeSumatera Barat yg tergabung dalam JPSM RM	Bank Sampah Kurabu Padang Panjang	Bapedalda Propinsi Sumbar
2016	Sosialisasi Bank Sampah	Nara sumber	Pengurus bank sampah se Kabupaten Pesisir Selatan	Painan	Badan Lingkungan Hidup Kab. Pessel
2015	Workshop Jejaring Bank Sampah Tahun 2015	Nara sumber	Pengurus Bank Sampah SeSumatera Barat yg tergabung dalam JPSM RM	Bukittinggi	Bapedalda Propinsi Sumbar
2015	Pengelolaan persampahan dengan bank sampah	Nara sumber	Ibu-Ibu PKK dan pengurus bank sampah di Kecamatan Lubuk Sikaping	Lubuk Sikaping	BLH Kab. Pasaman
2015	Pelatihan Manajemen Bank Sampah	Nara sumber	Anggota Bank sampah se Kota Padang	Bank Sampah Sei Andok, Bank Sampah	Kantor Lingkungan Hidup Kota

			Panjang	Seruani, Bank sampah Teratai, Bank Sampah Kurabu	Padang Panjang
2015	Pelatihan Manajemen Bank Sampah	Nara sumber	Ibu-Ibu Komplek	Komplek Perumahan Depan Kampus STIPER Sawahlunto Sijunjung	Kampus STIPER SWL/SJJ
2014	Pelatihan Manajemen Bank Sampah	Nara sumber	Ibu-Dharmawanita Kab. Tanah Datar	Ruang Dharmawanita Kabupaten Tanah Datar	KLH Tanah Datar
2014	Pelatihan Manajemen Bank Sampah	Nara sumber	Ibu-Ibu PKK	Kantor Camat Sipora Utara	Camat Sipora Utara
2014	Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah	Nara sumber	Ibu-Ibu Pengrajin dan masyarakat Cikal Bakal pengurus Bank Sampah	Kantor Lingkungan Hidup Kota Solok	KLH Solok
2014	Workshop Jejaring Bank Sampah 2014	Narasumber	Camat dan Lurah yang terlibat dalam Gerakan Sumbar Bersih	Hotel Inna Muaro	Bapedalda Propinsi
2013	Sosialisasi bank sampah di Kota Padang	Nara sumber	Cikal Bakal pengurus Bank sampah di sekolah dan masyarakat di kota Padang	Bapedalda Kota Padang	SMK 6 Padang
2013	Pelatihan pengomposan limbah rumah tangga	Nara sumber	Masyarakat setempat	Sikakap, Tua Pejat, Bosua dan siberut utara	KLH Mentawai
2012	Studi Banding Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Gemah Ripah Kab. bantul Yogyakarta	Peserta	Pendiri Bank sampah Barokah Assalam dan Bapedalda Prop. Sumbar	Kab. bantul Yogyakarta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Bapedalda Propinsi Sumatera Barat
2010-2011	Pendampingan dan Pendirian Bank sampah "Barokah Assalam"	Pendiri dan motivator	Ibu-Ibu Komplek	Perumahan Dangau Teduh Lubuk Kilangan Padang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Bapedalda Prop. Sumbar
2010	TOT Pengelolaan	Nara sumber	Dosen dan	PSLH	Universitas

	Limbah Padat melalui Bank Sampah		PSLH	Universitas Bung Hatta	Bung Hatta
2010	Studi Banding pengelolaan Bank sampah dan Pemanfaatannya di Kab. Bantul Prop. Yogyakarta	Peserta	LSM Andalas Bumi Lestari	Kab. Bantul Prop. Yogyakarta	Kementerian Lingkungan hidup
2010	Tim Pendirian Bank Sampah Universitas Bung Hatta	Anggota Tim	Dosen dan PSLH	PSLH Universitas Bung Hatta	Universitas Bung Hatta

2. KEGIATAN PROFESIONAL

<i>Tahun</i>	<i>Jenis/ Nama Kegiatan</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Pelaksana</i>	<i>Tempat</i>
2011-2016	Tim Penilai Adipura Propinsi Sumatera Barat	Anggota Tim	KLHK	Se Sumatera Barat
2014-2017	Tim Penilai Gerakan Sumbar Bersih Propinsi Sumatera Barat	Anggota Tim	Bapedalda Prop. Sumbar	Se Sumatera Barat
2011-2017	Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Propinsi Sumatera Barat	Anggota Tim	Bapedalda Prop. Sumbar	Se Sumatera Barat
2009-2015	Tim Penilai Menuju Indonesia Hijau	Anggota Tim	Kementerian Lingkungan Hidup	Se Sumatera Barat
2013	Penghijauan dan pembuatan kompos	Ketua	STIPER Swl/Sjj	Perumahan STIPER
2013	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Narasumber	KLH Kab. Mentawai	Sikakap, Tua Pejat, Bosua dan siberut utara
2012	<i>Pola Hidup Ramah Lingkungan</i>	Narasumber	KLH Kab. Mentawai	Sikakap
2012	Studi AMDAL Pembangunan PLTM di IV Nagari Palembayan Kabupaten Agam	Tim ahli pertanian dan sosial		IV Nagari Palembayan Kab. Agam
2011 dan 2012	Penyusunan Dokumen UKL/UPL diantaranya: - PT. FIF Padang - Laboratorium Sejawat Putra Pasaman di Kab. Pasaman Sumatera Barat.	Tim Penyusun/Tim Ahli	DECA Consulting	PT. FIF Padang dan Laboratoeium Sejawat Putra Pasamn
2011	Menyusun Dokumen DPLH beberapa KUD sebagai anak angkat dari PT. Wilmar Group. - Mutiara Sawit Jaya	Tim Penyusun/Tim Ahli	DECA Consulting	PT. Wilmar Group

	<ul style="list-style-type: none"> - Mutiara Sawit Jaya Kinali - Manggopoh I - Yayasan Tanjung Manggopoh - Bukik Sanding 3 - Tompek Tapian Kandis - Dastra Plasma 2 AMP 1 - Dastra Plasma 4 AMP 3 			
2011	Studi DELH Pembangunan Jalan Nipah Teluk Bayur	Tim ahli lingkungan	PT. Syntac Pratama	Nipah Teluk Bayur Padang
2011	Studi AMDAL Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang	Tim ahli lingkungan	PT. Syntac Pratama	Aie Pacah
2011	Studi AMDAL SPAM IKK Lubuok Tarok Kab. Sijunjung	Tim ahli lingkungan	PT. Syntac Pratama	Lubuok Tarok Kab. Sijunjung
2010	Penyusunan DELH Irigasi Batang Sinamar	Ketua Tim	Prop. Sumbar	Batang Sinamar Kab. Tanah Datar
2011	Penyusunan SLHD Kota Padang	Tenaga Ahli Pertanian dan Lingkungan	Bapedalda Kota Padang	Kota Padang
2010	Penyusunan SLHD Kota Pariaman	Tenaga Ahli Lingkungan	Kota Pariaman	Kota Pariaman
2010	Studi AMDAL Pembangunan Kampus II Universitas Bung Hatta oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Bung Hatta	Tim ahli lingkungan	Yayasan Bung Hatta	Aie Pacah Kota Padang
2008	Tim Penyusun Dokumentasi Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan (DPPL), diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan Kelapa Sawit PT Wilmar Group di Propinsi Sumatera Barat oleh Deca Consulting, diantaranya: (PT.KAMU, PT.PANP, PT.PMJ). - PTPN VI di Jambi (Unit RIMSA, Unit RIMDU dan Unit Durian Luncuk. 	Tim Penyusun	PT. Wilmar dan PTPN VI	Sumatera Barat dan Jambi
2007-2014	Konsultan Lingkungan	Tenaga Ahli	CV. Gibran ATTALA	Se Sumatera Barat
2007	Studi AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Sumatera Ranah Indonesia di Sijunjung Propinsi Sumatera Barat	Tim ahli lingkungan	PT. Agro Sumatera Ranah Indonesia	Kab. Sijunjung

2007	Studi AMDAL Perkebunan Kelapa Sawit PT. Lubuk Palma Sumatera di Sijunjung Propinsi Sumatera Barat	Tim ahli lingkungan	PT. Lubuk Palma Sumatera	Kab. Sijunjung
2009-2014	Dewan Sumber Daya Air	Anggota	Dinas PSDA Sumbar	Dinas PSDA Sumbar
2008-2017	Pengajaran	Dosen	STIPER SWL/SJJ	Muaro Sijunjung
2008-2009	Water Resources Management pada kegiatan Basin Water Resources Management (BWRM) Water Irigation Sector Management Program (WISMP) di Sumatera Barat. Program ini Funding dari Netherland Grant & World Bank Loan	Assisten Co Team Leader	BWRM/WISMP	Dinas PSDA Sumbar
2007 - 2011	Komisi Penilai AMDAL	Anggota	Bapedalda Propinsi Sumatera Barat	Bapedalda Propinsi Sumatera Barat
2006-2016	Yayasan Andalas Bumi Lestari	Ketua	LSM ABL	Padang
2004-2006	Fasilitator Desa dan Tenaga Ahli Pertanian Program (MCRMP). Funding Asia Development Bank. Pelatihan yang dilakukan: - Teknologi Tepat Guna Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) - Pembuatan cendera mata dari limbah padat di tepi pantai.	Fasilitator dan Tenaga Ahli Pertanian	Dinas Kelautan dan Perikanan kota Padang Bekerjasama dengan Yayasan Hayati Lestari (SAHATI) dalam kegiatan Marine Coastal Resources Management	Sungai Pisang Kota Padang Sumatera Barat

3. PENGHARGAAN

PENGHARGAAN PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2010	Peringkat Terbaik Pertama Pelatihan Penyusunan AMDAL Angkatan ke-48 PSLH UGM	Ketua PSLH UGM

4. TIM PENELITIAN DAN SURVEY LINGKUNGAN

2001 – 2016

PENGALAMAN PENELITIAN			
<i>Tahun</i>	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Ketua/Anggota Tim</i>	<i>Sumber Dana/Jurnal</i>
2016	Pengendalian Hama Pada Baglog dengan Ramuan Organik Untuk Meningkatkan Produksi dan Ekonomi Petani Jamur Tiram (<i>Pleurotus ostreatus</i>) di Kabupaten Sijunjung	Anggota	Penelitian Dosen Pemula Ristekdikti
2015	Kebijakan pengelolaan lingkungan dengan metode bank sampah berbasis pemberdayaan masyarakat di Sumatera Barat	Ketua	Jurnal AGROTROPICAL. Vol.5 No.2 Des 2015 ISSN : 1829-8656. Hal.46-51
2014	Kajian model reklamasi pasca penutupan tambang emas rakyat menjadi lahan pertanian produktif sebagai upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal di Kabupaten Sijunjung	Ketua	Jurnal Menara Ilmu LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
2014	Diversifikasi konsumsi pangan berbasis potensi lokal dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat	Ketua	Jurnal Menara Ilmu LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
2014	Kearifan Ekologi dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sumatera Barat	Ketua	Jurnal Agrotropical Vol 4 No 1 juli 2014 ISSN: 1829-8656
2013 s/d 2014	Survey Elektabilitas dan Popularitas Caleg Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sijunjung	Tenaga Ahli	Mitra Politica Indonesia
2014	Survey elektabilitas dan popularitas bakal calon Kepala Daerah pra pemilukada di Kabupaten Sijunjung	Tenaga Ahli	Mitra Politica Indonesia
2013	Hubungan kondisi lingkungan keluarga dengan gizi dan pangan balita	Ketua	Jurnal Agrotropical No 2 Vol 3 Des 2013 STIPER Sijunjung
2013	Membangun sistem agribisnis melalui pengembangan industri tahu	Ketua	Jurnal Ekotrans No2 Vol 13 Juli 2013, LPPM Universitas Ekasakti Padang
2012	Hubungan antara ketahanan pangan dengan status gizi anak di Kelurahan Teluk Kabung Selatan (Sungai Pisang) Kec. Bungus Teluk Kabung Padang	Ketua	Jurnal Agrotropical No 1 Vol 2 Juli 2012
2010	Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana Di Sumatera Barat	Ketua	Proceeding Konfrensi Nasional Penanggulangan Bencana dan Kewrusakan Lingkungan ISSN :2087-6343

2009	kearifan lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati propinsi Sumatera Barat	Tim Penyusun	Kementerian Lingkungan Hidup
2009	Penyusunan status keanekaragaman hayati Propinsi Sumatera Barat	Tim Penyusun	Kementerian Lingkungan Hidup
2008	<i>Voter Behavior for election 2008</i> di Jambi. Penelitian ini fokus pada perspektif pemilih untuk partai dan figure nasional serta kondisi ekonomi di Kab. Kerinci.	Anggota	LSI
2007	Penelitian tentang Perumahan, drainase dan kondisi lingkungan di Pasaman Barat	Anggota	Bappeda Sumatera Barat bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Ekonomi Bung Hatta
2007	Penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)	Anggota	Bappeda Sumatera Barat bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Ekonomi Universitas Bung Hatta
2007	Tesis : Hubungan Antara Kondisi Lingkungan Dengan Status Kesehatan Balita Di Kelurahan Teluk Kabung Selatan (Sungai Pisang) Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang	Ketua	Mandiri
2006	Penelitian Pulau-Pulau Kecil di Sumatera Barat (Pessel, Padang and Mentawai).	Anggota	Kerjasama Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang dengan CV. Bina Citra Consultant
2006	Sudi Komunikasi yang Efektif Untuk Kampanye Penyelamatan Terumbu Karang (COREMAP) Tua Pejat, Saliguma, Katurei, dan Sikakap	Anggota	Kerjasama Dinas Kelautan Mentawai dengan Yayasan <i>Minang Bahari</i>
2006	Studi Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat di Alahan Panjang	Anggota	Yayasan Anggari Dinamika Globa
2005	Tim Survey Petunjuk Teknis Pengelolaan Kawasan Lindung di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit di Bakrie Pasaman Plantation di Pasaman Barat	Anggota	Bapedalda Prop. Sumbar
2004	Skripsi : Pengaruh Ukuran Partikel Arang Aktif Cangkang Kelapa Sawit Sebagai Adsorben Dalam Pemurnian Gambir (<i>Uncaria gambir Roxb.</i>).	Ketua	Mandiri
2001	Inventarisasi gua di Kabupaten Sijunjung (Solok Ambah, Poru dan Aie Angek)	Koordinator	Mandiri

C. PELATIHAN DAN KURSUS TAMBAHAN

1. 14-17 Desember 2010. Studi Banding pengelolaan Bank sampah dan Pemanfaatannya di Kab. Bantul Prop. Yogyakarta. Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Yayasan Andalas Bumi Lestari.

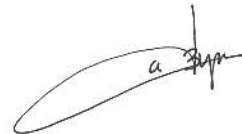
2. 17 Oktober 2010. ToT Pengelolaan Limbah Padat melalui Bank Sampah. Narasumber: Bambang Suwerda (pendiri Bank Sampah Gemah Ripah Bantul). PSLH Bung Hatta.
3. 17 Maret s/d 27 April 2010. Pelatihan **AMDAL PENYUSUN (AMDAL B)**. PSLH Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
4. 10 -11 Agustus 2009 (2 Hari). Sosialisasi dan Asistensi Program *Menuju Indonesia Hijau* Regional Sumatera 2009. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera. Pekan Baru.
5. 17 Juni 2009 (1 hari) . Peserta Pelatihan Pembuatan Web Balai Kliring Kehati dengan Menggunakan Soft Ware Joomla. Kerjasama Deputi Kehati Kementerian Lingkungan Hidup.dengan Bapedalda Propinsi Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach di Padang,
6. 28 November sampai 5 Desember 2007 (8 hari). "Achievment Motivation Training". *Dinas Perindag* Propinsi Sumatera Barat. Balai Diklat Propinsi Sumatera Barat Lubuk Lintah Padang.
7. Parai View Hotel Bukittinggi, 19 Februari sampai 2 Maret 2007 (12 hari). Peserta Pelatihan *Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)*. *Departemen Pekerjaan Umum* Sumatra Barat.
8. Hotel Ambacang Padang, 29 August sampai 31 August 2006 (3 hari). Peserta Pelatihan Consultan Finances Friends Bank (KKMB) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat.
9. Bali, 20-27 April 2006 (8 hari). Studi Banding pengelolaan Terumbu Karang dan ikan hias di Kantor Reef Check dan Nelayan Ikan Hias Binaan Reef Check Bali (Ocean Marine aquarium) di Bali. Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dengan Yayasan Hayati Lestari.
10. Sungai Pisang Padang 14 April sampai 16 April 2006 (3 hari). Instruktur Pelatihan Eko Wisata dalam Mata Pencaharian Alternatif / MPA (MCRMP). Bekerjasama dengan DKP Kota Padang dengan SAHATI.
11. Universitas Andalas. di Kampus Pasca Sarjana. 22 August sampai 29 August 2005 (8 hari). Peserta Pelatihan *Map Info*.
12. Batu Busuk Limau Manis 20-22 September 2002 (3 hari). Peserta Pelatihan Participatory Rural Apraisal (PRA) dalam rangka pengabdian masyarakat *Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam (KOMMA FP-UA)*.
13. Padang 21-25 September 2001 (5 hari). Peserta Pelatihan Kader Konservasi dan Pecinta Alam UKSDA Propinsi Sumatera Barat.
14. Cisarua Bogor, 8 January sampai 15 January 2001 (8 hari). Peserta Pelatihan Exploration Cave Technical in Carst area Kerjasama Hikespi dengan Geologi Bandung.
15. Padang 18-27 September 1999 (10 hari), Peserta Pendidikan Dasar Cinta Alam (PDCA) XVI. Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam (KOMMA FP-UA) Fakultas Pertanian Univ. Andalas.

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. 2013-2018. Ketua Jejaring Bank Sampah Ranah Minang Propinsi Sumatera Barat. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat.
2. 2012-2017. Sekretaris Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia DPW Sumatera Barat.

3. 2009-2014. Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (Perwaku) Sumbar.
4. 2009-2014, Anggota Dewan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat Utusan Dari LSM Andalas Bumi Lestari. Lembaga ini konsern pada permasalahan Sumber Daya Air dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur.
5. 2006-2009 dan 2015-2018, Ketua Yayasan Andalas Bumi Lestari. Lembaga ini konsern pada Konservasi, Sumber Daya Air, AMDAL, Pengelolaan sampah dan Pelestarian Lingkungan.
6. 2003-2004, Pendiri dan Ketua Agricultural Information Club (AgITC) di Fakultas Pertanian Unand. Lembaga ini Focus pada Informasi dan Technology Untuk Pertanian Dan Aplikasi Software Untuk Pertanian.
7. 2001-2002. Dewan Legislatif Mahasiswa. Fakultas Pertanian UNAND .
8. 1999-2004, Anggota dan Pengurus *Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam* (KOMMA FP-UA) Fakultas Pertanian UNAND.

Padang, 3 Mei 2017



SYAIFUDDIN ISLAMI, S.TP, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

NOTA DINAS

Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Untuk : Sekretaris, Para Kabid, Kasi/Kasubag di Lingkup DLH
Tanggal : 17 Maret 2017
Perihal : Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).

Isi :

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S. 156/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2017, proses pemberian penghargaan Nirwasita Tantra didasarkan atas penilaian kualitas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang sebelumnya dikenal dengan dokumen berupa Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
2. Mengacu kepada pedoman penyusunan dokumen IKPLHD sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas, maka terjadi perbedaan yang signifikan antara penyusunan dokumen IKPLHD dengan penyusunan SLHD baik dari format data maupun *out line* penulisan buku analisis.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk itu kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada rapat :

Hari/tanggal : Senin/20 Maret 2017

Pukul : 10.00 wib s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

- Agenda :
1. Pengenalan Juknis DIKPLHD
 2. Informasi Rencana Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Supervisi
 3. Dan lain-lain dirasa perlu
















Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



KEPALA
Drs. ASRIZAL ASNAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19570803 198503 1 005

DAFTAR HADIR

RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
 SENIN, 20 MARET 2017
 RUANG RAPAT BAPEDALDA LT.2

NO	NAMA	INSTANSI	NO TELP	TANDATANGAN
1	Arisal Asnan	Dirins LH		
2	Yantonus	Bd-HL		
3	DESRIAN			
4	Siti Angra	DLH PIR		
5	Rerecaushty	DLH PIR. Wadag		
6	Zaki Fachranawati	DLH Prov. Sulawesi	085244211541	
7	FERDI YENI JAH	DLH Prov Sulawesi		
8	Posta ?	Bid TL		
9	Risilla	Bidang TL		
10	Yasmike Jura	---		
11	Basri	Kabang PSUB3R		
12	M. Sidik P	Bidang P2HK		
13	M. Arief N.	---		
14	Noreni	Bidang TL		
15	Dev, Hendra	DLH prov. Sulawesi		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Nomor : 005/484/TL/DLH-2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persiapan Pelaksanaan Konsultasi Publik

Padang, 13 April 2017

Kepada Yth.:

(*Sebagaimana Daftar Lampiran*)
di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti rapat yang telah dilaksanakan tanggal 20 Maret 2017 perihal Arahan Terkait Mekanisme Penulisan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-449-2017 tanggal 12 April 2017 telah dibentuk Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Keputusan Gubernur Terlampir) yang akan berperan di dalam memberikan arahan dan bimbingan serta teknis di dalam penyusunan dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya yang melalui Surat Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan Tim Penulis Dokumen IKPLHD.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk itu kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada rapat :

Hari/tanggal : Senin/17 April 2017

Pukul : 10.00 wib s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

- Agenda :
1. Arahan dan penajaman pembagian tugas Tim Penyusun dan Tim Supervisi
 2. Pembahasan target waktu penyelesaian penulisan
 3. Rencana Kosultasi publik terkait isu prioritas lingkungan hidup untuk penyusunan dokumen IKPLHD
 4. Dan lain-lain dirasa perlu

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Drs. ASRIZAL ASNAN, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19570803 198503 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Peringgal.

Lampiran

Surat Nomor : 005/484/TL/DLH-2017
Tanggal : 13 April 2017
Perihal : Persiapan Pelaksanaan Konsultasi Publik

Daftar Alamat yang dituju:









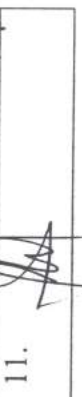

Kepada Yth.:

1. Sdri. Sekertris;
2. Sdri. Kabid Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
3. Sdri. Kabid Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan;
4. Sdri. Kasi Kajian Dampak Lingkungan
5. Sdr. Kasi Pemeliharaan
6. Sdr. Kasi Pengelolaan Sampah
7. Sdr. Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
8. Sdr. Drs. Bustanul Arifin, MSi
9. Sdr. DR. Khairul, MS
10. Sdr. DR. Marganof, MSi
11. Sdr. Syaifuddin Islami, STP, MSi
12. Sdr. Sdri. Aulia Ramadhani, S.Si, MSi
13. Sdr. M. Sidik Pramono, ST
14. Sdr. Zaki Fatramansia, ST, MSi
15. Sdr. Dedi Harian, ST.
16. Para staf di bidang Tata Lingkungan

DAFTAR HADIR

Rapat Persiapan Pelaksanaan Konsultasi Publik terkait isu prioritas Lingkungan Hidup untuk penyusunan dokumen IKPLHD

Hari : Senin
 Tanggal : 17 April 2017
 Tempat : DLH Propinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	INSTANSI	HP	Email	TANDA TANGAN
1	Drs. Asrizal Kurniawan	DLH prop. Sumbar			1. 
2	Armidir				2. 
3	Bustanul Arifin				3. 
4	Marganof	PSUH UMSB	081510928345		4. 
5	Chairul	PSUH Umand	081374092952		5. 
6	Aulis R				6. 
7	Viani				7. 
8	Devi Hendra				8. 
9	SYAIFUDDIN ISLAMI	USM ABL			9. 
10	Zeki Fatamansya				10. 
11	Feri Alay				11.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Nomor : 005/1486/TL/DLH-2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

Padang, 13 April 2017

Kepada Yth.:

Ka. Instansi Lingkungan Hidup se-Sumatera Barat
di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.156/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan penilaian dan penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2017 pada Daerah yang menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang sebelumnya dikenal dengan dokumen SLHD.
2. Mengacu pada pedoman penyusunan DIKPLHD sebagaimana dimaksud dalam surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas, perlu ditetapkan isu prioritas lingkungan hidup yang didasarkan pada proses penjaringan isu dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mengundang Saudara untuk dapat menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/18 April 2017

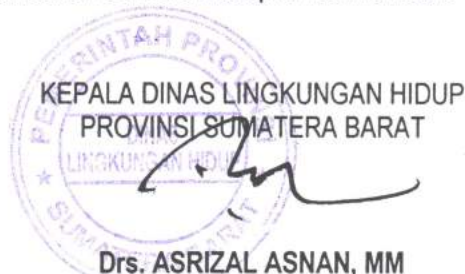
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Acara : 1. Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Sumatera Barat

2. Dan lain-lain dirasa perlu

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Drs. ASRIZAL ASNAN, MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19570803 198503 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Bapak Bupati/Walikota se-Sumatera Barat di Tempat;
3. Peringgal.

Lampiran Surat Nomor : 005 / 486 / TL / DLH - 2017
Tanggal : 13 April 2017
Perihal : Undangan

Daftar Alamat yang dituju:

1. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok di Solok;
3. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh di Payakumbuh;
4. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
5. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam di Lubuk Basung;
6. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat;
7. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan di Painan;
9. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok di Arosuka;
10. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang di Padang;
11. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kep Mentawai di Tuapejat;
12. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar di Batusangkar;
13. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Sijunjung di Muaro;
14. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
15. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
16. Sdr. Ka. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Solok Selatan di Padang Aro;
17. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Kab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
18. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Kab. Pasaman di Lubuk Sikaping;
Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Nomor : 005 / 484/TL/DLH-2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

Padang, 13 April 2017

Kepada Yth.:

(Sebagaimana terlampir)
di -

Tempat

Dengan hormat,

Menyusul surat kami terdahulu No. 660/431/TL/DLH-2017 tanggal 3 April 2017 perihal Penjaringan Isu dan Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan dilaksanakan pertemuan dalam rangka penjaringan isu prioritas lingkungan hidup di Sumatera Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/18 April 2017
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Acara : 1. Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Sumatera Barat
2. Dan lain-lain dirasa perlu

Diharapkan kepada Saudara untuk dapat membawa dan menyampaikan data isu lingkungan dan/atau inovasi pengelolaan lingkungan terkait dengan OPD masing-masing sesuai dengan permintaan kami pada surat di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT


Drs. ASRIZAL ASNAN, MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19570803 198503 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Pertinggal.

Lampiran Surat Nomor : 005 / 484 / TL/DLH-2017
Tanggal : 13 April 2017
Perihal : Undangan

Daftar Alamat yang dituju:

Kepada Yth.:

1. Sdr. Ka. Bappeda Prov. Sumbar;
2. Sdr. Ka. BPBD Prov. Sumbar;
3. Sdr. Ka. Dinas PSDA Prov. Sumbar
4. Sdr. Ka. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumbar;
5. Sdr. Ka. Dinas Kehutanan Prov. Sumbar
6. Sdr. Ka. Dinas ESDMProv. Sumbar
7. Sdr. Ka. Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sumbar
8. Sdr. Ka. Dinas Pariwisata Prov. Sumbar
9. Sdr. Ka. Dinas Perindag Prov. Sumbar
10. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Prov. Sumbar
11. Sdr. Ka. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Nomor : 660/1483/TL/DLH-2017
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Fasilitator Penjaringan Isu
Prioritas Lingkungan Hidup di Sumatera
Barat

Padang, 13 April 2017

Kepada Yth :

Sdr. Dr. Ardinis Arba'in (Pakar Lingkungan)

di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.156/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan penilaian dan penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2017 pada Daerah yang menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang sebelumnya dikenal dengan dokumen SLHD.
2. Mengacu pada pedoman penyusunan DIKPLHD sebagaimana dimaksud dalam surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas, perlu ditetapkan isu prioritas lingkungan hidup melalui proses penjaringan isu dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
3. Pertemuan penjaringan isu prioritas lingkungan hidup dimaksud akan dilaksanakan pada hari **Selasa tanggal 18 April 2017 jam 10.00 WIB** di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. **Sumbar**.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya kesediaan Saudara agar dapat menjadi narasumber/fasilitator pada pertemuan penjaringan isu dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. ASRIZAL ASNAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19570803 198503 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth.;

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Pertinggal.

DAFTAR HADIR

KEGIATAN PENJARINGAN ISU PRIORITAS DOKUMEN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Hari : Selasa
 Tanggal : 18 Maret 2017
 Tempat : DLH Propinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	INSTANSI	HP	Email	TANDA TANGAN
1	Fadjar Sembun	PSLH Unand	081219712496	fgembun@gmail.com	1.
2	Tulia Kristina D.	DLH Propi Kab. Pang. Pariis	08126711458	Wpudjpani@gmail.com	2.
3	RIFA1	YCMIM	08137979785	mayalire@yahoo.co.id	3.
4	WENI DAERI	DLH Propi Kab. Pd. Pasa	08226156520	wendark@yahoo.com	4.
5	Fajar Koto	KBL (Andalas Rumi Labari)	082291251161	rajarektorad@gmail.com	5.
6	ANDRIANS	DLH Propi Universitas Pror. SIB	08126742831	asylre.zulhanap@gmail.com	6.
7	SUSILASTRI	Universitas Muhammadiyah	081374920987	Susi.kasht34@yudha.com	7.
8	RACHUL AMAN	RSIN	08526303811		8.
9	Murmelawati	DINNES. PREU	08126767304	harunawati34@yahoo.com	9.
10	Hani PRABOWO	PERHAPI	081328511025		10.
11	NILSAMUD	Pempada	081363160215	willwajid2019@gmail.com	11.

12	NIKHUS DEWIKA	PSIHP - UMP	081266818841	l_dewika@yahoo.com	12
13	Dora Anggraeni Kiki	PKH. BUES.			13.
14	Selli Muzara	PKH. RUC.	080220257774		14.
15	Nasyrafal Carto	PSL UBT#	081266272364	cartoanlingkuluraci	15.
16	Leni Purnada Sari	KKI UDARI	082170487460	leny-kuh89@yahoo.com	16.
17	Yulina	DLH PASBAR	081267488315	yulina.hariyanto.com	17.
18	H. miyarsa	DLH. Pharmacy	081313299585		18.
19	Murpadi	DLH Dharma Jaya	081363793511		19.
20	Nurma A	RPSID Pua	081210702159	nyusraid@gmail.com	20.
21	Fitriana Octayana	PKP O Pua	082305924002	fitriana.o@gmail.com	21.
22	Joni C	PKP O Pua	085215725773	jonis@gmail.com	22.
23	Rosnelly Pasia	Dustanhost Gun	0811663442	rosnellypasia@gmail.com	23.
24	Erniwa Agreni	Bmas Perkimh Pd. Pangang	081374430070	perkimhpd@gmail.com	24.
25	Berada	"	085249503843	"	25.
26	Hardam.	Rina Pringka	08235875508	hardam.06@gmail.com	26.
27	Syafida	"	081363204670	syafidagadua@gmail.com	27.

12. Dewi

14. Selli

16. Leni

17. Yulina

18. H. miyarsa

19. Murpadi

20. Nurma A

21. Fitriana Octayana

22. Joni C

23. Rosnelly Pasia

24. Erniwa Agreni

25. Berada

26. Hardam.

27. Syafida

28	ALFA	DINAS CH Kab Ag-	085263326965	alfanitagmail.c.	28.
29	DIMI MURTIKA JUBI	-	08219451545	dimi-murtikasini@yahoo.com	29.
30	EKA AMELIA	DLH Payakumbuh			30.
31	Rico Ivande	DLH Payakumbuh	081328890950	ricorivande@gmail.com	31.
32	Andy Ikhwan	DINAS PSDA			32.
33	Raulnasser	Wuasel	08126700032		33.
34	SUKARDI	DLH. KOTA SOLOR	08126749064		34.
35	JOHN NITZE	DLH. KOTA SOLOR	08537508363		35.
36	ELDKRITA	Petkim-HI Siginjin	081263015987		36.
37	Titis Ermingsih	DLH PRP Kab. Solok	08121974288	nengnawani@gmail.com	37.
38	Jesti	-			38.
39	Machsondy	DLH. Kab. Solok	081374737427		39.
40	Alvan Padmawan	DLH. Kab. Solok	085266673968		40.
41	Nika P	DLH PRK Kab. Pasaman	081963261964		41.
42	Wendyganp	DLH. Kab. Puncak	085274598464	wendyganp1980@gmail.com	42.
43	Kelvin P.	-	08574222415		43.

Handwritten signatures and initials corresponding to the rows in the table, including names like 'Raulnasser', 'Sukardi', 'John Nitze', 'Eldkrita', 'Titis Ermingsih', 'Jesti', 'Machsondy', 'Alvan Padmawan', 'Nika P', 'Wendyganp', and 'Kelvin P.'.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Nomor : 005 / 508 / TL / DLH - 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Evaluasi Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Padang, 21 April 2017

Kepada Yth.:

(*Sebagaimana Daftar Lampiran*)
di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penjarangan dan penetapan isu prioritas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengacu kepada pedoman teknis penyusunan dokumen IKPLHD yang telah dikeluarkan oleh KLHK, maka isu prioritas lingkungan hidup yang telah ditetapkan harus diintegrasikan kedalam penulisan buku analisis. Disamping itu dokumen IKPLHD juga memuat Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelola lingkungan hidup.
2. Untuk mengintegrasikan isu prioritas lingkungan hidup kedalam buku analisis, serta untuk penajaman di dalam penulisan Inovasi Daerah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap dokumen IKPLHD yang telah disusun oleh Tim Penulis sebagai bahan di dalam proses pendampingan secara langsung dan total oleh Tim Supervisi kepada Tim Penulis yang akan dilaksanakan nantinya.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami undang Saudara untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 April 2017

Pukul : 10.00 wib s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jl. Khatib Sulaiman No 22 Padang

Agenda : 1. Evaluasi penulisan dokumen IKPLHD yang sudah Dilaksanakan
2. Informasi tentang integrasi isu prioritas lingkungan hidup kedalam penulisan analisis
3. Penajaman penulisan inovasi daerah
4. Pembahasan terkait persiapan supervisi dari Tim Supervisi kepada Tim Penulis secara langsung dan komprehensif yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 28 April 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan hadirannya Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA

Drs. ASRIZAL ASNAN, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19570803 198503 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Peringgal.

Lampiran

Surat Nomor : 005 / 508 / TL / DLH - 2017
Tanggal : 21 April 2017
Perihal : Evaluasi Penulisan Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Daftar alamat yang dituju:












Kepada Yth.:

1. Sdri. Sekeratri;
2. Sdri. Kabid Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
3. Sdri. Kabid Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan;
4. Sdri. Kasi Kajian Dampak Lingkungan
5. Sdr. Kasi Pemeliharaan
6. Sdr. Kasi Pengelolaan Sampah
7. Sdr. Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
8. Sdr. Drs. Bustanul Arifin, MSi
9. Sdr. DR. Khairul, MS
10. Sdr. DR. Marganof, MSi
11. Sdr. Syaifuddin Islami, STP, MSi
12. Sdr. Sdri. Aulia Ramadhani, S.Si, MSi
13. Sdr. M. Sidik Pramono, ST
14. Sdr. Zaki Fatramansia, ST, MSi
15. Sdr. Dedi Harian, ST.
16. Para staf di bidang Tata Lingkungan

DAFTAR HADIR

Rapat Evaluasi Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Hari : Rabu
 Tanggal : 26 April 2017
 Tempat : DLH Propinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	INSTANSI	HP	Email	TANDA TANGAN
1	Dr. Arizal Azman, um	DLH Prov. Sumbar			1. 
2	Buataul Atipis				2. 
3	Devi Herda				3. 
4	Murnanof	BLH UM SB			4. 
5	Chairae	PLH Luwee			5. 
6	Aulie R				6. 
7	Vlank				7. 
8	Zaki Fekamansa				8. 
9	syafuddin Islami	ISM ASL			9. 
10	Fari Aedy				10. 
11	Armi'ati	Kepjanda. DLH.			11. 

12	Jankowi	DH				12	Carsten
13	Jankowi DHB	DH				13.	
14	Prilla Tumari	DH Prov. Sumbawa				14.	
15	Dwi Ewita	DH Prov. Sumbawa				15.	
16	Peta 2	DH Prov. Sumbawa				16.	
17	Rampik	DH Prov. Sumbawa				17.	
18	DARIZKA					18.	
19	Siti Aisyah					19.	
20	Rodi Mariani					20.	
21	M. Arief N.					21.	
22						22.	
23						23.	
24						24.	
25						25.	
26						26.	
27						27.	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Nomor : 005 / 508 / TL / DLH - 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Evaluasi Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Padang, 21 April 2017

Kepada Yth.:

(*Sebagaimana Daftar Lampiran*)
di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penjarangan dan penetapan isu prioritas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengacu kepada pedoman teknis penyusunan dokumen IKPLHD yang telah dikeluarkan oleh KLHK, maka isu prioritas lingkungan hidup yang telah ditetapkan harus diintegrasikan kedalam penulisan buku analisis. Disamping itu dokumen IKPLHD juga memuat Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelola lingkungan hidup.
2. Untuk mengintegrasikan isu prioritas lingkungan hidup kedalam buku analisis, serta untuk penajaman di dalam penulisan Inovasi Daerah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap dokumen IKPLHD yang telah disusun oleh Tim Penulis sebagai bahan di dalam proses pendampingan secara langsung dan total oleh Tim Supervisi kepada Tim Penulis yang akan dilaksanakan nantinya.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami undang Saudara untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 April 2017

Pukul : 10.00 wib s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jl. Khatib Sulaiman No 22 Padang

Agenda : 1. Evaluasi penulisan dokumen IKPLHD yang sudah Dilaksanakan
2. Informasi tentang integrasi isu prioritas lingkungan hidup kedalam penulisan analisis
3. Penajaman penulisan inovasi daerah
4. Pembahasan terkait persiapan supervisi dari Tim Supervisi kepada Tim Penulis secara langsung dan komprehensif yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 28 April 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan hadirannya Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA

Drs. ASRIZAL ASNAN, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19570803 198503 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Peringgal.

Lampiran

Surat Nomor : 005 / 508 / TL / DLH - 2017
Tanggal : 21 April 2017
Perihal : Evaluasi Penulisan Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Daftar alamat yang dituju:




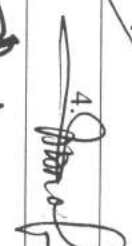



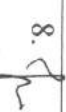

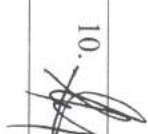

Kepada Yth.:

1. Sdri. Sekeratri;
2. Sdri. Kabid Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
3. Sdri. Kabid Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan;
4. Sdri. Kasi Kajian Dampak Lingkungan
5. Sdr. Kasi Pemeliharaan
6. Sdr. Kasi Pengelolaan Sampah
7. Sdr. Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
8. Sdr. Drs. Bustanul Arifin, MSi
9. Sdr. DR. Khairul, MS
10. Sdr. DR. Marganof, MSi
11. Sdr. Syaifuddin Islami, STP, MSi
12. Sdr. Sdri. Aulia Ramadhani, S.Si, MSi
13. Sdr. M. Sidik Pramono, ST
14. Sdr. Zaki Fatramansia, ST, MSi
15. Sdr. Dedi Harian, ST.
16. Para staf di bidang Tata Lingkungan

DAFTAR HADIR

Rapat Pembahasan terkait persiapan supervisi dari tim supervisi kepada tim penulis secara langsung dan komprehensif

Hari : Kamis
 Tanggal : 27 April 2017
 Tempat : DLH Propinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	INSTANSI	HP	Email	TANDA TANGAN
1	Fauzans	DLH			1. 
2	Fitriwidia				2. 
3	SYAFIUDDIU ISTAMU	LSM ABL			3. 
4	Maryunof	PSLT UMSTB	08131052834		4. 
5	Chairul	PSLT Unswel	081377459457		5. 
6	Aulia R				6. 
7	Devi Hendra				7. 
8	'Ismk				8. 
9	Zaki Fatramansia				9. 
10	Feni				10. 
11	Yasmike Yasa	Dite Prov	08136302577		11. 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Nomor : 005 / 508 / TL / DLH - 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Evaluasi Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Padang, 21 April 2017

Kepada Yth.:

(*Sebagaimana Daftar Lampiran*)
di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penjarangan dan penetapan isu prioritas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengacu kepada pedoman teknis penyusunan dokumen IKPLHD yang telah dikeluarkan oleh KLHK, maka isu prioritas lingkungan hidup yang telah ditetapkan harus diintegrasikan kedalam penulisan buku analisis. Disamping itu dokumen IKPLHD juga memuat Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelola lingkungan hidup.
2. Untuk mengintegrasikan isu prioritas lingkungan hidup kedalam buku analisis, serta untuk penajaman di dalam penulisan Inovasi Daerah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap dokumen IKPLHD yang telah disusun oleh Tim Penulis sebagai bahan di dalam proses pendampingan secara langsung dan total oleh Tim Supervisi kepada Tim Penulis yang akan dilaksanakan nantinya.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami undang Saudara untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 April 2017

Pukul : 10.00 wib s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jl. Khatib Sulaiman No 22 Padang

Agenda : 1. Evaluasi penulisan dokumen IKPLHD yang sudah Dilaksanakan
2. Informasi tentang integrasi isu prioritas lingkungan hidup kedalam penulisan analisis
3. Penajaman penulisan inovasi daerah
4. Pembahasan terkait persiapan supervisi dari Tim Supervisi kepada Tim Penulis secara langsung dan komprehensif yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 28 April 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan hadirannya Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA

Drs. ASRIZAL ASNAN, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19570803 198503 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Peringgal.

Lampiran

Surat Nomor : 005 / 508 / TL / DLH - 2017
Tanggal : 21 April 2017
Perihal : Evaluasi Penulisan Dokumen IKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Daftar alamat yang dituju:












Kepada Yth.:

1. Sdri. Sekeratri;
2. Sdri. Kabid Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
3. Sdri. Kabid Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan;
4. Sdri. Kasi Kajian Dampak Lingkungan
5. Sdr. Kasi Pemeliharaan
6. Sdr. Kasi Pengelolaan Sampah
7. Sdr. Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
8. Sdr. Drs. Bustanul Arifin, MSi
9. Sdr. DR. Khairul, MS
10. Sdr. DR. Marganof, MSi
11. Sdr. Syaifuddin Islami, STP, MSi
12. Sdr. Sdri. Aulia Ramadhani, S.Si, MSi
13. Sdr. M. Sidik Pramono, ST
14. Sdr. Zaki Fatramansia, ST, MSi
15. Sdr. Dedi Harian, ST.
16. Para staf di bidang Tata Lingkungan

DAFTAR HADIR

Rapat Lanjutan Pembahasan terkait persiapan supervisi dari tim supervisi kepada tim penulis secara langsung dan komprehensif

Hari : **Jumat**
 Tanggal : **28 April 2017**
 Tempat : **DLH Propinsi Sumatera Barat**

NO	NAMA	INSTANSI	HP	Email	TANDA TANGAN
1	Yantawis	Dus UI			1. 
2	syarifuddin Iclami	LSM ARZ			2. 
3	Marganof	RSIH UMSB	043928345		3. 
4	Bustanul Anis				4. 
5	Devi Hendra				5. 
6	Anis R				6. 
7	Chairul	RSIH UMSB	081374092487		7. 
8	Vina				8. 
9	Zeki Fatramansia				9. 
10	Feri Adly				10. 
11	Armiara	DLH			11. 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

Nomor : 006/520/TL/DLH-2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Finalisasi Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Padang, 28 April 2017

Kepada Yth.:

(*Sebagaimana Daftar Lampiran*)
di -

Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan batas waktu penulisan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S.156/Sekjen/DATIN/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Batas waktu penyampaian dokumen IKPLHD ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan pada tanggal 10 Mei 2017 yang dikirimkan melalui email dalam format PDF.
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan yang telah dilakukan sehingga Finalisasi terhadap dokumen IKPLHD dapat diselesaikan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk itu kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada rapat :

Hari/tanggal : Selasa/2 Mei 2017

Pukul : 10.00 wib s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Agenda : 1. Evaluasi dan Finalisasi dokumen IKPLHD

2. Dan lain-lain dirasa perlu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Drs. ASRIZAL ASNAN, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19570803 198503 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Peringgal.

Lampiran

Surat Nomor : 005 / 520 / TL / DLH - 2017
Tanggal : 28 April 2017
Perihal : Finalisasi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Daftar Alamat yang dituju:












Kepada Yth.:

1. Sdri. Sekeratris;
2. Sdri. Kabid Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
3. Sdri. Kabid Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan;
4. Sdri. Kasi Kajian Dampak Lingkungan
5. Sdr. Kasi Pemeliharaan
6. Sdr. Kasi Pengelolaan Sampah
7. Sdr. Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
8. Sdr. Drs. Bustanul Arifin, MSi
9. Sdr. DR. Khairul, MS
10. Sdr. DR. Marganof, MSi
11. Sdr. Syaifuddin Islami, STP, MSi
12. Sdr. Sdri. Aulia Ramadhani, S.Si, MSi
13. Sdr. M. Sidik Pramono, ST
14. Sdr. Zaki Fatramansia, ST, MSi
15. Sdr. Dedi Harian, ST.
16. Para staf di bidang Tata Lingkungan

DAFTAR HADIR

Rapat Finalisasi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Hari : Selasa
 Tanggal : 2 Mei 2017
 Tempat : DLH Propinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	INSTANSI	HP	Email	TANDA TANGAN
1	Yahkowi	Dis LH			
2	Arniatu	DLH.			
3	Bustanul Arifin	PSCB Uncau	08126752159	ba_arifin@yahoo.co.id	
4	Margana F	KLH UMSTB	081510928345		
5	Christine	PSCB Uncau	081379092957		
6	Andia R				
7	Rikardanti				
8	Syaikhidin Islami	USM ARBL	081266079423	il-lam@yahoo.co.id	
9	Devi Hendra				
10	Zaki Fatramaria				
11	Fari Ady				

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Telp. 0751 - 7055231 Fax. 0751 70445232
<http://dlh.sumbarprov.go.id>

